



REVOLUSI MENTAL

SEBAGAI
STRATEGI
KEBUDAYAAN

Rektorat
Kebudayaan

REVOLUSI MENTAL

SEBAGAI STRATEGI KEBUDAYAAN

Bunga Rampai Seminar Nasional Kebudayaan 2014

Karlina Supelli | A. Benny Susetyo | Haryatmoko | Saldi Isra
Sri Margana | Pujo Semedi | Sunaryo Kartadinata
I Ngurah Suryawan | Heddy Shri Ahimsa-Putra
Achmad Fedyani Saifuddin
Ki Supriyoko

Semiarto Aji Purwanto (Editor)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).



REVOLUSI MENTAL

SEBAGAI
STRATEGI
KEBUDAYAAN

Revolusi Mental sebagai Strategi Kebudayaan:
Bunga Rampai Seminar Nasional Kebudayaan 2014
© Penulis, 2015

Editor | Semiarto Aji Purwanto
Penulis | Karlina Supelli, dkk.
Desain Sampul | Genardi Atmadiredja
Layout | Genardi Atmadiredja
Pemeriksa Aksara | Lukman Solihin

Cetakan 2015

Diterbitkan oleh:



Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan
Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Gedung E Lantai 19, Jl. Jenderal Sudirman-Senayan,
Jakarta 12041
Telp. (021) 5725573
Fax. (021) 5725543

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Semiarto Aji Purwanto (Editor).
*Revolusi Mental sebagai Strategi Kebudayaan: Bunga Rampai Seminar Nasional
Kebudayaan 2014*
Cetakan I, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan, Jakarta.
xxi + 193; 14 x 20.8 cm
ISBN 978-602-72093-2-9

TIDAK DIPERJUALBELIKAN

KATA PENGANTAR

Hurip Danu Ismadi

Kepala Puslitbang Kebudayaan

Gagasan mengenai Revolusi Mental dilandasi kenyataan bahwa bangsa Indonesia belum mampu menjadi bangsa yang unggul dan berkarakter. Sejumlah kebiasaan yang tumbuh subur sejak zaman pra-kolonial hingga pasca-kolonial masih berlangsung hingga kini, mulai dari korupsi, intoleransi terhadap perbedaan, sifat tamak, ingin menang sendiri, cenderung menggunakan kekerasan dalam memecahkan masalah, melecehkan hukum, dan sifat oportunistis.

Ihwal mentalitas bangsa ini pernah didedah oleh Mochtar Lubis dan Koentjaraningrat. Mochtar Lubis (cet. 2012) sampai pada kesimpulan bahwa manusia Indonesia umumnya bermental munafik, enggan bertanggung jawab, berjiwa feodal, percaya takhayul, artistik, berwatak lemah, boros, bukan pekerja keras, suka mengeluh, mudah dengki, suka sombong, dan tukang tiru. Sedangkan Koentjaraningrat (1974) cenderung melihat manusia Indonesia memiliki sifat yang meremehkan mutu, suka menerabas, tidak percaya diri, tidak berdisiplin, dan suka mengabaikan tanggung jawab.

Munculnya kembali gagasan mengenai Revolusi Mental ini memperlihatkan bahwa persoalan mentalitas bangsa belum juga selesai, atau boleh jadi semakin akut. Hal ini menunjukkan pentingnya kita menyusun kembali strategi kebudayaan tidak hanya dalam ruang diskursus, melainkan sebagai praksis nyata sehari-hari. Di era Orde Baru, topik mengenai kebudayaan dan pembangunan menjadi salah satu diskursus penting. Kebudayaan, dalam diskursus saat itu, terutama dinilai dari sumbangannya terhadap proses pembangunan. Kebudayaan dikelola dan diarahkan untuk membentuk manusia dengan “mentalitas pembangunan”.

Pasca-Reformasi, konsep mengenai kearifan lokal menjadi tema yang kerap kali disinggung sebagai jawaban atas berbagai persoalan yang timbul dari proses pembangunan, modernisasi, maupun globalisasi yang datang “dari luar”. Khazanah lokal dan tradisional kembali dilirik dan dianggap sebagai obat mujarab untuk berbagai persoalan tersebut. Namun, lagi-lagi kebudayaan “hanya” dipandang

sebagai “pendukung” atau “penangkal” terhadap dampak yang ditimbulkan oleh pembangunan itu sendiri. Jika di masa Orde Baru kebudayaan diposisikan sebagai pendukung pembangunan, maka pasca-Orde Baru kebudayaan, dalam hal ini kearifan lokal misalnya, diyakini mampu memperbaiki dampak yang ditimbulkan oleh pembangunan.

Akhir-akhir ini, kebudayaan kembali diperbincangkan sekurangnya dalam dua tema besar, yaitu ketahanan budaya dan pembentukan karakter bangsa. Sebagaimana kekhawatiran pada masa-masa sebelumnya, globalisasi dan modernisasi dianggap telah merontokkan sendi-sendi kehidupan bangsa yang khas, yang dapat mengancam karakter kita sebagai bangsa Indonesia yang, antara lain misalnya, dianggap memiliki karakter yang agamis, toleran, santun, jujur, cinta tanah air, suka bekerja keras, dan memiliki sifat gotong royong. Apa yang dikemukakan oleh Presiden Joko Widodo tentang Revolusi Mental, juga berbicara hal serupa, yaitu tentang pembentukan karakter dan identitas nasional yang kuat yang tak lain harus disokong melalui kebudayaan dan pendidikan.

Tepat di titik inilah kebudayaan kembali menemukan momentumnya untuk dapat menjadi arus utama dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, posisi kebudayaan yang selama ini baru sebatas sebagai “pelengkap penderita”, belum menjadi arus utama dalam paradigma pembangunan, memerlukan tinjauan kritis dan komprehensif dari semua kalangan.

Mempertimbangkan latar dan kondisi itu, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan, Balitbang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melaksanakan kegiatan Seminar Nasional Kebudayaan untuk mempertemukan para akademisi dan cendekiawan guna merumuskan strategi kebudayaan Indonesia sebagai masukan bagi gagasan Revolusi Mental tersebut.

Penyelenggaraan seminar dengan tema “Paradigma Baru Strategi Kebudayaan” ini memiliki beberapa tujuan. *Pertama*, untuk menghimpun pemikiran para akademisi, budayawan, dan cendekiawan tentang Revolusi Mental dan strategi kebudayaan; *Kedua*, memberikan masukan kepada pemerintah terkait dengan konsep Revolusi Mental sebagai strategi kebudayaan; *Ketiga*, memberikan rekomendasi tentang kebijakan dan program dalam pendidikan dan kebudayaan; dan *Keempat*, menerbitkan buku hasil seminar sebagai dokumentasi dan publikasi guna meluaskan wacana kebudayaan sebagai arus utama paradigma pembangunan.

Untuk mendukung tujuan itu, seminar ini menghadirkan para pakar dan ahli di bidang masing-masing untuk berbicara mengenai Revolusi Mental dan strategi kebudayaan. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada para pembicara, antara lain Dr. Karlina Supelli (STF Driyarkara), Romo Benny Susetyo (Rohaniwan), Dr. Sri Margana (Sejarah UGM), Dr. Pudjo Semedi (Antropologi UGM), Dr. Haryatmoko (Univ. Sanata Dharma), Prof. Dr. Saldi Isra (Fak. Hukum, Univ. Andalas), Prof. Dr. Sunaryo Kartadinata (Univ. Pendidikan Indonesia), Prof. Dr. Heddy Shri Ahimsa-Putra (Antropologi UGM), Prof. Dr. Ahmad Fedyani Saefuddin (Antropologi UI), dan Prof. Ki Supriyoko (Majelis Luhur Taman Siswa), para moderator, yaitu Dr. Semiarto Aji (Antropologi UI), Dr. Ade Makmur (Antropologi UNPAD), dan Dr. Iwan Pirous (Antropologi UI), serta I Ngurah Suryawan (Universitas Papua Manokwari) yang telah menyumbangkan tulisan mengenai revolusi mental dengan perspektif dari Papua.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para peserta dari seluruh Indonesia yang telah hadir dan memberikan kontribusi dalam seminar yang kami selenggarakan, antara lain dari Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) seluruh Indonesia, Balitbangda Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kalimantan Selatan; peserta dari beberapa kampus seperti Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, Universitas Udayana, Universitas Hindu Indonesia, Universitas Hasanuddin, Universitas Negeri Makassar, Universitas Sam Ratulangie, Universitas Pattimura, Universitas Andalas, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Institut Seni Indonesia Padangpanjang; serta para undangan dari berbagai pusat kajian dan organisasi yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga melalui terbitnya buku ini kita dapat bersama-sama membangun diskursus yang sehat dan bermanfaat untuk Indonesia masa depan.

Selamat membaca.

REVOLUSI MENTAL DAN STRATEGI KEBUDAYAAN

Pengantar Diskusi

Semiarto Aji Purwanto

Ketiga, perlu perubahan orientasi politik, yaitu dari orientasi politik partisan menuju ke politik kewarganegaraan di mana warga negara diperlakukan setara di depan hukum, sebagai individu yang memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama, bukan politik partisan yang cenderung diskriminatif karena memperlakukan warga negara sebagai anggota suatu kelompok kepentingan tertentu. Dengan menekankan tatanan hukum yang menghormati hak-hak dan kewajiban setiap warga negara yang sama, kekuasaan mendasarkan diri pada legitimasi yang kokoh. Legitimasi sebagai dasar pembenaran tindakan atau kekuasaan ini ditentukan oleh atau mengacu ke modalitasnya yang berupa norma. Norma ini bisa meliputi undang-undang, hukum, adat atau kebiasaan. Dengan mengacu ke norma bersama (Pancasila) representasi kekuasaan dan wakil rakyat mendasarkan pada legitimasi yang disepakati bersama. Ketiga implikasi Revolusi Mental tersebut di atas akan dikembangkan secara sistematis dalam penjelasan di bawah ini.

Dari Orientasi Kekuasaan ke Orientasi Pelayanan Publik

Bagaimana memahami bahwa setelah Reformasi 1998, meski sudah terjadi demokratisasi dengan pembaharuan institusi-institusi politik, rakyat seperti masih bergejolak, di mana-mana masih marak demonstrasi? Dan demokrasi belum juga mampu menyejahterakan masyarakat.

Demokrasi diharapkan bisa mengurangi ketidakadilan, kesewenangan dan membuat lebih rasional pengorganisasian kehidupan kolektif. Dengan demikian demokrasi mampu menjamin kebebasan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun kenyataannya, dua masalah membelit demokrasi di Indonesia: *Pertama*, partisipasi demokrasi dalam masyarakat dengan tingkat pendidikan yang belum merata mudah direkayasa. Lalu, akuntabilitas dibuat sedemikian rupa sehingga hanya untuk memenuhi formalitas. *De facto*, mekanisme keputusan demokrasi hanya di tangan sekelompok orang terbatas, yaitu pimpinan partai, pengusaha, dan birokrat. Dalam banyak kasus, kelompok tersebut beraliansi dengan media. *Kedua*, persoalan menonjol yang sulit diatasi dalam demokrasi di Indonesia ialah peran partai politik yang terlalu dominan yang berakibat pada maraknya korupsi *kartel-elite*.

Masalah pertama tentang partisipasi demokrasi itu bisa dirumuskan dalam pertanyaan apakah kedaulatan rakyat masih

Revolusi Mental dimaknai sebagai perubahan mendasar '*mindset*' (pola pikir) masyarakat dan penguasa di dalam kehidupan berbangsa. Revolusi Mental tidak cukup mengandalkan niat baik, namun harus memperhitungkan perubahan struktural dalam interaksi masyarakat. Perubahan semacam itu, dengan mengacu ke Giddens (1993), harus menyentuh tiga bentuk interaksi sosial yang dominan, yaitu dalam hal komunikasi, hubungan kekuasaan, dan moralitas. Maka disebut struktural karena perubahan ketiga bentuk interaksi sosial itu menentukan warna ketiga struktur utama masyarakat (pemaknaan, dominasi, dan legitimasi). Di ranah politik, Revolusi Mental harus memperhitungkan ketiga struktur utama hasil interaksi sosial itu, yaitu cara pemaknaan, kualitas dominasi dan legitimasi kekuasaan. Ketiga hal ini mengondisikan pola pikir masyarakat, sehingga Revolusi Mental menuntut perubahan struktural itu dalam bentuk:

Pertama, perubahan orientasi dari politik sebagai upaya mencari kekuasaan menjadi politik sebagai usaha meningkatkan pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat. Maka perubahan mendasar pertama ini menyangkut perubahan kerangka penafsiran dalam kehidupan politik yang bukan lagi berorientasi kepada kekuasaan, tapi pelayanan publik. Kerangka penafsiran baru ini merupakan modalitas interaksi komunikasi yang akan menentukan kualitas strukturnya, yaitu pemaknaan. Dengan demikian semua bentuk kegiatan politik bisa dikatakan bermakna bila diarahkan ke pelayanan publik.

Kedua, perubahan sikap pejabat publik dan politisi. Mereka harus memiliki kemampuan memberi pelayanan yang berkualitas, artinya responsif terhadap kebutuhan publik dan memenuhi standar profesional. Untuk tujuan itu, pejabat publik harus memiliki kompetensi teknis, kepemimpinan, dan kompetensi etis. Maka kriteria seleksi pejabat publik dan politisi harus ketat dan berjenjang, termasuk dalam seleksi calon legislatif. Dalam ranah politik, terutama dalam interaksi kekuasaan, kriteria seleksi pejabat publik yang dituntut memiliki integritas dan kompetensi ini harus diperhitungkan karena akan memengaruhi kualitas dominasi (pemerintah, parlemen, dan yudikatif) agar menjadi kekuasaan yang melayani. Padahal kualitas dominasi tergantung pada modalitasnya, yaitu fasilitas yang dimiliki (ekonomi, budaya, politik, ideologi, sosial) dan strategi penempatan kapital (Bourdieu). Secara lebih sistematis P. Bourdieu merumuskan modalitas itu dalam bentuk empat kapital: ekonomi, budaya, sosial, dan simbolis.

REVOLUSI MENTAL DI RANAH POLITIK

**Orientasi Pelayanan Publik dan Pola
Baru Seleksi Pejabat Publik**

Haryatmoko

kekuasaan politik, dan menghasilkan manusia yang hanya pandai ikut-ikutan. Mereka bagaikan robot yang dikendalikan oleh *remote control*, yakni pemegang kekuasaan dan pemilik modal, melalui ideologi penyeragaman. Ini membuat mereka hanya mampu menunggu petunjuk serta pedoman dari atas. Kreativitasnya minim.

Akibatnya birokrasi menjadi lambat dalam merespon perubahan. Ketidakmampuan ini disebabkan oleh ketidakberdayaan mereka untuk keluar dari kultur lama. Di mana kemandirian individu direduksi menjadi ketaatan buta yang dikendalikan oleh sistem penyeragaman. Ini membuat gerbang reformasi terseok-seok, yang disebabkan oleh ketidakberdayaan untuk merespon perubahan yang begitu cepat, sehingga dibutuhkan sebuah transformasi budaya lewat transformasi paradigma pendidikan.

Daftar Pustaka

- Mangunwijaya, Y.B; Cet. 1 (1995). *Mendidik Manusia Merdeka: 65 Tahun Romo Y.B. Mangunwijaya*. Yogyakarta: Interfidei & Pustaka Pelajar.
- Mulyana, Deddy (2013). *Komunikasi Politik, Politik Komunikasi: Membedah Visi dan Gaya Komunikasi Praktisi Politik*. Bandung: Rosdakarya.
- Suasta, Putu (2013). *Menegakkan Demokrasi, Mengawal Perubahan*. Jakarta: Lestari Kiranatama.

dengan ketidakberdayaan ekonomi masyarakat di lain pihak. Jika di negara-negara maju, pendidikan yang berbiaya mahal tidak mendapatkan protes adalah karena masyarakatnya yang melihat kemampuan dirinya untuk mengakses dunia pendidikan tersebut.

Arah pendidikan tidak bisa dilepaskan dalam kerangka politik bangsa dalam menciptakan masyarakat sejahtera. Dalam hal ini kecenderungan pengambil kebijakan hanya berpikir secara dikotomis.

Roh pendidikan tak diarahkan untuk mendidik manusia menyadari kenyataan lingkungannya. Ironis pula ketika globalisasi yang begitu dahsyat justru dimanfaatkan para pelaku media untuk menjual mitos dan irasionalitas. Hal ini berbahaya sebab irasionalitas tersebut akan menjadi bagian dari cara berpikir bangsa yang membawa proses pembodohan secara permanen.

Kemerdekaan, Kesejahteraan, dan Kemanusiaan

Pendidikan yang membebaskan dan memanusiakan ala Freire tertuju untuk menggugah kesadaran pelaksanaan metode pendidikan yang bukan saja membebaskan tetapi yang terpenting kembali memanusiakan manusia; menghilangkan jejak de-humanisasi yang merasuki dunia pendidikan.

Bila pembebasan sudah tercapai, pendidikan menurut Freire adalah suatu kampanye dialogis sebagai suatu usaha pemanusiaan secara terus-menerus. Pendidikan bukan hanya menuntut ilmu, tetapi bertukar pikiran dan saling mendapatkan ilmu (kemanusiaan) yang merupakan hak bagi semua. Kunci dari pendidikan yang membebaskan dan kemudian memanusiakan.

Ruang publik kita hanya diisi oleh kaum petualang yang menggunakan gelar hebat tapi tidak ada isinya. Polemik terus-menerus dihadirkan untuk menghiasi publik setiap hari di media. Tetapi realitasnya polemik itu tidak mampu menjadi pelecut daya cipta untuk mengubah ketidakberdayaan menjadi keberdayaan. Ini terjadi karena kita sebagai bangsa, miskin cita-cita dan cinta.

Akar persoalannya bisa kita lacak, setidaknya-tidaknya dari bagaimana karakter sistem pendidikan diselenggarakan. Kita melihat bahwa pendidikan dalam bangsa ini hanya menjadi instrumen kekuasaan politik. Pendidikan disubordinasikan dalam

kemanusiaan dan keadilan. Hal ini tak akan pernah menjadi gagasan dasar dalam membentuk perilaku bangsa selama pendidikan hanya sebagai alat politik pengusaha. Pendidikan tak akan pernah menyentuh kesadaran dan melahirkan manusia rasional, selama kita dididik dalam dunia yang penuh mitos dan janji.

Prinsip dasar pendidikan adalah melahirkan manusia untuk belajar berbagi kepada sesama. Prinsip itu dijabarkan dalam proses menjadi manusia merdeka. Manusia yang berani meloncat dari pemenuhan kebutuhan akan dirinya sendiri menuju pada empati dan membantu orang lain.

Proses ini bisa dilampui bila ada kesadaran bersama bahwa kesejahteraan harus diraih untuk semuanya. Jadi pendidikan bukan untuk proses individual saja, dan akan melahirkan manusia dengan karakter individualistik. Harus disadari bahwa kenyataan distribusi kesejahteraan pada bangsa ini sangat timpang.

Polarisasi dan Diskriminasi

Bayangkan jika hanya lebih kurang 2 persen saja yang menguasai hajat hidup orang banyak. Kesenjangan ini membuat proses pendidikan menjadi sekadar alat untuk memenuhi kebutuhan konsumsi saja. Kebutuhan daya nalar tak bisa terpenuhi bila 'kemerdekaan' dan 'kesejahteraan' tidak dijadikan fokus utama dalam pandangan pendidikan ini.

Dalam dunia pendidikan sendiri ternyata tidak mengajarkan bagaimana jurang stratifikasi sosial itu dihentikan dan setiap murid mendapatkan perlakuan yang sama dan wajar. Pendidikan justru jelas-jelas mengajarkan bagaimana diskriminasi dilakukan.

Ini merupakan cermin nyata dampak integrasi pendidikan dalam pasar bebas. Jelas bagi kebanyakan masyarakat Indonesia, berangkat dari soal-soal yang dikemukakan di atas, sebenarnya implikasi yang paling logis diterima atas kebijakan itu adalah mahalannya biaya pendidikan. Ada kesenjangan yang tidak sulit dipahami dengan mata telanjang, terutama ketika kaum elite berebut kue pembangunan, dan kaum miskin semata-mata tetap menjadi objek pembangunan.

Terintegrasinya dunia pendidikan ke dalam pasar bebas dengan konsekuensi sebagaimana dipaparkan di atas di satu pihak, adalah fenomena yang tidak sebanding ataupun berlainan sama sekali

Berpikir merdeka dalam pengertian ini membuat manusia memiliki daya nalar yang kritis serta mampu menentukan pilihan dalam hidupnya.

Dalam konteks globalisasi pilihan lebih banyak ditentukan oleh apa yang terlihat oleh panca-indra. Pilihan ini bukan digerakkan daya nalar yang sehat melainkan hanya sekadar pemenuhan akan kebutuhan penyesuaian indrawi belaka. Media iklan yang begitu dahsyat kerap kali membuat mata kita tidak lagi awas. Ini menciptakan mentalitas konsumtif. Fenomena ini sekarang membudaya dalam sanubari publik bangsa ini. Semua serba instan.

Budaya instan alias siap saji membuat manusia tidak lagi berpikir jangka panjang. Kebijakan pendidikan pun terjebak pada budaya instan. Pendidikan seperti ini amat berbahaya bagi masa depan bangsa ini. Cita-cita pendidikan yang mencerdaskan rakyat hanyalah angan-angan saja.

Untuk menjadikan bangsa ini cerdas diperlukan politik pendidikan yang bervisi jelas, yakni memanusiaikan manusia dan menjadikannya sebagai pribadi merdeka. Merdeka dalam arti yang mendalam, yakni membuat orang tidak tergantung kepada hal yang melekat dalam dirinya. Kelekatan akan harta benda serta jabatan membuat orang tidak merdeka secara mendasar.

Merasakan Derita Orang Lain

Kemerdekaan membuat manusia memiliki keluhuran budi serta kemampuan merasakan derita orang lain. Kemerdekaan akan membuat manusia Indonesia tidak hanya berpikir bagi dirinya sendiri.

Bangsa ini kehilangan daya kreativitas karena miskin cita-cita dan gagasan. Politik tidak lagi mampu melahirkan gagasan besar untuk membangun sebuah cita-cita besar bagaimana membawa gerbang Indonesia menuju masa depan berperadaban. Inilah yang membuat bangsa ini terpuruk karena kurangnya cita rasa dan karsa dalam perilaku sehari-hari kita.

Hal ini terjadi karena insan pendidikan yang dihasilkan adalah sosok instan yang cenderung berpikir konsumeristik. Aura batin kita tak mampu menembus mata hati yang berkesadaran dalam menciptakan cara berpikir dan bertindak dalam kerangka

Mentalitas setengah-setengah itu tercermin dalam berbagai keraguan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hukum dan keadilan kerap dikalahkan oleh kekuatan politik dan uang. Dua hal ini begitu kuat mengendalikan hukum di republik ini. Dengan uang, semua perkara menjadi beres dan mudah diselesaikan di bawah meja.

Keadilan hanya menjadi permainan kata-kata oleh para elite politik yang selalu berkelit demi menjaga konstitusi. Padahal, semua tahu bahwa konstitusi sedang dijalankan dengan setengah hati: "sesuai dengan pesanan". Seolah-olah mereka mengalami keraguan, ketakutan untuk bertindak. Mereka tampaknya memiliki mentalitas minder dengan para pemilik uang.

Atas itu semualah, Revolusi Mental diperlukan, bukan hanya dalam kata-kata, namun juga dalam tindakan konkret untuk mengembalikan Indonesia sebagai bangsa besar yang mengelola kekayaan alam untuk rakyatnya sendiri. Orientasi pendidikan harus mengarah pada manusia merdeka. Selama orientasi pendidikan belum jelas menjadi manusia merdeka maka bangsa tidak akan keluar dari krisis rasa percaya diri. Dibutuhkan perubahan paradigma pendidikan dari sistem pendidikan yang hanya melihat manusia sebagai sekumpulan industri bukan sebagai manusia yang merdeka dalam menentukan masa depannya.

Paradigman Pendidikan

Kemanakah arah pendidikan nasional kita? Tidak jelas yang dituju. Centang perenang kebijakan pendidikan baik karena aktor maupun sistemnya membuat arah pendidikan nasional tidak pernah jelas yang mau dicapai.

Budaya Instan

Kita setuju secara teoretik bahwa pendidikan adalah untuk memerdekakan. Tapi dalam tindakan, sampai saat ini kita tak pernah sampai pada kesadaran bahwa pendidikan merupakan proses menjadikan manusia berpikir merdeka dan dengan demikian diikuti tindakan-tindakan yang mendukungnya. Alih-alih demikian, pendidikan kita tidak pernah sampai pada proses pemerdekaan itu sendiri, melainkan sering justru menjadi belenggu.

Merdeka bukan berarti liar tanpa aturan atau tidak mau diatur.

Ironisnya, penjajahan dalam arti yang lebih luas (politik, ekonomi, sosial, dan budaya) dilakukan oleh bangsa sendiri bersama dengan bangsa lain melalui persekongkolan jahat. Dalihnya kemakmuran, tapi nyatanya ketertindasan. Romantisme perjuangan dalam bentuk solidaritas kebangsaan yang amat kuat luntur karena para pengisinya tak pernah sadar bahwa usaha membangun selalu dilakukan bersama, bukan orang per orang dan kelompok per kelompok.

Revolusi '45 yang sudah menghasilkan landasan bagi kemerdekaan politik sulit diteruskan menuju kemerdekaan sosial, ekonomi, dan budaya sebagai sebuah cita-cita kemerdekaan bangsa secara menyeluruh. Atas semua fakta di atas, refleksi kemerdekaan seharusnya diletakkan dalam sebuah pertanyaan besar sejauh mana bangsa ini mempertanyakan kembali cita-cita kemerdekaan yang mendasar.

Kemerdekaan Sejati

Kemerdekaan adalah kepedulian untuk terus-menerus memberdayakan manusia agar ia memahami dirinya sendiri sekaligus mengaktualisasikan kreativitasnya demi membangun kemakmuran bangsa dan negara. Gagasan Romo Mangun tersebar dalam berbagai pikiran untuk membebaskan manusia dari belenggu. Bangsa baginya tidak hanya sebagai kumpulan manusia yang setiap tahun merayakan kemerdekaan.

Kemerdekaan bangsa adalah cerminan dari manusia sebagai individu yang otonom. Kenyataannya, meski kita sudah merdeka hampir setengah abad dari penjajah, arti kemerdekaan itu hanya bisa dilekatkan sebagai kemerdekaan secara formal. Itupun masih harus kita pertanyakan kembali, meski kita sudah merdeka, pada hakikatnya kita masih terjajah secara ekonomi.

Kemerdekaan sebagai sebuah bangsa secara formal bukanlah cermin kemerdekaan manusia per manusia di dalamnya. Kemerdekaan itu lebih berkonotasi sebagai kemerdekaan kolektif, formalistik dan simbolistik. Bukan sebagai kemerdekaan jiwa dan otonomi individu di dalamnya. Kegelisahan bangsa ini, terutama, adalah karena selama ini kita hanya menjalankan reformasi yang setengah hati. Ini disebabkan oleh mentalitas yang setengah-setengah dalam menegakkan keadilan dan hukum.

membungkuk pada orang lain.

Dan, inilah musabab segala problematika bangsa ini sebab mental elite tidaklah merdeka sepenuhnya. Dalam konteks pendidikan, ketakutan luar biasa terhadap mereka yang memiliki uang merupakan cermin gagalnya pengelolaan republik ini. Kita belum mampu memproses manusia yang merdeka; mendidik manusia untuk benar-benar menjadi merdeka.

Kita belum mampu memerdekakan bangsa dan manusia Indonesia dari sikap dan sifatnya yang minder, yang tidak fair, yang diwarnai oleh mentalitas kuli; cenderung menjilat ke atas dan menginjak ke bawah. Tidak setia kawan, mudah mengkhianati dan tega memfitnah, bahkan membunuh bila ada kesempatan. Akibatnya, lahir suatu watak yang tidak suka membela kebenaran.

Watak ini oleh Romo Mangun (1999) pernah dikatakan sebagai watak "mencari selamat sendiri-sendiri". Ini bahkan dilakukan melalui pengorbanan orang lain. Mereka lebih suka berbohong dengan dalih menjaga harmoni.

Demi semua itu, mereka tak mau bekerja secara *fairplay*, tetapi lebih menyukai menjadi bunglon demi menjaga karier, martabat, dan status. Mentalitas tersebut begitu kuat, dan akibatnya mereka tidak berani mengambil risiko dan berpedoman lebih baik mencari keselamatan diri sendiri saja.

Sistem Penuh Kepalsuan

Suka tidak suka, sadar tidak sadar, harus dikatakan bahwa inilah cermin sebagian besar elite politik kita hari ini, yang tidak berani mengadakan perubahan secara radikal dengan merombak sistem lama yang penuh kepalsuan. Sungguh ironis karena sudah tahu sistem tersebut penuh dengan kebobrokan, justru tetap dilestarikan karena berdalih menjaga kesopanan.

Tidak ada kesadaran bahwa selama sistem lama masih bercokol, jangan harap menghasilkan elite yang berkualitas. Cita-cita kemerdekaan yang digariskan oleh para pendiri republik seolah luntur. Barangkali, tak pernah disangka oleh para pendiri republik bahwa akhirnya kemerdekaan yang telah diraih dengan darah dan pengorbanan untuk keluar dari jerat pikir penjajahan kembali lagi menuju penjajahan di bawah dalih kemerdekaan.

“**R**evolusi Mental”. Frasa ini kini kerap disebut salah seorang kandidat presiden Indonesia. Pengertiannya merujuk pada adanya revolusi kesadaran. Perubahan mendasar yang menyangkut kesadaran, cara berpikir, dan bertindak sebuah bangsa besar. Revolusi Mental dari sesuatu yang negatif menuju positif.

Perubahan dari ketidakpercayaan diri menjadi bangsa yang penuh kepercayaan. Menyadari diri bahwa kita adalah bangsa besar dan bisa berbuat sesuatu yang besar. “Visi” Revolusi Mental ini begitu pentingnya mengingat beragam kegagalan kita sebagai bangsa, kerap (selalu) dimulai dari mentalitas ini.

Bangsa Besar

Harus ada yang terus mengingatkan bahwa Indonesia adalah bangsa besar. Namun, masyarakatnya kerap tidak percaya diri saat menghadapi tantangan-tantangan zaman. Pola pikir ini harus diubah karena perubahan selalu berasal dari sikap dan mental manusia. Kendati sudah merdeka berpuluh tahun lamanya, kita masih merasa sebagai bangsa yang rendah diri dan bermental “jongos”.

Kita tidak maju akibat sikap mental yang selalu merasa diri terjajah dan bahkan menikmati situasi ketergantungan pada bangsa lain. Kemakmuran yang ada seperti sebuah fatamorgana, hanya indah di buku-buku sekolahan, namun pahit dalam kenyataan. Sumber daya alam negeri ini bahkan nyaris ludes dikuasai oleh pihak asing.

Untuk mengembalikan semuanya, tidak berlebihan bila memang Revolusi Mental ini dikemukakan. Ini merupakan hal mendasar dan pertama kali dilakukan agar kita bisa memulai melakukan tindakan-tindakan konkret untuk mengambil manfaat sumber daya alam untuk kepentingan bangsa kita sendiri.

Merdeka Sepenuhnya

Kita sering merasa minder sebagai bangsa. Kurang bisa memaknai harga diri dan begitu mudah menyerahkan segala-galanya pada bangsa lain. Orientasi elite kerap hanya keuntungan dirinya saja, dengan hanya menjadi perantara atau makelar saja. Bukan sebagai bangsa yang tangguh yang berani mengelola semua potensi untuk rakyat sendiri. Berabad-abad lamanya menjadi bangsa yang bisa

IMPLEMENTASI REVOLUSI MENTAL DALAM KONTEKS KEHIDUPAN BERBANGSA SEBAGAI MANUSIA MERDEKA

A. Benny Susetyo

model pendidikan yang dianggap terlalu berat ke aspek kognitif dimengerti sebagai kritik terhadap model pendidikan yang hanya mengembangkan daya-daya kognitif paling rendah (menumpuk informasi dan mengingat), sebagaimana berlangsung selama ini.

Sebaliknya, kita justru memerlukan model pendidikan yang dapat meningkatkan kemampuan kognitif secara lebih utuh (kemampuan analitik, logika, daya-daya reflektif, kritis, imajinatif, kreatif), namun terintegrasi ke kemampuan afektif dan komitmen untuk bertindak (aspek ragawi). Di dalam pengintegrasian ketiga aspek manusia itulah daya-daya reflektif manusia akan berkembang. Tanpa kemampuan reflektif, yang memberi kita pemahaman matang namun realistik tentang kinerja dunia kontemporer, mustahil kita memulai Revolusi Mental.

*Sebagian bahan tulisan ini sudah pernah dikemukakan dalam naskah *"Mengartikan Revolusi Mental"*.

struktur memang terpisah tetapi bukannya tidak ada interaksi. Sistem budaya dapat memengaruhi struktur sosial dan sebaliknya, kendati tidak langsung. Untuk tidak masuk terlalu dalam ke ranah teoretis, cukuplah disampaikan di sini bahwa hubungan integral antara mental pelaku dan struktur sosial terjembatani dengan memahami kebudayaan sebagai pola berpikir, cara-merasa, dan cara-bertindak yang terungkap dalam praktik kebiasaan sehari-hari.

Di dunia nyata tidak ada pemisahan antara 'struktur' sebagai kondisi material/fisik/sosial dan 'kebudayaan' sebagai proses mental. Corak praktik serta sistem ekonomi dan politik yang berlangsung tiap hari merupakan ungkapan kebudayaan, sedangkan cara kita berpikir, merasa dan bertindak (budaya) dibentuk secara mendalam oleh sistem dan praktik habitual ekonomi serta politik. Tak ada ekonomi dan politik tanpa kebudayaan, dan sebaliknya tak ada kebudayaan tanpa ekonomi dan politik. Pada yang politik dan ekonomi selalu terlibat budaya dan pada yang budaya selalu terlibat ekonomi dan politik. Kita paham bahwa konsumerisme bukan semata-mata gejala ekonomi, melainkan terutama gejala budaya yang lahir dari perubahan struktur lingkungan yang memaksakan hasrat tertentu agar belanja melampaui kebutuhan menjadi kebiasaan sosial.

Revolusi Mental dan Indonesia Baru

Kalau sungguh mau dilaksanakan sebagai wahana untuk melahirkan Indonesia Baru, Revolusi Mental perlu menjadi strategi kolosal berskala nasional. Salah satu lokus bagi perubahan tersebut adalah pendidikan, formal maupun informal. Apabila kita sepakat bahwa salah satu kunci pendidikan untuk menghadirkan manusia berbudaya adalah orientasi kepada nilai (*value-oriented*), maka pendidikan tidak semata-mata mengajarkan pengetahuan tentang baik dan buruk, tetapi melatih hasrat peserta didik sampai terbentuk disposisi batin untuk selalu menghendaki yang baik.

Di sinilah kita perlu menambah sebuah catatan akhir. Revolusi Mental yang membidik transformasi karakter hendaknya tidak diartikan sebagai pengurangan porsi pendidikan kognitif demi menambah porsi pendidikan karakter. Hendaknya kritik terhadap

kata lain, kepribadian atau karakter berisi nilai-nilai operasional atau nilai-nilai dalam tindakan yang mencerminkan hal-hal yang kita—sebagai bangsa—anggap luhur. Nilai-nilai itu menjadi disposisi batin setiap kali kita berhadapan dengan situasi yang menuntut pilihan moral. Kebudayaan, dengan demikian, dimaknai sebagai keterarahan kepada hal-hal yang luhur dan merawat yang baik demi kemaslahatan bersama—baik bangsa maupun umat manusia. Musik, puisi, dan seni umumnya merupakan pengejawantahan dari hal-hal luhur tersebut, tetapi kebudayaan tidak dapat disempitkan maknanya ke seni dan karya-karya indah.

Menafsir Ulang Kebudayaan

Dalam praktik hidup sehari-hari, tidak ada pemilahan yang tajam antara hal-hal mental dan hal-hal fisik, antara soal-soal kebudayaan dan soal-soal politik, sosial dan ekonomi. Pembagian itu merupakan pembagian akademik semata-mata. Dalam hidup sehari-hari, kala (*moment*) kebudayaan tidak dapat dilepaskan dari peristiwa ekonomi, sosial-geografis, politik, hukum, dan sebagainya. Oleh sebab itu, pelbagai diskusi yang menegaskan bahwa “kebudayaan harus menjadi panglima dalam penyelenggaraan negara” hendaknya dimaknai sebagai mengembalikan kebudayaan ke dalam materialitas politik, ekonomi, dan kebiasaan-kebiasaan sosial kita.

Revolusi Mental acap kali disalahartikan sebagai perombakan di tingkat mental pelaku yang tidak akan menimbulkan pengaruh pada perubahan struktural. Padahal masalah kita (kemiskinan, korupsi, ketidakadilan) demikian argumennya, adalah masalah struktural. Menghubungkan struktur sosial, pelaku dan kebudayaan memang bukan perkara sederhana. Pernah ada problem teoretik mendasar yang menjadi bahan perdebatan serius ilmu-ilmu selama beberapa dasawarsa. Sekarang ini problematika pelaku *versus* struktur yang memutus interaksi keduanya sudah usang.

Dikotomi itu melahirkan pandangan seakan-akan kebudayaan berurusan hanya dengan ranah subjektif pelaku, sedangkan struktur sosial berurusan dengan ranah objektif tindakan. Padahal hubungan antara pelaku dan kebudayaan merupakan faktor inheren di dalam hubungan antara pelaku dan struktur. Secara analitik, pelaku dan

kepercayaan dan sistem nilai, hasrat, emosi, kehendak, motivasi, dan sebagainya yang semua tumbuh dari praktik kebiasaan sehari-hari dan/atau dari tradisi. Di sinilah kita mengerti mengapa ada cuaca kebudayaan dalam Revolusi Mental. Revolusi Mental diarahkan untuk merombak kebudayaan pada tiap-tiap lapisannya, yaitu lapis makna (cara masyarakat menafsirkan diri, nilai dan tujuan-tujuan serta mengevaluasinya), lapis kebiasaan (sikap dan laku sehari-hari), dan materialitas karya cipta manusia (termasuk ilmu dan teknologi) yang melandasinya. Revolusi Mental merupakan transformasi etos, yaitu perubahan mendasar dalam mentalitas, semangat dan moralitas yang menjelma ke dalam perilaku dan tindakan sehari-hari. Apa yang akan menjadi dasar bagi perubahan itu? Dalam bingkai kehidupan berbangsa saat ini, Revolusi Mental hanya bermakna apabila dilandasi oleh keinginan untuk mengoreksi cara berkebiasaan kita dalam semua bidang kehidupan, sedemikian, sehingga semua itu diarahkan untuk mencapai kebaikan bersama.

Dengan kata lain, Revolusi Mental adalah transformasi menyangkut keutuhan tiga aspek manusia, yaitu aku yang percaya, aku yang berpikir, dan aku yang bertindak. Namun, transformasi itu berlangsung bukan hanya pada skala individu melainkan mencakup skala seluas bangsa. Etos ini menyangkut semua bidang kehidupan mulai dari ekonomi, politik, sains-teknologi, seni, agama, dan sebagainya. Begitu rupa, sehingga mentalitas bangsa (yang terungkap dalam praktik/kebiasaan sehari-hari) lambat-laun berubah. Pengorganisasian, rumusan kebijakan dan pengambilan keputusan diarahkan untuk proses transformasi itu.

Oleh sebab itu, Revolusi Mental tidak dapat dicitutkan ke kesadaran moral ataupun karakter individu. Karakter individu atau kesadaran moral adalah salah satu tujuan saja dari Revolusi Mental. Karakter yang baik adalah buah dari budi yang terdidik melalui penanaman kebiasaan-kebiasaan, dan kebiasaan melibatkan latihan-latihan fisik individual tentang perilaku serta tindakan yang baik.

Namun, kalau kita ingin menjelmakan gagasan "kebudayaan sebagai kepribadian", kita tampaknya perlu mengingat kembali ujaran Ki Hajar Dewantara. Sesebuah pendidikan ini pernah menegaskan bahwa *kebudayaan tiap-tiap bangsa* adalah "apa yang disebut sebagai *persoonlijkheid* (kepribadian/karakter)". Dengan

masih dalam kontrol kepentingan kolonial. Hal serupa terjadi ketika strategi kebudayaan diarahkan untuk membentuk subjek budaya yang patuh menjalankan pembangunan serta menjaga kestabilan politik, atau untuk memobilisasi massa.

Dalam kedua pendekatan di atas, nilai-nilai budaya diperlakukan lebih sebagai aturan ketimbang terang budi dan rasa merasa yang dengan cara kreatif akan mengembangkan cara berpikir dan bertindak. Kebudayaan menjalankan fungsi pedagogis searah untuk melatih perilaku warga negara seturut motif politik yang dominan. Dalam kondisi ini, kebudayaan dalam pelbagai wujudnya—apakah sistem gagasan, perilaku, ataupun benda-benda—tidak lagi dipilah berdasarkan kandungan intrinsiknya yang memungkinkan manusia mencerna dan memahami kebaikan tertinggi, keindahan dan keluhuran, tetapi berdasarkan tolok ukur kegunaan.

Hal yang menarik adalah bagaimana strategi kolonial yang disebut di atas justru dimanfaatkan secara cerdas oleh sekelompok kalangan terdidik bumiputra untuk memulai gerakan nasionalis. Setiap strategi kebudayaan, karena itu, lebih tepat dilihat sebagai peta, jalan-jalan yang ditempuh atau dihindari dalam rangka menjelmakan visi yang dirumuskan; bukan sebagai rumusan-rumusan kebijakan yang kaku. Ibarat peta, strategi kebudayaan hanya memberikan arah atau gambaran. Namun akan selalu ada kawasan yang tidak akan terjelajah, atau kawasan tidak terduga yang hanya menjadi jelas ketika kita tiba di sana, dan bahkan ada yang tidak terjangkau atau tidak terealisasi sama sekali.

Dengan pengertian-pengertian itulah saya akan membahas tema yang lebih utuh di bawah ini.

Revolusi Mental dan Karakter Bangsa

Kiranya tidak perlu kita perdebatkan lagi bahwa “Revolusi Mental” adalah ungkapan yang banyak digunakan dalam sejarah pemikiran, manajemen, sejarah politik, dan bahkan sejarah musik—di dunia Barat maupun Timur.

Dari penjelasan istilah di atas, tampak bahwa dunia mental tidak hanya tersusun dari kemampuan kognisi, tetapi juga endapan sistem

material iklan memengaruhi preferensi konsumen dan prioritas memilih berdasarkan otonomi individu untuk memutuskan apa yang bernilai bagi dirinya.

Sedangkan istilah *revolusi* pada mulanya tidak memiliki arti sebagaimana kita sekarang memahaminya. Pada abad ke-13 istilah itu digunakan untuk menggambarkan gerak benda-benda langit yang senantiasa beredar balik (Latin: *revolvere*). Sementara untuk perubahan mendasar dalam cara pandang beserta metode dan praktiknya sampai permulaan zaman modern digunakan istilah renovasi atau restorasi (Francis Bacon). Baru sesudah peristiwa pemakzulan Raja Inggris 1688, istilah revolusi digunakan untuk menunjuk ke perubahan sosial-politik yang berlangsung cepat dan radikal, serta tidak jarang disertai kekerasan.

Melalui rangkaian kuliah sejarawan sains Herbert Butterfield yang kemudian diterbitkan dalam *The Origins of Modern Science* (1949), istilah "revolusi keilmuan" mulai lazim digunakan untuk menandai suatu episode keilmuan yang ditandai dengan keterputusan paradigma karena muncul paradigma baru yang sepenuhnya berbeda. Istilah ini menjadi populer sesudah Thomas Kuhn menerbitkan *The Structure of Scientific Revolutions* (1962).

Ketiga, tentang istilah strategi kebudayaan.

Strategi idealnya berisi kebijakan umum yang memberi haluan ke mana dan bagaimana sesuatu akan ditangani. Strategi berisi visi serta asumsi-asumsi dasar yang dilaksanakan berdasarkan tahapan, penentuan target setiap tahapan, serta langkah pencapaiannya. Masalahnya, kebudayaan bukan bidang yang dengan mudah dapat di-strategi-kan. Namun sebagai contoh, kita dapat melihat paradigma politik etis permulaan abad ke-20 di Hindia Belanda sebagai strategi kebudayaan pemerintah kolonial untuk menghasilkan pamong praja yang berpendidikan tetapi jinak.

Dalam bingkai itu, kebudayaan Barat ibarat paket yang dapat disusun rapi ke dalam kotak lalu dikirim ke tanah jajahan untuk meningkatkan cara pikir, cara merasa dan cara bertindak penduduk terjajah agar sesuai dengan tolok ukur kebudayaan modern, namun

menggabungkan *para* (di samping) dan *deiknunai* (menunjukkan). Artinya, 'apa yang menunjukkan diri di samping'. Dalam penjelasan Giorgio Agamben (2002), itu berarti bahwa paradigma senantiasa memiliki sisi tersembunyi yang sama pentingnya dengan sisi yang mengemuka. Tanpa memperhatikan makna asalnya ini, yaitu adanya sisi tersembunyi—di samping atau bersebelahan dengan—kita akan memperlakukan paradigma secara sepele dan bahkan meremehkan kerumitannya.

Kedua, tentang mental dan revolusi.

Seperti sudah saya sampaikan dalam naskah berbeda, istilah 'mental' adalah nama bagi genangan segala sesuatu menyangkut cara hidup. Sebut saja 'mentalitas zaman'. Di dalam 'mentalitas zaman' atau cara hidup zaman tertentu itu ada cara berpikir, cara memandang masalah, cara merasa, mempercayai/meyakini sesuatu, cara berperilaku dan bertindak. Ada mentalitas petani, mentalitas industrial, mentalitas priayi, mentalitas gawai (*gadget*), dsb.

Ini berarti bahwa hal-hal yang bersifat mental (berpikir, bernalar, menimbang-nimbang, memutuskan, dan lain-lain), kendati tidak bersifat fisik, bukannya tidak terkait dengan keragawian tindakan dan ciri fisik benda-benda dunia. Dunia mental tidak mungkin terbangun tanpa pengalaman ragawi. Pada gilirannya, daya-daya mental kita menghasilkan perilaku serta tindakan yang menjelma secara ragawi. Karena itulah kita memakai istilah mentalitas untuk menggambarkan dan sekaligus mengkritik "mentalitas zaman".

Mentalitas priayi tentu bukan sekadar hal-hal batin para priayi, melainkan cara mereka menampilkan diri, berpakaian, bertutur, memandang benda-benda, dan berperilaku, selain menyangkut cara mereka memahami diri dan dunia di sekitarnya, memahami dan melaksanakan ritual keagamaan, seni, dan sebagainya. Kelenturan mental pada suatu zaman, yakni kemampuan untuk mengubah dan bahkan meninggalkan cara pandang dominan pada suatu masa tertentu, juga dipengaruhi oleh hasrat. Hasrat adalah campuran antara emosi dan motivasi. Keduanya pun digerakkan oleh hasrat badani, bukan melulu cita-cita ideal. Kita tidak memerlukan analisis kebudayaan yang canggih untuk mengerti bagaimana daya-daya

Judul di atas saya ambil dari Kerangka Acuan Diskusi pagi ini. Sekurang-kurangnya ada tiga konsep besar yang mengemuka dalam judul tersebut, yaitu Revolusi Mental, Paradigma, dan Strategi Kebudayaan. Saya akan meninjau konsep-konsep tersebut lebih dulu sebelum merangkumnya ke dalam tema terpadu. Ada cita-cita yang besar dalam judul yang diajukan panitia penyusun Kerangka Acuan.

Memahami Istilah

Pertama, tentang paradigma.

Istilah ini amat populer dalam diskusi sehari-hari dan digunakan secara longgar untuk pelbagai keperluan. Kalau kita membuka *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ada tiga arti terkait paradigma, yaitu (1) terkait linguistik, yaitu daftar semua bentukan dari sebuah kata yang memperlihatkan konjugasi dan deklinasi kata tersebut; (2) model dalam teori ilmu pengetahuan; (3) kerangka berpikir. Kendati tidak memadai, arti ketiga tampaknya paling sesuai bagi keperluan kita.

Karena tidak memadai, kita perlu melengkapinya dengan melihat, misalnya, penggunaan dalam tradisi filsafat. Istilah itu sudah digunakan oleh Plato dan Aristoteles. Pada abad XX, istilah itu muncul kembali melalui pemikiran Michel Foucault dan Thomas Kuhn. Para filsuf tidak menggunakan istilah itu secara seragam. Namun di sini bukan tempat untuk memasuki perdebatan filosofis tentang paradigma. Karena itu, cukuplah kita katakan bahwa paradigma sebagai “kerangka berpikir” yang disebut di atas melibatkan andaian-andaian, konsep-konsep, nilai-nilai dan praktik, yang mencerminkan cara pandang tertentu terhadap realitas. Orang-orang yang berpegang ke paradigma yang sama akan menerapkan tolok ukur dan kaidah-kaidah penafsiran yang sama. Dalam arti ini, paradigma merupakan semacam pijakan. Pijakan itu membuat kita melihat segala sesuatu menurut cara tertentu, yang berbeda ketika kita berdiri di atas pijakan yang lain.

Pengertian di atas sekaligus melibatkan makna yang terdapat dalam asal muasal istilah itu. Kata Latin *paradigma* berasal dari kata Yunani *paradeigma*, dengan bentuk lebih awal *paradeiknunai*, yang

REVOLUSI MENTAL SEBAGAI PARADIGMA STRATEGI KEBUDAYAAN

Karlina Supelli

Strategi Kebudayaan untuk Revolusi Mental di Indonesia	
<i>Heddy Shri Ahimsa-Putra</i>	137
Revolusi Mental = Revolusi Pendidikan? (Prosesualisme dalam Pendidikan)	
<i>Achmad Fedyani Saifuddin</i>	159
Pendidikan Karakter Bangsa sebagai Strategi Kebudayaan	
<i>Ki Supriyoko</i>	179

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Kepala Puslitbang Kebudayaan	
<i>Hurip Danu Ismadi</i>	v
Revolusi Mental dan Strategi Kebudayaan: Pengantar Diskusi	
<i>Semiarto Aji</i>	viii
Revolusi Mental sebagai Paradigma Strategi Kebudayaan	
<i>Karlina Supelli</i>	1
Implementasi Revolusi Mental dalam Konteks Kehidupan Berbangsa sebagai Manusia Merdeka	
<i>A. Benny Susetyo</i>	11
Revolusi Mental di Ranah Politik: Orientasi Pelayanan Publik dan Pola Baru Seleksi Pejabat Publik	
<i>Haryatmoko</i>	21
Sistem Hukum sebagai Kontrol Sosial: Identifikasi dan Proyeksi Pemecahan Masalah Mentalitas dalam Perspektif Hukum	
<i>Saldi Isra</i>	47
Konteks Historis Perubahan Mentalitas dalam Paradigma Kebudayaan	
<i>Sri Margana</i>	63
Entek amek kurang golek: State, fishermen, and the illusion of cornucopia	
<i>Pujo Semedi</i>	75
Mentalitas Orang Indonesia: Tantangan bagi Paradigma Baru Strategi Kebudayaan dalam Perspektif Pendidikan	
<i>Sunaryo Kartadinata</i>	93
Revolusi Mental dan Strategi (Pengelolaan) Kebudayaan: Perspektif dari Papua	
<i>I Ngurah Suryawan</i>	109

kata kuncinya. Kedua ahli itu sepakat bahwa pendidikan juga harus menemukan justifikasi dalam pola perilaku, misalnya dengan pemberian contoh atau teladan. Selama ini sejumlah aturan dan produk hukum tercipta tetapi keteladan dari para pemimpin dalam berperilaku di tingkat elite kurang. Keteladanan merupakan bagian dari rekonstruksi sosial yang penting karena telah terjadi “krisis kepemimpinan”.

Sebagai sebuah konsep yang amat terikat dengan komunitas pelakunya, pembicaraan mengenai kebudayaan selalu harus mengingat pentingnya isu relativisme kebudayaan. Meskipun, konteks perubahan mental yang kita bicarakan ini bersifat nasional, namun kekhasan persoalan, strategi, dan solusinya di tingkat lokal tetaplah penting. Secara khusus, dalam hal Papua, I Ngurah Suryawan menunjukkan betapa persoalan yang dihadapi manusia Papua itu khas: antara transformasi besar evolusi ke akseptansi berbagai unsur modernitas dalam suatu interkoneksi global. Sejarah sosial-budaya mereka unik, sejarah politik dalam rangka integrasi dengan negara Indonesia juga khas. Oleh karenanya membangun Papua memerlukan strategi khusus. Suryawan mengedepankan pentingnya pendidikan humaniora sebagai salah satu cara untuk membangun mental orang Papua.

Pelajaran dari Papua ini menunjukkan kemungkinan adanya keragaman strategi. Sebagaimana Heddy Shri Ahimsa-Putra juga sudah ungkapkan di atas, perbedaan tataran akan berimplikasi pada perbedaan strategi yang harus dikembangkan. Secara horizontal, dalam konteks lokasi dan kelompok sosial, kasus Papua ini merupakan contoh diperlukannya variasi strategi kebudayaan yang harus dikembangkan. Di sisi lain, revolusi mental bukan berarti penekanan pada pembangunan aspek ide/gagasan/mental semata tetapi juga penyediaan infrastruktur yang seimbang. Kedua dimensi dari pembangunan itu, yaitu ide dan fisik harus dijalankan dalam satu kesatuan rancangan program. Di tingkat mental, pembangunan karakter menjadi satu hal yang penting. Oleh karena itu, strategi kebudayaan mestinya juga mengarah pada pengembangan karakter bangsa yang unggul. Suatu mentalitas yang cocok dengan dinamika kondisi dan lingkungan sosial budaya.

yaitu: perangkat keagamaan, klasifikasi, komunikasi, permainan, pelestarian, reproduksi, kesehatan, ekonomi, kesenian, dan transportasi. Kesepuluh unsur ini mewujudkan dalam empat aspek yaitu: aspek gagasan, bahasa, perilaku dan material. Menurutnya, revolusi mental akan operasional pada tiga unsur—dengan harus memenuhi keempat aspek perwujudannya—yaitu pada unsur keagamaan, komunikasi, dan pelestarian.

Pada tataran gagasan, Ahimsa-Putra berpendapat bahwa revolusi mental dapat dilakukan dengan membangun dan menanamkan pandangan serta keyakinan keagamaan, nilai-nilai, norma-norma, dan aturan-aturan, yang bersesuaian atau sejalan dengan "mentalitet anti" di atas. Kemudian, pada tataran bahasa, yang bermain adalah unsur budaya komunikasi dan pelestarian. Mentalitet lima anti dapat disebarkan dalam masyarakat yang lebih luas daripada masyarakat atau komunitas pemilikinya, antara lain dengan berbagai cerita (sastra) baru. Selanjutnya, pada tataran perilaku unsur budaya yang dapat dimanfaatkan adalah unsur budaya pelestarian. Perangkat simbol berupa perilaku, tindakan dan aktivitas mewariskan, mengajarkan, "mentalitet anti" dari generasi yang satu ke generasi yang lain, dari kelompok yang satu ke kelompok yang lain, dari golongan satu ke golongan yang lain adalah wujud dari unsur pelestarian bagi revolusi mental. Terakhir, pada tataran material, revolusi mental dapat mengambil manfaat dari kemajuan teknologi komunikasi dan internet. Selain memudahkan dan mempercepat penyebaran mentalitas yang diharapkan, teknologi ini juga dapat mengurangi unsur subyektivitas dalam berbagai transaksi yang melibatkan keuangan. Munculnya *e-budgeting*, misalnya, merupakan salah satu kontrol untuk mengurangi praktik korupsi.

Cara untuk mewujudkan revolusi mental dalam perspektif strategi kebudayaan juga merujuk pada orientasi dan mekanisme yang harus dilalui. Dua cara yang mengemuka adalah melalui pendidikan dan upaya rekonstruksi sosial yang lain. Pembentukan pendidikan dasar, terutama dalam hal penyediaan guru yang berkualitas dan isi kurikulum yang memadai. Bagi ahli antropologi A. Fedyani Saifuddin dan ahli pendidikan Ki Supriyoko, revolusi mental yang sesungguhnya adalah sebuah revolusi pendidikan. Ki Supriyoko mengingatkan pentingnya membangun karakter yang unggul bagi seluruh anak didik Indonesia. Paduan antara karakter yang bertanggung jawab secara moral, etika, religius dan kritis, ilmiah dan jujur menjadi

semisal korupsi. Upaya pendidikan melalui jalur budaya berupa penanaman nilai budaya dapat disemaikan melalui karya sastra dan seni. Perlu difasilitasi untuk tumbuh-kembangnya kesusastraan dan kesenian yang tidak saja memiliki nilai estetika tinggi tetapi juga kontekstual.

Mewujudkan Revolusi Mental melalui Strategi Kebudayaan

Pada konteks perkembangan dunia yang makin global sekarang—bukan hanya globalisasi di bidang teknologi informasi dan transportasi tetapi juga persoalan-persoalan kemanusiaan, keamanan dan lingkungan hidup—suatu strategi pengembangan kebudayaan jangka panjang, amat diperlukan. Suatu reorientasi budaya perlu dipikirkan. Kita sebagai sebuah bangsa memerlukan arah dan tujuan akhir yang akan dicapai dalam perjalanan berbangsa dan bernegara. Strategi pengembangan kebudayaan atau secara singkat dipahami sebagai strategi kebudayaan adalah sebuah upaya pengelolaan bermacam-macam debat di masyarakat. Di Indonesia, tulisan Van Peursen (1996) menjadi salah satu rujukan utama pembicaraan mengenai strategi kebudayaan. Menurutnya, strategi kebudayaan dapat dipandang lebih dari sekadar kebijakan melainkan juga sebuah pengamatan terus menerus atas dinamika sosial budaya di masyarakat; segala konflik dan pertentangan yang terjadi, untuk diolah menjadi suatu pelajaran. Pelajaran ini diperlukan agar sebuah bangsa dapat terus *survive*.

Heddy Shri Ahimsa-Putra, dalam paparannya, mengajukan sejumlah usulan mengenai revolusi mental dilihat sebagai sebuah strategi kebudayaan. Ia melihat ada sejumlah sebab mengapa mentalitas manusia Indonesia tidak berkembang dengan baik menjadi sifat unggul bangsa. Berbagai mentalitas negatif, sebagaimana diungkapkan Koentjaraningrat, yang menurutnya harus dicarikan antitesisnya. "Mentalitet anti" yang harus dicari itu, yaitu: (1) anti-kebodohan dan pembodohan; (2) anti-kecurangan dan pencurangan; (3) anti-kesenjangan dan penyenangan; (4) anti-rendah diri dan perendahan; (5) anti-kerusuhan dan perusuhan. Itulah yang harus dikembangkan sebagai sebuah strategi kebudayaan. Di dalam teorinya mengenai kebudayaan, Ahimsa melihat adanya unsur kebudayaan yang terdiri dari 10 perangkat atau institusi

hari ini tidak bisa lepas dari perdebatan tentang tuntutan kemajuan dan modernitas di berbagai aspek kehidupan. Perubahan-perubahan ini berhadapan langsung dengan klasisme tradisi dan nilai-nilai keagamaan. Tarik-menarik antara klasisme dan modernisme tersebut tidak terbatas pada wacana pemikiran tetapi juga dalam praktik sosial, budaya, ekonomi dan politik yang tidak jarang melahirkan gesekan-gesekan sosial dan konflik.

Gesekan sosial kadang kala merupakan manifestasi dunia khayalan sebagai bangsa dengan sumber daya alamnya yang melimpah. Seakan hidup menjadi tidak terlalu susah, sehingga mereka menyiasatinya dengan mengambil sebanyak mungkin sumber daya alam tanpa sadar batas. Bahkan manakala sumber daya alam yang menjadi landasan perilaku kolektif itu berkurang, khayalan sumber daya alam yang melimpah tetap membingkai kehidupannya. Pada gilirannya, hal itu membawa dampak pada sikap dan praktik eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, menggampangkan segala urusan yang bersifat produktif dan cenderung santai menghadapi hidup.

Karena itu, upaya-upaya dalam melakukan perubahan kebudayaan dari masa kolonial hingga masa kini pun ditemukan pola-pola repetisi dalam setiap fase perubahan dan perkembangan politiknya. Akhirnya, ide-ide perubahan kebudayaan lalu diserahkan kepada sebuah elitisme kebudayaan dan seringkali berakibat pada lahirnya reaksi dan resistensi. Agar perubahan kebudayaan, dalam hal ini mentalitas, dapat dilakukan perlu adanya kemauan dari para elite penguasa untuk memotong secara tegas garis kebudayaan lama sehingga dapat wujudkan kebudayaan yang dapat menjangkau masa depan. Rekonstruksi sosial bisa menjadi pilihan agar perubahan kebudayaan dapat mewujudkan mentalitas yang sejalan dengan tuntutan masa depan dengan membentuk tata pikir (*mind set*) bangsa yang membangun dan menumbuhkan pribadi dewasa yang memiliki kekuatan kompetisi internal diri untuk memenuhi standar keunggulan prestasi atau kinerja yang menjadi target capaiannya. Dengan cara itu, tumbuh dan berkembang kesadaran dan kebutuhan akan kejujuran diri, kerja keras, tanggung jawab, dan keberanian menghadapi risiko atas pilihan yang diambilnya, tanpa mengabaikan kultur kolaborasi.

Di bidang kebudayaan diperlukan pendekatan yang lebih *soft* dalam upaya untuk menanggulangi krisis sosial-politik yang sudah kronis

Lalu, apanya yang berubah dengan melakukan revolusi mental? Jika menggunakan pendekatan Bourdieu, maka apa yang berubah adalah habitus atau kebiasaan-kebiasaan yang sudah berlangsung lama. Mekanisme perubahan habitus itu harus secara implisit (persuasif) dan tidak afirmatif (diktator) untuk menghindari reaksi balik berupa resistensi. Perubahan habitus akan terlihat dari adanya kesukarelaan aktif untuk melakukan perubahan. Narasi-narasi sastra adalah contoh baik dan efektif untuk menciptakan habitus; sementara dalam bidang politik, antara lain: membatasi kekuasaan partai politik, memperbesar partisipasi masyarakat dalam politik untuk melakukan kontrol dan memberi sanksi, penjaminan akuntabilitas dan transparansi, pendidikan karakter yang mengambil bentuk kerja sosial sukarela (*pro bono*), di kalangan pelajar model kerja sukarela itu perlu diorganisir dan diintegrasikan ke dalam kurikulum, dan lain-lain.

Di bidang hukum, menurut Saldi Isra, bangsa kita menghadapi tantangan dari produk-produk hukum berupa undang-undang dan pasal-pasal yang ditulis oleh aktor-aktor yang tidak menghendaki perubahan. Mereka membuat produk hukum dengan rasa khawatir akan berdampak buruk bagi mereka. Indonesia mengalami persoalan *conflict of interest* antara pembuat hukum dan produk-produknya. Profesi Jaksa, Hakim, dan Pengacara seringkali belajar pada guru dengan kurikulum yang sama, namun kemudian memiliki tafsir yang sangat berbeda kepada produk hukum yang sama karena memang mereka berpulang pada kelompok-kelompok asosiasi penegak hukum yang berbeda kepentingan. Profesi penegak hukum adalah pekerjaan mulia. Maka rekrutmen mereka tidak dapat melalui cara-cara standar. Mengambil contoh dari negara lain, perlu ada masa inisiasi selama berbulan-bulan sebagai bagian pendidikan perguruan tinggi hukum hanya untuk menempatkan mereka dalam tipe kategori-kategori yang cocok apakah itu sebagai pengacara, hakim, atau jaksa. Tiap karakter penegak hukum itu ternyata sungguh-sungguh berbeda. Penegak hukum yang baik, selalu akan mencari segala cara untuk mewujudkan penyelesaian hukum terbaik walau menggunakan produk-produk hukum yang lemah.

Berbagai masalah dalam bidang sosial dan budaya dikupas oleh tiga ahli, yaitu oleh ahli antropologi Pujo Semedi, ahli sejarah Sri Margana dan ahli pendidikan Sunaryo Kartadinata. Mentalitas manusia Indonesia sejak awal terbentuknya sebagai bangsa hingga

sebenarnya kondisi bangsa kita? Melalui seminar yang diinisiasi oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dipresentasikan dan dibahas berbagai latar belakang, ide dasar dan bagaimana merumuskan ide revolusi mental sebagai sebuah strategi kebudayaan. Dalam buku yang memuat pokok-pokok pikiran dalam seminar di atas, ingatan pembaca akan disegarkan kembali dengan ide mengenai revolusi mental. Selanjutnya disampaikan sejumlah permasalahan politik, hukum, sosial, budaya dan pendidikan. Lalu, pada bagian akhir, ditutup dengan usulan formulasi revolusi mental sebagai sebuah strategi kebudayaan.

Menelusuri Akar Masalah Sosial-Politik di Indonesia

Atas berbagai persoalan politik yang mewujud dalam masalah lembaga-lembaga negara, personalia, sikap dan partisipasi politik warganegara, serta dinamika di dalamnya, Haryatmoko mengajukan sejumlah ide. Menurutnya, dalam hal politik, revolusi mental adalah perubahan pikir para penguasa menyangkut orientasi politik, perubahan sikap pejabat publik, dan politik partisan. Revolusi mental tidak hanya menyangkut pola pikiran, namun juga perubahan struktural dalam interaksi sosial yang dominan di masyarakat, yaitu komunikasi, hubungan kekuasaan dan moralitas. Harapannya, perubahan struktur tersebut memengaruhi ketiga struktur masyarakat, yaitu struktur pemaknaan, struktur dominasi, dan struktur legitimasi.

Dengan perspektif demikian, maka revolusi mental di bidang politik harus memerhatikan dua hal ini: *pertama*, perubahan orientasi politik secara mendasar dari pandangan berpusat pada kekuasaan menjadi berpusat pada pelayanan publik dan isu kewarganegaraan; dan *kedua*, perubahan revolusi mental adalah perubahan sikap pejabat publik dan politisi yang mampu memberi pelayanan berkualitas dengan kompetensi teknis, kepemimpinan, dan etis. Dalam perubahan yang revolusioner pada skala mental, langkah tidak selayaknya berhenti di penafsiran, tapi harus memerhatikan modalitas-modalitas yang ada yaitu ekonomi, budaya, politik, dan ekonomi. Masing-masing modalitas ini saling memperkuat satu-sama lain sehingga perubahan revolusioner terjadi. Termasuk juga sanksi moralitas terhadap pelanggaran-pelanggaran.

baik, bagus, benar, dan perlu diadopsi. Kemerdekaan sejati, yang merujuk pada aktualisasi diri sebagai pribadi yang mandiri tidak pernah tercapai karenanya. Susetyo, selain itu, juga menunjuk sistem penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang penuh kepalsuan. Indikator keberhasilan ditempatkan sebagai patokan keberhasilan dari program. Akibatnya, setiap laporan dari penyelenggara negara seperti harus tampil bagus. Masalah-masalah, sebaiknya, tidak ada. Kalau perlu, dibuatkan laporan fiktif untuk mendapatkan kesan positif.

Amatan Susetyo di atas, mengingatkan kita pada kondisi 20-30 tahun yang lalu ketika Koentjaraningrat bercerita tentang ketidaksiapan mental bangsa Indonesia dalam abad pembangunan. Sang pakar antropologi tersebut melihat ketidaksesuaian budaya warganegara Indonesia dengan syarat-syarat menjadi manusia modern. Menguatnya paham developmentalisme saat itu membuat para pembuat kebijakan yakin bahwa modernitas dan kemajuan hanya akan dicapai melalui pembangunan. Manusia Indonesia pada dasawarsa 1970-an, di masa awal Orde Baru yang mengusung politik pembangunan, adalah manusia-manusia dengan mentalitas yang belum siap maju. Mereka memiliki dan mempraktikkan sifat mentalitas yang meremehkan mutu; suka menerabas; tak percaya kepada diri sendiri; tak berdisiplin murni; dan suka mengabaikan tanggung jawab yang kokoh.

Setali tiga uang, budayawan Mochtar Lubis juga menyampaikan pandangan mengenai manusia Indonesia yang masih berciri pra-pembangunan. Berciri feodal dan hidup pada kejayaan masa lalu. Kedua pemikir tersebut menyediakan kritik yang besar pada Orde Baru yang menggunakan pembangunan sebagai mekanisme mentransformasi negara dan manusia Indonesia menjadi modern. Alih-alih, menurut Lubis, manusia Indonesia masih hidup dalam kesadaran diri yang hipokrit alias munafik, segan dan enggan bertanggung jawab, berjiwa feodal, masih percaya takhyul, artistik, memiliki watak yang lemah, tidak hemat, tidak suka bekerja keras, tukang menggerutu, cepat cemburu dan dengki, manusia sok, dan cenderung menjadi tukang tiru.

Puluhan tahun berlalu, ribuan program pembangunan sudah dilancarkan. Kalau kemudian seorang calon Presiden masih merasa perlu menjual ide revolusi mental untuk kampanyenya, maka patut dipersoalkan: apa lagi yang menjadi alasannya? Bagaimana

- d. Perubahan pikir para penguasa menyangkut orientasi politik, perubahan sikap pejabat publik dan politik partisan.
- e. Tidak hanya menyangkut pola pikiran, namun juga perubahan struktural dalam interaksi sosial yang dominan di masyarakat, yaitu komunikasi, hubungan kekuasaan, dan moralitas.
- f. Pengembangan sikap anti kepada hal-hal negatif.

Revolusi mental menuntut perubahan pada dua tatanan sosial politik, yaitu pada para pejabat (pembuat, pelaksana kebijakan, dan semua yang terkait dengan posisi pemerintahan) dan rakyat sebagai warganegara. Oleh karena itu, perubahan juga harus diarahkan pada kedua tatanan tersebut: bagaimana penguasa menjadi pelindung dan pelayan publik yang cakap dan santun, dan bagaimana rakyat dapat menjadi warga negara yang terlindungi, terjamin hak-haknya, dan bertanggung jawab pada lingkungannya. Di sisi lain, Karlina Supelli mengajak kita untuk melihat revolusi mental sebagai proses budaya. Hal ini berarti bahwa ada mekanisme kerja yang seperti otomatis terjadi ketika sesuatu sudah menjadi bagian dari budaya. Secara khusus Supelli menunjukkan bahwa revolusi mental, kalau berhasil, seharusnya mampu mengubah cara berpikir dan cara bertindak manusia Indonesia menjadi lebih baik. Singkatnya, ada suatu tahap seleksi mental yang mengatakan bahwa apabila sesuatu diketahui buruk maka itu tidak akan dikerjakan. Pengetahuan mengenai sesuatu yang negatif mestinya tidak manifes menjadi perilaku yang negatif pula. Berbagai masalah sosial dan politik yang terlihat berantakan belakangan ini ditengarai sebagai akibat pembiaran, tidak hanya pada tingkat institusi tetapi juga pada tingkat mental individual. Orang sudah tahu bahwa korupsi, misalnya, salah—tetapi dengan segala justifikasi perilaku itu tetap dilakukan. Hal yang sama juga terjadi pada kasus mencontek di kalangan pelajar.

Benny Susetyo, salah seorang yang dari awal mengejawantahkan konsep revolusi mental Jokowi mengingatkan betapa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Namun kebesarannya, selama ini, seperti tertutup oleh kondisi belum merdeka sepenuhnya yang tercermin dari mentalitas negatif warganegara. Salah satu yang paling menonjol adalah sifat minder atau tidak percaya diri di hadapan bangsa lain. Suatu sikap yang menyebabkan warga negara Indonesia cenderung menerima segala sesuatu dari luar sebagai

Membaca Usulan tentang Revolusi Mental

Para ilmuwan sosial sejak pertengahan dasawarsa 1970-an sudah mengisyaratkan transformasi mental masyarakat Indonesia agar dapat hidup di dunia modern (Lubis 1985); yang memerlukan syarat tumbuhnya mentalitas pembangunan (Koentjaraningrat 1987). Tiga puluh tahun kemudian gagasan besar dari dua tokoh pemikir besar di bidang kebudayaan itu nampaknya belum terpenuhi. Persoalan yang menyangkut integrasi nasional, penyelenggaraan negara dan bernegara, kehidupan sosial di tengah kemajemukan, dan kesejahteraan yang penuh ketimpangan masih menjadi persoalan utama. Di sisi lain, disadari bahwa di tingkat budaya, sikap-sikap negatif atau tidak sesuai dengan kondisi ideal terus saja diperlihatkan secara masif dan terus menerus. Suatu kondisi yang memunculkan 'budaya negatif'. Kita bisa mengambil contoh bagaimana kecurangan dipelajari, ditampilkan dan disebarikan—pendeknya: diproduksi dan direproduksi—sejak masa seseorang duduk di bangku sekolah dasar. Menyontek, misalnya, bahkan seperti diizinkan demi mendapat nilai tinggi. Atas nama sukses Ujian Nasional (UN) yang indikatornya antara lain nilai UN, banyak sekolah membiarkan siswanya menyontek. Di tingkat atasnya, pembiaran pungutan liar untuk jasa dan pelayanan di instansi negeri juga terjadi, malah semakin meluas. Praktik korupsi marak di semua tingkat, di semua wilayah.

Persoalan-persoalan seputar budaya atau mentalitas di atas itulah yang tampaknya hendak dijawab dengan revolusi mental. Suatu transformasi yang dalam bahasa Jokowi akan mendorong sikap "negativisme menjadi positivisme". Proses yang menginginkan sikap-sikap negatif dari warganegara dikritisi dan diubah menjadi sikap-sikap positif. Oleh karena itu, diperlukan operasionalisasi konsep revolusi mental agar ide tersebut dapat dipahami dan diwujudkan. Selama seminar, para narasumber merujuk revolusi mental sebagai:

- a. Upaya untuk mengubah kebiasaan dan kerangka pemikiran sehari-hari masyarakat yang berdampak luas bagi publik.
- b. Proses menghasilkan manusia merdeka, bagaimana mendidik manusia yang mengerti dirinya, mengerti keindonesiaannya.
- c. Transformasi pengertian dan pemahaman mengenai politik dari isu kekuasaan menjadi pelayanan publik.

26 Oktober 2014: Pengumuman kabinet, yang tertunda selama beberapa hari dari yang direncanakan akhirnya terlaksana. Dengan nama Kabinet Kerja, Jokowi kini memiliki 34 menteri. Tidak sebegitu ramping daripada bayangan para pengamat yang memegang pernyataan Jokowi untuk membuat kabinet yang ramping. Di samping itu, sejumlah nama yang berafiliasi langsung atau tidak langsung dengan Partai Politik dianggap menjadi indikasi bahwa Presiden telah berkompromi dengan kekuatan politik yang ada. Hal ini berbeda dengan pernyataannya yang akan mengedepankan profesionalitas kabinet.

Rekaman pemberitaan media massa yang menampilkan popularitas Jokowi mencapai puncaknya pada dua momentum terakhir: pelantikannya sebagai presiden dan pengumuman kabinet kerja yang diharapkan segera dapat memenuhi harapan masyarakat. Setelah itu, berangsur-angsur, beberapa kebijakan yang dibuatnya seperti tidak memenuhi keinginan publik. Mulai dari pelepasan subsidi bahan bakar minyak yang membuat harga di pasar naik dan turun mengikut mekanisme pasar bebas, penentuan Kepala Kepolisian RI, sampai pada pelaksanaan hukuman mati pada terpidana mati kasus narkoba. Perekonomian makro juga direcoki oleh laju kenaikan nilai tukar dolar AS dibanding nilai rupiah yang menimbulkan kenaikan harga barang-barang konsumsi masyarakat.

Saat ini, pada bulan Maret 2015, banyak orang mempertanyakan kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi. Secara khusus, bahkan, sebagian mengungkapkan sinisme atas ide revolusi mental yang dicanangkan di masa kampanye. Salah satu saran yang mengemuka, yang terkait dengan bagaimana revolusi mental itu dilakukan, adalah dengan pemberian contoh oleh para pejabat. Pejabat, termasuk presiden, harus mampu memberi teladan baik kepada masyarakat. Mereka adalah figur yang menyebarkan inspirasi bagi orang lain. Bagaimana revolusi mental dapat menjadi jawaban atas segala masalah bangsa? Banyak pihak seperti tidak menemukan jawaban pada semester pertama pemerintahan Presiden Jokowi ini. Namun, melalui makalah-makalah yang terhimpun dalam buku ini, saya mengajak kita semua untuk mencermati usulan ini sekali lagi. Bagaimanapun, sebuah gagasan mengenai strategi kebudayaan memang masih amat relevan bagi bangsa ini; revolusi mental adalah salah satu gagasan yang patut ditengok dan dicobalaksanakan.

Rentang Waktu, Rentang Tanggapan

14 Maret 2014: Joko Widodo atau Jokowi, Gubernur DKI Jakarta yang adalah mantan Walikota Surakarta, mencalonkan diri sebagai Presiden RI. Kehadirannya dalam kontes calon pimpinan bangsa itu menjadikan Pemilihan Presiden 2014 menjadi seru. Kemunculannya sebagai kandidat yang dicalonkan PDI Perjuangan, partai pemenang pemilihan legislatif yang tidak memegang suara mayoritas di DPR, sedikit kontroversial karena menggantikan ketua partai yang biasanya menjadi calon presiden.

24 Mei 2014: Sebagai salah satu materi kampanye Jokowi yang paling banyak ditanggapi publik adalah usulan perlunya revolusi mental sebagai solusi penyelesaian berbagai masalah yang dihadapi bangsa ini. Dalam sebuah acara di TV swasta, Jokowi mengatakan ingin mengubah mental orang Indonesia yang cenderung tidak percaya diri menghadapi dunia. Dia menjelaskan keinginannya untuk mentransformasi masyarakat, “Revolusi mental dari negativisme menuju positivisme”. Menurutnya, revolusi mental dapat memenuhi visi yang dia namakan “Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian”.

9 Juli 2014: Pasangan Jokowi dan Jusuf Kalla memenangkan pemilihan presiden melalui pertarungan yang ketat melawan Prabowo dan Hatta Rajasa. Akibat ketatnya persaingan, Prabowo dan pasangannya menggugat kemenangan Jokowi melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang MK dimulai 16 sampai 21 Agustus 2014.

20 Oktober 2014: Setelah melalui proses banding dan sidang MK, Jokowi ditetapkan menjadi Presiden RI. Presiden Jokowi mengangkat sumpah di hadapan sidang MPR. Sesaat kemudian, bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla, Jokowi diarak dengan kereta kuda menuju Istana Presiden. Arak-arakan ini begitu dekat dan seolah meniadakan batas antara pemimpin tertinggi negara dengan rakyat. Popularitas dan kedekatan dengan rakyat merupakan salah satu senjata dan kekuatan Jokowi selama kontes pemilihan presiden, gubernur, dan walikota. Ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta dan Walikota Surakarta, kesan kedekatan dan pemihakan kepada rakyat amat terlihat.

punya makna atau menunjuk kepada realitas tertentu. Bukankah kedaulatan rakyat tidak bermakna lagi sehingga hanya menutupi realitas pertarungan kekuasaan di antara kelompok-kelompok (partai politik)? Tujuan utamanya menjamin kendali negara dan mendistribusikan secara sepihak posisi-posisi kekuasaan.

Masalah kedua, korupsi *kartel-elite*, menjadi berat karena melibatkan partai politik, pengusaha, birokrat, dan penegak hukum semakin marak karena mau menjamin kekuasaan ada di tangan. Sistem demokrasi belum mampu menjamin prosedur *fair* untuk mencapai kekuasaan. Korupsi *kartel-elite* mendapat dukungan jaringan politik (partai politik), ekonomi (pengusaha), aparat penegak hukum dan birokrasi dalam situasi sosial-politik yang ditandai dengan ciri-ciri (M. Johnston, 2005: 89): (i) para pemimpin menghadapi persaingan politik dalam lembaga-lembaga yang masih lemah; (ii) sistem peradilan penuh kompromi atau korup; (iii) partai politik tidak sungguh mengakar dalam masyarakat, tapi lebih mewakili elite yang bersaing; (iv) birokrasi terlalu besar dan rentan korupsi. Maka suasana politik penuh risiko dan ketidakpastian.

Situasi ketidakpastian itu mendorong terjadinya korupsi *kartel-elite* yang berfungsi melindungi dan memperkaya jaringan itu. Korupsi jenis ini membantu mempertahankan hegemoni dalam suasana persaingan politik sementara institusi-institusi masih lemah. Transaksi atau perjanjian dilakukan bukan hanya antara pejabat publik dan sektor swasta, pimpinan politik dan pengikutnya, tetapi juga di antara para pemimpin politik yang berkuasa, birokrat dan pengusaha. Tujuan korupsi ini tidak hanya untuk memengaruhi suatu kebijakan publik tertentu, tetapi untuk menghalangi atau mengkooptasi pesaing-pesaing yang potensial, menghimpun pengaruh untuk menguasai dan menjauhkan keuntungan-keuntungan ekonomi dan kebijakan publik dari tekanan sosial dan elektoral (M. Johnston, 2005: 90).

Korupsi *kartel-elite* bukan hanya masalah penyalahgunaan kepercayaan oleh kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok, tetapi korupsi jenis ini menjadi cara yang dipakai elite untuk menggagalkan dukungan politik dari masyarakat serta untuk memenangkan kerja sama dengan lembaga legislatif, penegak hukum dan birokrasi (F. Lordon, 2008: 10). Bisa dibayangkan betapa berat dan sulitnya menghadapi korupsi semacam itu, baik untuk melakukan investigasi maupun untuk menemukan bukti, karena korupsi melibatkan jaringan kekuasaan. Apalagi korupsi jenis

ini biasanya juga menggunakan strategi komunikasi politik yang canggih untuk merekayasa opini publik. Revolusi Mental dalam konteks ini harus memperhitungkan pembatasan kekuasaan partai politik dan menuntut akuntabilitas serta transparansinya.

Akibat korupsi dalam jangka panjang menjadi berat karena korupsi menunda dan membelokkan perkembangan ekonomi dan politik. Uang sogok yang dibayarkan ke birokrat ternyata tidak akan memecahkan kemacetan administrasi, tetapi justru menular ke pejabat lain. Korupsi seperti ini memberitahukan kepada pejabat lain bahwa dengan memperlambat prosedur administrasi akan mendapat uang. Korupsi yang memengaruhi pengambilan keputusan menyebabkan nilai-nilai demokratis menjadi tidak relevan. Kesempatan yang seharusnya untuk banyak orang yang membutuhkan, akhirnya disangkal. Korupsi lalu menjadi insentif jangka pendek yang membebani ongkos jangka panjang, bukan untuk tujuan politik kesejahteraan bersama, tetapi untuk mempertahankan kekuasaan. Dengan demikian korupsi berarti mengabaikan pilihan-pilihan politik (Lordon, 2008:24-25).

Tiadanya transparansi dan akuntabilitas merupakan penghambat terbentuknya institusi pasar dan politik yang kuat dan efektif. Padahal kedua unsur ini penting di dalam pembangunan etika politik, yaitu sebagai aspek *polity* (modalitas politik). Kedua hal itu mengaburkan batas-batas antara politik dan ekonomi, kepentingan publik dan privat. Lalu akses ke pengambil keputusan dijadikan komoditi. Korupsi semakin memperlemah partisipasi dan institusi-institusi politik dan ekonomi karena memberikan imbalan kepada tiadanya efisiensi. Kontrak atau perjanjian yang korup akan menempatkan pembayar di luar perlindungan hukum. Terlebih lagi kontrak yang diwarnai korupsi dengan meninggalkan jejak bukti yang memberatkan akan digunakan untuk menekan dan memeras lebih jauh lagi. Maka demokrasi efektif bila memungkinkan masyarakat bisa memiliki alternatif riil dalam hal politik dan ekonomi sehingga membantu menghindarkan masyarakat dari eksploitasi dan ketergantungan. Kompetisi politik memperlemah kemampuan kepentingan ekonomi atau faksi politik untuk mendominasi arena. Ada kaitan antara tingginya korupsi dan rendahnya tingkat kompetisi.

Ada hubungan langsung antara korupsi dan implikasinya bagi perkembangan politik. Korupsi bisa merugikan proses politik yang terbuka dan kompetitif melalui pemilu. Monopoli politik oleh

jaringan kelompok tertentu, meski melalui prosedur yang sah, melalui pemilihan umum (yang penuh rekayasa) biasanya tidak menoleransi gagasan yang berlawanan. Dampaknya, mengabaikan transparansi. Lemahnya transparansi dalam kebijakan akan cenderung mengutamakan kelompok atau warga negara tertentu tanpa ada kontrol. Dalam iklim yang korup, kebebasan untuk memilih, membentuk organisasi-organisasi mandiri dan kompetisi dalam mencari dukungan bisa saja tidak dijamin karena pejabat-pejabat yang korup dan klien-kliennya (F. Lordon, 2008:29). Interaksi politik semacam itu akan membentuk *habitus* yang tidak akan mudah diubah/diperbaiki. Maka perlu Revolusi Mental dengan cara memperbaiki UU Kepartaian.

Untuk memperbaiki Undang-Undang Kepartaian supaya ada kontrol efektif terhadap partai politik harus dimulai dari akuntabilitas wakil rakyat. Dalam hal akuntabilitas, wakil rakyat berhadapan dengan dua pihak: di satu sisi, berhadapan dengan konstituen atau masyarakat yang diwakili; di lain sisi, berhadapan dengan pemerintah yang harus diawasi (K.Strøm, 2003:62).

Pertama, seorang wakil rakyat bisa dikatakan akuntabel bila memiliki hubungan kesalingan dengan masyarakat yang diwakili, artinya (i) dia mampu bertindak demi sekelompok warga negara yang diwakilinya, dan (ii) yang diwakili mempunyai kemampuan untuk memberi sanksi atau imbalan atas kinerjanya. Syarat yang kedua ini menunjukkan bahwa mekanisme akuntabilitas bukan hanya prosedur, tetapi juga mengandaikan penilaian terhadap hasil kinerjanya. Jadi akuntabilitas, menurut K.Strøm, mengandung arti bahwa yang diwakili (rakyat) memiliki dua hak terhadap yang mewakili, yaitu hak untuk meminta informasi dan memberi sanksi. Sanksi bisa dalam bentuk (a) menghalangi, menolak, atau mengoreksi keputusan; (b) mencabut mandat, tidak memilih lagi, membatasi kekuasaannya, atau menuntut pimpinan partai untuk melakukan *recall* terhadapnya; (c) menjatuhkan sanksi tertentu, misalnya, membayar ganti rugi, memprotes melalui demonstrasi, memboikot aktivitasnya, mempublikasikan catatan negatif kinerjanya (Strøm, 2003: 62). Kurang tersedianya informasi yang memadai bagi konstituen atau publik pada umumnya membuat hampir tidak mungkin menerapkan sanksi seperti itu.

Dalam praktik sistem representasi, konstituen atau rakyat yang diwakili tidak memiliki kemampuan yang efektif memberlakukan sanksi-sanksi tersebut. Warga negara belum

terbiasa meminta informasi kepada wakil rakyat tentang apa yang telah dilakukan, apa yang sedang dilakukan, apa proyek politiknya dan bagaimana implementasinya. Bahkan masyarakat sering tidak tahu bahwa menjadi hak mereka meminta wakil rakyat untuk menjelaskan, memberi alasan, menjawab, menjalankan kewajiban, memperhitungkan apa yang dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Wakil rakyat seharusnya memberi informasi tentang apa yang ingin diketahui oleh konstituen. Sebagai perantara rakyat dan pemerintah, wakil rakyat diandaikan membuka akses ke informasi.

Masalahnya ialah bahwa sistem representasi tidak hanya menyangkut hubungan antara yang mewakili dan diwakili. Harus diperhitungkan beberapa faktor lain yang *de facto* lebih menentukan: (i) peran partai politik; (ii) yang diwakili tidak selalu terdiri dari kelompok yang homogen dan belum tentu terorganisir baik. Jadi opininya tidak selalu bisa seragam atau dinilai cukup representatif; (iii) konstituen sering tidak memperoleh informasi yang memadai tentang suatu masalah; (iv) wakil rakyat juga mempunyai kewajiban bekerja untuk kepentingan seluruh bangsa, bukan hanya kepentingan konstituen. Keempat faktor itu memberi peluang wakil rakyat untuk menemukan alasan mengelak dari akuntabilitas dan ingkar janji kampanye. Mekanisme untuk menagih janji tidak tersedia kecuali pemilu, lagi pula daya tawar konstituen rendah.

Dominannya peran partai politik membuat wakil rakyat lebih patuh kepada pimpinan partai daripada konstituen, maka sulit bagi masyarakat untuk percaya komitmen wakil rakyat untuk memperjuangkan kepentingan publik. Maka maraknya demonstrasi di mana-mana karena tersumbatnya aspirasi masyarakat karena kedaulatan mereka disita oleh para pimpinan partai politik. Oleh karena itu peran partai politik diperhitungkan, terutama yang mengatur kewenangan Dewan Pimpinan Pusat partai politik karena mesin partai ini biasanya lebih menentukan kegiatan-kegiatan dan kinerja wakil rakyat. Maka konstituen perlu membangun basis organisasi agar bisa memiliki akses komunikasi dengan DPP partai-partai politik. Tujuannya ialah meningkatkan daya tawar politik agar penerapan sanksi terhadap wakil rakyat bisa lebih efektif.

Pelayanan Publik Menuntut Seleksi Pejabat Publik yang Kompeten

Upaya pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan publik tergantung pada kemampuan memberi pelayanan yang berkualitas, artinya memenuhi standar profesional dan responsif terhadap kebutuhan publik. Dalam konteks ini, Revolusi Mental menuntut kompetensi etis karena norma etika mendorong pejabat/politisi lebih responsif terhadap kebutuhan publik dan membantu dalam pembastinan integritas publik. Integritas publik dipahami sebagai sikap jujur dan sungguh-sungguh untuk melakukan yang benar dan adil dalam setiap situasi sehingga mempertajam keputusan dan tindakannya dalam kerangka pelayanan publik (Fleishman, 1981:53).

a. Integritas Publik dan Tiga Kompetensi Pejabat Publik

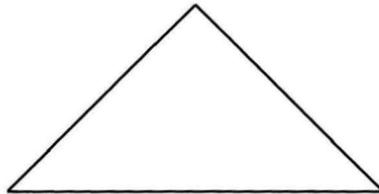
Ada tiga ciri integritas publik: *pertama*, visi, perilaku, dan tindakan sesuai dengan standar etika: jujur dan sepenuh hati menjalankan pelayanan publik; *kedua*, bersikap adil dan responsif terhadap kebutuhan publik; *ketiga*, kompeten untuk menepati kewajiban terhadap tanggung jawab jabatannya demi kepentingan publik karena menghormati hak-hak warga negara. Maka dalam pengelolaan sumberdaya, aset dan kekayaan negara, pejabat yang memiliki integritas selalu mengacu ke tujuan manfaat publik. Dengan demikian integritas publik mencegah pejabat publik dari konflik kepentingan dan korupsi. Untuk tujuan mencapai integritas itu, pejabat publik, menurut J.S. Bowman, dituntut memiliki kompetensi teknis, *leadership*, dan kompetensi etis, terutama penalaran moral, manajemen nilai, dan proses pengambilan keputusan (2010:27).

Segitiga kompetensi

Profesionalisme pelayanan publik

- Pengetahuan yang terspesialisasi
- Pengetahuan hukum
- Manajemen program
- Manajemen Strategis
- Manajemen Sumberdaya

KOMPETENSI TEKNIS



KOMPETENSI ETIKA

- Manajemen nilai
- Kemampuan penalaran moral
- Moralitas pribadi, Moralitas Publik
- Etika organisasional

KOMPETENSI LEADERSHIP

- Penilaian dan penetapan tujuan
- Keterampilan Manajemen *hard/soft*
- Gaya manajemen
- Keterampilan politik dan negosiasi
- Evaluasi

(J.S. Bowman, *Achieving Competencies in Public Services: Professional Edge*, New York: Armonk, 2010:23)

Seharusnya partai politik mensyaratkan kriteria etika dan integritas publik bagi para caleg atau calon pejabat publik. Maka salah satu kriteria penting ialah apa jasa mereka atau perjuangan macam apa yang pernah mereka lakukan untuk kepentingan masyarakat. Tuntutan integritas publik dan keutamaan seperti itu adalah suatu *habitus*. *Habitus* merupakan hasil keterampilan

yang menjadi tindakan praktis (tidak harus selalu disadari) yang kemudian lingkungan sosial tertentu (Bourdieu, 1994: 16-17, 96-126, 138-155, 169-173).

Agar muncul pejabat publik yang berintegritas, justru masyarakat perlu pemberdayaan. Kejujuran, kerja keras, dan kepedulian pemimpin akan kebutuhan masyarakat adalah *habitus*, hasil pengalaman panjang dari interaksi pemimpin dengan rakyatnya. "Sebagai buah dari sejarah, *habitus* menghasilkan praktik-praktik, baik individual maupun kolektif, sesuai dengan skema yang dikandung oleh sejarah. *Habitus* menjamin kehadiran aktif pengalaman-pengalaman masa lalu dalam bentuk skema persepsi, pemikiran dan tindakan, terutama semua aturan formal dan norma tersurat, untuk menjamin kesesuaian praktik-praktik sepanjang waktu (Bourdieu, 1980: 91). Biasa melayani masyarakat dan jujur merupakan hasil pelatihan. *Habitus* seperti itu akan menjadi nilai dan norma yang disebut etos karena sudah menjadi prinsip dan nilai yang dipraktikkan atau bentuk moral yang dibatinkan, meski tidak harus selalu mengemuka dalam kesadaran, namun efektif mengatur perilaku sehari-hari.

Etos semacam itu tidak diperoleh di bangku kuliah, namun diperoleh melalui pengalaman, yang kemudian diorganisir dan direfleksikan. Kepedulian terhadap masyarakat kecil bukan buah dari kunjungan kerja atau mempelajari aspirasi mereka, tetapi dengan terlibat berjuang bersama mereka. *Habitus* merupakan struktur mental yang selalu dalam proses restrukturisasi. Jadi praktik-praktik dan representasi kita tidak sepenuhnya deterministik (pelaku bisa memilih), namun juga tidak sepenuhnya bebas (pilihannya ditentukan oleh *habitus*). Praktik-praktik kehidupan tidak hanya bentuk pelaksanaan norma-norma yang sudah tersurat, namun menerjemahkan makna praktis yang sudah diperoleh melalui *habitus*. Dengan tanpa mencari lagi maknanya atau mengangkat ke kesadaran, *habitus* mengarahkan sesuai dengan posisi yang ditempati pelaku menurut logika arenanya. Maka politik dinasti, caleg atas dasar kriteria finansial dan caleg artis bisa dipermasalahkan dari sudut pandang *habitus* sebagai etos ini.

Dialektika pelaku dan struktur sosialnya ini juga menunjukkan dimensi *habitus* yang menekankan pada arah orientasi sosial dan dimensi afeksi (cita-cita, selera). Dua dimensi *habitus* ini melukiskan adanya disposisi seseorang atau suatu kelas sosial yang menentukan arah orientasi sosial, cita-cita, selera, cara berpikir, dan etos. Apakah

seorang pemimpin mempunyai komitmen pada kesejahteraan rakyatnya, atau hanya kepentingan diri dan kelompoknya sangat ditentukan oleh *habitus* sebagai orientasi sosial ini. Perlu disadari sistem disposisi manusia tidak mudah diubah meski ada tuntutan situasi. Unsur *inertia* juga mewarnainya. "... *habitus* cenderung melindungi diri terhadap krisis dan dari yang mempertanyakan secara kritis dengan menjamin diri dalam lingkungan yang sedapat mungkin sudah disesuaikan, artinya dunia yang cukup stabil yang akan semakin memperteguh disposisi-disposisinya" (Bourdieu, 1980: 102). Dimensi yang menekankan arah orientasi sosial ini bisa menjadi petunjuk bahwa pemimpin yang tertutup terhadap kritik sulit berubah. *Inertia* sering menjangkiti pemimpin yang terlalu percaya diri, dan lebih berbahaya lagi kalau dikelilingi pembantu/ penasihat yang suka menjilat.

Sebetulnya teori *habitus* ini mencoba mengatasi dualisme kebebasan dan determinisme: "Sebagai sistem skema pendorong yang diperoleh, *habitus* memungkinkan kreativitas pemikiran, seluruh persepsi dan tindakan yang terpatneri dalam pembatasan yang melekat pada kondisi khas produksinya. (...). Sebagai kemampuan pendorong yang tak terbatas namun juga dibatasi, *habitus* mencoba mengatasi determinisme dan kebebasan, pengkondisian dan kreativitas, kesadaran dan ketaksadaran atau individu dan masyarakat" (Bourdieu, 1980: 92). Perubahan *habitus* yang mendorong kreativitas butuh topangan fasilitas, misalnya, untuk mengubah kebiasaan tidak mau antre perlu difasilitasi dengan menyediakan kartu nomor urut berdasarkan waktu kehadiran. Dengan fasilitas nomor urut itu ada jaminan bahwa yang datang lebih dulu mendapat pelayanan yang pertama. Jadi untuk mendobrak *inertia* atau determinisme diperlukan tiga sarana, yaitu fasilitas, perubahan aturan main, atau sistem baru.

Ketiga faktor pendukung perubahan itu memperhitungkan konsep *habitus* yang tidak menerima pemisahan ketat antara pelaku sosial dari struktur-struktur yang melingkupinya. Konsep *habitus* memungkinkan dibangunnya teori produksi sosial pelaku dan logika tindakan. Maka Revolusi Mental hanya mungkin dibahas dalam kerangka perubahan *habitus*. Hubungan *habitus*, kapital dan arena mampu menjelaskan kondisi yang mengarahkan keberlangsungan atau perubahan struktur-struktur dan dengan demikian menjadi syarat reproduksi sistem-sistem sosial yang baru. Ketiga konsep itu (*habitus*, kapital, dan arena) merupakan faktor penjelasan logika

berfungsinya masyarakat, dasar bagi strategi kekuasaan, dan internalisasi nilai-nilai etika publik.

Konsep *habitus* menjelaskan dasar kepribadian pemimpin dan proses perolehan *habitus* pemimpin yang memiliki integritas publik. Konsep *habitus* tidak bisa dipisahkan dari konsep arena. Dua konsep itu memiliki hubungan mendasar karena saling mengandaikan, hubungan dua arah antara struktur-struktur objektif (struktur-struktur bidang sosial) dan struktur-struktur yang telah terintegrasi pada perilaku (struktur-struktur *habitus*) (Bourdieu, 1994: 9).

Kalau kualitas pemimpin yang memiliki integritas publik atau akuntabel itu merupakan hasil *habitus* berarti integritas semacam itu tumbuh dari pendidikan keluarga, berkembang di sekolah, lingkungan masyarakat dan teruji dalam kehidupan profesional, terutama keterlibatannya di berbagai organisasi. Jadi integritas publik adalah hasil pendidikan, pelatihan, dan pembiasaan tindakan yang diarahkan ke nilai-nilai etika publik. Pembentukan etos atau *habitus* moral terkait dengan lingkungan atau struktur sosial yang membentuknya. Mungkin benar pepatah yang mengatakan pemimpin merupakan buah yang dipetik dari masyarakatnya. *Habitus* adalah sistem disposisi yang dapat ditularkan dengan berperan sebagai prinsip pembangkit dan pengorganisir praktik-praktik dan representasi, tanpa harus secara sadar membidik tujuan dan menguasai sarana yang diperlukan untuk mencapainya; *habitus* ini tertata tanpa harus melalui kepatuhan pada aturan atau diarahkan secara kolektif, tanpa harus menjadi hasil tindakan yang diorganisir pemimpin. Pengkondisian yang dikaitkan dengan suatu kelas khusus ini menghasilkan *habitus* (Bourdieu 1980: 88-89).

Disposisi atau *habitus* itu berfungsi sebagai prinsip tindakan, persepsi, dan refleksi. Jadi disposisi yang sudah diperoleh akan mengkondisikan perolehan lebih jauh disposisi-disposisi baru. Maka seorang pemimpin yang dibesarkan dalam organisasi yang peduli akan kebutuhan masyarakat dan kesejahteraan bersama dimungkinkan memiliki integritas publik karena keterlibatannya merupakan proses pembatinaan nilai-nilai etika publik. Integritas dan kepedulian terhadap kesejahteraan bersama itu tidak hanya menjadi kesalehan pribadi, namun dilembagakan ke dalam sistem akuntabilitas dan transparansi (budaya etika). Maka Revolusi Mental mengandaikan upaya integrasi budaya etika itu ke dalam organisasi pelayanan publik.

b. Seleksi Pejabat Publik dan Akuntabilitasnya

Kapital sosial dalam bentuk jaringan atau asosiasi-asosiasi, menurut Putnam, menjadi prasyarat sosial untuk tercapainya demokrasi yang efektif. Cara mengukurnya dengan membandingkan tingkat dan kualitas partisipasi dalam kehidupan asosiasi. Kualitas partisipasi ditentukan oleh sejauh mana asosiasi-asosiasi mandiri terhadap negara. Aspek kerja sama untuk mengejar kepentingan bersama juga sangat menentukan, maka relevan pertanyaan apakah asosiasi itu didirikan untuk kepentingan pribadi anggota-anggotanya atau kepentingan umum.

Demokrasi yang efektif, yang ditandai dengan partisipasi yang luas, mengandaikan dukungan asosiasi-asosiasi yang mengejar kepentingan publik itu. Maka perkembangan pasar juga ikut ditentukan oleh partisipasi yang terbuka dan kompetitif, tapi terstruktur dalam institusi-institusi politik dan ekonomi yang adil. Lalu mencegah terjadinya monopoli atau persaingan yang tidak seimbang, sehingga tumbuh berkembang asosiasi-asosiasi yang mengejar kepentingan bersama. Asosiasi-asosiasi yang mengejar kepentingan bersama bisa menjadi institusi yang legitim dan efektif melindungi serta mengendalikan kegiatan-kegiatan di arena ekonomi tersebut sambil mempertahankan batas-batas dan pintu akses ke pasar.

Pemimpin yang memiliki integritas publik adalah mereka yang berjuang dan berkembang bersama asosiasi-asosiasi seperti itu. Kepekaan dan kepedulian mereka terhadap kepentingan publik menumbuhkan tanggung jawab sehingga tidak mudah jatuh ke korupsi dan konflik kepentingan. Pemimpin semacam itu berusaha memberdayakan masyarakat supaya mampu mengungkapkan pilihan-pilihan mereka secara bebas dan diperhitungkan secara *fair* oleh para pengambil keputusan. Maka penting aspek kritis demokrasi terungkap, artinya mampu memberi imbalan kepada pemerintah yang efektif dan menjatuhkan pemerintah yang tak kompeten atau yang menyalahgunakan kekuasaan.

Masyarakat yang memiliki alternatif riil dalam hal politik dan ekonomi tidak mudah dieksploitasi dan tidak tergantung pada penguasa atau kelompok-kelompok kepentingan. Sedangkan, masalah pembusukan dalam politik biasanya terjadi karena rasa tidak aman, tidak yakin akan memegang terus kekuasaan, sehingga mendorong politisi memperkaya diri secepat dan sebanyak mungkin

dan pengusaha membeli perlindungan pejabat, sambil menekankan kembalian jangka pendek sebanyak mungkin. Bahaya seperti ini dapat dicegah bila kualitas institusi-institusi menjamin sikap *fair*, sehingga penting adanya peran kapital sosial.

Kualitas institusi-institusi dan kehidupan demokrasi merupakan kekuatan kapital sosial yang mampu mengondisikan pertumbuhan ekonomi. Jadi kepercayaan, asosiasi, demokrasi, perumusan hak-hak kepemilikan pribadi, sistem hukum dan administrasi yang efektif pertama-tama berasal dari kapital sosial bukan ekonomi. Semua dimensi sosial, organisasi, institusi, kelompok-kelompok (keluarga, asosiasi, atau ketetanggaan). Kapital sosial merupakan jaringan hubungan sebagai sumber daya untuk penentuan kedudukan sosial (Bourdieu, 1994: 33, 196-197). Kapital sosial dipahami sebagai semua dimensi eksistensi sosial, semua bentuk organisasi, institusi, dan kelompok. Maka menjadi penting bagi pemimpin untuk investasi kapital sosial dengan terlibat sejak dini dalam asosiasi-asosiasi yang mengejar kepentingan bersama dan belajar peka terhadap kepentingan masyarakat dengan terlibat dalam kerja sukarela.

Dengan keterlibatan semacam itu kohesi sosial dibangun. Mengapa? karena keterlibatan mengintensifkan hubungan sosial. Dengan demikian akan tumbuh rasa hutang budi, kewajiban, dan keterikatan kepada komunitas. Ketiga hal ini bukannya tidak mungkin mendorong tumbuhnya solidaritas dan kepedulian terhadap kesejahteraan bersama. Maka sebagai bentuk investasi kapital sosial, perlu sejak dini orang dilibatkan di dalam kerja sukarela untuk membantu mereka yang lemah, serta terlibat dalam asosiasi yang mengejar kepentingan bersama. Revolusi Mental mengandaikan seriusnya menangani pendidikan karakter bagi warga negara.

Pendidikan karakter dan kewarganegaraan perlu mengambil bentuk kerja sosial sukarela atau pengabdian masyarakat. Di kalangan mahasiswa maupun pelajar SMU, model kerja sukarela itu perlu diorganisir dan diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan karakter. Bentuk-bentuk kerja relawan bisa beragam tergantung tujuannya: untuk kepentingan umum (bangunan publik, taman publik, lapangan, sekolah, hutan); demi pendidikan pluralitas (aktivitas lintas agama, rumah ibadat, kegiatan dialog, membantu kegiatan agama lain); untuk solidaritas dan peduli lingkungan: bekerja untuk orang miskin, rumah jompo, bencana alam, keanggotaan dalam kegiatan pramuka, olahraga, organisasi-organisasi kemasyarakatan. Kalau perlu kerja relawan dimasukkan

sebagai syarat untuk bisa masuk ke jenjang pendidikan lebih tinggi.

Perguruan tinggi perlu mendorong keterlibatan sukarela dari mahasiswa untuk ikut menunjang program pembangunan budaya etika dan pemberantasan korupsi ini. Sebagai insentif, keterlibatan aktif itu memperoleh kredit SKS. Sebagai bagian dari pendidikan kewarganegaraan, praktik keterlibatan semacam itu sebaiknya bukan hanya berhenti untuk program pemberantasan korupsi, tetapi juga bentuk kerja relawan di bidang pengabdian masyarakat lainnya.

Untuk kaum profesional atau yang sudah aktif bekerja, selain partisipasi dalam asosiasi-asosiasi yang mengejar kepentingan bersama, perlu pembiasaan pada keterlibatan pribadi untuk kepentingan publik dalam bentuk praktik *Pro bono* (lengkapnya *Pro bono publico* artinya untuk kepentingan publik). *Pro bono* maksudnya ialah kerja sukarela kaum profesional yang tidak dibayar sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Bedanya dengan relawan biasa ialah *Pro bono* mengandalkan pada keahlian/profesi untuk memberi pelayanan cuma-cuma bagi mereka yang tidak bisa membayar, terutama sebagai bentuk pengabdian masyarakat (*Wikipedia, The Free Encyclopedia, Internet*).

Mungkin salah satu caranya ialah dengan mulai memberlakukan jumlah jam bekerja *Pro bono* per bulan bagi profesional. Jumlah jam kerja ini dipakai sebagai salah satu syarat bagi seseorang untuk bisa menduduki jabatan, calon legislatif atau jabatan-jabatan struktural lainnya baik di pemerintahan maupun swasta. Kriteria *Pro bono* ini berfungsi mengingatkan bahwa jabatan publik dan profesi mengandung nilai etis atau kewajiban moral, yaitu sebagai panggilan untuk pengabdian masyarakat. Dengan kata lain, kriterium *Pro bono* ini mau menuntut calon legislatif atau pejabat publik untuk menunjukkan apa jasa yang telah disumbangkan kepada masyarakat sehingga berani mencalonkan diri.

Untuk mengasah kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat dan melatih meningkatkan akuntabilitas, dengan meniru gagasan Samuel Paul, perlu terlibat dalam membuat program *Kartu Pelaporan oleh Warga Negara (Citizen Report Card)* sebagai alat umpan balik terhadap pejabat publik (Sampford, 2006: 235). KPW itu berisi laporan akses ke pelayanan publik, kualitasnya, bisa dipercaya/tidaknya, masalah yang dihadapi konsumen, responsif/tidaknya pelayan publik. Dari kartu pelaporan itu akan tersingkap standar kualitas pelayanan publik, norma-normanya, biaya yang harus

dibayar, termasuk ongkos yang disembunyikan seperti suap (*Improving Local Governance and Pro-Poor Service Delivery, Citizen Report Card Learning Toolkit*, Internet).

Tujuan pembuatan *Kartu Pelaporan oleh Warga Negara* adalah untuk memperoleh beberapa masukan: (i) penilaian tentang akses, kelengkapan dan kualitas pelayanan publik sejauh dialami atau dirasakan oleh masyarakat serta membandingkan dengan pelayanan-pelayanan publik yang lain sehingga bisa dibuat *rating*; (ii) ukuran kepuasan warga negara dengan memberi prioritas pada perbaikan. Dalam kartu tersebut secara sederhana dan jelas ditunjukkan tingkat kepuasan atau ketidakpuasan; (iii) indikator lingkup masalah di dalam pelaksanaan pelayanan publik, misal memberi penjelasan segi khusus interaksi antara warga negara dan petugas pelayanan publik (ketidakpuasan akibat pasokan air atau listrik, ketersediaan obat di rumah sakit, pelayanan kepolisian), kesulitan-kesulitan yang dihadapi (nota lebih tinggi, dipersulit dalam urusan); (iv) memberi prakiraan adanya korupsi dan ongkos lain yang mungkin disembunyikan; (v) membantu warga negara mengeksplorasi kemungkinan memperbaiki pelayanan publik karena KPW juga untuk menjajaki berbagai pilihan yang diharapkan masyarakat dalam mengatasi beragam masalah. Lalu akan diketahui apakah masyarakat bersedia membayar lebih mahal pelayanan yang lebih baik (Sampford, 2006: 236).

Dari sisi pendidikan politik dan pemberdayaan, KPW itu membuka tiga kesempatan, yaitu (i) membantu pelayanan publik, memfasilitasi diskusi tentang kinerjanya; (ii) memberdayakan warga negara dengan melakukan pengawasan dan monitor terhadap badan pemerintah atau pemerintah daerah; (iii) investasi kapital sosial karena KPW mempertemukan berbagai komunitas melalui masalah-masalah yang dihadapi dan menjadi keprihatinan bersama (*Improving Local Governance and Pro-Poor Service Delivery, Citizen Report Card Learning Toolkit*, Internet).

Bentuk partisipasi masyarakat dalam mendorong akuntabilitas pejabat publik ini multiguna dan menjadi pola pendidikan politik yang efektif. Melalui *Kartu Pelaporan Warga Negara* tersebut ada masukan tentang tingkat kepuasan pelayanan publik di berbagai sektor dan sekaligus bisa digunakan sebagai alat untuk mendeteksi atau mengukur tingkat korupsi. KPW itu juga berfungsi sebagai alat diagnostik bagi pejabat publik, konsultan, peneliti sebagai bahan untuk analisis dan mencari pemecahan masalah. Praktik

KPW ini membiasakan warga negara untuk mengambil sikap dan menuntut hak-haknya dengan meminta akuntabilitas, akses dan respon dari pejabat publik. Sebaliknya, bagi pejabat publik adanya KPW mendorong untuk lebih terbuka, menentukan standar kinerja dan meningkatkan transparansi (Sampford, 2006: 235). Jadi pemberdayaan *civil society* menemukan bentuk konkretnya di dalam praktik KPW.

Proses akuntabilitas wakil rakyat sebaiknya tidak hanya diukur setelah pelaksanaan tugas selesai. Cara terbaik untuk menjamin akuntabilitas harus mulai jauh sebelum pelaksanaan suatu mandat, artinya harus mulai dari saat rekrutmen. Antisipasi dalam akuntabilitas berarti partai politik harus mulai dengan rekrutmen yang ketat. Cara ini berarti peduli pada bentuk pengawasan dari dalam diri pelaku. Akuntabilitas tidak bisa dilepaskan dari kemampuan partai menyeleksi calon anggota legislatif yang berkualitas, melatih dan mendampingi.

Bertitik-tolak dari gagasan Arthur Lupia tentang empat sarana untuk membantu menjamin akuntabilitas (2003: 45-51), penulis mencoba menerapkannya untuk menganalisis proses akuntabilitas dalam perekrutan calon legislatif dengan mempertimbangkan hubungan antara wakil rakyat dan konstituen. Proses ini memperhitungkan mekanisme sebelum mandat diberikan dan selama pelaksanaan tugas.

Dengan desain kontrak, sarana ini merupakan persetujuan antara calon wakil rakyat dan konstituen dengan dimonitor oleh panitia seleksi partai untuk menentukan target tugas dalam jangka waktu tertentu yang harus dipenuhi. Misalnya, setelah masa bakti dua tahun tidak berhasil memperjuangkan upaya perbaikan fasilitas pendidikan atau penciptaan lapangan kerja di daerah mereka, mandat akan dilihat kembali. Memang, persetujuan semacam itu belum mempunyai kekuatan hukum, tetapi bisa menjadi mekanisme kontrol untuk mengukur akuntabilitas wakil rakyat. Perlu dalam desain kontrak itu ada klausul mau berbagi risiko, misalnya, kalau kegagalan disebabkan oleh tekanan dari partai politiknya atau faktor di luar kemampuannya, maka konstituen akan tetap mendukung atau melakukan upaya yang bisa menguntungkan wakil rakyat. Berbagi risiko semacam itu, selain perhitungan realisme juga memberi insentif wakil rakyat.

Melalui mekanisme penyaringan dan seleksi, mekanisme

penyaringan berjalan asal ada kompetisi dari beberapa kandidat. Ada tiga kemungkinan dalam proses penyaringan ini: *pertama*, konstituen mengorganisir diri untuk bisa memberi informasi ke partai politik tentang catatan calon wakil rakyat. Masukan ke partai politik akan mengantungkan pengurus partai dalam upaya untuk meningkatkan bobot caleg dan kemungkinan terpilihnya; *kedua*, kompetisi tidak berhasil karena informasi yang tidak cukup tentang kandidat yang sudah tersaring, bahkan meski sudah mencari informasi dari pihak ketiga. Kandidat bisa saja terlalu percaya diri akan kemampuannya atau tidak begitu yakin akan kemampuannya sehingga menyesatkan; *ketiga*, seleksi kurang informasi atau ada unsur manipulasi sehingga mereka yang memenuhi tuntutan kompetensi justru tidak terpilih, sedangkan yang tidak kompeten justru terpilih karena koneksi. Kalau dalam seleksi syarat-syarat terpenuhi, calon wakil rakyat bisa diandalkan, maka salah satu unsur utama akuntabilitas sudah dipenuhi, yaitu integritas publik wakil rakyat.

Melalui monitor dan pelaporan, partai politik akan meningkatkan kepercayaan rakyat bila memiliki komisi etika yang akan memberi pelatihan etika publik, memberi arahan tertulis tentang dimensi etika di dalam kebijakan publik, membantu menjamin akuntabilitas dan mengawasi anggota partai yang akan menjadi wakil rakyat. Selain itu, pengawasan dari pihak independen di luar organisasi, *civil society*, *parliament watch* dan pelaporan secara terbuka atau konfidensial akan membantu memberi informasi tentang apakah yang dilakukan wakil rakyat berhasil atau gagal. Bisa dipantau juga mengapa terjebak dalam konflik kepentingan atau pelanggaran kode etik dan aturan lainnya. Mekanisme pengawasan akan efektif bila memperhitungkan dan memberi perlindungan hukum kepada *whistle-blowers*.

Melalui pengecekan secara institusional, Komisi Etik, Komisi Kerja, DPP partainya merupakan lembaga-lembaga yang berperan untuk menuntut akuntabilitas wakil rakyat. Agar akuntabilitas institusional ini efektif, perlu membangun mekanisme untuk menampung masukan, keluhan, atau laporan dari organisasi independen, atau *civil society*. Dalam pengawasan ini, media berperan sangat menentukan karena bisa menjadi sekaligus pengawas, penyambung lidah *whistle-blower*, dan pemberi sanksi (memberitakan pelanggaran, konflik kepentingan atau korupsi berarti menyebarkan reputasi buruk). Melalui jurnalisme investigatifnya yang profesional media sering bisa mengungkap pelanggaran secara tajam.

Sebagai bentuk tanggung jawab setelah seleksi, partai politik harus memfasilitasi agar wakil rakyat semakin memperhatikan kepentingan konstituennya. Jangan justru menekan wakil rakyat untuk memprioritaskan kepatuhan pada partai. Sering loyalitas wakil rakyat terombang-ambing oleh konflik kepentingan antara partai dan pelayanan publik. Etika politik mengingatkan agar dalam mengambil keputusan, wakil rakyat memberi prioritas kepada pelayanan publik. Warga negara tidak cukup hanya mengeluh/mengkritik wakil mereka. Perlu bahwa warga negara mengorganisir diri agar suaranya didengarkan sehingga meningkatkan daya tawar politiknya.

Politik Inklusif: Orientasi Politik Kewarganegaraan Mengganti Politik Partisan

Prinsip tindakan yang menggerakkan manusia demokrasi adalah kepentingan individu warga negara, dalam arti cara bertindak rasional dan damai yang tidak terseret oleh massa. Jadi orientasi politik kewarganegaraan mempunyai asumsi bahwa setiap warga negara jangan sampai menderita pengaruh dari pihak lain dan tidak menginginkan pihak lain menderita karena pengaruhnya demi prinsip kesetaraan (P. Manent, 1993: 82). Maka demokrasi seharusnya lebih berorientasi pada politik kewarganegaraan daripada politik partisan. Politik partisan cenderung memperlakukan warga negara secara tidak setara sehingga menjadi sumber diskriminasi. Kondisi sosial demokrasi memperlakukan warga negara di depan hukum bukan atas dasar kepemilikan pada suatu kelompok, tetapi karena dia warga negara seperti yang lain.

Demokrasi yang efektif tergantung pada partisipasi yang terbuka dan kompetitif. Kualitas partisipasi terstruktur dalam politik dan ekonomi di mana institusi-institusi yang sah dan efektif melindungi serta mengendalikan kegiatan-kegiatan di arena tersebut dengan melalui penentuan batas-batas dan pintu aksesnya (F. Lordon, 2008:7). Maka perbaikan sektor publik sebaiknya bukan hanya menekankan tujuan *good governance*, tetapi juga harus membidik pendasaran secara esensial institusi-institusi politik dan ekonomi.

Isu-isu yang diusung dalam pemilu jarang mengacu ke perbaikan institusi-institusi politik dan ekonomi ini. Maka yang dibutuhkan ialah demokratisasi yang mendalam, bukan hanya pemilihan umum, tetapi perdebatan yang serius tentang masalah-masalah riil

rakyat. Demokratisasi ini mengandaikan adanya kelompok yang mampu mengusung masalah-masalah itu dan menjanjikan untuk menyelesaikan secara politik tanpa mengabaikan kepentingan kelompok tersebut. Maka hubungan antara partisipasi dan penguatan institusi politik dan ekonomi menjadi isu yang menentukan karena pertaruhannya ialah masalah keadilan. Seperti diingatkan oleh Rawls (1971) bahwa masalah keadilan terkait erat dengan struktur dasar masyarakat, dalam arti bahwa *pertama*, dalam struktur masyarakat sudah terkandung berbagai posisi sosial. Posisi dan harapan masa depan ditentukan sebagian oleh sistem politik, kondisi ekonomi, dan sosial; *kedua*, lembaga-lembaga sosial mendefinisikan hak dan kewajiban sehingga memengaruhi masa depan, cita-cita, dan kemungkinan tercapainya cita-cita tersebut. Jadi lembaga-lembaga itu sudah merupakan sumber kepincangan dan titik awal keberuntungan bagi yang satu dan kemalangan bagi yang lain. Maka menciptakan institusi-institusi yang adil tidak bisa dilepaskan dari upaya mengefektifkan demokrasi.

Orientasi politik kewarganegaraan sejalan dengan konsep bangsa yang mewadahi keberagaman. Konsep *bangsa*, menurut E. Gellner, mengandaikan, *pertama*, adanya acuan ke "budaya yang sama", dalam arti suatu sistem gagasan, tanda, dan cara bertindak dan berkomunikasi. Tuntutan ini tidak mungkin dipenuhi kalau penafsirannya hanya menjadi alat legitimasi dan hanya dikuasai oleh kalangan elite terbatas. Budaya yang menjadi dasar kekuasaan tidak bisa hanya milik kelompok tertentu saja. Dalam hal ini, multikulturalisme menjadi relevan karena memberi pembatasan terhadap pengertian dasar acuan yang bisa diterima semua kelompok etnis, agama, atau minoritas; *kedua*, *bangsa* merupakan bangunan keyakinan, loyalitas dan solidaritas anggota-anggotanya. Dalam konteks ini, multikulturalisme dimaksudkan mendorong tumbuhnya identitas, solidaritas, dan kohesi sebagai bangsa; *ketiga*, *bangsa* terbentuk bila anggota-anggota masyarakat saling mengakui hak dan kewajiban masing-masing karena status sama (Gellner, 1983:7). Jadi bangsa menuntut bentuk organisasi sosial yang didasarkan pada budaya inklusif sehingga setiap komunitas bisa mengenali diri sebagai bagiannya.

Revolusi Mental memiliki dua implikasi: *pertama*, partai politik semakin dituntut profesional dalam manajemen organisasi, termasuk dalam penunjukan calon legislatif; *kedua*, menghadapi primordialisme kedaerahan dan agama, pemerintah pusat harus mempunyai politik

budaya. Mengapa? Karena nilai strategis budaya sebagai penyebar standar simbolis dan komunikatif serta politik budaya berperan mendasari identitas bangsa. Selain itu, politik budaya berdampak positif pada ekonomi dan sosial karena mengembangkan kreativitas. Politik budaya ini harus mendasarkan pada Pancasila. Dan nilai Pancasila harus bisa menjadi norma tindakan praktis.

Agar nilai-nilai Pancasila yang masih berupa konsep abstrak bisa menjadi norma konkret perlu penyederhanaan karena Pancasila juga merupakan etika politik. Etika adalah ilmu praktis, artinya harus berperan dalam mengarahkan tindakan bersama. Maka Pancasila harus bisa dijabarkan menjadi norma-norma bertindak yang praktis dan jelas. Prinsipnya, suatu gagasan bisa mendorong tindakan kolektif bila mampu membentuk opini. Untuk bisa menjadi opini, *rigoritas* gagasan harus rela melemah sehingga menjadi lebih sederhana dan mudah ditangkap oleh kebanyakan orang. Maka model-model tindakan atau teladan besar perannya untuk memudahkan pemahaman karena ternyata bisa dipraktikkan dan meyakinkan. Jadi supaya mempunyai efektivitas sosial, sistem pemikiran harus berubah menjadi sistem keyakinan. Bila sudah menjadi keyakinan, untuk berubah menjadi tindakan kolektif, tinggal satu langkah lagi. Dalam mekanisme ideologi, proses penyederhanaan ini disebut *skematisasi* (Ricoeur, 1986), yaitu ketika konsep, berkat penyederhanaan, bisa bergema, mendorong dan memotivasi tindakan.

Sila ketiga Pancasila (“Persatuan Indonesia”) sangat relevan untuk menghadapi masalah diskriminasi dan konflik antar-agama/suku. Rumusan masalah ini menentukan dimensi-dimensi “Persatuan Indonesia” mana yang relevan, yaitu, *pertama*, budaya inklusif; *kedua*, bangsa sebagai bangunan keyakinan, loyalitas dan solidaritas; *ketiga*, status semua warga negara sama di depan hukum, artinya ada pengakuan hak dan kewajiban yang sama. Dari dimensi-dimensinya ini, ditentukan indikator-indikator untuk mengukurnya (lihat skema di bawah ini).

KONSEP	Sila Ketiga Pancasila Persatuan Indonesia	Menghadapi diskriminasi dan konflik antar-agama atau suku	
DIMENSI	Budaya Inklusif	Bangsa: bangunan keyakinan, loyalitas dan solidaritas	Status sama di depan hukum: pengakuan hak dan kewajiban yang sama
INDIKATOR	<ul style="list-style-type: none"> - Toleran terhadap yang beragama/suku berbeda dengan jaminan hukum - Sikap/perlakuan terhadap kelompok minoritas - Menjamin representasi, partisipasi dan orientasi politik kewarganegaraan - Ruang publik terbuka untuk semua - Akses setara ke media - Menjamin penerapan kebijakan multikultural - Pengakuan/hormat terhadap identitas masing-masing komunitas - Peduli terhadap yang miskin, terpinggirkan, dan korban bencana atau musibah - Distribusi kekayaan dengan tekanan solidaritas terhadap saudara sebangsa yang berpendapatan lebih rendah - Mampu menepati perjanjian - Menjamin kohesi sosial untuk solidaritas dan belarasa - Komitmen untuk mencegah, tidak melupakan/mengulangi ketidakadilan/kekerasan - Kemampuan minta maaf dan mengampuni antar-warga negara & suku/agama - Menjamin tidak ada diskriminasi agama, etnis, gender untuk akses ke pekerjaan dan jabatan publik - Semua mempunyai hak dan kesempatan sama dalam pendidikan dan pekerjaan - Semua bentuk diskriminasi terselubung mendapat sanksi hukum yang tegas - Tiada pembatasan akses ke sumber daya budaya, ekonomi, dan politik - Menjamin upaya serius untuk mencegah segregasi sosial atas nama agama/suku 		

(Cara penjabaran ini menerapkan R. Quivy et L. Van Campenhoudt, *Méthodes en sciences sociales*, 1995: 111)

Pertama, model penjabaran Pancasila itu menghindari penafsiran sewenang-wenang oleh penguasa atau kelompok dominan. *Kedua*, ketiga langkah proses penjabaran Pancasila di atas memungkinkan pemahaman bersama berkat pendasaran pada argumentasi untuk menyetujui isi proposisi. Persetujuan ini mengantar ke pelaksanaan norma-norma hidup bersama karena tahu apa yang harus dilakukan berkat indikator-indikatornya. Hasrat untuk persetujuan merupakan dasar moralitas politik (Weale, 2013:10). Dengan demikian, warga negara bisa mudah memahami apa yang harus dilakukan dan sekaligus bisa menuntut akuntabilitas pejabat publik karena dari indikator-indikator itu jelas apa yang harus dipertanggungjawabkan, dikontrol, dan dikoreksi.

*Selain ada beberapa bagian baru, sebagian besar makalah ini disadur dari buku penulis yang berjudul *Etika Publik: untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi*, Gramedia (2011, 2013).

Daftar Pustaka

- Boisvert, Y., *Crise de confiance et crise de légitimité: de l'éthique gouvernementale à l'éthique publique*, dans: *Revue internationale d'éthique sociétale et gouvernementale*, vol. 4, no 1, Printemps 2002, 19-31.
- Boudon, R., 1979. *La logique du social*. Paris: Hachette
- Bourdieu, P., 1980. *Le sens pratique*. Paris: Minuit
- , 1994. *Raisons pratiques*. Sur la théorie de l'action. Paris: Seuil
- Bowman, J. S., 2010. *Achieving Competencies in Public Services. The Professional Edge*, Second Edition, Armonk N.Y.: M.E.Sharpe
- Crozier, M. dan Friedberg, E., 1977. *L'acteur et le système*, Paris: Seuil
- Dobel, P. J., 1999. *Public Integrity*, Baltimore: Johns Hopkins University press
- Fleishman, J. L., 1981. *Public Duties: The Moral Obligation of Government Officials*, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
- Giddens, A., 1984. *The Constitution of Society*, Cambridge: Polity Press

- , 1993. *New Rules of Sociological Method*, Cambridge: Polity Press
- Haryatmoko, 2011. *Etika Publik: untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi*, Jakarta: Gramedia
- Head, B. W., 2008. *Promoting Integrity: Evaluating and Improving Public Institution*, Burlington: Ashgate
- Jabbara, J. G., and Dwivedi, O.P., 1988. *Public Service Accountability*, West Hartford Connecticut: Kumarian Press
- Johnson, T. J., 1998. *Engaging The Public. How Government and the Media Can Reinvigorate Democracy*, Lanham: Rowman and Littlefield
- Johnston, M., 2005. *Syndromes of Corruption. Wealth, Power and Democracy*, New York: Cambridge University Press
- Johnston, M. (ed.), 2005. *Civil Society and Corruption. Mobilizing for Reform*, Lanham: University Press of America
- Lordon, F., 2008. *Conflits et pouvoir dans les institutions du capitalisme*, Paris: Presses de La Fondation Nationales des Sciences Politiques.
- Lupia, A., dalam: Strøm, Kaare (ed.), 2003. *Delegation and Accountability in Parliamentary Democracies*, Oxford: Oxford University Press, hlm. 45-51
- Manent, P., 1993. *Tocqueville et la nature de la démocratie*, Paris: Gallimard
- Mezey, M. L., 2008. *Representative Democracy. Legislators and Their Constituents*, Lanham: Rowman and Littlefield
- OECD, 2009. *OECD Principles for Integrity in Public Procurement*, Paris: OECD Publishing
- Putnam, R. D., "Bowling alone: le déclin du capital social aux Etats Unis", dalam: Bevort (éd.), *Le capital social, série RECHERCHE*, Paris: Découverte, 2006.
- Ricoeur, P., 1986. *Du texte à l'action. Essais d'herméneutique II*, Paris: Esprit-Seuil.
- Quivy R. et L. Van Campenhoudt, 1995. *Méthodes en sciences sociales*, Paris: Dunod

- Sampford, Charles (ed.), 2006. *Measuring Corruption*, Burlington: Ashgate
- Sutor, B., 1991. *Politische Ethik*, Paderborn: Ferdinand Schöningh
- Touraine, A., 1984. *Le retour de l'acteur*, Paris: Fayard
- Weale, A., 2013. *Democratic Justice and the Sosial Contract*, Oxford: Oxford University Press
- Zarka, Y.Ch., 2010. *Repenser la Démocratie*, Paris: Armand Collin

SISTEM HUKUM SEBAGAI KONTROL SOSIAL

**Identifikasi dan Proyeksi Pemecahan
Masalah Mentalitas
dalam Perspektif Hukum**

Saldi Isra

Pendahuluan

Keberadaan hukum mungkin sama usianya dengan peradaban manusia, bahkan mungkin lebih tua. Sebab, hukum bukan saja sesuatu yang khas untuk manusia, melainkan juga makhluk-makhluk selain manusia. Sebagaimana dikemukakan Ulpianus: *jus istud non humani generis proprium est, sed omnium animalium, quae in caelo, quae in terra, quae in mari nascuntur* (hukum bukanlah sesuatu yang khas spesies manusia, melainkan ia untuk semua makhluk hidup yang terlahir di langit, di bumi atau di laut).¹ Dengan demikian, hukum akan selalu ada dan akan menjadi sesuatu yang selalu menyertai maju mundurnya peradaban manusia. Dalam ihwal ini, Sudikno Mertokusumo mengatakan, hukum itu hidup dalam kesadaran manusia.²

Dengan demikian, tidak keliru apa yang pernah dikatakan Marcus Tullius Cicero (106-42 SM), *ubi societas ibi ius* atau *where there is a society, there is law*, di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Secara sederhana dapat dikatakan, hukum tidak akan pernah mengambil jarak dengan manusia, atau sebaliknya. Sebab, hukum itu inheren dengan manusia. Para pakar hukum dan filosof boleh berbeda pendapat tentang definisi, fungsi, proses terbentuk dan tujuan hukum, namun semua mereka sepakat bahwa hukum itu ada bersamaan dengan keberadaan manusia.

Apalagi jika sudah bicara tentang manusia dalam sebuah komunitas organisasi kekuasaan seperti negara, tentunya hukum akan menjadi materi perbincangan yang teramat penting. Sebab, hukum sebagaimana dikemukakan Donald Black adalah kontrol sosial dari pemerintah. Ia mengartikan kontrol sosial sebagai aturan atau proses sosial yang mencoba mendorong perilaku yang baik dan berguna atau mencegah perilaku buruk.³ Lebih jauh Black menjelaskan, semua hukum adalah kontrol sosial, namun tidak semua kontrol sosial adalah hukum, sebab masih ada lagi kontrol sosial lainnya selain hukum.⁴ Dengan demikian, hukum hanyalah menjadi salah satu dari sekian banyak alat kontrol sosial.

-
- 1 Carl Joachim Friedrich (2008), *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nusa Media Nuansa, Bandung, hlm. 35.
 - 2 Sudikno Mertokusumo (2011), *Teori Hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 18
 - 3 Lawrence M. Friedman (2001), *American Law: An Introduction*, Second Edition, Penerjemah : Wishnu Basuki, PT. Tatanusa, Jakarta, hlm. 3.
 - 4 *Ibid.*, hlm. 4.

Sebagai alat kontrol, hukum tidak saja diletakkan sebagai norma yang mengatur lalu lintas pergaulan antar-manusia di dalam negara, melainkan juga mengatur dan menjamin agar bagaimana kekuasaan negara tidak melampaui batas-batas tertentu sehingga dianggap merugikan rasa keadilan manusia yang hidup di dalamnya. Dalam konteks itu, hukum ditujukan untuk mewujudkan pengayoman bagi manusia secara pasif dengan mencegah tindakan sewenang-wenang, dan secara aktif menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi yang memungkinkan proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar sehingga secara adil setiap manusia memperoleh kesempatan yang luas dan sama untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh.⁵ Dalam arti, hukum diletakkan sebagai alat untuk mengontrol kekuasaan agar kekuasaan tersebut tidak melampaui wewenang dan pada gilirannya dapat merusak keseimbangan sosial. Dengan posisi yang demikian, manusia di banyak negara menganggap bahwa hukum merupakan isu nomor satu yang mesti dituntaskan jika hendak mewujudkan cita-cita yang dituangkan dalam konstitusi negara.

Dengan demikian, secara sadar sebetulnya semua orang memahami bahwa apapun perbincangan ihwal kemajuan budaya atau peradaban manusia, membicarakan kontribusi hukum adalah bagian penting yang tak dapat ditinggalkan. Karena itu, bila hendak membahas agenda perubahan perilaku, membangun mentalitas manusia, dan merancang kemajuan peradaban, hukum haruslah dijadikan salah satu komponen penting yang mesti dibicarakan.

Demikian juga halnya terkait gagasan Revolusi Mental yang dikemukakan Presiden Terpilih, Joko Widodo. Menurutnya, berbagai persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia haruslah diselesaikan dengan melakukan Revolusi Mental. Di mana, Revolusi Mental dimaksud ditujukan untuk mendorong pembentukan karakter bangsa dan identitas nasional yang kuat. Dalam konteks itu, hukum tentunya juga dapat dijadikan salah satu alat untuk mendorong berhasilnya agenda Revolusi Mental. Hanya saja, pada wilayah mana dan intervensi seperti apa yang dapat dilakukan hukum agar capaian dari agenda Revolusi Mental dapat diwujudkan?

Jawaban atas pertanyaan tersebut tentunya harus diawali

5 Bernard Arief Sidharta (2013), *Ilmu Hukum Indonesia: Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 105

dengan mengidentifikasi berbagai persoalan yang ada, terutama yang menjadi akar rapuhnya identitas budaya nasional. Secara lebih khusus, sebagai bagian inheren dari kehidupan manusia Indonesia, juga harus diidentifikasi tentang apa sumbangan hukum atas kemajuan maupun stagnasi peradaban manusia Indonesia. Identifikasi atas berbagai persoalan terkait keberadaan hukum tersebut setidaknya dapat dijadikan bahan untuk menentukan intervensi kebijakan di bidang hukum guna memuluskan agenda Revolusi Mental pemerintahan baru nantinya.

Sistem Hukum dan Sistem Kontrol Sosial

Sistem hukum adalah bagian dari sistem kontrol sosial.⁶ Artinya, melakukan kontrol sosial adalah bagian dari fungsi sistem hukum. Di mana, sistem hukum memerintahkan setiap orang apa yang harus dan jangan dilakukan, dan sistem hukum itu menjunjung perintah-perintahnya dengan paksa.⁷ Lebih jauh dari itu, sistem hukum juga berfungsi untuk melakukan rekayasa sosial (*sosial engineering function*), di mana hukum digunakan untuk mengadakan perubahan sosial yang direncanakan.⁸ Dalam hal ini, hukum difungsikan oleh pemerintah sebagai alat untuk mendorong terjadi perubahan sosial dalam masyarakat. Hukum digunakan sebagai alat membentuk pola hubungan tertentu dalam masyarakat negara yang dikehendaki oleh sebuah pemerintahan negara. Dalam konteks itu, desain kemasyarakatan yang hendak diciptakan adalah sebuah rancangan-bangun kemasyarakatan yang diciptakan sebuah pemerintahan sesuai cita-cita yang disepakati bersama dalam konstitusi negara.

Sebagai bagian dari sistem kontrol sosial, Lawrence M. Friedman menilai bahwa berhasil atau tidaknya hukum melaksanakan fungsinya akan bergantung pada tiga komponen sistem hukum. *Pertama*, substansi hukum (*legal substance*). Substansi hukum adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu.⁹ Substansi hukum juga diartikan sebagai produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum, mencakup keputusan atau aturan baru yang mereka susun. Dalam konteks itu, substansi bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang

6 Lawrence M. Friedman (2001), *Op.cit.*, hlm. 11

7 *Ibid.*

8 *Ibid.*, hlm. 12

9 *Ibid.*, hlm. 7.

(*law books*), melainkan juga mencakup hukum yang hidup (*living law*).

Kedua, struktur hukum (*legal structure*) atau struktur sistem hukum. Friedman menyebutnya sebagai kerangka atau rangka atau bagian yang tetap bertahan atau bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan.¹⁰ Sub-sistem struktural dalam sistem hukum menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Untuk memberikan kepastian atas wewenang yang dimilikinya, kewenangan lembaga penegak hukum atau struktur sistem hukum dijamin dalam undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dapat berjalan secara merdeka, dalam arti terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.¹¹ Kehadiran struktur hukum sangatlah penting, sebab betapa pun bagusnya suatu peraturan perundang-undangan, namun jika tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik, penegakan hukum dan keadilan hanya angan-angan. Dalam konteks itu, tujuan hukum hanya akan tercapai secara lebih baik jika aspek penegak hukum¹² diisi oleh orang-orang yang kredibel dan menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

Ketiga, budaya hukum (*legal culture*). Kultur hukum adalah opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan), kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.¹³ Budaya hukum juga dapat diartikan sebagai suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat. Dengan posisi demikian, budaya hukum memiliki peran signifikan dalam penegakan hukum. Sebab, tanpa budaya hukum sistem hukum tidak akan berdaya.¹⁴ Budaya hukum yang baik dan

10 *Ibid.*, hlm 12.

11 Soejono Soekanto (2010), *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 77.

12 Purnadi Purbacaraka dan A Ridwan (1990), *Filsafat Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Rajawali. hlm. 4.

13 Achmad Ali (2012), *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Volume 1*, Kencana, Jakarta, hlm. 204

14 *Ibid.*

pola pikir masyarakat yang taat hukum akan mendorong berjalannya sistem hukum sesuai fungsi hukum yang seharusnya termasuk dalam agenda pemberantasan korupsi.

Dalam agenda dimaksud, sejauh ini substansi undang-undang yang ada gagal untuk melakukan percepatan pemberantasan korupsi. Banyak pihak berpendapat, salah satu faktor yang menyebabkan hal itu sulit diungkapkan karena banyak aturan hukum yang tidak jelas, memiliki makna ganda (multi-interpretasi), dan memihak pelaku korupsi. Pendapat lain, mayoritas aparat penegak hukum tidak punya komitmen jelas untuk memberantas korupsi. Berdasarkan pandangan tersebut, dapat dikatakan, meruyaknya praktik korupsi karena hukum dan penegak hukum di negeri ini dapat dikatakan teramat ramah kepada para pelaku korupsi. Bahkan, banyak pengalaman menunjukkan, upaya pengungkapan kasus-kasus korupsi justru membuka peluang praktik korupsi baru.

Khusus untuk substansi hukum, dapat dikatakan sebagai salah satu faktor yang memberi kontribusi besar atas kegagalan menghentikan gurita praktik korupsi. Dalam praktik, substansi hukum yang lemah bertaut dengan komitmen sebagian penegak yang tidak memihak kepada agenda pemberantasan korupsi. Tidak hanya itu, substansi hukum juga seperti dirancang sedemikian rupa sehingga memudahkan mereka yang tersangkut korupsi mengelak dari jeratan hukum. Cara paling sederhana, membuat norma hukum yang tidak jelas atau kabur.

Substansi hukum yang kabur itu tidak hanya memudahkan melakukan korupsi tetapi juga memberi kesempatan luas kepada penegak hukum untuk "menggorengnya" sesuai dengan kepentingan masing-masing. Bagi sebagian penegak hukum yang bekerja demi kepentingan penegakan hukum, aturan yang tidak jelas dapat digunakan untuk menjerat pelaku korupsi yang memanfaatkan aturan hukum yang tidak jelas tersebut. Sementara itu, bagi sebagian penegak hukum yang ingin meraih keuntungan sesaat dan jangka pendek (seperti keuntungan finansial), substansi hukum yang demikian potensial diperdagangkan dengan mereka yang tersangkut kasus korupsi.

Berdasarkan praktik yang pernah terjadi, setidaknya terdapat lima celah yang membuka ruang dan kesempatan bagi penegak hukum untuk menggoreng aturan hukum yang ada demi mendapatkan keuntungan sesaat. *Pertama*, pada tahap awal (baik

berupa penyelidikan maupun penyidikan), para penyelidik dan/atau penyidik sangat mungkin memanfaatkan proses tersebut untuk menyalahgunakan kewenangan. Banyak kejadian menunjukkan betapa sebagian penegak hukum berupaya menanggung keuntungan dalam bentuk “negosiasi” dengan mereka yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi. Dalam batas-batas tertentu, kasus yang pernah menimpa Jaksa Urip Tri Gunawan ketika menerima suap dari Artalyta Suryani (Ayin) dapat menjelaskan fenomena ini.

Dalam banyak kejadian, proses awal penegakan hukum sering kali dimanfaatkan sebagai ATM bagi penegak hukum. Misalnya, ketika memberikan kesaksian di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, bekas Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional Glenn Yusuf mengakui terpaksa memberikan uang total Rp 1 milyar kepada jaksa Urip (*Kompas*, 25/7-2008). Pengalaman Glenn Yusuf ditambah dengan kasus suap antara jaksa Urip dan Ayin, membuktikan sinyalemen yang berkembang selama ini, penanganan kasus korupsi sarat dengan pemerasan dan suap.¹⁵ Sadar atau tidak, kejadian-kejadian tersebut memberikan kontribusi terhadap menurunnya partisipasi masyarakat untuk turut serta melaporkan adanya indikasi korupsi.

Kedua, bagi kasus-kasus yang secara sederhana dapat dimengerti bahwa praktik korupsi benar adanya, penegak hukum masih dapat melakukan menuver untuk meraih keuntungan dengan melakukan pelbagai rupa penawaran agar mereka yang terindikasi melakukan korupsi tidak menjadi pesakitan lebih awal. Untuk kemungkinan ini hal yang paling mungkin dilakukan adalah mengupayakan agar pelaku tidak ditahan. Bagaimanapun, pilihan untuk tidak ditahan tentunya diupayakan dengan cara-cara yang tidak benar. Bahkan, bila perhatian publik menjadi berkurang karena sebuah proses yang panjang dan bertele-tele, tidak jarang diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Kemungkinan ke arah tersebut sangat terbuka karena ruang bagi publik menyoal segala bentuk penyimpangan yang dilakukan ditahap penyidikan sangat terbatas.

Ketiga, bila sebuah kasus korupsi masuk ke persidangan, tidak jarang ada upaya sistematis dengan cara “menggoreng” dakwaan agar pelaku korupsi bisa mendapat vonis hakim yang lebih ringan. Sejauh ini, dalam dunia penegakan hukum di negeri ini, upaya merekayasa surat dakwaan bukan cerita baru. Dalam hal ini, penuntut umum

15 Lebih jauh dapat dibaca dalam Saldi Isra, 2008, “Keluar dari Jerat Korupsi”, dalam *Harian Kompas*, 28 Juli, Jakarta.

paham betul bahwa hakim akan sangat legalistik sehingga apabila ada dakwaan yang jauh atau tidak sesuai perbuatan materil yang dilakukan, hakim akan membebaskan pelakunya. Gejala ke arah ini pernah diungkap secara akademik dalam disertasi Marwan Mas (2005) pada program Pascasarjana Universitas Hasanuddin. Menurut Marwan, banyak skandal besar korupsi yang dibebaskan pengadilan karena kekeliruan merumuskan dakwaan.

Keempat, banyak putusan hakim yang tidak memberikan efek jera dalam *agenda setting* pemberantasan korupsi. Terkait dengan hal ini, mantan Ketua Komisi Yudisial M. Busyro Muqoddas menyatakan banyak putusan hakim yang tidak berpihak pada korban yang mengalami proses pemiskinan masif akibat tindak pidana korupsi sebagai kejahatan atas kemanusiaan (*crime against humanity*). Sebagian hakim, tegas Busyro justru berpihak pada pelaku dengan alasan terdakwa sebagai pejabat telah berjasa pada negara. Suatu alasan hakim yang secara terang-terangan mencederai kehormatan dan keluhuran martabat diri dan institusinya.¹⁶

Bahkan, untuk tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam “keadaan tertentu” saja tidak pernah ada penjatuhan hukuman maksimal. Padahal, UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memungkinkan untuk menjatuhkan hukuman mati koruptor: “*dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan*”. Selanjutnya dalam Penjelasan dinyatakan:

“Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter”.

Kelima, bila seorang koruptor dinyatakan bersalah dan kemudian harus melalui masa tahanan, masa tahanan dan rumah tahanan memberikan segala macam kemudahan. Selain kemungkinan untuk mendapatkan grasi, hal yang paling umum terjadi pemberian remisi kepada para koruptor. Dengan fasilitas itu, salah satu

16 M. Busyro Muqoddas, 2010, “Pengantar”, dalam *Wajah Hakim dalam Putusan*, PUSHAM UII, Yogyakarta, hal. vi.

tujuan pemidanaan adalah memberikan *deterrent effect* bagi pelaku maupun bagi masyarakat sulit dicapai. Contoh yang paling baru adalah pemberian remisi terhadap sejumlah koruptor termasuk Ayin. Dengan fasilitas tersebut, bukan tidak mungkin, bagi sebagian mereka yang terbukti melakukan korupsi, rumah tahanan hanya merupakan pelintasan antar-waktu sembari menghindari dari penglihatan masyarakat.

Sejumlah kasus memperlihatkan, rumah tahanan justru menimbulkan luka yang mendalam karena perlakuan istimewa yang diterima selama dalam masa tahanan. Dalam konteks ini, banyak contoh membuktikan bahwa semakin kuat posisi politik seorang tahanan, biasanya semakin mudah mendapatkan fasilitas dengan segala kemudahan. Bila kekuasaan politik tidak begitu kuat, fasilitas dan segala kemudahan masih bisa dinikmati sepanjang mampu menyediakan uang untuk menyuap berbagai pihak yang terkait dengan otoritas rumah tahanan. Salah satu buktinya, fasilitas ruang super mewah di Rumah Tahanan Pondok Bambu yang ditemukan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum beberapa waktu yang lalu. Bahkan, ketika “perselingkuhan” tersingkap ke publik, segala bentuk penyelewengan rumah tahanan menambah luka bagi masyarakat yang menghendaki keadilan. Yang sulit dimengerti, hampir segala bentuk penyimpangan yang terjadi di rumah tahanan menguap dan berlalu begitu saja.

Dalam hal remisi yang pernah diterima Ayin, misalnya, Pasal 15 Kitab Undang-undang Hukum Pidana membenarkan bahwa yang bersangkutan telah menjalani dua-pertiga masa tahanan yang dijatuhkan hakim. Meski begitu, ketentuan Pasal 15 KUHP tersebut tidak bisa begitu saja diberikan. Setidaknya, pemberian pelepasan bersyarat harus memperhatikan perilaku bersangkutan selama menjalankan masa tahanan. Berdasarkan pengertian itu, melacak *track-record* selama dalam masa tahanan, Ayin tidak layak mendapatkan fasilitas dalam bentuk pelepasan bersyarat tersebut. Dalam hal ini, Guru Besar hukum pidana UGM, Eddy OS Hiariej mengemukakan, tindakan Ayin mendapatkan fasilitas super mewah selama dalam masa tahanan merupakan perbuatan tercela. Selain itu, kejahatan Ayin menyuap jaksa Urip terkategori *abstruction of justice*. Bahkan, bila dikaitkan dengan *United Nation Convention Againts Corruption*, Ayin seharusnya tidak mendapat keringanan dalam bentuk pelepasan bersyarat.

Bekerjanya hukum sebagai bagian dari sistem kontrol sosial

akan sangat bergantung pada bekerjanya semua subsistem hukum tersebut secara integral. Substansi hukum yang baik tidak akan mampu menciptakan kebaikan jika tidak ditopang oleh struktur penegak hukum yang berintegritas. Sebaliknya, penegak hukum yang berintegritas juga akan kesulitan menciptakan keadaan yang lebih baik bagi kemanusiaan jika tidak didukung dengan aturan-aturan yang baik pula. Demikian juga halnya dengan budaya hukum, tanpa dukungannya, aturan yang baik dan penegak hukum yang berintegritas akan menghadapi tantangan yang amat berat jika tidak didukung oleh budaya hukum yang sehat.

Oleh karena itu, jika hendak melakukan perubahan atau perbaikan terhadap fungsi hukum sebagai bagian dari sistem kontrol sosial, maka harus dilakukan secara integral. Dalam konteks itu, benar apa yang dikatakan oleh Ahmad Ali, kalau membahas tentang reformasi hukum, maka tidak dapat tidak, kita harus memahaminya sebagai sekaligus reformasi struktural, reformasi substansi dan reformasi kultur hukum.¹⁷ Dalam arti, reformasi hukum tidak dapat dilakukan setengah-setengah, melainkan harus dilakukan secara komprehensif mencakup semua subsistem hukum. Lebih jauh, Ahmad Ali menilai, akan menjadi suatu penyakit jika reformasi hukum hanya diarahkan pada reformasi undang-undang saja tanpa secara bersamaan juga mereformasi komponen struktur dan budaya hukum.¹⁸

Dengan demikian, walaupun sistem hukum tidak pernah dapat dilepaskan dari sistem kontrol sosial, namun agar ia dapat berfungsi dengan baik dalam satu kesatuan sistem kontrol sosial, maka sistem hukum haruslah diperbaiki atau direformasi. Dalam bekerja sebagai sistem kontrol sosial, sistem hukum betul-betul harus baik. Ibarat sapu, ia harus bersih terlebih dahulu sebelum dipergunakan untuk menyapu lantai. Jika tidak, jangankan lantai yang bersih, justru kehadiran sapu yang akan menambah kotornya lantai. Demikian juga halnya dengan sistem hukum, ia harus berada dalam posisi yang siap dan baik dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai alat kontrol sosial. Jika tidak, yang akan terjadi adalah seperti pepatah klasik di Minangkabau, hukum akan menjadi *tungkek mambaok rabah* (tongkat yang membawa/menyebabkan rebah) dalam sistem kontrol sosial. Dalam arti, sistem hukum bukannya akan menjadi alat kontrol sosial, melainkan akan menjadi penyebab rusaknya sistem dan keseimbangan sosial.

17 *Ibid.*, hlm. 207

18 *Ibid.*

Hal yang sama juga berlaku dalam misi melakukan Revolusi Mental. Cakupan pekerjaan tersebut multi-dimensi, di mana sistem hukum adalah salah satu dimensinya. Agar sistem hukum dapat bekerja sebagai alat Revolusi Mental, ia harus direformasi secara integral. Sebaliknya, proses Revolusi Mental juga dapat menjadi salah satu jalan untuk memperbaiki sistem hukum secara menyeluruh. Dengan demikian, semua proses tersebut mesti dilakukan secara simultan. Dalam arti, agenda reformasi sistem hukum dapat ditumpangkan dalam proses Revolusi Mental. Di lain pihak, agenda reformasi mental juga dapat ditopang melalui reformasi sistem hukum sebagai bagian dari sistem kontrol sosial.

Identifikasi dan Jalan Revolusi Mental dalam Sistem Hukum

Persoalan saat ini yang dihadapi dunia hukum sangatlah kompleks. Berangkat dari subsistem hukum yang dipetakan Friedman sebagaimana dibentangkan sebelumnya, persoalan hukum ada pada semua level sub-sistem. Pada ranah substansi hukum, sebagian undang-undang yang dibuat tidak berpijak pada politik hukum permanen yang digariskan UUD 1945. Selain itu, politik hukum juga tidak diselenggarakan dari kepentingan-kepentingan yang ada sangkut pautnya dengan situasi konkret masyarakat¹⁹ Indonesia secara keseluruhan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya undang-undang yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK) melalui proses pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Pada tahun 2009 saja, dari 32 perkara yang telah diputus (dari 78 perkara pengujian undang-undang yang ditangani MK), 14 perkara dikabulkan. Artinya, hampir separuh dari perkara yang telah diputus, dikabulkan oleh MK.²⁰ Pada tahun 2012, sebanyak 29% permohonan pengujian undang-undang juga dikabulkan MK. Banyaknya pengujian undang-undang yang dikabulkan MK disebabkan buruknya kualitas produk undang-undang yang dihasilkan pemerintah dan DPR.²¹

Kondisi tersebut setidaknya memberi isyarat pada beberapa hal:

-
- 19 Theo Huijbers (1995), *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 116
 - 20 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (2009), *Mengawal Demokrasi Menegakkan Keadilan Substantif, Refleksi Kinerja MK 2009 Proyeksi 2010*, Jakarta, hlm. 29
 - 21 Ketua MK: 29% UU Dibatalkan Karena Tak Berkualitas, <http://news.liputan6.com/read/475147/ketua-mk-29-uu-dibatalkan-karena-tak-berkualitas>, diakses tanggal 10 Oktober 2014

(1) proses pembentukan undang-undang tidak sepenuhnya taat pada cita-cita bernegara yang disepakati dalam konstitusi negara; (2) undang-undang dibentuk lebih pada tujuan untuk mengakomodasi kepentingan jangka pendek kelompok tertentu; (3) rendahnya kualitas proses legislasi, sehingga potensial terjebak pada lahirnya norma undang-undang yang tidak berkualitas.

Persoalan pertama dan kedua berhubungan dengan soal mentalitas pembentuk undang-undang. Orientasi pembentuk undang-undang tidak diarahkan pada bagaimana melahirkan hukum atau undang-undang yang baik bagi perwujudan kebaikan dan kesejahteraan manusia Indonesia secara keseluruhan, melainkan lebih pada pemenuhan kepentingan individu dan kelompok. Dalam hal ini, pembentuk undang-undang diboncengi berbagai kepentingan yang sesungguhnya berdiri *vis a vis* dengan kepentingan bersama rakyat Indonesia.

Tidak dapat disangkal, pembentukan undang-undang berada di dalam sebuah ruang proses politik, yang di sana terjadi dialog, debat dan dinamika berbagai kepentingan anak bangsa. Hanya saja, semua perbatasan dalam membentuk undang-undang haruslah dalam semangat melahirkan undang-undang yang sesuai bagi pencapaian kehidupan yang lebih baik bagi kehidupan manusia Indonesia. Kepentingan negara, bangsa dan seluruh rakyat mesti dijadikan prioritas utama dalam melahirkan undang-undang. Debat dalam membentuk undang-undang harus dijauhkan dari dinamika sekadar menaikkan posisi tawar demi melakukan barter kepentingan kelompok politik di lembaga perwakilan yang justru merugikan rakyat.

Orientasi ideal pembentukan undang-undang di atas tentunya tidak dapat diwujudkan jika yang mengisi lembaga perwakilan adalah manusia-manusia pragmatis bermental materialistik. Perbaikan arah pembentukan undang-undang sulit ditumpangkan kepada orang-orang yang lebih mengedepankan kepentingan pribadi, kelompok dan partai pengusungnya. Meski mereka dipilih melalui proses pemilihan umum yang demokratis, namun karena sisi kualitas dan orientasi politik manusianya yang bermasalah, maka mengharapkan lahirnya undang-undang yang baik bagi kepentingan bangsa, negara dan rakyat menjadi sesuatu yang absurd.

Jika ditelaah lebih jauh, struktur politik berupa proses pengisian jabatan anggota lembaga perwakilan yang dilakukan melalui

sebuah pemilu dalam UUD 1945 sudah tepat. Sebab, melalui proses tersebut keikutsertaan dan kontrol rakyat terhadap kekuasaan dapat dilakukan. Hanya saja, struktur pengisian jabatan publik yang demikian juga harus disertai dengan memperbesar peluang terpilihnya orang-orang bermental sehat.

Pada saat yang sama, kuantitas “orang-orang baik” juga harus terus ditingkatkan melalui berbagai agenda pengkaderan yang melibatkan semua pihak dan semua proses, baik pendidikan formal, non-formal, pendidikan di kelompok, lingkungan maupun keluarga. Dengan melakukan pembiakan “orang-orang baik” tentunya peluang masuknya sumber daya manusia berintegritas ke dalam lembaga perwakilan kian besar. Dalam konteks ini, agenda Revolusi Mental tentunya menjadi salah satu peta jalan melakukan proliferasi “orang-orang baik”.

Selanjutnya, pada ranah sub-sistem hukum berupa struktur hukum, yang terjadi adalah ketiadaan keteladanan dan ketegasan. Hukum yang mengatur tentang struktur hukum berikut dengan segala sanksinya lebih dari cukup, tetapi tetap saja penegak hukum melakukan berbagai tindakan yang justru mencoreng wajah hukum itu sendiri, seperti praktik suap, jual beli perkara, penegakan hukum pilih kasih dan berbagai tindakan lain yang bertentangan dengan prinsip kepastian dan keadilan hukum. Bahkan dengan menaikkan tingkat kesejahteraan penegak hukum sendiri tetap saja tidak memberi dampak signifikan terhadap hilangnya praktik penyimpangan oleh aparat penegak hukum. Penyimpangan oleh penegak hukum tidak semata-mata karena soal kesejahteraan, melainkan lebih karena soal mentalitas korup yang ada di dalam diri dan kekuasaan hukum yang dipegangnya.

Kondisi itulah kemudian yang menyebabkan penegak hukum tidak memiliki wibawa di mata publik. Kehadiran lembaga penegak hukum tidak dianggap mampu membantu menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat, melainkan justru menjadi beban. Sebagai contoh, jika terjadi kecelakaan kecil di jalan raya, orang lebih cenderung menghindari polisi dan berupaya menyelesaikannya secara kekeluargaan. Bukan karena lebih mengedepankan alternatif lain sebagai alasan utama, melainkan jika diketahui dan berurusan dengan polisi, masalah bukannya selesai, melainkan tambah rumit dan berbelite-belite.

Selain itu, kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena alasan tidak efektifnya lembaga yang ada (kepolisian dan

kejaksaan) dalam melakukan penegakan hukum menunjukkan ada persoalan serius dengan sub-sistem struktur hukum Indonesia. Hal ini yang menjadi salah satu alasan mengapa reformasi pada sektor struktur hukum perlu dilakukan. Solly Lubis mengatakan, reformasi pada sektor pelaksana hukum (*law enforcer*) mesti dilakukan tidak saja secara kelembagaan melainkan juga individu-individu aparaturnya.²²

Sampai saat ini, reformasi pada aspek kelembagaan tetap terus dilakukan, hanya saja yang masih memerlukan sentuhan lain dan perlu lebih serius adalah individu-individu aparaturnya. Sebab, meski struktur penegak hukum yang ada memiliki berbagai kelemahan, tetapi jika diisi oleh individu-individu dengan mentalitas baik, tentunya perbaikan wajah lembaga penegak hukum akan terjadi. Oleh karena itu, reformasi sektor sub-sistem struktur hukum haruslah diarahkan pada membangun karakter dan mentalitas penegak hukum melalui berbagai cara yang ada, terutama melalui pendidikan. Bukan hanya pendidikan tinggi hukum, melainkan pada semua level pendidikan, mulai dari yang paling rendah sampai pendidikan tinggi. Selain itu, yang jauh lebih penting adalah pendidikan di tingkat keluarga dan lingkungan.

Pada ranah budaya hukum, bangsa ini dihadapkan pada budaya masyarakat yang instan, semua masalah ingin diselesaikan dengan cepat, kalau perlu dengan jalan pintas. Kondisi tersebut didukung oleh budaya penegak hukum yang terkadang “mempersulit” masyarakat pencari keadilan atau masyarakat yang membutuhkan pelayanan birokrasi. Satu urusan tidak dapat diselesaikan dalam satu atau dua kali berurusan, melainkan harus dilakukan dengan bolak-balik. Bahkan, dalam proses pelayanan publik, tindakan dan informasi aparat pemerintahan yang satu tidak sinkron dengan yang lain, sehingga masyarakat yang berurusan menjadi sulit, berbelit-belit, dan dipermainkan. Dalam kondisi seperti itu, praktik calo, suap, dan memilih jalan pintas menjadi pilihan tak terelakkan. Pada gilirannya, yang terbangun adalah cara berpikir instan, kebiasaan-kebiasaan tak taat rambu-rambu, yang pada gilirannya akan merusak proses pembangunan bangsa dan masyarakat. Kondisi tersebut sebetulnya sebuah situasi budaya hukum yang berkelindan antara cara berpikir aparat penegak hukum (termasuk aparat birokrasi) tentang hukum (dan pelayanan) dengan cara pandang masyarakat

22 Solly Lubis (2011), *Manajemen Strategis Pembangunan Hukum*, Mandar Jaya, Bandung, hlm. 69

tentang aparat. Keduanya saling bertemu pada ranah negatif dan itu semua telah berlangsung lama, mengakar dan sampai saat ini masih kukuh bertahan.

Bagi pemerintah, mengintervensi aparat penegak hukum tentu jauh lebih mungkin dibanding mengintervensi seluruh rakyatnya. Dalam arti, mendorong perubahan perilaku apatur pemerintah dan penegak hukum jauh lebih mungkin untuk dilaksanakan dibanding mengubah perilaku masyarakat yang sudah begitu masif. Dalam konteks itu, mengubah mentalitas penegak hukum haruslah menjadi agenda utama, di mana dari sana diharapkan terjadi efek domino terhadap perubahan perilaku atau budaya hukum masyarakat. Dalam kondisi di mana aparat penegak hukum tidak lagi mau disogok, tentunya cara berpikir masyarakat tentang hukum juga akan ikut berubah. Pada akhirnya, perubahan cara berpikir pun akan menyebabkan terjadinya perubahan kultur hukum ke kondisi yang lebih baik.

Dalam bahasa lain dapat dikatakan, yang mesti dilakukan pemerintah adalah mendorong terjadi perubahan metalitas aparat penegak hukum, sehingga mereka dapat menjadi teladan bagi yang lain. Pada saat keteladanan penegak hukum telah direkayasa, sehingga tercipta keteladanan yang masif, maka arah perubahan budaya hukum dengan sendirinya akan hadir sebagai sebuah kenyataan.

Penutup

Berdasarkan uraian di atas agenda Revolusi Mental sebetulnya dapat menyentuh semua sub-sistem hukum yang ada. Di saat yang sama, pada ranah itu pula sistem hukum dapat turut serta atau berkontribusi untuk terwujudnya agenda Revolusi Mental menuju ke sebuah situasi sehat mental. Sebagai bagian dari kontrol sosial, reformasi sistem hukum juga sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya manusia penegak hukum yang berintegritas. Sebab itu, pendidikan dan pendidikan tinggi hukum memiliki peranan penting, dan yang lebih penting dari semua itu adalah pendidikan di tingkat keluarga dan lingkungan. Sebab proses itulah yang akan berkontribusi besar untuk terjadinya pembiakan orang-orang baik yang nantinya akan mengisi semua lini sistem hukum.

Daftar Pustaka

- Ali, Achmad, (2012). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Volume 1*. Jakarta: Kencana
- Friedrich, Carl Joachim, (2008). *Filsafat Hukum Pperspektif Historis*. Bandung: Nusa Media Nuansa
- Friedman, Lawrence M., (2001). *American Law: An Introduction*, Second Edition, Penerjemah: Wishnu Basuki. Jakarta PT. Tatanusa
- Huijbers, Theo, (1995). *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius.
- Isra, Saldi, (2008), "Keluar dari Jerat Korupsi", dalam *Harian Kompas*, 28 Juli, Jakarta.
- Lubis, Solly, (2011). *Manajemen Stategis Pembangunan Hukum*. Bandung: Mandar Jaya.
- Mertokusumo, Sudikno, (2011). *Teori Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, (2009). *Mengawal Demokrasi Menegakkan Keadilan Substantif, Refleksi Kinerja MK 2009 Proyeksi 2010*. Jakarta.
- Muqoddas, M. Busyro, (2010). "Pengantar", dalam *Wajah Hakim dalam Putusan*, Yogyakarta: PUSHAM UII.
- Purbacaraka, Purnadi, dan A Ridwan, (1990). *Filsafat Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Rajawali.
- Sidharta, Bernard Arief, (2013). *Ilmu Hukum Indonesia Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soekanto, Soejono, (2010). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- "Ketua MK: 29% UU Dibatalkan Karena Tak Berkualitas", <http://news.liputan6.com/read/475147/ketua-mk-29-uu-dibatalkan-karena-tak-berkualitas>, diakses tanggal 10 Oktober 2014.

KONTEKS HISTORIS PERUBAHAN MENTALITAS DALAM PARADIGMA KEBUDAYAAN

Sri Margana

Prolog

Mentalitas dimaknai sebagai “*a way of thinking or the ability to think and learn*” atau cara berpikir atau kemampuan berpikir dan belajar. Munculnya gagasan tentang “Revolusi Mental” tentu disadari dan didasari pada suatu asumsi bahwa mentalitas yang ada saat ini perlu diubah dengan cepat. Tentu pertanyaannya adalah mentalitas yang mana yang perlu diubah dengan cepat? Dan bagaimana cara mengubahnya?

Kesadaran dan upaya melakukan perubahan mental di Indonesia telah lama muncul terutama sejak munculnya tarikan-tarikan di jaman “kemadjoean”. Awal abad XX adalah fase di mana kesadaran tentang perubahan mental berkelindan dengan tumbuhnya nasionalisme. Pada periode ini nasionalisme dan modernisme menjadi dua wacana besar yang menjadi pembicaraan dan perdebatan di kalangan elite pergerakan nasional Indonesia. Cita kebangsaan menguat dan lahirnya sebuah negara yang berdaulat, modern dan demokratis menjadi kesepakatan yang tak terbantahkan, tetapi saat identitas kebangsaan hendak dirumuskan terjadilah tarik menarik antara nilai-nilai modern dan klasisisme. Para elite pergerakan umumnya sepakat untuk menjadikan nilai-nilai kebudayaan klasik yang telah berkembang sebelumnya dipertahankan sebagai dasar identitas kebangsaan atau jati diri bangsa.

Tarik-menarik antara modernisme dan klasisisme ini terus berkembang dan semakin rumit terutama setelah klasisisme (nilai-nilai tradisi) berkelindan dengan nilai-nilai religius. Perdebatan tentang tuntutan kemajuan dan ke-modern-an di berbagai aspek kehidupan berhadapan dengan klasisisme tradisi dan nilai-nilai keagamaan. Tarik-menarik antara klasisisme dan modernisme ini tidak terbatas pada wacana pemikiran tetapi juga dalam praktik sosial, budaya, ekonomi dan politik yang tidak jarang melahirkan gesekan-gesekan sosial dan konflik. Paper singkat ini hendak menelusuri konteks historis, tarik menarik antara klasisisme dan modernisme dalam merumuskan mentalitas kebangsaan dalam konteks paradigma kebudayaan.

Paradigma Kultural dan Perubahan Kebudayaan

Perubahan atau Revolusi Mental menjadi bagian dari wacana besar tentang perubahan kebudayaan. Dalam kumpulan karangan

ilmiahnya yang diberi judul *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan* Ignas Kleden menjelaskan bahwa setiap usaha untuk memikirkan, memajukan, dan melakukan perubahan kebudayaan sekaligus merupakan produk dari kebudayaan orang-orang yang terlibat di dalam usaha tersebut. Kebudayaan selalu menjadi *cultural paradigm* bagi seseorang yang akan menentukan bentuk dan sudut kesadaran kognitifnya sekaligus memengaruhi jenis dan arah pilihan yang diambil berdasarkan preferensi nilai yang dianut dalam kebudayaan tersebut (Ignas Kleden: 1988:185).

Ignas Kleden menjelaskan bahwa pada awalnya kebudayaan adalah nasib sebuah generasi, kemudian generasi itu memanggulnya sebagai tugas. Sebuah generasi pada dasarnya menjadi pewaris dari kebudayaan generasi selanjutnya. Sebagai pewaris kebudayaan ia tidak hanya menghayati tetapi juga menjadi "penderita" atau pasien yang menanggung kebudayaan itu sebelum ia sadar dan bangkit untuk mengubahnya. Dengan kata lain suatu generasi akan menjadi "pasien" kebudayaan sampai mereka cukup kuat menjadi agennya (Ignas Kleden: 1988:185-186).

Menurut Ignas Kleden pasien kebudayaan berpandangan bahwa perubahan kebudayaan akan lebih mudah terjadi jika suatu kebudayaan baru tidak ditanggapi sebagai pengaruh baru yang membahayakan kebudayaan lama tetapi sebagai kelanjutan atau penyempurnaan dari kebudayaan lama. Menganggap kebudayaan baru sebagai pengaruh yang akan membahayakan kebudayaan yang lama akan melahirkan resistensi. Sebaliknya dari perspektif si agen kebudayaan, suatu perubahan kebudayaan baru menjadi perubahan yang sebenarnya jika bisa ditegaskan dan didefinisikan perbedaan unsur-unsur baru dengan yang lama. Dengan kata lain harus ada titik-titik diskontinuitas yang memisahkan kebudayaan lama dan baru. Jika pandangan para pasien kebudayaan lebih dominan, maka kemungkinan perubahan kebudayaan lebih kecil, sebaliknya jika pandangan agen lebih dominan, maka kemungkinan perubahan akan lebih besar (Ignas Kleden: 1988:186-187).

Yang lebih rumit lagi bagi perubahan kebudayaan menurut Ignas Kleden adalah jika pandangan pasien dan agen berada pada individu atau kelompok yang sama, atau yang disebut *cultural paradigm*, paradigma kebudayaan bagi mereka. Oleh karena itu perubahan kebudayaan adalah sekaligus perubahan paradigma kebudayaan. Perubahan paradigma dipahami sebagai perubahan keseluruhan alam pikiran yang memengaruhi pilihan sudut pandang dan

pemilihan bidang atau objek perhatian (Ignas Kleden: 1988:187).

Ignas Kleden juga mengingatkan bahwa keberhasilan perubahan kebudayaan tak semata-mata dilihat dari pandangan si pasien dan agen kebudayaan, tetapi juga pada kenyataan objektif landasan material kebudayaan dan organisasi sosialnya. Untuk itu diperlukan proses transisi untuk reintegrasi, reorientasi, dan reorganisasi kebudayaan. Jika transisi gagal akan melahirkan involusi dan entropi kebudayaan, yaitu berupa gejala mempertahankan salah satu segi sementara segi lain telah ditinggalkan, atau nilai atau pandangan tertentu hanya dijaga supaya tidak mati, tetapi tidak bertenaga memenuhi kebutuhan baru yang dibawa oleh perubahan segi-segi sosial atau material kebudayaan. Involusi kebudayaan menurut Ignas Kleden adalah dialektika tanpa sintesis. Perubahan tanpa pembaharuan kualitatif yang ditandai adanya perumitan bentuk tanpa perkembangan isi, atau sofistifikasi internal untuk menghindari perubahan yang sedang bergerak di luar (Ignas Kleden: 1988:187-188).

Perubahan paradigma melewati tahap-tahap teoretis yang sulit. Paradigma lama masih dipakai tanpa mengenal paradigma baru, kemudian paradigma baru dikenal tetapi masih dipahami dengan paradigma lama dan akhirnya penerimaan paradigma baru dan paradigma lama ditinggalkan. Dengan kata lain, orang hampir tak dapat membedakan sendiri apakah mereka sedang berbicara atau bertindak sebagai pasien atau agen kebudayaannya. Dalam arti kebudayaan kritik identik dengan krisis artinya orang akan dapat melakukan kritik kebudayaannya jika itu pernah mengalami atau terlibat dalam semacam kritis dalam kebudayaannya. Tanpa krisis yang mengguncang paradigma kebudayaannya seseorang masih tetap berpikir dalam paradigma tersebut walaupun seolah-olah menghendaki perubahan (Ignas Kleden: 1988:189).

Ketidakjelasan dalam memandang diri sebagai pasien atau agen menurut Ignas Kleden melahirkan dua konsekuensi penting, yaitu ambivalensi, multivalensi, dan eliteisasi kebudayaan. Ambivalensi dan multivalensi atau sikap menerima suatu nilai tetapi menghindari atau bahkan menampiknya. Hal ini merupakan bentuk sikap oportuniste logis yang memperlakukan nilai budaya sebagai *hypostase* atau khayal platonis yang serba sempurna. Mereka hanya mengakui implikasi yang positif dan menolak implikasi yang negatif dari nilai dan pandangan budaya yang sama. Eliteisme kebudayaan melahirkan *establishment* yang menimbulkan rekasi berupa inisiatif-

inisiatif baru di luarnya, yaitu mereka yang tidak mau diperlakukan hanya sebagai pasien kebudayaan yang hanya boleh menerima cita-cita, pembatasan, dan bentuk-bentuk interaksi yang telah mapan. Eliteisasi kebudayaan terjadi karena pandangan dikotomis yang hanya melihat kebudayaan dari sisi agen dan pasien saja, tanpa menyadari bahwa pada saat yang sama mereka menjadi keduanya. Perkembangan kebudayaan lalu dianggap sangat tergantung pada agen atau para elite; dalam hal ini kaum *literati*, *cognoscenti* dan *eriditi* (kaum melek huruf, pemilik pengetahuan, dan terpelajar) (Ignas Kleden: 1988:190-191).

Sejauh mana pandangan teoritis Ignas Kleden tentang perubahan kebudayaan ini terjadi secara praktis dalam sejarah kesadaran dan upaya melakukan perubahan kebudayaan?

Dari Mentalitas Feodal ke Mentalitas Kolonial

Proklamasi kemerdekaan mengakhiri pemerintahan kolonial, namun akhir kekuasaan kolonial tidak serta merta mengakhiri keseluruhan kebudayaan yang telah berkembang selama periode itu. Dan warisan kebudayaan kolonial itu menjadi beban sejarah yang harus diatasi oleh bangsa Indonesia. Lebih parahnya adalah bahwa sebagian besar kesadaran tentang nasionalisme Indonesia tumbuh tidak hanya sebagai reaksi atas kolonialisme dan kebudayaannya tetapi juga feodalisme dan kebudayaannya. Dengan kata lain bangsa Indonesia yang baru merdeka mewarisi dua kebudayaan sekaligus, feodalisme dan kolonialisme yang juga dianggap sebagai bagian dari *ancient regime* dan perlu diubah.

Apa yang terjadi pada masa kolonial adalah bahwa kehadiran kolonialisme tidak ikut mengikis kebudayaan sebelumnya yaitu feodalisme, tetapi justru memanfaatkannya untuk kepentingan kolonial. Misalnya kekuasaan bupati yang feodalistis memberikan kemungkinan yang luas dan leluasa untuk dimanfaatkan sebagai agen penerahan tenaga kerja dan akses terhadap tanah yang diperlukan untuk mengembangkan ekonomi perkebunan kolonial. Sehingga hak-hak feodal bupati dipertahankan untuk kepentingan ini. Pemerintah kolonial mengembangkan kapitalisme perkebunan bertumpu pada hak-hak feodal para penguasa pribumi. Penerapan berbagai kebijakan, seperti *Priangan Stelsel*, *cultuurstelsel*, dan *landrente* adalah wujud nyata dari hubungan yang saling berkelindan antara kolonialisme, kapitalisme dan feodalisme (Clive Day: 1904).

Memang benar dalam perkembangannya ada fakta-fakta ke arah defeodalisasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial, ketika para bupati tidak lagi diposisikan sebagai raja-raja vasal tetapi sebagai bagian dari birokrasi kolonial yang disebut *Inlandsch bestuur*. Pemerintah kolonial telah menarik tanah-tanah lungguh para bupati dan digantikan dengan gaji bulanan. Simbol, simbol feodal seperti gelar, payung dan jumlah para pengiring mulai direduksi. Demikian juga ketika posisi bupati tidak lagi bersifat turun temurun tetapi berdasarkan kompetisi atau *vacancy* (D.H. Burger: 1962). Namun kebijakan-kebijakan ini tidak membawa perubahan yang mendasar tentang sifat-sifat patrimonialistik birokrasi feodal dan kolonial. Para bupati sebagai pasien dari perubahan kebudayaan bukanlah pasien yang pasif. Mereka menunjukkan sifat-sifat rekasioner dan mencari celah atas skema kebijakan pemerintah kolonial sebagai agen perubahan kebudayaan. Misalnya dalam tradisi baru kualifikasi seorang bupati dituntut untuk memiliki ijazah sekolah-sekolah Eropa, dan pada saat itu penduduk bumiputra yang mampu menyekolahkan dan diijinkan sekolah di sekolah-sekolah Eropa hanya para keluarga bupati dan bangsawan. Sehingga kualifikasi ini juga akhirnya tetap menjadi monopoli keluarga para elite termasuk para bupati si pemilik budaya feodal.

Di samping itu ada semacam keengganan dari pemerintah kolonial untuk mengangkat bupati yang berasal dari keluarga yang tidak mereka kenal atau di luar *establishment*, terutama karena alasan loyalitas dan kepercayaan. Ada pula kecurigaan bahwa kualifikasi pendidikan yang harus dipenuhi bagi seorang calon bupati merupakan tuntutan logis akan kebutuhan birokrasi kolonial yang lebih berkeahlian daripada sekadar menghapuskan nilai-nilai feodalismenya. Setelah kebijakan kolonial ini diterapkan tampak bahwa bupati-bupati baru yang diangkat oleh pemerintah kolonial tetap dari keluarga para bupati lama. Dari proses historis ini tampak bahwa pemerintah kolonial gagal melakukan perubahan kebudayaan atau mentransformasi kebudayaan feodal ke kebudayaan modern karena pemerintah kolonial memiliki paradigma kultural sendiri dalam melaksanakan perubahan dan dalam memandang kepentingannya sendiri.

Dari Mentalitas Kolonial ke Mentalitas Kebangsaan

Pengenalan pendidikan Barat pada skala dan lingkungan yang

terbatas oleh pemerintah kolonial kepada penduduk bumiputra mulai menunjukkan hasilnya pada paruh kedua abad XX. Kartini adalah sosok yang mewakili dari perubahan ini. Kartini pada awalnya sebagai pasien kebudayaan menjadi objek dari modernisasi pendidikan kolonial kemudian beranjak menjadi agen perubahan. Pendidikan modern telah membuka matanya tentang realitas yang lebih luas tentang masyarakat Jawa pada umumnya dan perempuan pada khususnya. Sebuah kenyataan yang menyadarkan dirinya untuk beranjak menjadi agen perubahan kebudayaan dengan mendirikan sekolah ala barat kepada anak-anak perempuan bumiputra. Namun demikian, Kartini tetap menjadi sebuah tragedi karena ia tidak mampu menciptakan diskontinuitas atau pemutusan secara tegas terhadap nilai-nilai budaya feodal yang membesarkannya sekaligus ditentangnya (Taufik Abdullah: 2001). Pada suatu sisi ia menjadi agen perubahan itu dan pada sisi lain ia tak bisa keluar dari kungkungan budaya feodal yang membesarkannya.

Memasuki abad ke-20 harapan akan adanya perubahan yang mendasar dari kebudayaan feodal-kolonial ke kebudayaan modern mulai tumbuh dan berkembang terutama setelah pendidikan barat dikenalkan dan diberikan pada warga bumiputra yang lebih luas. Sebuah generasi elite baru telah dilahirkan, yang dapat dikategorikan dalam dua kelompok dominan (Robert van Niel: 1984). Kelompok pertama adalah anak-anak dan pemuda bumiputra yang bersekolah di Eropa dan terlepas dari akar budaya tradisionalnya. Kelompok kedua adalah mereka yang belajar di sekolah-sekolah Eropa di Hindia Belanda dan tetap tinggal di lingkungan budaya lokal.

Keduanya adalah kelas-kelas yang memiliki kesadaran untuk melakukan perubahan dan menggeser perannya dari pasien menjadi agen perubahan. Mereka mewakili manusia-manusia yang dianggap sebagai modern, namun sekali lagi sebagian besar dari mereka tidak jauh berbeda dengan Kartini yang mengalami paradigma kultural dalam dirinya. Para pendiri Boedi Oetomo adalah sekumpulan elite terpelajar yang menginspirasi lahirnya semangat kebangsaan dan nasionalisme namun mereka tetap menjadi kebudayaan Jawa (tepatnya kebudayaan priayi) sebagai dasar perilaku moralnya. Masih banyak tokoh pergerakan lain yang berada pada posisi paradigma kultural ini, seperti Sukarno, Ki Hajar Dewantara, K.H. Agus Salim dan sebagainya. Taufik Abdullah misalnya mencontohkan bahwa pada tahun 1901 Dr. Rivai menyerukan bahwa semaju apapun jaman hendaknya kepribadian "Hindia" tetap menjadi pegangan bagi kaum bumiputera (Taufik Abdullah, 2001:12-13).

Pada tahun 1930 terjadi polemik kebudayaan yang dipicu oleh tulisan Sutan Takdir Alisjahbana "Menuju Masyarakat dan Kebudayaan Baru: Indonesia-Pra-Indonesia" (*Pujangga baru*, 2 Agustus 1935). Ia menjadi minoritas agen perubahan kebudayaan dengan terang-terangan memihak kebudayaan Barat sebagai masa depan kebudayaan Indonesia dan menolak tegas kesinambungan kebudayaan lama Indonesia. Ia membedakan "Zaman pra-Indonesia" (yang berlangsung hingga akhir abad ke-19) dan "zaman Indonesia" (yang mulai pada awal abad ke-20). Ia menegaskan tentang lahirnya zaman Indonesia Baru, yang bukan sekali-kali dianggap sambungan dari generasi sambungan Mataram, Minangkabau atau Melayu, Banjarmasin atau Sunda. Karenanya tiba waktunya mengarahkan mata ke Barat.

Tulisan ini mendapat tanggapan dari Sanusi Pane dan Poerbatjaraka. Dalam tulisannya yang berjudul "Persatuan Indonesia" (*Suara Umum*, 4 September 1935), Sanusi Pane menulis: "Zaman sekarang ialah terusan zaman dahulu. Haluan yang sempurna ialah menyatukan *Faust dan Arjuna*, memesrakan materialisme, *intellectualisme* dan individualisme dengan spiritualisme, perasaan dan *collectivisme*". Dalam tulisannya yang berjudul "Sambungan Zaman", Poerbatjaraka mengatakan, "Pada perasaan saya, yang manfaat buat tanah dan bangsa kita ini, ialah mengetahui jalan sejarah dari dulu-dulu sampai sekarang ini. Dengan pengetahuan ini kita seboleh-bolehnya berusaha mengatur hari yang akan datang. Pendek kata, janganlah mabuk kebudayaan kuno tetapi jangan mabuk kebaratan juga; ketahuilah dua-duanya itu supaya kita bisa memakainya dengan selamat di dalam hari yang akan datang kelak."

Di ujung kekuasaan Jepang kesadaran tentang nasionalisme melahirkan demokrasi sebagai asas fundamental negara baru yang segera akan diproklamirkan. Demokrasi dipilih karena dapat merepresentasikan tuntutan umum dari para *founding fathers* tentang prinsip-prinsip negara modern. Namun tarikan-tarikan klasisisme juga muncul dalam perdebatan untuk memberi identitas yang eksklusif sebagai bangsa yang berdaulat, sehingga nilai-nilai tradisional tentang musyawarah untuk mufakat, gotong royong, dan religioisitas dipertahankan dalam ideologi negara dan Undang-Undang Dasar negara.

Dari Mentalitas Kebangsaan ke Mentalitas Ideologis

Godaan berbagai bentuk ideologi sebagai warisan politik dari akhir Perang Dunia pertama telah mewarnai hampir keseluruhan periode selama seperempat abad pertama sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus. Semangat dan nilai-nilai kebangsaan dipertanyakan dengan tegas dan dihadapkan dengan ideologi-ideologi lain seperti sosialisme, kapitalisme, komunisme dan ideologi keagamaan. Pertarungan ideologis antara kelompok dan elite tak terhindarkan dan separatisme menjadi ancaman yang serius dari negara kesatuan. Pada periode ini muncul banyak agen yang menghendaki perubahan kebudayaan dengan sasaran masyarakat yang sama. Batas-batas unsur-unsur perbedaan kebudayaan sangat tegas, dan perubahan itu menghendaki diskontinuitas yang tegas pula, sehingga banyak pasien kebudayaan dan juga agen kebudayaan yang lain merasa kebudayaan yang baru ditawarkan itu akan menghapuskan kebudayaan yang lama. Yang muncul adalah resistensi yang besar.

PKI muncul sebagai agen nilai-nilai budaya komunis, PSI dan Permesta muncul sebagai agen nilai-nilai budaya sosialisme, DI/TII dan para elitnya seperti Kartosuwiryo, Daud Beureueh, Kahar Muzakkar menjadi agen nilai-nilai ideologis keagamaan, semuanya terlibat dalam paradigma kebudayaan yang frontal, yang hendak mengubah bentuk dasar kebudayaan kebangsaan yang telah *established* sebelumnya dengan kebudayaan yang baru. Pada saat mereka tampil sebagai agen dengan kesadaran akan perubahan pada saat yang sama mereka juga menjadi objek atau sasaran dari agen-agen perubahan yang lain, sehingga yang muncul bukan integrasi, adaptasi, atau akulturasi tetapi sebuah pertarungan kebudayaan. Sekali lagi keseluruhan ide-ide perubahan itu tidak berhasil dan justru melahirkan intervensi asing.

Sukarno sebagai pemimpin tertinggi muncul dengan ideologinya tersendiri, nilai dan mentalitas baru untuk *nation building* dan *character building* dikenalkan. Disamping Nasakom yang mengakulturasi nilai-nilai nasionalisme, agama, dan komunisme ia juga mengenalkan nilai-nilai kemandirian ekonomi dengan slogannya berdikari dan nilai-nilai atau karakter bangsa yang disebutnya kepribadian Indonesia. Dalam peran ini Sukarno tampil sebagai agen perubahan, tetapi ia mungkin tidak menyadari bahwa ia sendiri dan gagasan-gagasannya menjadi bagian dari permasalahan kebudayaan itu. Sukarno dan gagasannya adalah paradigma kebudayaan.

Dari Mentalitas Ideologis ke Pembangunanisme

Suharto tampil sebagai agen perubahan yang fundamental yang berhasil mengakhiri pertarungan kebudayaan ideologis-religius dan mengenalkan mentalitas pembangunanisme atau *developmentalism*. Seluruh potensi politik, ekonomi, sosial dan budaya diarahkan kepada upaya menumbuhkan mentalitas pembangunan. Stabilitas politik dihadirkan paling awal dan dijamin dengan kekuatan militer. Kekuasaan yang militeristik menjadi warna yang mencolok dalam setiap gerak lembaga politik dari tingkat atas hingga bawah. Seluruh organisasi sosial-politik dan keagamaan dikerahkan untuk menjadi agen-agen menumbuhkan nilai-nilai pembangunanisme. Sementara itu, ekonomi dikembangkan secara kapitalistik dan konglomerasi, walaupun pada saat yang sama nilai-nilai berkoperasi masih dipelihara. Nilai-nilai pembangunanisme dihadirkan tidak hanya pada level masyarakat tetapi juga keluarga. Nilai berkeluarga yang berencana menjadi kontribusi penting bagi pembangunan nasional khususnya dalam menciptakan kesejahteraan dan mengendalikan pertumbuhan penduduk.

Di bidang kebudayaan Suharto menjadikan lembaga pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi sebagai tempat menyemai nilai-nilai moral Pancasila atau ideologi negara dan menghasilkan tukang-tukang yang bekerja untuk menyukseskan pembangunan nasional. Kebudayaan daerah dipelihara sebagai properti kekayaan budaya sekaligus daya tarik pariwisata. Miniatur kebudayaan nasional dibangun sebagai simbol kekayaan dan tempat pembelajaran tentang keragaman.

Pembangunan fisik tumbuh dengan pesat dan merangsang pertumbuhan ekonomi yang pesat. Namun demikian pertumbuhan yang pesat dari pembangunan dan ekonomi ini dibarengi dengan praktik nepotisme, kolusi, dan korupsi. Nilai-nilai yang disebutkan terakhir itu mewarnai seluruh praktik birokrasi, pemerintahan, militer, dan ekonomi. Suharto yang selama hampir tiga puluh tahun menjadi agen perubahan kebudayaan yang tangguh, di masa-masa akhir menjadi persoalan dari seluruh patologi sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan pada dekade terakhir masa pemerintahannya. Krisis ekonomi dunia pada pertengahan tahun 1990-an menjadi pemicu resistansi besar dan tuntutan perubahan kebudayaan yang mendasar yang kemudian disebut sebagai reformasi.

Dari Pembangunanisme ke Mentalitas Oligarkis

Orde Reformasi berhasil mengakhiri Orde Baru, namun mentalitas pembangunanisme yang ditopang kekuatan hutang luar negeri, ekonomi biaya tinggi, konglomerasi dan diwarnai praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme tetap menjadi warisan dan beban sejarah yang harus ditanggung dalam perjalanan sejarah selanjutnya. Kaum reformis hadir dengan membawa isu-isu demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan pluralisme budaya. Semua slogan itu diterima sebagai nilai-nilai yang akan diaplikasikan dalam meneruskan cita-cita reformasi, namun demikian para agen perubahan kebudayaan baru ini hanya berdiri di menara gading, sedangkan para pelaksana perubahan kebudayaan sebenarnya para pasien kebudayaan yang menjadi objek perubahan itu. Dasar nilai-nilai sistem kekuasaan dan birokrasi diubah dengan nilai-nilai baru, namun tanpa menyertakan perubahan mental para penguasa dan birokratnya.

Ketika katup demokrasi dibuka selebar-lebarnya, budaya politik kekuasaan yang ororiter dan patrimonialistik digantikan oleh budaya politik oligarkis yang ditopang oleh sistem multi-partai. Lahirlah politik biaya tinggi dengan diterapkannya pemilihan anggota parlemen, kepala negara hingga kepala daerah secara langsung yang mengurus kas negara dan juga para kandidat politik. Hal ini diperparah dengan pemekaran wilayah di tingkat kabupaten dan propinsi sebagai upaya mendorong kemajuan pembangunan dan pemerataan. Akibatnya otoritas politik baik di parlemen dan di eksekutif dijadikan modal dalam tawar menawar kekuasaan dengan imbalan finansial dan jasa yang tinggi. Dengan kata lain kekuasaan dijadikan modal untuk mengembalikan politik biaya tinggi yang telah mereka keluarkan. Di tingkat parlemen jual beli pasal dan perundang-pundangan menjadi kelaziman. Di tingkat eksekutif suap menyuap untuk perizinan dan tender proyek negara menjadi kelaziman pula.

Pada saat yang sama atas nama kebebasan berpendapat dan berserikat muncul organisasi-oraganisasi sosial-politik yang mengusung intoleransi atas nama agama. Sentimen kelompok dan keagamaan menguat dan kekerasan sering menjadi pilihan untuk memaksakan kehendak.

Epilog

Menelusuri rekam jejak upaya-upaya dalam melakukan perubahan kebudayaan dari masa kolonial hingga masa pascakolonial ditemukan pola-pola repetisi dalam setiap fase perubahan dan perkembangan politiknya. Sebuah pola yang mengacu kepada apa yang oleh Ignas Kleden disebut sebagai involusi atau entropi kebudayaan. Umumnya para agen perubahan kebudayaan berada pada posisi *cultural paradigm* atau paradigma kebudayaan. Mereka tidak menyadari bahwa pada saat yang sama mereka adalah pasien kebudayaan. Di setiap fase perubahan politik perumusan ide-ide perubahan kebudayaan diserahkan kepada para elite penguasa, *literati*, *cognoscenti*, dan *eriditi* sehingga yang terjadi adalah sebuah eliteisme kebudayaan yang kemudian melahirkan reaksi dan resistensi. Tarik menarik antara kebudayaan baru dan lama terus menjadi *unending cyclus*, di mana posisi pasien kebudayaan yang cenderung ingin mempertahankan kebudayaan lama begitu dominan sehingga ide-ide tentang perubahan kebudayaan yang memotong tegas garis kebudayaan yang lama dan baru selalu gagal diterapkan.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Taufik. 2001. *Nasionalisme dan Sejarah*. Bandung: Satya Historika.
- Burger, D.H. 1962. *Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia*, Jilid I. Jakarta: Pradjna Company.
- Day, Clive. 1904. *The Policy and Administration of the Dutch in Java*. The Macmilan
- Kartodirdjo, Sartono. 2005. *Sejak Indische sampai Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Kleden, Ignas. 1980. *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan*. Jakarta: LP3ES. Paramita.
- Smith, Anthony D. 1998. *Nationalism and Modernism: A Critical Survey of a Recent Theories of Nation and Nationalism*. London and New York: Roudledge.
- Van Niel, Robert. 1984. *Munculnya Elite Modern Indonesia*. Jakarta: Pustaka Jaya.

ENTEK AMEK KURANG GOLEK

**state, fishermen, and the illusion
of cornucopia**

Pujo Semedi

The second day of Idul Fitri 1993. Just like the *Idul Fitri* in previous years I went to Wonokerto Kulon on the flat coastal plain of Wiradesa district, Pekalongan Regency, Central Java, to visit my foster family and friends. Ten years before, thrilled by the idea of doing ethnographic research in an 'exotic' community, my classmates and I had rushed to Wonokerto Kulon for a short spell of fieldwork training. To us, undergraduate students of anthropology mostly trained in agricultural research, a sea-fishing community really suited our imagination of what was exotic. Eager to know what the lives of the villagers were really like, we soon found ourselves mixing with them, observing their activities, and asking questions. In short, doing what we thought of as participant observation. At the end we felt satisfied with the programme, and were able to write our first "ethnographic" account (TPL, 1983). In the following years my relationship with the villagers grew closer and became more personal as I went to the village again and again to collect data for term papers in 1984 and 1988 and an MA thesis in 1991, and a publication in 1992/93. After the 1984 fieldwork, the villagers were less surprised when they saw me walking the village streets, interviewing their neighbours or washing the deck of a boat I had joined on its fishing trip. More than once I overheard a villager telling a friend who had been asking what I was doing there: "He is the son of skipper Kadir. A student on a job training". That was that. To the villagers, some of whom have become close friends, I was known as a student on a job training and the son of skipper Kadir for I always lodged at his house in the Perumahan Nelayan (Fishermen Housing) hamlet during fieldwork; gradually I became the adopted son of Kadir and Maimun who had two married daughters.

Maimun was delighted to see us, when I came with my wife and Sekar, our two-year old daughter on *Idul Fitri* 1993. She immediately took Sekar and carried her around for the rest of our visit. We spent the time talking about many things. Maimun was alone at home; since eight in the morning Kadir had been away on the Sepait River to earn some extra money by offering *Idul Fitri* sightseers a sea trip. At one o'clock in the afternoon, Kadir came home. As his boat approached the river bank, a neighbour shouted to him; "Dir, your son is here visiting". Like his wife, he too was delighted to see us. We stayed for another hour and then asked permission to leave but promised Kadir and Maimun to visit them again sometime in the future. When we were already sitting on our motorbike, Maimun said to me in a low tone; "*Le, mbok nasibe bapakmu kae tulung dipikirke. Apa sak lawase*

urip arep dadi pendega terus. Kepriye jajal ben bisa nduwe prau dewe? "Son, what's going to happen to your father. Must he remain a simple fisherman for all his life. Will he ever be able to have his own boat?" I was not surprised by her subtle request. During my previous stay in Wonokerto Kulon, Maimun and Kadir had often talked about their wish to own a boat themselves. Indeed they had tried to make this dream come true. In 1989, they had sold their old house in Penjalan hamlet for two million rupiah and moved into a new, smaller house on the Fishermen Housing, provided free by the Ministry of Sosial Welfare. They spent 1.2 million on buying an old, six-metre long boat, while the rest was used to cover the cost for repairing the boat. The trouble was another one and half million rupiah was still needed to buy an engine and the fishing gear. Unable to lay their hands on that money, Maimun and Kadir eventually decided to sell the boat. But the hope of an owning boat had not vanished, and Maimun and Kadir raised the issue frequently.

There was nothing I could say at that moment except "Yes *Mak*", simply because it was impossible for me to say anything else; but the question intrigued me. Sea-fishing in Wonokerto Kulon was a far cry from a being healthy and profitable business. In 1981, the fishermen had received credit from the People's Bank in the form of 130 fishing boats, a debt which they were supposed to settle within 5 years; but during the next few years, the catch was too poor to allow them to repay the credit until finally in 1998 it was written off by the People's Bank. Since 1986 the fishermen have been confronting the fact that shrimp in the fishing grounds north of their village were in increasingly short supply, and their boats spent more and more time lying idle, while some had even been consigned the fate of lying along the banks of the Mrican River as dead hulks. Fishermen, deck-hands and boat owners all alike complained about the poor catch. Most boats on average were deployed on less than a hundred fishing trips per year. Together in 1993 they brought in a catch of around 344 million rupiah, which meant that each boat earned Rp 5,500 per day, the equivalent of eight kilos of rice. Distributed among three crew members and a boat owner; the income of each of them was less than two kilos of rice per day —as some part of the catch was used to cover the cost of their fishing supplies. Figures for the other years were no brighter. Maimun and Kadir were well aware of this and Kadir often complained to me how difficult it was to make a good catch nowadays.

Maimun and Kadir were certainly not the only ones in Wonokerto

Kulon who wanted their own boat; nearly everyone in the village did. The deck-hands used to dream of their own boat, while those who already had one wanted a bigger one, with a more powerful engine. Some fishermen were able to realize their dreams. Every time I visited Wonokerto Kulon there always one or two or three new, bigger, and more powerful boats under construction. Between 1981 and 1996, the number of boats increased from 135 to 187. During the same period some fishermen also enlarged their boats so that in these years the average size of boats in the village fishing fleet doubled from 3 tons to 7.3 tons. In 1997 Sentiko, a boat owner of my age and a graduate of the maritime academy in Semarang, even tried to get 21 million rupiah's worth of credit from the National Bank to buy another boat besides the *cantrang* he already had. He wanted one which was bigger and more powerful —and he asked me to review his proposal. Upon reading the proposal I asked him whether he was sure that his plan was going to work because if it went ahead it meant that he had to repay the bank at least 5 million rupiah per year for the subsequent five years. In a firm tone, he answered; "*Ora usah kuwatir, mangsa ora kebayara ... Angger praune gede, mesine gede, mesti beres!*". "There is nothing to worry about, the boat will be repaid ... If the boat is big, if the engine is big, then everything will be all right!". I was astonished. How could it be that while the villagers' boats failed to bring in sufficient catch, people were so determined to have their own fishing boat or to own yet another one; that they were so convinced that more boats and better fishing techniques were a sure remedy for their economic problems which were the direct outcome of their poor catch? Were they all extremely naïve in their calculations, or did they not calculate the cost and possible benefits at all. Or was I the one who did not understand the economic dynamics of sea-fishing?

--0--

Indonesia is an archipelagic country as the larger part of its territory is covered by sea. According to the 1957 Djuanda Declaration, its territorial waters cover an area of three million square kilometres. In the 1960/1970s, another two million square kilometres were added when the Indonesian government signed continent shelf agreements with Malaysia, Thailand, Australia, and India. There was yet another expansion in 1980 when the government declared all waters within 200 sea miles of the Indonesian coast as its Exclusive Economic Zone (Lembaga Pertahanan Nasional, 1999: 27-31; Valencia, 1990). This vastly fertile tropical seas which according to the calculations of

the Directorate General of Fisheries' (DGF) harboured an abundant stock of biotic resources —fish, shrimp, molluscs, crabs— could be exploited at a rate of 6 million tons per year without endangering the sustainability of the resources (Comitini and Hardjolukito, 1983: 38; Bailey, 1988)¹. Sea-fishing is indeed an important sector of the Indonesian economy. It provides a source of income for over one and half million fishermen (DGF, 1995) —and many others are involved in businesses related to sea-fishing, such as trade, fish processing, and transport.

The Indonesian fishing community is spread along a 81,000-kilometre long coastal area around the islands of the country, large and small. But the largest concentration of fishermen is on the north coast of Java. This thousand-kilometre long coastline is home to around one-third of the country's fishermen. If we sail through the north Java coastal waters every five to ten kilometres we will come across a fishing village on the river estuaries themselves or slightly upstream from there. In the coastal cities, we will see big fishing ports teeming with large boats. During the last three decades, sea-fishing has also started to mushroom along the rugged southern coast of Java. Here and there, in small bays a growing number of people are engaged in reaping the wealth of the Indian Ocean (Kendrick, 1993; Satriawan, 1997).

When I started this work in 1994, my intention was to study the impact of the modernization policies of the New Order regime in Indonesia on the socio-cultural life of a fishing community. This topic as such was quite relevant. During the era of the New Order regime, Indonesian sea fishery experienced a drastic change, marked by the emergence of a modern, large-scale fishing industry and simultaneous government intervention in the socio-economic

1 Indonesian government officials tended to view the fish stock in Indonesian seas as still under-exploited wealth (SM, March 15, 1969; May 19, 1970). President Soeharto himself maintained a view that until the mid-1990s only 50 percent of the country's sea fishery resources had been exploited (SM, Nov. 21, 1997). But, researchers doubted the number, as 6 million tons was too optimistic an estimation (Bailey, 1988). A marine biologist, Tatang Sujastani (1982), pointed out that by the early 1980s the country's most fertile seas such as the Straits of Malacca and the Java Sea were already suffered from overfishing. However apparently nobody paid any attention to that warning.

and political life of fishing communities². Backed by foreign funds from the Overseas Economic Cooperation Fund of the Japanese Government, the Asian Development Bank, and the World Bank, no less than US\$ 55 million was invested in the country's sea fishery between 1968 to 1975, in an attempt to create a productive primary industry which would be able to increase the per capita income of the fishermen, to produce commodities for export, and to increase foreign exchange earnings (Director General of Fisheries, 1974; Comitini and Hardjolukito, 1983: 7)³. A programme for modernizing the whole set-up was introduced. In coastal cities modern fishing ports, equipped with fish storage and processing plants, were built to facilitate fishing enterprises undertaken by joint ventures and Indonesian urban investors. The character of Indonesian sea fishery changed drastically and kept changing in a single direction: from rural-based to city-based activities, from obsolete sail-powered to mechanized fishing boats. Within eighteen years, from 1960 to 1978, the number of motor fishing boats in Indonesia increased from a mere 1,456 to 22,800 (Knox and Miyabara, 1984: 59). This change, as the statistical reports of the DGF pointed out, was accompanied by an increase in sea fishery production, from 661 thousand tons in 1965 to 1.3 million tons in 1979 and to 2.6 million tons in 1992. At the same time, the country's fish exports also increased from 23 thousand tons in 1968 to 78 thousand tons in 1979 and to 421 thousand tons in 1992⁴.

The New Order also launched an effort to change the fishermen's politico- economic orientation. Fishing co-operatives which had operated as the main economic institutions, at least in Java, of the fishing community since the colonial times, were crippled. The right of the co-operatives to run fish auctions in their working area was taken over by the government and then handed over to a newly created and government-sponsored body named the Centre for Fishing Co-operatives (*Puskud Mina*). In the same period, the government created another body, the All-Indonesian Fishermen's Association (*Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia: HNSI*), which was declared to be the only officially recognized association for Indonesian fishermen. Political aspirations and economic demands were supposed to be passed by

2 Krisnandhi, 1969; Bailey, 1988; Antlov, 1993; Hüsken, 1990.

3 At that time, the foreign market for sea fishery in Indonesia and other Southeast Asian countries began to flourish because of the improvement in the standard of living in developed countries (Yosuke, 1987; Suzuki, 1995).

4 Krisnandhi, 1969; DGF, 1979, 1980, 1995.

the HNSI to the government faction *Golongan Karya*.

Despite the magnitude of its undertakings, a policy aiming at the modernization of Indonesia sea fishery was not something which the New Order government had invented. Similar efforts can be traced back as far as the second decade of the twentieth century when the colonial regime created the Batavia Fishing Research Station in Jakarta, sponsored the organization of fishing co-operatives among fishermen on the northern coast of Java, and later on introduced the fishermen to motorized fishing boats⁵. And, as Masyhuri (1996) has demonstrated, government intervention in the socio-economic life of Javanese fishermen had already begun in the early decades of the nineteenth century with the introduction of a tax-farming system in sea fishery. This marks the time from which the development of Javanese fishing community became inextricably mixed up with direct government intervention. The reason the government was tempted to intervene is obvious, it could not but be aware that the fishing sector is imbued with great politico-economic potential. However small the population of fishing villages is, their economic role in the country is crucial, in bringing the bounty of the seas ashore and providing protein-rich food for their fellow citizens. Colonial and post-colonial governments, therefore, have done their best to increase the productivity of the fishing sector.

Neither the process of commercialization nor sosial differentiation among the Javanese fishermen were the outcome of the New Order era and its policies only. Aware of the importance of this argument, at an early stage of my research, I decided to focus on the diachronic rather than synchronic context of the New Order. I reformulated my research question in order to uncover the relationship between national policies in sea fishery and local activities in a Javanese fishing community from the colonial era in the nineteenth century to the mid-1990s when the writing was on the wall for the New Order regime. What happens at the local level when fishermen are subjected to government policies which are designed to step up productivity? How do these policies affect sosial conditions within the fishing community as well as that of the community's position in the wider sosial system as government thrust them into the role as participants in a sector important to the national politico-economic system? How do these policies affect the fishermen's cultural view of the fishery resources? What is the

5 Roosendaal and Van Kampen, 1909; Sunier, 1914; Van Kampen, 1922; DEZ, 1941.

nature of the cutting edge between government-sponsored sea fishery modernization and the fishing activities employed by the fishermen? Does the fishermen's paradoxical reaction to resolving their problem of a poor catch, as I have illustrated in the introductory chapter, have something to do with their long and close encounter with government policies?

--0--

From studying the sosial history of Wonokerto we learn that the ups and downs in village life in this Javanese fishing community during the last two centuries and the economic, sosial, and cultural configuration of sea-fishing are as much the product of the interaction between community and state as of the internal sosial dynamics of the community alone. Wonokerto's historical journey since the early nineteenth century has been a journey of incorporation of a marginal community on a far-away coastline into a fishing community which is fairly and squarely in the clutches of the state. However, seen from the perspective of the state, the incorporation has not been a total success. There is no question that economically Wonokerto community has been totally incorporated into the national fishing industry. However, sosially and politically the incorporation process is still only half-way.

Nineteenth-century Wonokerto, like other fishing communities along the northern coast of Java, was on the fringe of Java, tapping its sources of livelihood from an aquatic frontier. As they were part of a marine environment, relatively unconnected to the agro-ecological system of Java, fishing villages were sosially positioned on the fringes of the rural peasant world; they were the outer fence of the socio-cultural system of agricultural Java. Being the frontier of the Java, they were villages to which people from the interior could flee when life in their own communities became too burdensome. This is exactly what happened during the nineteenth century when Wonokerto grew rapidly because of the number of people leaving the interior of Java when the Cultivation System made life hard.

As we have seen, the state took early steps to reap benefits from the community through a systematic taxation implemented with the help of tax farmers. Later on, as the state bureaucracy grew stronger and more stable, the community was organized under a village administration under which taxation could be imposed more efficiently through bureaucratic channels. In the early twentieth

century, the state plunged deeper into village life by establishing local fishing organizations in the community in an attempt to jack up fish production of Java which had been on the decline in previous decades. In Wonokerto the organization helped the community to become financially self-sufficient so that boat owners were no longer dependent on external sources of capital to maintain and develop their fishing fleet. Five decades passed and over the years it turned out that the fishing organization—which was transformed into a co-operative after Indonesian independence—had not been successful in increasing fish production in Wonokerto. Capital accumulated by the fishing organization just made fishery a field of diminishing returns rather than developing its sustainability; more capital was invested in an already overcrowded business to work on already overexploited fishing grounds. Only when the New Order state directly involved itself by injecting a large amount of capital into the modernization of the infrastructure and by convincing capital owners to invest their money in modern fishing boats, were the fishermen in a position to expand their fishing grounds to faraway waters and greatly increase their catch.

Inevitably, these state interventions had brought impacts on the social condition of the fishing community. The introduction of the tax-farming system and the forced Cultivation System in the first half of the nineteenth century had laid a firm foundation on which the fishing community could develop as more people kept coming to take up jobs in sea-fishing. After the tax-farming system was abolished in the 1860s and the taxation of the fishermen was organized by the village administration, a clear social differentiation between deck-hands and boat owners became potently obvious in Wonokerto fishing community. This differentiation became more marked and more incisive in the early twentieth century when the Mino Soyo fishing organization was established and the community gained a position as the centre of sea-fishing in the Regency. This situation began to crumble in the mid-1960s with the coming of the New Order regime with its plans for the vast-scale modernization of sea fishery. Capital from outside the fishing communities was solicited and injected, and large-size, finely motorized boats were introduced. Almost overnight the position of Wonokerto as the centre of sea-fishing in the Regency had disappeared, and the community was turned into a supplier of deck-hands for the modern fishing industry in Pekalongan.

State intervention has also brought Wonokerto fishing community

from the precariousness of marginality to a recognizable position in the wider sosial arena. As the major source for labour supply of the economically important fishing industries of Pekalongan, nowadays the fishermen are hardly marginal people, nor is their community. The establishment of the Mino Soyo fishing organization in the early twentieth century certainly reinforced the fishermen's sosial identity. Pertinently, of the existence Mino Soyo was an explicit and official acknowledgment by the government of the community. Finally, as the fishing villagers' interaction with people of other communities has grown intensive the gap between fishing community and other communities must be narrowing. Many people from outside the fishing community have entered sea fishery and many people from the fishing community have sought a niche in urban-based industries.

In spite its great effect on the sosial organization and position of Wonokerto community in a wider sosial arena, apparently the state has not been quite as successful in transforming the villagers' 'loose-structure' sosial system into a more rigid structure with which it can easily control villagers through the bureaucracy and government regulations. Rather than dance to the government's tune, in running their economic activities the villagers tend to play according to their own rules of game. Rules which basically put individual interest and freedom above anything else. A government policy will be appreciated and adjudged in as far as it fits in with villagers' own interest and is attune to their sense of freedom. When it does not, villagers tends to write it off as nonsense.

Intensive campaigns run by political parties have also failed to turn villagers into loyal political constituents. Rather than being loyal constituents, Wonokerto villagers have preferred to sit on the sidelines and watch the political parties compete with each other as if they were watching a cock fight. With the advent of the New Order and the arena on which the competition between the political parties could be played out was replaced by a stage for the government's single party, the villagers simply joined the opposition.

Given the tendency displayed in their political behaviour, I do not think that modernization of sea fishery has improved political position of the fishermen. The creation of fishermen's front organizations by the political parties in the 1950s, Golkarization of the fishing community, and creation of the All Indonesian Fishermen's Association (*HNSI*) in the early 1970s, and on top of this, the creation of a so-called *Masyarakat Perikanan Indonesia*,

Indonesian Sea Fishery Society, by Sudwikatmono, President Soeharto's brother-in-law, few years before the New Order came to its end (Kompas, Jan. 27, 1996; Jun 1, 1996), undoubtedly has produced an impression that the modernization of sea fishery has allowed —Javanese and Indonesian— fishing communities to seize a greater share of the political power. However, this impression is wrong. As we have seen, all the institutions mentioned above were not created by the fishermen themselves to serve the fishermen's interests, but created by either the government or the political parties or entrepreneurs to serve their own interests. Cogently, political activities in the fishing communities have always been in the hands of people who are not themselves fishermen, but fishing organization managers, fish auction managers, staff members of the Fisheries Service Office and —as in the case of Indonesian Fishing Society— big entrepreneurs who invest their capital in sea fishery. They wield the power while the fishermen themselves keep spending most of their time at sea and are politically inactive. Undeniably, once such organizations have been set up, the fishermen's aspirations can be brought up in a wider political arena and in one or other way this can lead to an improvement in the fishermen's well being. However, what appears to be an improvement in the political position of the fishing community is basically not an improvement of the fishermen's political activities, but the effect of the growing interest of the state, political parties, and entrepreneurs in the fishing community and sea fishery. At best, I think, the fishermen are only political objects rather than active political subjects.

Nor does it stop here. There is still another effect produced by state policies of modernization of sea fishery.

I find no evidence that the so-called community property, as Matthews (1993) suggests, has ever existed among fishermen on the northern coast of Java. Indeed, every fishing community along the northern coast of Java generally claims its own fishing grounds, namely the waters north of the village where fishermen from the community regularly used to fish. But that is not a community property, since the claim is not accompanied by any institutionalized effort to prevent fishermen from other communities fishing in the fishing grounds. Perhaps the nineteenth-century fishermen fished only in fishing grounds nearby their villages, but it is very likely was because the nearby fishing grounds were still rich with fish rather than because of community common property. As overfishing began to pose a threat,

the fishermen began to expand their fishing grounds by intruding into other communities' fishing grounds. With the arrival of the twentieth century, it was clear that Java Sea was an open fishing ground where fishermen from Tegal could fish in Jakarta Bay and fishermen from Comal could fish in Juwana waters.

What did the open fishing grounds mean to the fishermen? They meant, fishing grounds were perceived as a frontier which could be expanded almost endlessly. When fish stock in a fishing grounds has been depleted, the fishermen could simply move to another fishing grounds which still contained a fresh stock of fish. Open fishing grounds have also led the fishermen to perceive sea fish not only as a common property, more than that it is a common property which always available. As far as the fishermen are concerned, the economic problem which haunts them lie not in the availability of the fish stock but in the death of fishing technology which would allow them to exploit it. When catches drop, the first thing the fishermen do is not to look for what is wrong with the fish stock, but what is wrong with their fishing boats and gear which seems no longer to be able to produce good catch for them.

Unfortunately for the fishermen, when the government intervened in the sea fishery, rather than urging the fishermen to revise their views on fishery resources, what the government did was typical of any other government's policy in dealing with frontier economic activities; it adopted the frontier people's views and practices and sanctioned these as a state policy (Melbin, 1978). When the government brought sea fishery modernization policies to the fishermen, in every respect the policies were based on views similar to these expressed by the fishermen: that, the sea fishery production must be increased and it is always possible to increase because the country's abundant sea fishery resources have not yet been fully exploited. The key to achieving that goal is the modernization of the fishing fleet to enable the fishermen to roam from sea to sea and reap the natural bounty of the deep. Culturally Indonesian sea fishery modernization is an engagement of two similar ideologies, not a conflict between two different ideologies. To the fishermen sea fishery modernization is neither a correction nor threat to their 'traditional' views. On the contrary, the government's systematic programme to increase and improve the scope of the fishermen's fishing technology is a reinforcement and an official endorsement of the fishermen's 'traditional' views.

In the last decades of the nineteenth century, when their catch declined what Wonokerto and Pekalongan fishermen did was to increase the number of their boats and consult numerologists to find out what was meta-technologically wrong with their boats and fishing gear. Nowadays, when faced with similar problems, what they do is —apart from still consulting numerologists— to increase the number of the boats and adopting more effective fishing technologies; as Sentiko convincingly said to me; “*Angger praune gede, mesine gede, mesti beres!*”. “If the boat is big and the engine is big, then everything will be all right”; Natural fish stock is never been considered to be a problem.

Perhaps, this view of an eternally available fish stock too provides an explanation for the fishermen’s consumerism and prodigal behaviour with money. Among Pekalonganese, laymen and government officials alike, Wonokerto villagers are notorious for their consumerism and prodigal behaviour. An official in the Regency office once told me that the fishing villagers are fools who have never abandoned the habit of spending their money lavishly without giving a single thought to the future, that they are people stung by “*Pung nak, pung no. Pung nak, pung keh*, mentality”, an abbreviation of ‘*Mumpung enak, mumpung ana. Mumpung enak, mumpung akeh*’; a Javanese version of *carpe diem*; seize the day before it is gone; enjoy the money before it vaporizes. Another official commented that the fishing villagers have never been cultivated the Javanese notion of *gemi ngati-ati*, being thrifty and shrewd.

The views expressed above are certainly exaggerated. As we have seen, whenever possible the villagers do try to save their money, in jewellery, in *arisan*, and in *nyelengi bahan* to be used to improve their housing. All this indicates that the fishing villagers do care about the future. However, as we have seen too, all these forms of saving do not eradicate the fact that the fishing villagers are indeed consumerist, prodigal, and they are proud of this; as a Banyuwangi —East Java— fisherman boasted; “*Kalau di sini, tidak cuma nasinya putih, rokoknya juga putih*”. “We here, not only is our rice white (first class), our cigarette is also white (Western)” (Kompas, Oct. 01, 1998). To some degree, the consumerist behaviour of the fishing villagers must have something to do with the total integration of their economy into the market system, what constantly stares them in the face is that most of their consumption goods have to be bought; pertinently, the market not only provides the fishing villagers with goods to cover their daily needs, it also dictates their taste. But, I think to put this all down to the

market is simplistic. More than anything else, the way people treat and use their money is reflection of the way they perceive it.

As the fish stock is perceived by the fishermen to be an unailing and ever-present blessing to a greater or lesser degree the money produced from it is perceived in a similar way too. Once I asked Skipper Asim about the fishing villagers' consumerism and prodigality in squandering their money, and he replied; "Don't be astonished! That is us. Fishing villagers. Never regret spending money, *entek amek kurang golek*". Money is perceived as something cheap, *entek amek kurang golek*; if it is running out, there is still abundance out there to be harvested; if it is less than it is supposed to be, there is still plenty out there to be picked up.

It is not too much, I think, to say that basically the fishermen and their fellow fishing villagers are people caught up in the toils of a collective dream of abundant resources and equally abundant wealth. When money comes their way they spend it in a prodigal way, as if they are prosperous people with infinite supply of cash. When poverty strikes they grumble that their better-off neighbours accumulate their money with aid of evil spirit masters. Their grouching is not because they perceive that the wealth is limited, therefore their better-off neighbours have stolen part of the wealth which is supposed to be their right as Foster (1967) has suggested. The wealth is abundant, it just becoming harder to access so that only through recourse to supra-human efforts people can lay their hands on it.

Indeed, up to this time the views of the fishermen and of the government about the availability of the fish stock and the role key of fishing technologies have not been contradicted by declining catches. The development of a modern fishing fleet in Pekalongan has increased the catch and brought the fishermen there a better economic life. But, there is no guarantee that the fishermen can sustain this achievement for a longer period, since the improvement has basically been achieved through the expansion of fishing grounds. The fact is that since the 1980s catches from the Java Sea have been decreasing steadily. To get an adequate catch, at the cost of fishermen of other islands, nowadays Pekalongan purse seine fishermen have to fish in the Natuna Sea and in Masalembo waters. Sooner or later fishery resources in the Natuna and Masalembo fishing grounds will be exhausted too. When this happen, overfishing like that which struck the fishing grounds off northern coast of Java in the nineteenth century and dragged the fishing community into poverty will certainly

strike again. Before it is too late, I think, the fishing community and the government should strike a new tack in the way the fishery is run. A new tack which is based on the more realistic premise that fishery resources are limited and are not as abundant as they are imagined to be.

Bibliography

- Antlov, Hans 1993 *The State in the Village*. Phd thesis. Goteborg: Dept. of Anthropology, University of Goteborg.
- Bailey, Conner 1988 "The Political Economy of Marine Fisheries Development in Indonesia" in *Indonesia* No. 46. Ithaca: Southeast Asia Program, Cornell University.
- Comitini, Salvatore and Sutanto Hardjolukito 1983 *Indonesian Marine Fisheries development and Strategy under Extended Maritime Jurisdiction*. Hawaii: East-West Environmental and Policy Institute.
- Department van Economische Zaken (DEZ) 1941 *Verslag van de Vischveilingen aan de Noordkust van Java over 1940*. Batavia: Landsdrukkerij.
- Director General of Fisheries 1974 "Strategi dan Kebijakan Pembangunan Perikanan di Indonesia, Khususnya Pembangunan Perikanan Rakyat", Opening Speech at the Workshop of Artisanal Fisheries Development in Indonesia with Special Emphasis on Brackish Water Pond Culture". Jakarta: Directorate General of Fisheries, March 4, 1974.
- *Statistik Perikanan Indonesia*. Year 1970 - 1995. Jakarta: Direktorat Jenderal Perikanan.
- Foster, George M. 1967 "Peasant Society and The Image of Limited Good" in Potter, Jack M., May N. Diaz and George M. Foster (eds.) *Peasant Society*. Boston: Little Brown and Co.
- Hüsken, Frans 1990 "Urban Idioms in a Village World: Power and Communication in Rural Java" in Kemp, Jeremy (ed) *Peasants and Cities, Cities and Peasants*. Overveen: ACASEA.
- Van Kampen, P.N. 1922 *Visscherij en Vischteelt in Nederlandsch-Indie*. Haarlem: H.D. Tjeenk Willink & Zoon.

- Kendrick, Anita 1993 "Access and Distribution: Two Aspects of Changing Local Marine Management Institutions in Javanese Fisheries" in *MAST* Vol. 6 (1/2). Amsterdam: MAST.
- Knox, George A. and Tetsuo Miyabara 1984 *Coastal Zone Resource Development and Conservation in Southeast Asia*. Hawaii: East West Centre.
- Krisnandhi, Sulaiman 1969 "The Economic Development of Indonesia's Sea Fishing Industry" in *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. Vol. V. No. 1. March 1969. Canberra: ANU.
- Lembaga Pertahanan Nasional 1999 *Kewiraan Untuk Mahasiswa*. Jakarta: Gramedia. Masyhuri 1996 *Menyisir Pantai Utara*. Jogjakarta: Pustaka Nusantara and KITLV.
- Mathews, David Ralph 1993 *Controlling Common Property. Regulating Canada's East Coast Fishery*. Toronto; University of Toronto Press.
- Melbin, Murray 1978 "Night As Frontier" in *American Sociological Review*. No. 1. Vol. 43.
- Roosendaal, A.M. van and P.N. Van Kampen 1909 "Verslag van de verrichtingen van het Onderzoekingsvaartuig "GIER" gedurende het tijdvak 2 September 1907 (datum van indienststelling) tot U 1908" in *Mededelingen van het Visscherij Station te Batavia*. No IV. Batavia-Weltevreden: G. Kolff & Co.
- Satriawan, Budi 1997 *Nelayan Desa Watukarung*. BA thesis. Yogyakarta: Dept. of Anthropology, Gadjah Mada University.
- Sunnier, A.L.J. 1914 "De beteekenis van het natuurwetenschappelijk visscherij-onderzoek voor Nederlandsch-Indie" in *Mededelingen van het Visscherij Station te Batavia*. No X. Batavia-Weltevreden: G. Kolff & Co.
- Sujastani, Tatang 1981 "The State of Indonesian Marine Fishery Resource Exploitation" in *Indonesian Research and Development Journal*. Vol. 3 No. 1. Jakarta: Institute of Agricultural Research and Development.
- Suzuki, Tadashi 1995 *Imports of Prawns/Shrimp to Japan: Their Impact on Exporting Countries*. Research report.
- TPL (Tim Peneliteiten Lapangan) 1983 *Masyarakat Nelayan Desa Wonokerto*. Jogjakarta: Keluarga Mahasiswa Antropologi,

Fakultas Sastra, Universitas Gadjah Mada.

- Valencia, Mark J. 1990 "International Conflict over Marine Resources in South-East Asia: Trends in Politicization and Militarization" in Ghee, Lim Teck and Mark J. Valencia (eds.) *Conflict over Natural Resources in South-East Asia and the Pacific*. Manila: Ateneo de Manila University Press.
- Yosuke, Inuke 1987 "Fat Prawn for Japan, Slim Picking for the Fisherpeople" in *AMPO Japan-Asian Quarterly Review*. Vol. 18. No. 4.

Newspaper

Kompas Daily

Jan. 27, 1996 "Diumumkan, Tahap Pertama Rencana Deregulasi Tahun 1996. Beberapa Pungutan Dipangkas, Keran Impor Kapal Ikan Dibuka"

June 01, 1996 "Masyarakat Perikanan Nusantara"

Oct. 01, 1998 "Nasi Putih dan Rokok Putih -- Janji dari Laut (1)"

Suara Merdeka (SM)

Mar. 15, 1969 "Kekayaan Laut Kita Masih Belum Tergali"

May 19, 1970 "Presiden: Baru 5% Hasil Laut Kita Yang Dapat Dimanfaatkan"

Nov. 21, 1997 "Separo kekayaan Laut Belum Dimanfaatkan"

* The presentation is a recycle of my 2001 works *Close to the Stone far From the Throne. The story of a Javanese fishing community, 1820s -1990s*.

MENTALITAS ORANG INDONESIA

**Tantangan bagi Paradigma Baru
Strategi Kebudayaan dalam
Perspektif Pendidikan**

Sunaryo Kartadinata

Dalam pembangunan bangsa, saat ini kita cenderung menerapkan prinsip-prinsip paham liberalisme yang jelas tidak sesuai dan kontradiktif dengan nilai, budaya, dan karakter bangsa Indonesia. Sudah saatnya Indonesia melakukan tindakan korektif, tidak dengan menghentikan proses reformasi yang sudah berjalan, tetapi dengan mencanangkan Revolusi Mental menciptakan paradigma, budaya politik, dan pendekatan nation building baru yang lebih manusiawi, sesuai dengan budaya Nusantara, bersahaja, dan berkesinambungan ...

Sistem pendidikan harus diarahkan untuk membantu membangun identitas bangsa Indonesia yang berbudaya dan beradab, yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral agama yang hidup di negara ini. Akses ke pendidikan dan layanan kesehatan masyarakat yang terprogram, terarah, dan tepat sasaran oleh negara dapat membantu kita membangun kepribadian sosial dan budaya Indonesia (Joko Widodo, Kompas, 10 Mei 2014).

Kondisi Mental Bangsa yang Rapuh

Revolusi Mental yang dicetuskan presiden terpilih Joko Widodo adalah sebuah langkah besar yang memerlukan langkah masif dan gerakan menyeluruh. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, karena memang sebelumnya tidak pernah terjadi perubahan mental secara mendasar dan signifikan dalam kehidupan bangsa ini. Revolusi Mental yang digagas Jokowi mestinya telah terjadi sejak Reformasi di Republik ini digulirkan pada tahun 1998, walaupun mungkin ketika itu lebih tepat disebut sebagai Reformasi Mental. Era reformasi yang ditandai dengan keterbukaan, kebebasan dan demokrasi, telah membawa kepada euforia kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih mengedepankan bingkai individualistik dan kelompok daripada bingkai nasionalisme dan kehidupan bangsa secara hakiki. Pemikiran dan perkataan besar yang diungkapkan berbagai pihak berseliweran dalam bingkai masing-masing dan tidak dalam satu visi besar yang menjadi perekat keragaman yang membentuk tata pikir (*mindset*) bangsa yang membangun kekuatan kepemimpinan nasional. Pemikiran dan perkataan besar itu menjadi tidak berkontribusi signifikan karena bermuara pada masing-masing kepentingan, dan tidak bermuara pada kesamaan *mindset* sebagai bangsa dan sebagai individu warga negara yang merikat diri secara kuat ke dalam *mindset* bangsa dan kebangsaan. Persoalan utama yang terjadi ialah karena tidak ada *mindset* yang tumbuh dalam setiap kepala warga negara Indonesia yang tertuju kepada visi yang sama. Kondisi semacam ini telah membawa proses kehidupan berbangsa

dan bernegara kepada munculnya “kepemimpinan melalui konflik” (*leading trough conflict*) yang berkepanjangan.

Konflik ini ibarat sebuah kondisi yang dibangun dengan menumbuhkan kultur kompetisi di dalam berbagai tatanan kehidupan, bahkan dalam proses pendidikan sekalipun kultur kompetisi menjadi ukuran prestasi yang acap kali mengabaikan kultur kolaborasi. Kultur kompetisi telah begitu mengedepan dan dominan dalam masyarakat Indonesia dewasa ini, dan kompetisi yang tumbuh adalah kompetisi horizontal. Artinya kompetisi untuk mengungguli dan mengalahkan yang lain, kalau perlu dengan cara apa saja yang penting tujuan tercapai. Kondisi seperti ini amat kasat mata dapat kita saksikan dalam keseharian kehidupan berbangsa dan bernegara, baik yang terjadi langsung di masyarakat maupun dalam representasi masyarakat di legislatif. Kultur ini telah menjadi virus dan menular ke dalam dunia pendidikan. Kompetisi demi kompetisi dalam dunia pendidikan pun, dalam berbagai aspeknya, bergulir terus. Pendidikan menjadi ajang kompetisi, kalau tidak menjadi sebuah hobi.

Kultur kompetisi bukanlah hal buruk. Namun jika kompetisi itu tidak menjadi nilai dan kultur yang terinternalisasi sebagai kekuatan internal yang mendorong perbaikan mutu perilaku jangka panjang, melainkan lebih merupakan perilaku instan untuk meraih kejuaraan dan pujian, maka yang akan terjadi adalah perilaku paradoks dan konflik potensial serta perilaku munafik. Kultur ini sangat tidak menguntungkan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara sebab bisa menumbuhkan predisposisi perilaku yang tidak sehat dalam jangka panjang. Secara pedagogis, kultur seperti ini tidak membangun kedewasaan berpikir peserta didik. Tidak menumbuhkan kesadaran tanggung jawab karena perilaku yang muncul lebih bergantung pada kekuatan eksternal.

Kondisi Ideal yang Diharapkan: Pemaknaan Landasan Normatif Pendidikan

Dalam perspektif pendidikan, kondisi ideal perkembangan manusia Indonesia yang diharapkan adalah tumbuhnya pribadi dewasa yang memiliki kekuatan kompetisi internal diri untuk memenuhi standar keunggulan prestasi atau kinerja yang menjadi target capaiannya. Dengan demikian yang akan tumbuh dan berkembang adalah kesadaran dan kebutuhan akan kejujuran diri

(karena orang tak akan bohong pada dirinya), kerja keras, tanggung jawab, dan keberanian menghadapi risiko atas pilihan yang diambilnya. Kondisi diri seperti ini tidak boleh meniadakan kultur kolaborasi. Yang harus terjadi adalah kompetisi ke dalam diri untuk kinerja unggul dan benar, kolaborasi ke luar diri untuk membangun kebersamaan. Dengan demikian akan terwujud kompetisi yang santun dalam kultur kolaborasi, dan “*mindset* kompetisi dalam kedamaian”.

Adalah hal yang paling mudah untuk menyalahkan dan menghakimi pendidikan ketika perilaku peserta didik di luar harapan. Perilaku dan kultur pendidikan akan membentuk perilaku peserta didik. Apa yang keliru dengan (kultur) pendidikan sehingga tidak membangun mental (kejujuran, kerja keras, tanggung jawab, kebersamaan, dan nasionalisme) yang kokoh? Apakah pendidikan di Republik ini belum punya landasan dan arah yang jelas terkait dengan pembangunan mental manusiannya?

UU Sisdiknas yang lahir 11 tahun yang lalu telah menegaskan arah dan tujuan pendidikan nasional sebagai landasan dan arah pembangunan manusia Indonesia secara utuh. Landasan paradigmatis (ALPTKI, FKIP, ISPI: 2014) penyelenggaraan pendidikan dirumuskan atas dasar arahan, terutama, Pasal 1 (1-2), Pasal 3, Pasal 4 (3), Pasal 5 UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas. Dari pasal ayat yang disebutkan, ditarik makna yang berporos pada arahan Pasal 1 (1) yang menegaskan bahwa: “*Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.*”

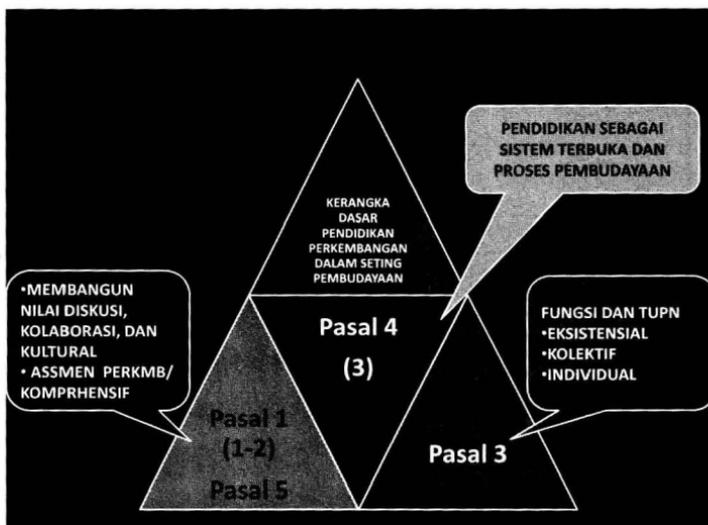
- a. *Suasana belajar dan proses pembelajaran*, yang dinyatakan pada Pasal 1 (1), menjadi wahana utama yang harus diusahakan *secara sadar dan terencana* (frasa imperatif Pasal 1 ayat 1) dalam mewujudkan upaya pendidikan yang mengandung implikasi imperatif bagi (1) penempatan peserta didik dalam posisi sebagai pemikir aktif, (2) penekanan pada proses transformasi, diskusi dan kolaborasi, dan (3) sistem evaluasi (komprehensif) yang tidak berhenti pada ukuran-ukuran kuantitatif yang mengukur ekspose-ekspose didaktis belaka, melainkan menggambarkan progres perkembangan peserta didik.

- b. *Suasana belajar dan proses pembelajaran* yang dikembangkan secara sadar dan terencana sebagaimana dimaksud, harus diselenggarakan dalam konteks arahan Pasal 1 (2) sehingga suasana belajar dan proses pembelajaran yang dikembangkan oleh para guru harus secara sadar pula berlangsung dalam konteks dasar negara Pancasila dan UUD 1945, nilai-nilai agama dan budaya nasional Indonesia yang tanggap terhadap perkembangan zaman, jelasnya kehidupan global transkultural. Persoalan *fokus dan tujuan* menjadi isu krusial pengambilan keputusan yang harus dilakukan oleh para guru sepanjang proses dan transaksi pembelajaran berlangsung.
- c. *Suasana belajar dan proses pembelajaran* yang dimaksudkan untuk mengawal penyiapan dan pengembangan manusia Indonesia masa depan (GE 2045?) perlu dipahami dari arahan Pasal 3 UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas yang secara kontekstual dalam konteks arahan Pasal 1 (2) adalah untuk mewujudkan fungsi pendidikan nasional (arahan Pasal 3). Arahan Pasal 3 mengandung makna adanya ragam tataran fungsi, yaitu fungsi: (1) *eksistensial*, membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat yang akan menjamin kepastian keberlanjutan eksistensi bangsa Indonesia, (2) *kolektif*, mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai kekuatan kolektif karakter bangsa, dengan menempatkan nilai kulutral sebagai perekat dari kekuatan kolektif itu, (3) *individuasi dan diferensiasi*, mengembangkan potensi peserta didik untuk menjadi manusia Indonesia sebagaimana arahan Pasal 1 (1). Ketiga tataran itu bermuara sebagai Tujuan Utuh Pendidikan Nasional.
- d. *Suasana belajar dan proses pembelajaran* yang bertolak dari esensi dan fungsi pendidikan yang ditegaskan dalam Pasal 1 (1-2) dan Pasal 3 UU No. 20/2003 sebagaimana digambarkan mengandung konsep pendekatan perkembangan, pengembangan daya adaptasi cerdas dan kompetitif, serta proses diferensiasi pendidikan dan pengakuan atas keragaman. Kandungan konsep pendekatan yang disebutkan terakhir harus diwujudkan dalam konteks arahan Pasal 4 (3) UU No. 20/2003 yang

esensinya terletak bahwa pendidikan (yang diwujudkan dalam suasana belajar dan proses pembelajaran) harus menjadi proses pemberdayaan (pengembangan potensi) dan pembudayaan. Pembudayaan perlu memperoleh penegasan sebagai *setting* atau adegan di mana suasana belajar dan proses pembelajaran berlangsung dan menjadi wahana untuk mengembangkan, menguatkan, memperbaiki perilaku yang berorientasi pencapaian tujuan utuh pendidikan nasional dan bahkan menyembuhkan perilaku yang tidak sesuai dengan tujuan utuh pendidikan nasional dimaksud. Pembudayaan dilihat dari dua arah utama, yaitu (1) menumbuhkan kebanggaan dan sikap memelihara akan kelestarian nilai-nilai warisan budaya baik yang bersifat fisik dan tampak (*tangible*) maupun yang “tidak tampak” (*intangible*), (2) pengembangan perilaku yang membentuk budaya nasionalisme, kerja keras, jujur, empatik, demokratis, toleran, dan perilaku efektif, kreatif dan inovatif yang relevan dengan manusia Indonesia masa depan yang diharapkan (GE 2045).

- e. *Suasana belajar dan proses pembelajaran* yang dikembangkan dan diwujudkan secara sadar dalam *setting* dan konteks sebagaimana dijelaskan pada butir a s.d d harus mengakomodasi semua peserta didik dengan segala keragamannya. Arah Pasal 5 mengandung implikasi imperatif bahwa konteks dan *setting* suasana belajar dan proses pembelajaran harus menghindari diskriminasi perlakuan terhadap peserta didik, dan yang harus terjadi adalah diferensiasi dan diversifikasi layanan atas dasar keragaman dan kekhususan kebutuhan peserta didik. Prinsip inklusi harus menjadi orientasi penyelenggaraan pendidikan dan terhindar dari layanan-layanan eksklusif yang akan menimbulkan “*opportunity cost*” tinggi yang akan menimbulkan ketidakadilan perlakuan pendidikan.

Keutuhan kerangka pikir paradigma penyelenggaraan pendidikan, yang secara sadar dan terencana diwujudkan dalam suasana belajar dan proses pembelajaran, dapat divisualisasikan seperti pada Gambar 1.



Gambar 1. Landasan Paradigmatik Suasana Belajar dan Proses Pembelajaran.

Kondisi ideal yang digambarkan adalah sebuah proses *pembelajaran yang mendidik* yang memfasilitasi perkembangan manusia (Indonesia) berdasarkan ragam potensi dalam konteks ragam budaya, baik aspek intelektual maupun nonintelektual sebagaimana terkandung di dalam Tujuan Utuh Pendidikan Nasional.

Pada saat ini pendidikan terlalu berorientasi pada hasil sehingga menimbulkan perilaku instan. Poin besar yang harus dilakukan dari upaya pendidikan adalah memperbaiki proses. Pasal 1 ayat 1 membawa implikasi mendasar konseptual yang menekankan pentingnya aspek proses dalam pendidikan. Pendidikan harus berbasis pada perkembangan dan kebutuhan anak dan tidak dijadikan kepentingan ajang orang dewasa yang bisa mengeksploitasi anak. Proses pendidikan harus dihayati betul oleh guru.

Cara belajar siswa aktif yang kembali diangkat dalam konteks Kurikulum 2013 akan membuat tugas guru jadi lebih berat. Jika guru memberikan tugas siswanya tidak beragam, pembelajarannya tidak akan menumbuhkan kreativitas. Untuk itu, seharusnya guru mendorong siswa menggunakan sumber-sumber belajar yang lebih variatif. Mari kita bangun pendidikan ke depan secara lebih bermartabat.

Penguatan sisi proses dalam pendidikan akan membangun konsistensi perilaku kognitif, afektif, dan perilaku nyata. Konsistensi ini penting karena pendidikan bertujuan mengembangkan keutuhan pribadi yang siap menerima risiko pilihan dan tanggung jawab. Pendidikan harus sampai membentuk tanggung jawab yang tidak diajarkan sebagai pengetahuan melainkan sebagai internalisasi nilai melalui proses pendidikan yang bermutu. Pendidikan tidak hanya diukur dari ukuran kuantitatif tapi juga dari proses. Diharapkan makin tinggi pendidikan seseorang maka akan makin tinggi pula kesadaran tanggung jawabnya.

Pengembangan Kapital Strategik: Proses Mental Membangun *Mindset*

Empat misi Negara yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, yakni: “... (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia... (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...” , harus menjadi landasan bagi pembangunan nasional.

Sukses pembangunan nasional bidang pendidikan dapat dicapai jika telah mencapai titik keseimbangan yang optimal antara dua kepentingan yang ekstrem, yaitu memperkokoh kedaulatan negara (*inward looking*) dan memperkuat daya saing bangsa (*outward looking*). Keempat misi tersebut hanya dapat dicapai jika amanat UUD 1945 dapat dipahami, dimanifestasikan melalui ketentuan UU Sistem Pendidikan Nasional dan peraturan pelaksanaan, serta dijabarkan secara “arif dan bijaksana” ke dalam kebijakan pendidikan nasional.

Setiap penyelenggara pemerintahan harus berusaha keras untuk mengemban misi “mencerdaskan kehidupan bangsa”, dengan mewujudkan sistem pendidikan nasional yang mendorong terjadinya transformasi budaya tradisional menuju budaya modern, budaya feodal menuju budaya demokratis, serta budaya birokratis menuju budaya profesional.

Sebagai wujud dari negara kesejahteraan, misi mencerdaskan kehidupan bangsa, harus dimaknai pula dengan misi memajukan kesejahteraan umum. Dengan semakin kokohnya kedaulatan negara, semakin cerdasnya kehidupan bangsa, dan semakin terpenuhinya kesejahteraan umum, maka perjuangan selanjutnya adalah

memperkuat daya saing bangsa. Misi ini tertuang dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945: "Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial." Mengemban misi ini, pembangunan pendidikan nasional harus diarahkan pada penguatan keunggulan dan daya saing bangsa dalam era globalisasi, yaitu melalui penguatan mutu dan keunggulan semua jenjang pendidikan, dengan tetap berakar pada jati diri bangsa sendiri. (UPI: 2014).

Mindset kompetitif-damai sebagaimana disebutkan adalah *continum polar* kondisi kehidupan mental yang terbentuk melalui proses kultural. Esensi membangun kesejahteraan adalah pengembangan kecakapan hidup yang lebih baik, yang menempatkan hati dan pikiran untuk kesehatan kehidupan emosional dan spiritual yang didukung oleh kecukupan material guna mempertahankan kelangsungan hidup. Sementara *mindset* damai terbentuk dari kedamaian dalam diri perorangan yang bersifat unik dalam tatanan kultur dan jejaring sosial tertentu, dan muncul sebagai kedamaian kolektif yang tumbuh bersamaan dengan kesadaran, komunikasi, dan kecerdasan kultural.

Untuk mewujudkan kondisi ideal yang digambarkan ada perangkat kapital yang harus dikembangkan. Pengembangan kapital adalah sebuah proses mental yang menekankan kepada perubahan perilaku manusia baik secara individual maupun kelompok, membangun *mindset* kolektif sebagai masyarakat dan bangsa. Kapital strategik dalam membangun (*mindset*) bangsa adalah kapital: manusia, budaya, kelembagaan, dan pengetahuan. Kapital lain seperti infrastruktur dan finansial adalah hal yang penting yang harus kokoh, sementara *sustainability*, *comparative* dan *competitive advantage* dibangun dalam *setting* pengembangan kapital sosial.

Kapital manusia, dikembangkan dalam wujud penguatan keimanan dan ketaqwaan, kecerdasan, keterampilan, wawasan, kecakapan dan karakter sebagaimana terkandung dalam Tujuan Utuh Pendidikan Nasional. Kapital kultural dikembangkan baik sebagai proses maupun hasil. Kapital kultural sebagai proses, yang harus diwariskan kepada generasi muda, melalui ragam saluran, tataran, dan *setting* (*multi chanel, level, and setting*). Kapital kultural sebagai produk, ragam bentuk seni budaya seperti musik, bahasa, dan tradisi maupun dalam bentuk sikap dan nilai-nilai yang berorientasi kreasi dan inovasi, yang membangun sustainability bangsa baik secara ekonomi, sosial, budaya, maupun politik. Dalam pengembangan

kapital kultural sangat mungkin terjadi proses adaptasi, perubahan, perbaikan, dan bahkan terapi kultural yang membentuk daya kreasi dan inovasi, membentuk kultur inovasi (*innovation culture*).

Kapital kelembagaan dibangun dalam *mindset* seperti efisiensi pemerintahan, profesionalisasi birokrasi, proteksi kekayaan (alam maupun lainnya) baik yang tampak maupun tidak tampak, kekuatan bisnis, tenaga kerja, dan remunerasi. Kapital sumber daya pengetahuan dibangun dalam *mindset* menghargai dan meraih ilmu pengetahuan dan teknologi, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan kapasitas perguruan tinggi dan riset, dan kelompok pemikir.

Ada tanggung jawab unik pendidikan dan pendidikan guru. "Tanggung jawab unik itu adalah menuntun bangsa ke jalan nilai-nilai moral dan spiritual, mendidik warga negara bertanggung jawab atas kemaslahatan masyarakat, dunia, dan lingkungan alamnya. Pendidikan guru mengemban misi penting di dalam mewujudkan warisan nilai-nilai keadilan, demokrasi, keharmonisan, kesehatan lingkungan dan pewarisan nilai-nilai kultural yang akan menjadikan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa kesuksesan dan kemaslahatan bagi pembangunan daya saing bangsa." (Sunaryo Kartadinata: 2014) "... Ada tanggung jawab moral perguruan tinggi dalam konteks ini, yaitu memperkuat nilai-nilai para pakar untuk berperan sebagai hati nurani bangsa di dalam membangun generasi muda dan melahirkan kemaslahatan sosial."

"Adalah tanggung jawab pendidikan untuk membangun *mindset* damai yang tumbuh (*growing peaceful mindset*) dan bukan *mindset* yang pasti (*fixed mindset*) agar manusia yang dilahirkan dari pendidikan memiliki kepakaran tinggi yang bermuatan hati nurani yang akan menjadi penentu kesuksesan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membuahkan kemaslahatan bagi umat manusia di dunia ini." (Sunaryo Kartadinata: 2014).

Dapat ditegaskan bahwa *mindset* bangsa adalah *mindset* kolektif dan bukan agregasi *mindset* perorangan. *Mindset* bangsa harus diikat oleh perekat kultural yang disebut dengan kesadaran dan kecerdasan kultural, dibangun dan dikembangkan sebagai nilai kultural dan karakter bangsa, yang bisa diwariskan kepada generasi penerus melalui proses pendidikan secara utuh, dan menjadi kekuatan bagi pengembangan dan keberhasilan bisnis untuk mewujudkan kesejahteraan dalam bingkai kokohnya karakter bangsa untuk

mewujudkan perdamaian.

Membangun Kultur Inovasi: Daya Ungkit (*Leverage*) Budaya Lokal

Landasan normatif pendidikan Pasal 4 (3) UU No. 20/2003 menegaskan pendidikan sebagai proses pemberdayaan dan pembudayaan. Makna yang terkandung dalam arahan Pasal-ayat ini adalah bahwa pengembangan ragam potensi peserta didik harus berlandaskan kepada dan membangun budaya secara dinamis dan memiliki daya adaptasi tinggi. Daya adaptasi ini perlu menjadi kecakapan hidup manusia karena manusia selalu dihadapkan kepada perubahan lingkungan. Daya adaptasi merupakan kebutuhan dasar manusia, inheren dalam kehidupan manusia, untuk membangun daya tahan hidup, bukan semata-mata daya tahan fisik melainkan daya tahan psikososio-kultural-spiritual. Kebutuhan berekreasi dan inovasi lahir dari kebutuhan adaptasi.

Oleh karena itu, inovasi tidak dipandang sebagai kekuatan eksternal yang dipaksakan masuk ke dalam cara hidup dan berpikir manusia (Indonesia) melainkan sebuah daya adaptasi kreatif yang ada dalam diri manusia untuk membangun ketahanan hidup bangsa. Ini berarti kreativitas dan inovasi tumbuh dan berbasis kepada potensi diri, kelompok, dan bangsa. Keragaman kultur, etnis, dan keyakinan yang menjadi aset bangsa merupakan keragaman potensi bangsa untuk membangun daya adaptasi yang melahirkan kreasi dan inovasi. Relevansi inovasi dalam konteks global ialah bahwa: *"In a rapidly changing global world, managers must use all their abilities to anticipate opportunities and threats"*(IGF: 2013). Manajer dalam pengertian ini termasuk di dalamnya para pendidik dan pemimpin penyelenggara pendidikan.

Dikatakan bahwa *"Innovation is a process by which value is created for customers through public and private organizations that transform new knowledge and technologies into profitable products and services for national and global markets. A high rate of innovation in turn contributes to more intellectual capital, market creation, economic growth, job creation, wealth, and higher standard of living. ... innovation cultures will define the future sustainability of a nation. Innovation nations will attract the talent, the capital, the assets, the business and see their economies soar."* (IGF: 2013).

Pikiran ini mengandung makna dan implikasi bahwa keragaman budaya dan potensi bangsa di satu sisi dan daya saing global yang harus dibangun di sisi lain, mesti berbasis pada kekuatan dan keunikan lokal dan dikembangkan dalam kerangka pikir kompetisi (berbasis keunggulan lokal) dalam kultur kolaborasi dan keadamaian (*mutual symbiosis*). Kreativitas dan inovasi dalam konteks budaya lokal adalah mengembangkan nilai inovasi (*innovation values*) yang menawari konsumen dengan nilai kebaruan dan keunggulan produk di dalam bisnis tradisional melalui pengetahuan dan gagasan inovatif. Konstruksi mental yang dikembangkan adalah "*living local values*" yang harus didukung oleh kepemimpinan yang terlibat dengan hati dan pikiran yang dipimpinya untuk mewujudkan perbaikan produk maupun layanan secara berkelanjutan. Nilai-nilai yang dibawa atau masuk dari luar harus diinternalisasi menjadi milik sendiri dan menjadi nilai-nilai baru bangsanya. Di sinilah faktor kreativitas dan inovasi sebagai wujud kekuatan daya adaptasi manusia menjadi kekuatan untuk menyesuaikan diri dengan nilai-nilai baru itu.

Implikasi bagi pendidikan, perlu redefinisi muatan lokal dan mengkolaborasikan program pendidikan dengan "*living local values*" yang menumbuhkan kecakapan vokasional peserta didik yang terakognisi secara internasional dan ekonomi berbasis pengetahuan nilai lokal (*local values knowledge based economy*), yang didukung oleh kepemimpinan pedagogis¹ transformatif.

Strategi Implementasi: Pendidikan Berbasis Politik Jati Diri

Pendidikan sebagai proses pemberdayaan dan pembudayaan mengandung makna pendidikan berbasis budaya, proses membangun jati diri bangsa. Pendidikan berlandaskan dan/atau untuk mewujudkan "politik jati diri". Bingkai dasar yang perlu mendapat perhatian, antara lain adalah hal-hal berikut.

1. *Membangun mindset kolektif.* Pendidikan berbasis budaya harus diawali dengan membangun kesamaan *mindset* yang menjadi visi bersama, yang tumbuh dan hidup dalam setiap

1 Kepemimpinan pedagogis menjadi penting dalam mendorong perubahan dan menggeser cara pandang yang menganggap sekolah sebagai tempat guru *mengajar* ke arah sekolah sebagai tempat guru *belajar* (belajar dari kekurangan, belajar dari peserta didik, dan belajar mengadopsi pembaharuan).

pikiran warga Negara Indonesia. Visi harus menjadi *trigger* yang mampu menggugah setiap pikiran dan tindakan manusia Indonesia dalam menyelenggarakan pendidikan. Membangun *mindset* Bangsa Pendidikan (*Education Nation*). Dalam konteks mental bangsa yang rapuh sebagaimana digambarkan, saya memandang kata kunci yang harus ada dan tumbuh dalam setiap pikiran dan hati orang Indonesia, terkait dengan pendidikan, adalah *mutu* dan *kejujuran*. Oleh karena itu perlu ada gerakan holistik untuk membangun *mindset* dengan gelora mewujudkan “Pendidikan bermutu dan kejujuran”. Setiap pemikiran dan upaya pendidikan dari dan oleh siapapun harus diarahkan untuk mewujudkan mutu dan kejujuran. *Mindset* ini sebagai perekat yang akan memuarakan berbagai pikiran besar maupun kecil ke dalam pelabuhan besar yang sama, yaitu “pendidikan bermutu dan kejujuran”. Sekecil apapun orang berpikir tentang pendidikan akan dirasakan berkontribusi signifikan karena berbicara dalam pelabuhan berpikir yang sama.

2. *Internalisasi nilai baru menjadi milik sendiri*. Pendidikan sebagai pembudayaan dan sistem terbuka akan menyerap nilai-nilai baru. Setiap nilai baru yang diserap dunia pendidikan nasional harus dimaknai dan diinternalisasi setiap orang Indonesia dalam bingkai budaya bangsa Indonesia, sehingga nilai baru yang diserap benar-benar menjadi milik dirinya dan milik bangsa. Perlu rumusan kebijakan pengembangan pendidikan yang mengawal penyerapan nilai-nilai baru pendidikan konsisten dengan budaya dan politik jati diri bangsa.
3. *Menyiapkan guru bermutu*. Membangun generasi penerus adalah membangun generasi masa depan. Pendidikan merupakan sebuah proses alih generasi. Apa yang disebut dengan Generasi Emas 2045 perlu dirumuskan secara komprehensif dan menjadi tonggak berlabuh bagi upaya pendidikan di dalam menyiapkan generasi manusia Indonesia masa depan. Secara filosofis dan psikokultural, upaya pendidikan—jelasnya pendidik, harus “datang lebih awal” kepada dunia generasi manusia Indonesia masa depan dimaksud. Frasa ini mengandung makna bahwa guru masa depan, secara kontekstual harus paham akan politik jati diri bangsa sebagai landasan membangun bangsa melalui upaya pendidikan. Implikasi mendasar dari persoalan ini adalah pendidikan guru bermutu, dengan misi tanggung jawab unik guru dan pendidikan guru sebagaimana digambarkan harus

memperoleh perhatian dan disiapkan secara sungguh-sungguh. Keutuhan Pendidikan Profesional Guru dan karir guru sebagai sebuah *life cycle* perlu memperoleh pengembangan dalam road map yang jelas dan terukur. Harus ada sistem pembinaan guru yang membangun guru bekerja lebih profesional.

4. *Mewujudkan pendekatan meritokrasi.* Meritokrasi pengelolaan pendidikan nasional diperlukan di seluruh jenjang pengelolaan (Pusat dan Daerah) untuk mewujudkan layanan pendidikan yang adil, bermutu, berdaya saing, dan relevan dengan kebutuhan pembangunan di berbagai bidang. Pendidikan harus dipahami dan dipimpin secara profesional dan memanifestasikan kebijakan pendidikan yang utuh dan bermutu. Untuk mendukung terwujudnya meritokrasi dimaksud, diperlukan *political will* seluruh jenjang pemerintahan (pusat dan daerah) dalam hal: pemberian kepercayaan penuh kepada guru sebagai seorang profesional, otonomi profesional dihargai dan tidak diintervensi birokrasi dan politisasi, kultur meritokrasi dikembangkan secara menyeluruh, dan politik anggaran berbasis merit dan kinerja disiapkan secara memadai.

Daftar Pustaka

- ALPTKI, Forum FKIP, ISPI: *Grand Design Pengawasan Implementasi Kurikulum 2013*, Masukan Kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- Institute for Global Future. (2013). *Global Future Forecast, GFF 2013*
- Widodo, Joko. "Revolusi Mental", opini dalam harian *Kompas*, 10 Mei 2014.
- Sunaryo Kartadinata. (2009). *Pembangunan untuk Kesejahteraan dan Perdamaian*. Simposium Kebudayaan Indonesia-Malaysia, 10-12 November 2009.
- , (2012). *Memantapkan Karakter Bangsa Menuju Generasi 2045: Sistem Pendidikan yang Memungkinkan Dihasilkannya Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Kompeten Untuk Mempersiapkan Generasi 2045*. KONASPI 7, Yogyakarta.
- , "Kepemimpinan Pedagogis" HU Pikiran Rakyat publikasi dalam *Politik Jati Diri* (2014): h 91-91.

- , (2014). *Politik Jati Diri: Telaah Filosofi dan Praksis Pendidikan bagi Penguatan Jati Diri Bangsa*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Universitas Pendidikan Indonesia. (2010). *Redesain Pendidikan Profesional Guru*. Pemikiran UPI tentang model utuh pendidikan guru sebagai sinergi filosofis akademik dengan aspek yuridis.
- , (2014). *Membangun Meritokrasi Pendidikan Nasional Dalam Menangkal Wabah Korupsi*. Masukan UPI terhadap "Tatap Gagasan KPK-Kandidat Presiden RI", Sarasehan UPI-KPK tanggal 19 Mei 2014, di Kampus Bumi Siliwangi.

**REVOLUSI MENTAL DAN
STRATEGI (PENGELOLAAN)
KEBUDAYAAN**
Perspektif dari Papua

I Ngurah Suryawan

Pendahuluan

Saya akan bertitik tolak dari apa yang diungkapkan oleh Dr. Karlina Supelli, terutama dalam dua poin yang dalam pemahaman saya sangat urgen dalam memahami relasi strategi kebudayaan dan revolusi mental. *Pertama*, keterkaitan yang erat antara proses-proses kebudayaan dalam pembentukan cara berpikir manusia dalam berkomunitas. Dalam konteks ini, cara berpikir (perspektif), cara memandang masalah, dan akumulasi pengetahuan kita—juga berarti akumulasi kebudayaan kita—sangat berhubungan dengan dunia batin (mental) dan juga hal-hal ragawi yang berada di sekitar kita, yang secara langsung memengaruhi bagaimana cara dan hasil kita dalam berkebudayaan. Oleh sebab itulah Dr. Karlina Supelli mengungkapkan:

“...‘mental’ (bukan) hanya urusan batin yang tidak terkait dengan sifat ragawi tindakan dan ciri fisik benda-benda dunia. Daya-daya mental seperti bernalar, berpikir, membuat pertimbangan dan mengambil keputusan memang tidak ragawi (tidak kasat mata), tetapi dunia mental tidak mungkin terbangun tanpa pengalaman ragawi. Pada gilirannya, daya-daya mental pun dibentuk dan menghasilkan perilaku serta tindakan ragawi. Kelenturan mental, yaitu kemampuan untuk mengubah cara berpikir, cara memandang, cara berperilaku/ bertindak juga dipengaruhi oleh hasrat (campuran antara emosi dan motivasi).”¹

Mental dan kebudayaan juga berkaitan dengan bagaimana cara memahami diri dan dunia melalui serangkaian nilai-nilai dan norma-norma yang dihasilkan melalui hidup berkomunitas dan berkebudayaan. Di dalam konteks ini manusia sebagai subjek kebudayaan memiliki cara memandang diri dan dunia yang bukan hanya persoalan moral tetapi juga hal-hal ragawi yang berhubungan dengan konteks ekonomi politik dari lingkungan sekitarnya. Maka dari itu, proses-proses kebudayaan mempertemukan, mempertautkan, dan menjadi medium dari ranah subjektif pelaku (mental manusia) dan struktur sosial (konteks sosial, ekonomi, politik) berurusan dengan ranah objektif tindakan. Dr. Karlina Supelli menulis:

1 Lihat Dr. Karlina Supelli, “Mengartikan Revolusi Mental”: <http://www.megawatiinstitute.org/megawati-institut/artikel/211-mengartikan-revolusi-mental.html> (diunduh 11 Oktober 2014).

“...hubungan integral antara “mental pelaku” dan “struktur sosial” terjembatani dengan memahami ‘kebudayaan’ (*culture*) sebagai pola cara berpikir, cara-merasa, dan cara-bertindak yang terungkap dalam praktik kebiasaan sehari-hari (*practices, habits*). Di dunia nyata tidak ada pemisahan antara ‘struktur’ sebagai kondisi material/ fisik/ sosial dan ‘kebudayaan’ sebagai proses mental. Keduanya saling terkait secara integral. Corak praktik serta sistem ekonomi dan politik yang berlangsung tiap hari merupakan ungkapan kebudayaan, sedangkan cara kita berpikir, merasa dan bertindak (budaya) dibentuk secara mendalam oleh sistem dan praktik habitual ekonomi serta politik. Tak ada ekonomi dan politik tanpa kebudayaan, dan sebaliknya tak ada kebudayaan tanpa ekonomi dan politik. Pemisahan itu hanya ada pada aras analitik. Pada yang politik dan ekonomi selalu terlibat budaya dan pada yang budaya selalu terlibat ekonomi dan politik.”

Tataran poin *kedua* dari tulisan Dr. Karlina Supelli yang urgen diperbincangkan adalah menyangkut strategi kebudayaan pada tataran konsep dan praktik sehari-hari yang akan dikembangkan di tengah transformasi sosial budaya di negeri ini. Ia menulis:

“... transformasi sosial yang dimaksudkan adalah menyangkut corak cara-berpikir, cara-merasa dan cara-bertindak. Kebudayaan hanya dapat “di-strategi-kan” jika kita sungguh memberi perhatian pada lapis kebudayaan tersebut. Karena itu, kunci bagi ‘Revolusi Mental’ sebagai strategi kebudayaan adalah menempatkan arti dan pengertian kebudayaan ke tataran praktek hidup sehari-hari. Kebudayaan mesti dipahami bukan sekadar sebagai seni pertunjukan, pameran, kesenian, tarian, lukisan, atau celoteh tentang moral dan kesadaran, melainkan sebagai corak/pola cara-berpikir, cara-merasa, dan cara-bertindak yang terungkap dalam tindakan, praktik dan kebiasaan kita sehari-hari. Hanya dengan itu ‘Revolusi Mental’ memang akan menjadi wahana melahirkan Indonesia baru. Strategi kebudayaan dan revolusi mental dengan demikian menjadi gerakan pembaruan dengan melibatkan rakyat sebagai titik pusing pembaruannya. Tujuannya adalah gerakan pembaruan dalam mental rakyatnya menyangkut perubahan mendasar dalam mentalitas secara keseluruhan, cara berpikir, cara merasa dan cara mempercayai, yang semuanya menjelma dalam perilaku dan tindakan sehari-hari. Etos ini menyangkut semua bidang kehidupan mulai dari ekonomi, politik, sains-teknologi, seni, agama, dan yang lainnya. Dengan demikian mentalitas bangsa (yang terungkap dalam praktik/kebiasaan sehari-hari) lambat-laun berubah. Pengorganisasian, rumusan kebijakan dan pengambilan keputusan diarahkan untuk proses transformasi itu. Salah satu lokus penting dalam praktik revolusi mental dalam strategi pengelolaan kebudayaan adalah melalui proses pendidikan.”²

2 Keseluruhan bagian ini dikutip dari Dr. Karlina Supelli, “Mengartikan Revolusi Mental”: <http://www.megawatiinstitute.org/megawati-institut/artikel/211-mengartikan-revolusi-mental.html> (diunduh 11 Oktober 2014).

Esai sederhana ini berusaha mengelaborasi perspektif revolusi mental dan strategi kebudayaan dalam konteks rakyat Papua dengan kebudayaannya yang heterogen dan dalam proses transformasi sosial terus-menerus. Bagian awal dari esai ini akan menguraikan tentang perspektif pengelolaan kebudayaan dan emansipatif dalam memahami rakyat Papua. Bagian selanjutnya akan membahas tentang realitas rakyat Papua di tengah pertautannya dengan dunia global. Implikasi-implikasi interkoneksi global ini melahirkan kemungkinan-kemungkinan pembaruan gerakan kebudayaan rakyat Papua melihat diri dan lingkungannya yang tengah berubah. Bagian terakhir esai ini memfokuskan pembahasan tentang perspektif pendidikan humaniora dan dinamikanya di Tanah Papua. Inspirasi strategi kebudayaan dalam konteks Papua, salah satunya akan berkembang melalui pendidikan humaniora dengan mengapresiasi nilai-nilai kebudayaan rakyat di Tanah Papua dan memodernisasinya melalui institusi pendidikan.

Emansipasi dan Pengelolaan Kebudayaan

Bagian ini memfokuskan pada dua hal penting yaitu memahami kompleksitas kebudayaan di Tanah Papua secara lebih emansipatif, holistik historis, dan menempatkan perspektif pengelolaan kebudayaan. Perspektif emansipatif berangkat dari kenyataan bahwa begitu banyaknya reproduksi pengetahuan yang menjadikan Tanah Papua sebagai “objek” tanpa adanya sebuah gerakan pembaruan kebudayaan dan implikasi terhadap perubahan sosial yang terjadi di Tanah Papua.

Akumulasi pengetahuan yang melimpah ruah jumlahnya itu belum menyentuh kepada perubahan mental dan memengaruhi strategi kebudayaan yang terjadi di Tanah Papua. Hasil-hasil penelitian dan reproduksi pengetahuan yang terlahir dengan menggunakan Papua sebagai “objek” sudah tak terhitung lagi. Tumpukan laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan pemetaan kondisi sosial budaya menjadi harta yang tak ternilai harganya dalam memahami dan menafsirkan Papua. Namun persoalannya adalah bagaimana tumpukan akumulasi pengetahuan tersebut berguna bagi rakyat Papua “mengerti dirinya sendiri” dan terlibat sebagai subjek dalam perubahan sosial yang terjadi di tanahnya sendiri?

Persoalan relasi ilmu pengetahuan dan masyarakat memang menjadi perdebatan yang tidak ada habisnya. Ujung dari perdebatan

itu adalah terletak dari paradigim ilmu pengetahuan tersebut melihat masyarakat sebagai “sumber pengetahuan”. Menempatkan manusia sebagai subjek dalam proses transformasi sosial budaya yang berlangsung di Papua khususnya adalah salah satu perspektif berpikir dalam studi kebudayaan. Perspektif emansipatoris yang transformatif mengacu kepada bagaimana ilmu-ilmu humaniora menggunakan ilmunya secara “berpihak” menjadi mediasi menyadarkan serta menyakinkan masyarakat untuk mengambil peran dalam perubahan sosial. Kata kuncinya adalah kesadaran untuk berpartisipasi dan mengambil peran aktif dalam proses perubahan sosial budaya.

Sudah puluhan tahun program pembangunan hadir di tengah masyarakat Papua. Perubahan perlahan mulai dirasakan menyangkut lingkungan fisik berupa bangunan-bangunan fasilitas publik seperti jalan, sekolah, Pustu (Puskesmas Pembantu) di kampung-kampung. Pembangunan fisik yang mencolok terlihat adalah gedung-gedung pusat pemerintahan di tingkat kabupaten maupun distrik yang mulai menerabas hutan dan tanah-tanah ulayat milik masyarakat. Namun, semua itu terjadi karena adanya bantuan triliunan rupiah jumlahnya baik itu dari pemerintah pusat Indonesia di Jakarta, melalui Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Papua dan Papua Barat serta program-program bantuan dari lembaga luar negeri. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah dengan adanya berbagai macam bantuan tersebut membuat masyarakat Papua berinisiatif untuk mengubah diri dan kehidupannya ke depan? Di sinilah kemudian terletak persoalannya.

Sudah menjadi kelumrahan jika dalam memandang, “mambaca”, mencitrakan, dan menganalisis Papua sebagai masyarakat “terbelakang”, “kurang beradab” dan sejumlah kesan minor lainnya karena sederetan kisah tentang gizi buruk, “perang suku”, dan kekurangmajuan mereka dibandingkan dengan daerah Indonesia di bagian barat. Pembacaan ini dari perspektif yang memengaruhinya sudah mengalami permasalahan yang sangat akut dan serius. Permasalahannya adalah menempatkan bahwa yang memandang Papua merasa dirinya lebih “berkuasa” dan beradab dibandingkan masyarakat Papua secara umum. Ini adalah cikal bakal dari pandangan kolonialistik dan penaklukan (baca: penjajahan). Pembacaan ini lebih mengundang permasalahan daripada menemukan solusi dalam menghadapi kompleksitas persoalan Papua.

Realitas berbagai persoalan yang terdapat di Papua harus dilihat

secara holistik, komprehensif dan berperspektifkan empati yang emansipatoris. Ide dari pendekatan ini adalah melihat kompleksitas persoalan Papua dengan menggali latar belakang permasalahan, tidak menyalahkan tapi membangun solusi bersama. Setelah itu menempatkan masyarakat Papua sebagai subjek dan menggerakkan mereka untuk berperan secara aktif dan mengubah dirinya sendiri. Caranya adalah menggugah kesadaran mereka tentang kondisi Papua dan tanah kelahirannya kini dan menggantungkan harapan-harapan pembaruan kepadanya.

Dengan menggunakan perspektif emansipatoris dan transformatif, masyarakat Papua akan merasa dirinya menjadi bagian dari perubahan besar yang terjadi di Papua, bukan malah sebagai penonton seperti kecenderungan yang terjadi selama ini. Argumentasi ekonomi politik sebagai basis dari pandangan modernisme (kemajuan) mendasarkan kemajuan diukur dari pembangunan ekonomi dan stabilitas politik. Dasar pemikiran inilah yang dominan selama ini memengaruhi cara pandang dan pembacaan terhadap Papua, sehingga fenomena pemekaran digalakkan sedemikian rupa dengan alasan untuk memajukan Papua dari kemiskinan, ketertinggalan, dan sebagai aspirasi politik budaya masyarakat Papua. Kemiskinan dan ketertinggalan adalah basis dari argumentasi ekonomi, sedangkan aspirasi politik etnik/suku di Papua adalah basis untuk menjaga stabilitas politik.

Namun, ada satu hal yang dilupakan padahal memiliki peran vital menyangkut identitas dan martabat sebuah masyarakat. Memang bukan hal yang konkret seperti ekonomi tapi ini menyangkut soal kebudayaan. Fenomena pemekaran daerah yang saya amati terutama di wilayah Provinsi Papua Barat belum secara maksimal memperhatikan perkembangan sosial budaya yang kompleks di Tanah Papua. Yang terjadi justru dominannya argumentasi ekonomi politik tanpa memikirkan perspektif kebudayaan dalam rencana pemekaran. Alih-alih yang terjadi justru semakin menguatkan sentimen etnik dalam rencana pemekaran daerah di Papua. Oleh karena itulah masyarakat Papua hanya akan semakin memikirkan diri dan kebudayaannya saja tanpa mempunyai kesempatan untuk interaksi dan akulturasi dengan dunia luar. Hal inilah yang menyebabkan orang Papua kehilangan kesempatan untuk memperbarui identitas-identitasnya.

Pemekaran daerah dan interkoneksi Papua dengan dunia luar sebenarnya adalah peluang yang besar bagi orang Papua untuk

membayangkan pembaruan-pembaruan identitasnya. Hal ini bisa dilihat dari akulturasi yang terjadi di dalam masyarakat Papua karena pengaruh pendatang dan kebudayaan-kebudayaannya. Di samping itu hadirnya pemerintahan, pembangunan, dan investasi juga berdampak penting bagi orientasi nilai dan kebudayaan dalam masyarakat Papua. Pembaruan-pembaruan identitas itu bisa terjadi melalui reproduksi kebudayaan dalam relasi-relasi dalam keseharian masyarakatnya. Semua proses kebudayaan berlangsung dalam fragmen-fragmen kehidupan masyarakat yang mereproduksi identitas dan norma-norma yang hidup di tengah masyarakat.

Kondisi keterpecahan (fragmentasi) yang terjadi di tengah masyarakat Papua berimplikasi serius terhadap rapuhnya solidaritas dan integrasi sosial dalam masyarakat. Hasilnya adalah masyarakat yang sangat rapuh karena solidaritas sosial hanyalah di permukaan tanpa menyentuh akar relasi-relasi sosial budaya dalam keseharian masyarakatnya. Praktik-praktik introduksi pembangunan dan berbagai terangan investasi menghasilkan fragmentasi yang serius di tengah masyarakat. Integrasi dan solidaritas sosial yang terkandung dalam nilai-dan norma beserta pengetahuan masyarakat mendapat gugatan di internal masyarakat sendiri. Masuknya nilai-nilai baru mengubah reproduksi pengetahuan dan kebudayaan yang berlangsung di tengah masyarakat. Integrasi sosial budaya dan masyarakat yang terorganisir yang tercipta dari proses reproduksi kebudayaan sebelumnya kehilangan konteksnya. Nilai-nilai pembangunan, modernitas, dan kapitalisme dalam wajah-wajah investasi global yang menerjang Papua menciptakan budaya masyarakat yang kehilangan kemandirian dan martabatnya.

Membaca Papua melalui pemekaran daerah secara emanisipatoris melibatkan rakyat Papua dalam perubahan sosial setidaknya memperhatikan dua hal penting. Hal *pertama* sebagai basis adalah memberikan perhatian untuk pelayanan publik (kesehatan dan pendidikan). Hal yang *kedua* adalah melayani (baca: memfasilitasi) ekspresi-ekspresi budaya yang begitu heterogen di Tanah Papua. Kondisi yang terjadi hingga kini adalah pemekaran daerah hanya melayani kebutuhan para elite bukannya martabat kebudayaan masyarakatnya. Kehidupan kultural hanya dipolitisasi untuk kepentingan para elite agar pemekaran terjadi dan dengan demikian uang dan kekuasaan pun ada di tangan. Dengan demikian, orang Papua merasa bahwa kebutuhan kulturalnya *tra* (tidak) terjamin dan diperalat hanya untuk kepentingan kekuasaan. Perspektif yang

emansipatif dalam melihat Papua paling tidak memperhatikan kedua hal di atas sembari memperbaiki pengetahuan dan cara pandang kita yang menusiawi dan empati dalam melihat kompleksitas persoalan yang terjadi di bumi cenderawasih ini.

Salah satu perspektif yang emansipatif dalam membaca Papua adalah yang berkaitan dengan cara pemahaman dalam pengelolaan kebudayaan. Reproduksi kebudayaan yang terjadi terhadap Tanah Papua tercermin dalam kekayaan data-data etnografi Papua, melalui tulisan ilmiah ataupun laporan-laporan pemetaan kebudayaan. Hal itu semua adalah modal penting dalam melakukan pengelolaan kebudayaan secara lebih lanjut dan partisipatif. Data etnografi tersebut, meskipun masih sangat sederhana dan terkesan dominan melakukan simplifikasi (penyederhanaan) adalah data awal yang tidak bisa diabaikan. Namun, data awal itu harus dilanjutkan dengan *revisiting* (mengunjungi kembali) untuk melakukan pembaruan data-data kontemporer tentang Papua. Hal selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menganalisis dan melakukan penafsiran tentang situasi kontemporer yang terjadi dan langkah-langkah dalam pengelolaan kebudayaan yang merekognisi (mengakui) masyarakat Papua.

Bagian awal yang perlu diperhatikan adalah mengkritisi sebagian besar gambaran etnografi tentang Papua yang masih menggunakan perspektif tujuh unsur kebudayaan. Akumulasi pengetahuan yang tercipta dari penggambaran etnografi kelompok masyarakat berdasarkan tujuh unsur kebudayaan menjadi hal yang “sederhana” dan paling berguna untuk penggambaran awal “kebudayaan etnik” tersebut. Oleh rezim kolonial, gambaran etnografi suku bangsa inilah yang dipergunakan untuk modal awal melakukan penjajahan. Oleh rezim “pembangunanisme”, data etnografi ini dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan kekuasaan. Salah satunya dalam melaksanakan Operasi Militer, Operasi Koteka, dan usaha-usaha eksploitasi sumber daya alam dan manusia yang ada di Tanah Papua.

Dalam pandangan Ahimsa-Putra (1987:27), studi-studi etnografi yang mengikuti pandangan tujuh unsur kebudayaan universal bermaksud untuk memudahkan para peneliti memanfaatkannya dalam studi perbandingan kebudayaan (*cross-cultural*). Melalui studi perbandingan yang semacam ini diharapkan akan dapat dicapai rumusan-rumusan yang sedikit banyak meyerupai “hukum-hukum” atau “dalil” tentang fenomena sosial-budaya. Epistemologi yang ada di balik pemikiran semacam ini adalah epistemologi yang positivistik.

Pandangan positivistik ini mengandaikan kebudayaan itu statis, kaku, dan tidak berubah. Perspektif itulah yang mendominasi studi-studi tentang Papua yang bisa dengan mudahnya digunakan untuk kepentingan kekuasaan.

Studi-studi yang sangat positivistik itu tentu saja masih sangat berguna sebagai gambaran awal, meskipun sebagian besar datanya akan terkesan sangat "meromantisir" Papua sebagai wilayah budaya yang eksotik dan statis. Namun kita sudah mendapatkan data awal yang lebih dari cukup dalam memberikan gambaran awal tentang Papua. Tapi tentu saja itu tidak cukup. Sangat diperlukan usaha untuk menafsirkan dan menganalisis kondisi Papua yang tidak lagi bisa dilokalisir dan eksotik. Realitasnya Papua adalah wilayah yang sedari dulu tersentuh atau berinteraksi dengan dunia global. Hal ini dibuktikan dengan kontak-kontak kebudayaan dengan para pedagang dan pelaut dari Ternate, Tidore maupun dari luar negeri. Oleh karena itulah kebudayaan Papua juga berjalan dinamis seiring kontak budaya dengan para pendatang yang berlangsung tanpa henti ke Tanah Papua.

Pada momen inilah pengelolaan kebudayaan dimulai dengan memikirkan perubahan kebudayaan yang ditimbulkan dari persentuhan budaya Papua dengan budaya luar (global) yang hadir dan berkembang di Tanah Papua. Pengelolaan kebudayaan itu berhubungan dengan keseharian masyarakat terkait dengan mengatasi perbedaan-perbedaan, lebih tepatnya dalam mengelola properti-properti kebudayaan yang berbeda-beda. Seperti diungkapkan oleh Koentjaraningrat (1959:139;173-174) bahwa kebudayaan kita berubah dan terus akan berubah. Dari perspektif antropologi, peristiwa-peristiwa perubahan kebudayaan dipandang sebagai akulturasi/perubahan kebudayaan, yaitu proses ketika budaya-budaya tempatan di Indonesia secara kreatif terlibat dalam mengkonstruksi identitas (Indonesia): dialektika "dunia lama" dan "dunia baru" yang menghasilkan keberagaman masyarakat ("jiwa baru" bangsa), termasuk di dalamnya kebudayaan Papua yang mau tidak mau terlibat di dalamnya.

Pengelolaan kebudayaan bagi kondisi yang heterogen dan kompleks, seperti terjadi di Papua dan daerah lain di Indonesia, membutuhkan kecermatan terutama memahami cair dan dinamisnya konsep mengenai kebudayaan tersebut. Kebudayaan itu berkaitan-kelidan dengan proses sejarah, yang kecenderungannya bergantung pada tanggapan individu dan sosial terhadap keserbamungkinan

yang didedahkan oleh perubahan yang ada baik secara alami maupun politis-sosiologis. Perubahan yang ada juga cenderung mengancam kebhinekaan akibat dari penetrasi ketunggalan dari kebijakan dan praktik politik serta kelimpahruahan pengetahuan dan informasi yang ditebarkan media (massa) baru. Kebudayaan itu tanggap terhadap tantangan perubahan dari luar, melawan seperlunya sambil memantas-mantaskan atau mengapropriasi apa yang asing menjadi bagaian dari dirinya (Laksono, 2011).

Keseluruhan perspektif di atas berhubungan dengan cara mengelola kebudayaan yang emansipatif dan merekognisi heterogenitas etnik di Tanah Papua. Kebudayaan itu begitu kompleks butuh penyederhanaan. Kebudayaan itu juga pada dasarnya laten dan tidak kasat mata. Kebudayaan itu berkaitan dengan proses sejarah, yang kecenderungannya bergantung pada tanggapan individu dan sosial terhadap keserbamungkinan yang didedahkan oleh perubahan yang ada baik secara alami maupun politis-sosiologis. Perubahan yang ada juga cenderung mengancam kebhinekaan akibat dari penetrasi ketunggalan dari kebijakan dan praktik politik serta kelimpahruahan pengetahuan dan informasi yang ditebarkan media (massa) baru. Kebudayaan itu tanggap terhadap tantangan perubahan dari luar, melawan seperlunya sambil memantas-mantaskan atau mengapropriasi apa yang asing menjadi bagaian dari dirinya.

Tantangan pengelolaan kebudayaan di tengah penetrasi politik dan fragmentasi (keterpecahan) di dalam masyarakat adalah mentautan (menghubungkan) pengelolaan kebudayaan dengan pendidikan. Ini mungkin terkesan klise tetapi justru di sinilah letak persoalan yang tak kunjung kita carikan jalan keluarnya. Mengenal properti-properti kebudayaan lain (suku dan bangsa), seperti belajar berbahasa dan berseni daerah lain, meskipun sudah ada bahasa pengantar, ternyata efektif untuk membangun solidaritas bersama. Keinginan kita belajar dengan sungguh-sungguh apa yang terjadi di Tanah Papua dan memahami keberagaman budaya di bumi cenderawasih ini menjadi kata kunci untuk melahirkan pengelolaan kebudayaan yang emansipatif.

Dalam konteks Papua, dalam kasus pembentukan nasionalisme dan sejarah (bahasa) Indonesia yang sebenarnya lahir dari efek-efek antara persentuhan dunia lama dan dunia baru. Dalam hal ini, James T. Siegel (1997:7) menjelaskan bahwa sejarah Indonesia terbuat bukan dari sumber-sumber asli dan juga bukan dari pinjaman

asing, tetapi dari efek koneksi-koneksi antara keduanya. Wacana kebudayaan sering diam-diam memuat jejak (hirarki) kuasa colonial yang diskriminatif dan laten. Misalnya kita cenderung meresmikan tatacara meja makan, yang lebih Indo-Belanda, daripada lesehan yang lebih bebas. Sementara itu sejarah membuktikan bahwa nasionalisme Indonesia tidaklah semata-mata tumbuh dari perlawanan anti penjajah. Oleh karena itu untuk menjadi Indonesia orang harus pertama-tama merasakan arus-arus komunikasi dunia (Siegel, 1997:93). Dengan demikian Indonesia menjadi ruang (wacana) antara kini dan masa revolusi yang lalu; antara dunia baru dan dunia lama; antara kegiatan-kegiatan pertanian dan industry; antara kampung-kampung dan kota. Indonesia adalah ruang antar pulau, antar sukubangsa, antar bahasa, bahkan antar benua dan antar kala/zaman.

Efek-efek persentuhan antara dunia lama (tradisional) dan dunia baru (global) itu pulalah yang memungkinkan terjadi di Papua, dalam usahanya mengkontruksi sejarah dan kebudayaannya. Pengelolaan kebudayaan mendapat permasalahan yang serius terkait dengan interkoneksi ini. Begitu banyak perbedaan yang dibawa oleh kebudayaan tradisional dan global untuk kemudian dikelola. Meskipun kebudayaan itu cair dan lentur dan bisa dengan cepat melakukan adaptasi dan “memantas-mantaskan” dirinya dengan dunia baru, namun kepentingan ekonomi politis memengaruhi kecairan kebudayaan tersebut sehingga akan menjadi kaku dan sangat hegemonik. Di Tanah Papua, kebudayaan (baru) yang lahir dari persentuhan dunia lama dan dunia baru (global) sudah terjadi dan menimbulkan berbagai implikasi. Namun hal itu adalah kejamakan terjadi dan sekaligus menjadi tantangan dan peluang bagi rakyat Papua untuk mengkonstruksi kembali pikiran dan identitas mereka yang selalu akan berubah tanpa henti.

Interkoneksi Global dan Benteng Terbuka Papua

Jika memungkinkan untuk membentengi Papua dari eksploitasi sumber daya alam, hal itu mungkin pertama kali yang akan dilakukan oleh para pemuka adat, kepala suku, tokoh agama, pemerintah, dan dewan adat Papua adalah memproteksi kekayaan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat Papua secara keseluruhan. Yang utama dan terutama adalah rakyat Papua di kampung-kampung yang merasakan langsung bagaimana perusahaan—begitu masyarakat

di kampung biasa menyebut datangnya investasi—menghabisi hutan mereka dan mengangkut kayu-kayu ke daerah lain. Namun langkah itu meski belum terlambat untuk dilakukan tapi semakin menyulitkan seiring massifnya laju investasi dan ketidaksiapan masyarakat untuk bernegosiasi dalam menjaga kawasan situs-situs kebudayaan dan sumber hidup mereka. Ketidakseimbangan kekuatan ini diperparah dengan fragmentasi (keterpecahan) yang dirancang secara sadar ataupun tidak sadar oleh kuasa investasi global di tengah masyarakat.

Jika ingin membuat sesuatu yang melindungi kekayaan sumber daya alam, kelompok-kelompok masyarakat yang peduli terhadap Papua mungkin menginginkan membuat benteng yang melindungi kekayaan Papua tersebut. Benteng tersebut kurang lebih akan menjaga agar kekayaan alam Papua sebagian besar dinikmati oleh rakyat Papua dan dipergunakan secara pasti untuk kesejahteraan mereka dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan primer lainnya. Namun apadaya hal itu tidak mungkin untuk dilakukan karena posisi Papua yang strategis dan keterhubungannya dengan dunia luar. Maka perlahan namun pasti ketimpangan pengelolaan (baca: eksploitasi) kekayaan alam Papua akan menjadi kenyataan, dimana rakyat tempatan yang menjadi "pemilik" kekayaan tersebut justru terpuruk dan miskin di tanahnya sendiri. Investasi dan globalisasi yang adalah jaringan yang mengeruk kekayaan tersebut.

Investasi global yang mengurung Tanah Papua disetiap jengkal adalah sebagian kecil saja dari elemen yang sering disebut globalisasi yang mengungkung seluruh dunia hari ini. Secara sederhana globalisasi diartikan sebagai peningkatan arus perdagangan, keuangan, kebudayaan, gagasan dan manusia sebagai akibat dari tekonologi canggih di bidang komunikasi, perjalanan dan persebaran kapitalisme neoliberal ke seluruh penjuru dunia, dan juga adaptasi lokal dan regional serta perlawanan terhadap arus-arus itu. Secara sederhana globalisasi mengacu kepada perubahan secara dramatik makna ruang atau teritori yang bergeser akselerasinya kepada struktur temporal bentuk-bentuk penting aktivitas manusia.

Globalisasi salah satu cirinya yang penting adalah terjadinya pengaburan batas-batas lokal bahkan nasional dalam banyak arena kegiatan manusia. Globalisasi dengan demikian mengacu pada bentuk-bentuk aktivitas sosial non-teritorial. Lebih dari itu, globalisasi terkait dengan pertumbuhan interkoneksi sosial melintasi batas-batas geografi dan politik atau deteritorialisasi. Globalisasi itu

juga terkait dengan pertumbuhan interkoneksi sosial melintasi batas-batas geografi dan politik atau deteritorialisasi. Tahap yang paling menentukan dalam globalisasi adalah ketika peristiwa-peristiwa dan kekuatan-kekuatan yang jauh juga memengaruhi prakarsa-prakarsa lokal dan regional (Lewellen, 2002; Laksono, 2009).

Dengan demikian adanya investasi tambang atau timah di Papua diatur oleh perusahaan pusatnya yang berbasis di Amerika atau Inggris misalnya. Melalui koneksi dan kongsi dengan pemerintah pusat dan daerah di suatu negara untuk memperoleh izin, titik-titik eksplorasi kemudian ditentukan dan berlangsunglah rangkaian panjang pengerukan kekayaan alam untuk diperdagangkan. Tidak ada lagi sekat-sekat ruang dan waktu yang menghambat globalisasi untuk menguasai dunia. Contoh yang paling sering digunakan adalah globalisasi *Coca Cola* yang menguasai hampir seluruh dunia hingga pelosok kampung-kampung. Kekuatan-kekuatan global yang berada entah dimana bisa memengaruhi reproduksi kebudayaan dan nilai-nilai yang terjadi di tingkat lokal sekalipun. Misalkan saja akibat eksplorasi gas, beberapa kampung harus dipindahkan karena berada di kawasan eksplorasi. Kelompok masyarakat yang hidup dan mereproduksi kebudayaannya setelah sekian lama menjadi tidak mempunyai hak dan mendaku tanah dan kebudayaannya. Mereka harus berpindah ke lokasi lain dengan lingkungan yang sudah pasti memerlukan adaptasi. Pada momen inilah perubahan kebudayaan berlangsung akibat arogansi investasi yang memutus relasi masyarakat setempat dengan tanah, lingkungan, dan kebudayaannya.

Oleh sebab itulah benteng yang dimimpikan untuk memproteksi sumber daya alam Papua harus betul-betul dipikirkan melalui berbagai cara dan aspek untuk menandingi kisah-kisah sukses yang ditawarkan oleh investasi dan globalisasi ini. Benteng proteksi itu misalnya bisa dipraktikkan dengan memperkuat kapasitas dan kecakapan kepala kampung atau kepala suku/adat untuk bernegosiasi dengan investor yang masuk ke wilayah kampung mereka. Hal ini hanya untuk memastikan bahwa masyarakat *tara dapat tipu* dari investor dan memastikan bahwa kepentingan dan kesejahteraan masyarakat adalah di atas segala-galanya.

Begitu banyak investasi yang masuk di Tanah Papua ini. Pengalaman saya dalam sebuah perjalanan penelitan lapangan di Kabupaten Teluk Bintuni di Provinsi Papua Barat Mei 2011 menggambarkan bagaimana fragmen masyarakat di kampung-

kampung menghadapi properti-properti dari perusahaan yang mengeruk kekayaan alam mereka. Properti yang dimaksud adalah segala macam peralatan, tingkah polah, dan elemen-elemen yang mencitrakan bagaimana investasi menjadi dominan menyingkirkan property-properti lama masyarakat tempatan seperti hutan sagu, laut tempat mencari ikan, dan hutan tempat segala sumber kehidupan tersedia. *Speedboat* siap mengantarkan para pekerja untuk menghuni barak-barak dan siap memulai aktivitas eksplorasi. Begitu juga alat-alat berat di kawasan eksplorasi yang tiada henti menderu-deru mesinnya memecah keheningan kampung.

Di kabupaten inilah berdiri perusahaan BP (*British Petroleum*) Indonesia yang melakukan eksplorasi gas dengan nama proyeknya, Kilangan LNG Tangguh. Dengan jenis produksi sumber daya alam, gas alam cair/LNG. Lokasi aktivitasnya berada di Kawasan Teluk Bintuni yang meliputi wilayah administratif empat (4) distrik yaitu Babo, Bintuni, Aranday dan Merdey. Masuknya perusahaan BP sebagai MNC (*Multinational Corporation*) terbesar kedua setelah PT. FI (Freeport Indonesia) di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, mengundang berbagai bentuk program-program “pemberdayaan” terhadap masyarakat tempatan. Berbagai proyek untuk menunjukkan kepedulian sosial perusahaan MNC inipun menggelinding mulus untuk masyarakat lokal.

Posisi masyarakat tempatan langsung bertemu dengan kekuatan ekonomi global. Berbagai perubahan sosial pun terjadi begitu cepat. Relasi-relasi *baku tipu* ekonomi politik yang “mengalahkan” masyarakat tempatan menjadi cerita yang begitu biasa diungkapkan. Kisah-kisah keterbelakangan yang bertemu dengan simbol modernitas bernama industri kapitalisme internasional bagai kisah ironis yang menyesak dada. Puncak-puncak kemewahan yang ditunjukkan perusahaan MNC berhadapan dengan kondisi masyarakat tempatan, yang sebenarnya mempunyai hak di atas tanah mereka. Gedung-gedung bertingkat dengan fasilitas mewah berdampingan dengan rumah-rumah papan sederhana masyarakat lokal.

Pada relasi-relasi itulah yang terjadi bukan hanya penjajahan dalam bentuk penetrasi ekonomi global, tapi lebih dalam kepada penjajahan secara produktif dalam cara berpikir yang dilakukan industri ekonomi global yang menggandeng pemerintah daerah dalam melakukan intervensinya. Penjajahan itu dilakukan melalui serangkaian teori dan pendekatan politik budaya yang diskriminatif,

dipraktikkan dengan massif dalam kerangka “pembangunan masyarakat tertinggal”.

Pelajaran yang dapat dipetik dari penetrasi globalisasi di Papua maupun di daerah lain di Indonesia adalah kisah suksesnya untuk memproduksi kesejahteraan terlalu dekat dengan kegagalannya meredistribusi kesejahteraan nyata bagi rakyatnya. Globalisasi dengan demikian merupakan momen-momen perubahan yang penuh friksi yang kreatif tak terduga dan dapat memporakporandakan lingkungan alam dan bahkan warisan sosial budaya (Laksono, 2010). Mimpi suksesnya globalisasi mengacu kepada negara-negara lain yang sudah pasti tidak seragam kondisinya dengan Papua. Kisah sukses dan “mimpi kesejahteraan” itulah yang kemudian dibawa ke lokasi-lokasi eksploitasi sumber daya alam di negara-negara lain untuk diadopsi. Resistensi tidak terhindarkan ketika perubahan kehidupan terjadi dalam masyarakat. Ada yang menikmati dan tersingkir oleh globalisasi. Dengan demikian globalisasi juga mengobarkan perlawanan, dibenci tapi dirindukan setengah mati oleh masyarakat.

Oleh karena itulah perlu dipikirkan benteng yang betul-betul memproteksi sumber daya alam di Tanah Papua dari semua elemen masyarakat dimanapun posisi dan kedudukannya. Kesadaran akan pentingnya benteng—apapun itu bentuknya—harus ditanamkan terlebih dahulu di semua kalangan di Papua, agar jangan di kemudian hari saling *baku tipu* di tengah masyarakat Papua karena tergiur kemewahan uang. Tokoh adat, agama, suku, budaya, dan pemerintah harus duduk memikirkan hal ini. Setiap kalangan bisa melakukan praktik sesuai dengan kapasitasnya. Pejabat membuat regulasi (peraturan), tokoh adat yang menjaga wilayah adat dan tanah ulayatnya, tokoh suku mengingatkan warganya untuk lebih bermartabat dengan tidak menjual tanah, dan tokoh agama menyejukkan umatnya dengan bekerja keras dan berlandaskan kasih dalam perjuangan hidup.

Namun kondisi tersebut yang ideal, yang terjadi di kampung-kampung Tanah Papua adalah lapisan-lapisan fragmentasi yang akut. Saya akan menuturkan pengalaman ketika berkunjung ke beberapa kampung di pedalaman wilayah kepala burung Papua Barat. Hasrat pemekaran dan mimpi kesejahteraan akhirnya berujung kepada keputusan ketika semua mimpi itu makin jauh dari kenyataan. Saat mempunyai kesempatan untuk mengunjungi beberapa kampung-kampung di sekitar wilayah pesisir Teluk Wondama pada

pertengahan November 2013, saya menyaksikan kondisi kampung-kampung pemekaran yang jauh dari cita-cita untuk mengakses pembangunan. Kampung pemekaran ini sebelumnya adalah bagian dari kampung lama. Kondisinya hanya beberapa rumah saja. Untuk mengakses sekolah dan Pustu (Puskesmas Pembantu) pun mereka harus menyeberang dengan perahu menuju kampung lama. Setelah berjalan selama 5 tahun, sebuah SD YPK (Yayasan Pendidikan Kristen) dan Pustu terbangun berkat prakarsa kepala kampung yang justru tidak mempunyai rumah di kampungnya sendiri. Sang kepala kampung adalah seorang pengusaha, pendiri sebuah CV lokal di Wasior, dan menjadi kepala kampung dari Wasior, ibukota Kabupaten Teluk Wondama. Keseluruhan dana-dana pembangunan yang masuk ke kampung—PNMP, Otsus, Pemda dan bantuan lainnya—diatur oleh kepala kampung dari Wasior dan dikerjakan oleh para pekerja yang tergabung di CV-nya.

Kasus ini jelas menggambarkan bagaimana pemekaran kampung menjadilahan baru bagi para elite-elite kampung untuk mengais rejeki. Dana-dana yang masuk ke kampung tak terhitung jumlahnya. Bahkan saya sempat menyaksikan bagaimana masyarakat di kampung harus rapat berkali-kali dengan berbagai program-program pembangunan. Budaya rapat dan baku tipu (saling menipu) penggunaan anggaran terserap perlahan-lahan di antara masyarakat kampung. Introduksi berbagai program pembangunan—dengan mengucurnya dana-dana segar—turut berperan dalam pembentukan kelompok masyarakat yang perlahan-lahan lihai bersiasat untuk memanfaatkan situasi yang menguntungkan mereka.

Di kampung lainnya di wilayah Teluk Wondama, saya melihat bagaimana masyarakat di kampung memiliki wilayah ulayat yang sangat luas membentang dari pinggian muara Kali Wosimi hingga ke pergunungan berbatasan dengan Kampung Wombu di Distrik Naikere. Dusun sagu yang berada di atas muara Kali Wosimi merupakan wilayah dimana tanah-tanah warga masyarakat berada. Di sekitar wilayah itu adalah wilayah konservasi Teluk Cenderawasih dengan tanaman mangrove. Wilayah kampung dikelilingi oleh hutan mangrove dan kayu. Setiap marga-marga di kampung mempunyai hak ulayat atas tanahnya masing-masing. Tanah tersebut bisa didapatkan seseorang dari hasil pemberian atau lewat warisan yang diterima lewat mama atau mertua karena kawin masuk ke suatu wilayah.

Sontak situasi berubah ketika sebuah perusahaan kayu

mengeksploitasi hutan-hutan sepanjang wilayah pegunungan kampung-kampung Teluk Wondama. Tanah-tanah yang sebelumnya tidak berpenghasilan, kini layaknya emas yang harus dijaga dan diklaim dengan harapan akan mendapatkan ganti rugi dari perusahaan. Bahkan konflik di internal masyarakat pun terjadi yang berhubungan dengan saling mengakui wilayah tanah ulayat masing-masing marga. Tanah ulayat inilah yang menjadi lahan eksploitasi perusahaan kayu. Maka, kampung pun terpecah dan pembagian tanah ulayat diurus dengan membagi tanah-tanah ulayat berdasarkan marga-marga yang ada di kedua kampung.

Di bukit sebuah kampung, saya berdiri di Puskesmas Pembantu (Pustu) yang mempunyai rumah kayu yang megah di ujung kampung. Letaknya mengelilingi rumah penduduk di kampung. Jika berdiri di teras rumah Pustu itu, akan terlihat pemandangan yang sangat indah sekitar Teluk Etna yang mengelilingi kampung. Tampak jembatan kayu panjang yang membelah teluk sebagai tempat bersandar kapal yang merupakan alat transportasi satu-satunya yang mengitari kampung-kampung. Namun sayangnya, Pustu yang bagus ternyata tidak berpenghuni para bidan dan perawat. Sudah sejak 2 tahun lalu sejak saya berkunjung di tahun 2013, perawat sudah pergi ke kota dengan kapal dan tak kunjung kembali. Mama Yoselin yang saya temui tinggal di Pustu menuturkan bahwa Ia lah kini yang menjadi perawat. Ia yang menggantikan perawat yang sebenarnya di kampung. Ia rutin turun ke kota untuk mengambil obat-obatan di RSUD Kaimana dan Dinas Kesehatan. Ia bersyukur mendapatkan pendidikan kesehatan saat zaman Belanda. Sisa-sisa pengetahuan itulah yang ia praktikkan untuk pengobatan sederhana warga kampung. Sungguh ironis.

Fragmen-fragmen di atas hanya cukilan dari bergitu banyak hal-hal ironis yang terjadi di Tanah Papua. Jurang pembangunan di kota dan kampung-kampung menganga lebar. Mimpi akan sukses pembangunan seperti kota-kota di Jawa tepapar dengan gamblang melalui program-program pembangunan yang tidak mengakar. Derasnya informasi dan visual melalui televisi membuat rakyat Papua begitu yakin bahwa mimpi kesuksesan pembangunan seperti di Jawa akan ada di kampung mereka. Di sisi lain, investasi telah merangsek dan menggerus sumber-sumber kehidupan mereka selama ini. Hutan tempat mereka berburu telah berubah menjadi kebun sawit atau derus mesin pemotong kayu. Sementara hutan sagu mereka telah berubah menjadi rumah-rumah para pemotong kayu. Tempat-tempat sakral dan keramat juga telah berubah menjadi jalan-

jalan tempat alat-alat berat milik perusahaan lalu lalang.

Menyadari hal itu, tanah yang sebelumnya tidak ternilai harganya karena hanyalah hutan kini bisa diuangkan dengan menjualnya ke perusahaan. Maka mulailah konflik-konflik terjadi, bukan hanya antara masyarakat dengan perusahaan yang masuk melakukan investasi ke kampung mereka . Bahkan, di internal masyarakat tempatan (lokal) tidak jarang konflik terjadi. Tanah yang sebelumnya hanya ditumbuhi pohon-pohon, yang mereka bayangkan tidak akan mungkin laku terjual, kini bisa diuangkan dengan menjualnya kepada para investor yang dalam sekejap akan merubah kehidupan mereka sekaligus wajah kampung.

Namun permasalahan mulai muncul saat tanah bisa diuangkan ketika investasi berwujud perusahaan-perusahaan kayu membelah hutan-hutan kayu mereka. Masalah itu biasanya terkait dengan batas tanah dan hak pengakuan pada wilayah ulayat ketika perusahaan bermaksud untuk memberikan ganti rugi berupa uang. Masyarakat berebut untuk mengakui bahwa merekalah yang mempunyai hak atas tanah tersebut dengan harapan akan mendapatkan ganti rugi. Hal inilah yang nantinya menimbulkan konflik antara sesama warga kampung. Selain pembuktian secara benda dan mengetahui serta mampu menunjukkan batas-batas tanah sesuai dengan warisan leluhur, cara “Sumpah Adat” juga dilakukan warga kampung untuk membuktikan kebenaran hak kepemilikan tanah tersebut.

Sumpah adat yang dimaksud adalah dengan ritual “makan tanah” sebelum berbicara tentang asal-usul pengakuan kepemilikan tanah. Kalau dalam pengakuannya nanti dia menipu, maka tanah yang akan menelan dia. Selama pertengkaran yang terjadi dan disepakati untuk melaksanakan sumpah adat ketika masing-masing pihak mempertahankan kebenarannya, maka kutukan adat akan berjalan. Sumpah itu mereka sendiri yang akan menanggung resiko dan tanggungjawabnya, termasuk didalamnya keturunan maupun kelompok marganya. Sampai saat ini sumpah adat tidak pernah meleset dan selalu menelan korban bagi yang menipu dari apa yang diucapkannya.

Pemerintah dan perusahaan membawa mimpi modernitas melalui janji-janji “pembangunanisme” yang menawarkan kemajuan, keluar dari keterisoliran, peradaban baru, dan tentu saja kehidupan (kesejahteraan) yang lebih baik. Namun mimpi itu harus dibayar dengan hilangnya “kehidupan” mereka sebelumnya yaitu tanah

mereka. Masyarakat lokal Papua yang berada di kampung-kampung mendadak dan dipaksakan harus beradaptasi dengan dunia dan kebudayaan baru. Sudah tentu ada begitu banyak implikasi yang akan terjadi.

Pemerintahan yang bekolusi dengan investasi dengan rezim administrative ekonomi politiknya mendorong secara terus-menerus perubahan pada tingkat provinsi, kabupaten, bahkan distrik, dan kampung-kampung dengan berbagai cara dan program. Secara sporadis dan sangat tergesa-gesa, kampung dan masyarakatnya bergerak sangat dinamis bahkan diluar perkiraan untuk merespon perubahan-perubahan yang terjadi tingkat elite (Otsus, pemekaran-pemekaran daerah, dan UU Desa).

Introduksi berbagai macam program tersebut mengakibatkan masyarakat lokal terpapar dalam interkoneksi (pertautan) dengan dunia luar dan nilai-nilai baru. Seturut dengan itu, mereka dituntut untuk merespon perubahan ini dengan cara-cara mereka sendiri. Perubahan itupun tidak main-main karena menyangkut secara langsung terhadap nasib diri mereka, identitas, dan kebudayaannya. Pada awalnya yang terjadi adalah fragmentasi (keterpecahan) di tengah masyarakat dan masyarakat yang terus-menerus mencari nilai-nilai dan solusi dalam menghadapi perubahan tersebut. Respon itu adalah sangat wajar, namun lebih daripada itu diperlukan konsolidasi di internal masyarakat untuk merespon perubahan sosial yang sedang terjadi. Solidaritas dan integrasi sosial yang pernah dan mungkin masih terjadi kampung-kampung mulai terkikis habis karena keterpecahan di tengah masyarakat akibat merespon nilai-nilai baru ini. Oleh sebab itulah praktik-praktik konsolidasi di tengah masyarakat untuk memperkuat integrasi dan solidaritas sosial mutlak diperlukan. Bagaimanapun masyarakat di kampung-kampung tidak mungkin akan menghindari dari realitas sosial yang menuntut mereka untuk bersikap.

Hadirnya pemerintahan, agama, dan program-program pembangunan mentautkan masyarakat tempatan (lokal) kepada nilai-nilai baru. Tentunya hal ini berhubungan dengan pembentukan kebudayaan yang berada di wilayah mereka sendiri. Sejatinya mereka (masyarakat lokal) adalah komunitas yang dinamis dan selalu berubah, bahkan juga tidak selalu terisolir. Dalam dinamika itu ada dua proses yang berbeda. *Pertama*, proses itu merupakan bagian dari hidup masyarakat setempat yang telah melampaui masa panjang dengan perspektif yang tidak selalu tempatan.

Di sini kita harus memahami budaya masyarakat setempat pun pernah mengalami kontak dengan dunia luar, namun dalam proses itu “warna” tempatan kuat bertahan karena masyarakat berhasil mengidentifikasi dirinya dalam proses itu. Mereka dapat mengontrol sejarahnya sendiri, yang mampu membuat sejarahnya sendiri atau menghadirkan waktu transendennya sendiri. *Kedua*, adalah yang berhubungan dengan merasuknya kuasa pembangunan dalam kesadaran kita bukan sebagai sintesa proses historis budaya-budaya tempatan, tetapi lewat daya pikat citra suksesnya di negeri-negeri industri maju yang didukung kekuatan modal. Negara-negara inilah yang selalu menjadi contoh dari suksesnya pembangunan. Mimpi untuk sukses dan berhasil tentunya hak semua orang. Namun dalam kasus introduksi pembangunan dan nilai-nilai budaya global yang tercermin di masyarakat kampung (perdesaan), kita membayangkan kesuksesan pembangunan dari daerah-daerah lain, bukan pada daerah kita sendiri (Laksono, 2000).

Justru persoalannya yang terjadi adalah kita baru dapat memeluk mimpi dan citranya (bukan/belum suksesnya) yang mengacu daerah lain, tetapi telah melepas pegangan kita pada pengetahuan budaya yang telah lama kita bangun. Itulah realitas yang terjadi dalam proses besar-besaran dan berlangsung massif berkelanjutan dalam perubahan sosial yang terjadi di kampung-kampung (perdesaan) di Indonesia, tak terkecuali di Papua. Pegangan yang kini perlahan namun pasti lepas dari pegangan masyarakat lokal di kampung-kampung adalah sumber daya alam dan nilai-nilai kebudayaan tradisional yang telah terbukti menghidupi warganya. Lebih daripada itu, identitas dan kepercayaan diri masyarakat untuk melanjutkan hidupnya semakin lama semakin terkikis akibat penetrasi nilai-nilai modern yang justru membingungkan mereka.

Pendidikan Humaniora dan Gerakan Mediasi Kebudayaan

Di tengah kondisi keterpecahan yang terjadi di tengah masyarakat Papua, menjadi penting mempertanyakan peranan dari perspektif ilmu-ilmu humaniora dalam konteksnya di Tanah Papua. Dalam sebuah esainya, intelektual terkemuka Papua, Pendeta Dr. Benny Gay mengungkapkannya bahwa perlu refleksi di kalangan lembaga pendidikan di Papua untuk menjadikan dirinya sebagai lembaga yang emansipatif dan transformatif. menuju Papua Baru. Lembaga pendidikan di Papua bukan hanya menempatkan dirinya semata-

mata sebagai lembaga pewaris nilai-nilai sosial budaya generasi masa lampau. Yang terjadi justru lembaga pendidikan ini tidak akomodatif kepada perubahan jaman (Giay, 2000: 93-102). Diperlukan terobosan dari lembaga pendidikan di Papua untuk menangkap kegelisahan dan pergolakan di yang sedang terjadi di tengah masyarakat. Kegelisahan dan pergolakan tersebut terekspresikan melalui berbagai fenomena social budaya yang terpentaskan di public maupun tersimpan rapat dibalik kebungkaman rakyat untuk bersuara.

Ilmu-ilmu humaniora adalah pengetahuan yang bersumber dan terus hidup melalui pengalaman manusia dalam berkomunitas dan mengkonstruksi (membentuk) kebudayaannya. Konstruksi manusia dalam relasinya berkomunitas itulah yang membentuk ilmu-ilmu humaniora seperti bahasa, sastra, arkeologi, sejarah, antropologi. Semuanya masuk ke dalam rumpun-rumpun ilmu budaya yang membedakan dirinya dengan ilmu social dan politik (sosiologi, komunikasi, kriminologi, administrasi, dll). Karena fokusnya pada pembentukan kebudayaan manusia, ilmu-ilmu humaniora menysasar secara langsung refleksi identitas-identitas manusia dalam rentang sejarah yang terus berubah sesuai dengan konteks, ruang, waktu, dan kepentingan manusia tersebut.

Ilmu humaniora tentu berbeda dengan ilmu pasti dan sangat jauh dari pemikiran tentang pragmatisme pendidikan untuk melayani dunia kerja, pasar global, dan sudah tentu kuasa kapital (investasi) yang menggerogoti negeri ini dan juga manusia-manusia di dalamnya. Subjek yang dipelajari dalam ilmu-ilmu humaniora terus bergerak dan dinamis, sementara yang mempelajarinya juga mempunyai pengalaman pribadi yang terus berubah sesuai dengan konteks historisnya. Oleh karena itu hasil dari belajar antropologi lebih bersifat pengetahuan reflektif dan apresiatif yaitu pada penemuan eksistensi manusia itu sendiri. Ilmu humaniora meletakkan kebenaran ada dalam rentang sejarah sosial manusia, dalam relasi kuasa/politik, ketika manusia harus membuat strategi dan siasat untuk mengorganisir hidupnya di dunia nyata.

Pendidikan pada prinsipnya berkaitan dengan revolusi kesadaran historis (sekalgus kritis) manusia akan hakekat hidupnya. Eksistensi manusia terbentang antara masa lampau dan masa depan. Dengan demikian pendidikan itu arahnya tidak hanya pada ilmu pengetahuan dan teknologi saja, tetapi juga pada usaha pemahaman atas diri sendiri dalam konteks historisnya. Ada tiga poin penting yang patut direnungkan. *Pertama*, pengetahuan manusia itu bersifat

historis, maka sifat dogmatis bertentangan dengan sikap historis manusia itu. *Kedua*, perlu tekanan dalam pendidikan pada “proses” bukan hanya dalam “produk”. *Ketiga*, perlunya menghidupkan kesadaran historis dengan membiasakan peserta didik melihat “akar-akar” sejarah dan masalah-masalah masa kini yang kita hadapi. Pendidikan seperti inilah yang berwawasan kemanusiaan, jadi juga berwawasan antropologi.³

Ilmu-ilmu humaniora memiliki perkembangan yang menjanjikan dan dinamis di Papua. Konteks sosial budaya dan perubahan sosial menjadi laboratorium yang penting dalam pengembangan ilmu antropologi khususnya. Namun, situasi ironis yang terjadi adalah terkesan mandegnya perkembangan ilmu-ilmu humaniora karena penetrasi birokratisasi pendidikan dan kuasa investasi global. Namun, kondisi ironis yang terjadi adalah justru ketajaman (ilmu) antropologi sangat lemah di tempat-tempat dimana masyarakat dan kebudayaannya dikalahkan oleh kekuatan eksploitasi (modal, negara, dan jaringan sistem nilai global). Jejaring interkoneksi kuasa kapital global inilah yang mengeksploitasi sumber daya alam yang dahsyat dan mengalahkan masyarakat dan budaya tempatan (Laksono, 2010:10).

Dalam ranah praksis, kerja ilmu-ilmu humaniora, khususnya antropologi mesti dikerjakan secara berkelanjutan dengan mengapresiasi pengalaman-pengalaman dan narasi reflektif identitas yang berbeda-beda. Penting juga diajukan kerja partisipatoris bersama-sama masyarakat tempatan untuk melakukan studi etnografi bersama yang memberikan ruang dan sekaligus mengapresiasi pengalaman-pengalaman masyarakat tempatan untuk bersiasat di tengah terjangan kekuatan kapital global. Oleh karena itulah menjadi penting untuk menghargai “ruang antar budaya” untuk menumbuhkan kesadaran keberbedaan, melihat identitas diri kita pada masyarakat tempatan lain yang sebelumnya “asing” atau kita anggap “terkebelakang” dibanding identitas budaya kita.

Antropologi sangat berperan penting dalam sumbangannya dalam menafsirkan bagaimana konstruksi identitas kebudayaan kita

3 Lebih lengkap tentang perspektif pemikiran ini lihat makalah dari Prof. P.M. Laksono, M.A., “Kontekstualisasi (Pendidikan) Antropologi Indonesia” dalam Sarasehan AJASI (Asosiasi Jurusan Antropologi Seluruh Indonesia) di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2010.

terbangun. Bahkan, antropologi juga bisa menguraikan bagaimana pemegang kuasa menelikunginya. Antropologi dengan demikian memiliki daya dan kapasitas untuk mengawal proses konstruksi identitas kebudayaan tersebut berjalan lebih seimbang atau memihak yang sedang dilemahkan (Laksono, 2010: 10).

Proses konstruksi kebudayaan diawali dari manusia dalam hidupnya berkomunitas dan mereproduksi kebudayaannya memerlukan media sebagai ruang ekspresinya. Ruang bukan hanya tempat yang nir-historis (tanpa sejarah), tetapi penuh dengan imajinasi, ingatan, dan keterikatan manusia dengan identitasnya dan dengan demikian juga dengan kebudayaannya. Di dalam ruang yang menyejarah itulah manusia memerlukan media-media ekspresi kebudayaan untuk menegakkan identitas dirinya.

Di pusat reproduksi makna kebudayaan—ruang dan media-media ekspresi kebudayaan—itulah kebudayaan terus-menerus diperdebatkan, diperbincangkan, dan dijadikan pijakan melalui sistem nilai dan norma-norma dalam hidup berkomunitas (bermasyarakat). Oleh karena itulah sudah sepantasnya kebudayaan dipahami sebagai sebuah “gerakan sosial” yang akan terus-menerus berubah dan berada dalam wilayah ketegangan antara yang ingin berubah dan mempertahankan kebudayaan. Melokalisir kebudayaan dalam tempat tertentu tentu sangat salah kaprah, ini disebabkan karena begitu liar dan licinnya kebudayaan dipraktikkan melalui manusia-manusia yang menciptakannya.

Marilah coba merenungkan bagaimana kini kebudayaan-kebudayaan Papua terinterkoneksi (terhubung) dengan dunia luar. Implikasi dari keterhubungan ini adalah ketergoncangan yang terjadi akibat hadirnya kebudayaan baru yang sama sekali berbeda. Situasi “geger budaya” (kegagapan budaya) inilah yang menghadirkan gesekan-gesekan antara imajinasi lokal masyarakat tentang dirinya dan logika kapital global yang masuk melalui investasi-investasi yang mengeksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Setiap jengkal tanah di Tanah Papua ini tidak bisa dilepaskan dari tangan-tangan investasi global yang ditunjukkan dengan masuknya berbagai jenis investor. Di sisi lain masyarakat lokal masih memerlukan adaptasi (penyesuaian) tentang mimpi dan imajinasi tentang diri dan kebudayaannya yang bergesekan dengan kebudayaan global.

Dalam silang-sengkarut inilah orang Papua dihadapkan pada imajinasinya tentang diri dan identitasnya yang digadang-gadang

sebagai “identitas atau kebudayaan asli Papua” dan realitas kekinian dimana akulturasi dengan begitu *fluid* (cairnya) kebudayaan memunculkan kemungkinan-kemungkinan pemaknaan baru tentang identitas dan budaya Papua yang lebih lentur dan *in the making*, dalam proses pembentukan terus-menerus tanpa henti.

Berbagai fenomena “ketersingkirkan” secara halus namun pelan tapi pasti tengah mengiringi perjalanan kebudayaan di Tanah Papua. Berbagai ruang-ruang kebudayaan modern dipenuhi dengan materi-materi kebudayaan yang asing bagi mereka. Misalkan saja, kehadiran perkebunan kelapa sawit, pertanian, bangunan ruko (rumah toko), dan para pendatang yang membawa kebudayaan dan gairah berjuang untuk tetap *survive* (bertahan) di tanah rantau.

Di tengah situasi seperti ini, mengakui serta memperjuangkan identitas dan kebudayaan menjadi sangat problematik dan penuh dengan liku-liku. Oleh karena itulah di tengah situasi seperti ini menjadi sangat penting upaya-upaya yang apresiatif untuk merekognisi (mengakui) kebudayaan masyarakat lokal. Hal ini dilakukan untuk memberikan ruang-ruang kebudayaan untuk mengekspresikan identitas dan jati diri mereka.

Interkoneksi antara dunia luar dan anak-anak Papua secara jelas terlihat dalam dunia pendidikan. Dalam konteks pendidikan di Tanah Papua, dengan bukti buku pelajaran membaca yang dirancang oleh misionaris, terlihat jelas usaha kreatif untuk menempatkan konteks lokal dalam rancangan pembelajaran membaca di sekolah dasar. Misalkan saja dengan penggunaan alat peraga berupa gambar besar yang mendeskripsikan “Rumah yang di kampung kena api. Ada orang berteriak dan lari. Ada babi yang lari. Ada pula orang yang lari mencari air dan membawa air dan memadamkan api itu sampai api mati” (I.S Kijne, 1951: 5).

Anak-anak Papua dengan demikian memerlukan media-media pembelajaran dimana anak-anak mampu belajar tanpa kehilangan identitasnya. Oleh karena itulah mereka akan dapat berpartisipasi dalam gerakan perubahan masyarakatnya, bukannya malah tersingkir dan terasingkan dengan pembelajaran yang asing bagi mereka. Agar anak-anak Papua bisa belajar tanpa kehilangan identitasnya, dibutuhkan media-media kebudayaan yang dipentaskan dalam ruang-ruang kebudayaan, termasuk salah satunya di sekolah. Media-media jelas menjadi kebutuhan yang tidak bisa dianggap sepele. Media-media kebudayaan yang dimaksudkan adalah

berbagai sarana-sarana yang menjadi “alat” untuk mengeskpresikan kebudayaan berbagai macam etnik yang ada di Tanah Papua ini. Media-media budaya sebenarnya hidup di tengah masyarakat dan menjadi simbol pemaknaan kebudayaan yang terus-menerus mereka lakukan. Namun, ditengah globalisasi dan modernisasi yang membayangkan kemajuan sebagai indikatornya, apresiasi terhadap media-media budaya yang tradisional dianggap ketinggalan zaman.

Media-media kebudayaan yang dimaksud adalah diantaranya adalah kesenian (ukir, tari, musik, suara) yang begitu kaya di Tanah Papua. Masing-masing kesenian ini mempunyai ruangnya yang menyejarah saling bertautan dalam penciptaan kebudayaan sebuah komunitas. Seni ukir sebuah wilayah bisa merepresentasikan sistem pengetahuan dan religi sebuah komunitas. Melalui ukiran-ukiran kayu para seniman inilah pemaknaan sebuah kebudayaan sedang dilakukan terus-menerus, diperbincangkan, dan kemudian diwariskan menjadi sistem pengetahuan yang menandakan identitas mereka.

Di Tanah Papua, kesatuan kesenian (visual, tari, musik, nyanyian/ suara) sudah menjadi ruh dan kehidupan masyarakat. Berbagai ekspresi kesenian ini adalah media-media budaya yang akan terus tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat Papua. Namun karena mimpi terhadap kemajuan dan modernitas yang diimpor dari cerita kesuksesan daerah-daerah lain, apresiasi terhadap media-media kebudayaan tradisional akhirnya tersingkir. Permasalahannya bukan hanya tersingkirnya apresiasi-apresiasi tapi secara perlahan namun pasti transformasi (perubahan) sosial pun menjadi tantangan yang harus dihadapi di depan mata.

Selain kesenian, media cerita-cerita rakyat dan proses inisiasi adat adalah pembelajaran nilai-nilai kemanusiaan yang paling menyentuh kehidupan seseorang. Jika dipahami lebih dalam, dalam cerita-cerita rakyat akan banyak terkandung nilai-nilai dalam kehidupan manusia. Lebih jauh, proses inisiasi adat yang dilakukan oleh sebuah komunitas atau etnik tertentu adalah pendidikan kebudayaan yang paling efektif dan berpengaruh dalam menciptakan karakter seseorang.

Media-media kebudayaan ini di tengah situasi bertautannya dunia tradisional dan dunia masa depan seolah dianggap kehilangan spiritnya. Arnold Clements Ap, seorang tokoh kesenian dan kebudayaan Papua, pernah mengungkapkan pendapat tentang apa

yang dikerjakannya bersama teman-temannya di Group Mambesak. "Mungkin kamu berpikir saya ini sedang melakukan hal bodoh, tapi inilah yang saya pikir dapat saya lakukan untuk rakyat, sebelum saya mati." Apa yang dilakukan Arnold Ap dan Mambesak melalui media-media kebudayaan kesenian dalam hal ini adalah sesuatu yang membanggakan sekaligus menginspirasi. Salah satu hal yang tidak dapat terbeli dalam kehidupan ini salah satunya mungkin adalah kepuasan ketika identitas diri dan kebudayaannya terekspresikan dengan merdeka tanpa tekanan.

Melakukan gerakan-gerakan apresiasi terhadap kebudayaan masyarakat adalah salah satu perspektif dalam studi kebudayaan. Mediasi kebudayaan bisa diartikan sebagai perspektif yang melihat pelibatan/pengikutsertaan perspektif kebudayaan dalam memecahkan suatu permasalahan. Perspektif kebudayaan yang dimaksudkan adalah suatu pemahaman bahwa segala macam permasalahan terkandung aspek kebudayaan. Analisis kebudayaan inilah yang menjadi sumbangan dari gerakan-gerakan mediasi kebudayaan.

Tentang apa itu kebudayaan dan bagaimana perspektif yang terdapat di dalamnya menjadi perdebatan yang tiada ujung dan akhir. Begitu banyak teori dan perspektif kebudayaan dengan metodologinya masing-masing. Jika menganggap kebudayaan itu terus bergerak dan berubah sesuai dengan konteks ruang dan waktu, perspektif transformatif yang emansipatoris sangatlah tepat dirujuk. Paradigma kebudayaan ini memandang bahwa pemaknaan kebudayaan lahir dari proses belajar bersama antara masyarakat dan orang lain yang ingin belajar tentang kebudayaannya. Dengan demikian, pengetahuan terlahir dari proses negosiasi dan saling belajar. Perspektif ini jauh dari pemikiran bahwa kebudayaan adalah datang jatuh dari langit dan ada begitu saja (*taken for granted*). Kebudayaan adalah proses pemaknaan berupa sistem nilai dan norma dalam sebuah komunitas yang akan terus berubah-ubah sesuai dengan konteks ruang yang menyelaraskan dan waktu.

Gerakan mediasi-mediasi kebudayaan bisa tercermin dari digunakannya perspektif kebudayaan yang transformatif emansipatoris dalam membaca perubahan sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Mediasi kebudayaan bisa juga terlihat dari keberpihakan dalam memfasilitasi ekspresi-ekspresi kebudayaan lokal yang tumbuh dan berkembang menjadi identitas dan martabat masyarakat Papua.

DAFTAR PUSTAKA

- Putra, Heddy Shri Ahimsa. 1987. "Etnografi sebagai Kritik Budaya: Mungkinkah di Indonesia?" dalam Majalah *Jerat Budaya* No 1/1/1987 Jurusan Antropologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Giay, Benny, 2000. *Menuju Papua Baru: Beberapa Pokok Pikiran sekitar Emansipasi Orang Papua*. Jayapura: Deiyai/Els-ham Papua.
- Kijne.I.S. 1951. *ITU DIA ! Djalan Pengadjaran Mambatja untuk Nieuw Guine* J.B. Wolters-Groningen, Djakarta-1951.
- Laksono, P.M. 2009. "Peta Jalan Antropologi Indonesia Abad Kedua Puluh Satu: Memahami Invisibilitas (Budaya) di Era Globalisasi Kapital". Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 27 Oktober 2009.
- Laksono, P.M. 2010. "Kontekstualisasi (Pendidikan) Antropologi Indonesia". Makalah dalam Sarasehan AJASI (Asosiasi Jurusan Antropologi Seluruh Indonesia) di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Laksono, P.M. 2010b. "Mewacanakan Pemberdayaan Masyarakat dalam Antropologi". Makalah dalam Kongres Asosiasi Antropologi Indonesia ke-3 dan Seminar Antropologi Terapan di Cisarua 21-23 Juli 2010.
- Laksono, P.M. 2011. "Ilmu-ilmu Humaniora, Globalisasi, dan Representasi Identitas". Pidato yang disampaikan pada Peringatan Dies Nataliske-65 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 3 Maret 2011.
- Suryawan, I Ngurah. 2013. "Tanah Dibutuhkan Tapi Orang Tidak: Transformasi Masyarakat Adat dalam Perspektif Etnografi dan Sejarah Sosial" dalam *Kritis, Jurnal Studi Pembangunan Interdisipliner* Vol. XXII No. 2 Juli - Desember 2013.
- Suryawan, I Ngurah. 2012. "Politik Ruang (Pasar) dan Pemekaran Daerah: Siasat Rakyat Papua di Garis Depan Global" dalam *Kritis, Jurnal Studi Pembangunan Interdisipliner* Vol. XXII No. 1 Februari - Juli 2012.

- Suryawan, I Ngurah. 2012b. *Jiwa Yang Patah*. Yogyakarta: Pusat Studi Bahasa dan Budaya Papua (Pusbahaya) UNIPA Manokwari, Papua Barat dan Penerbit Kepel.
- Suryawan, I Ngurah. 2011. "Antropologi Gerakan Sosial: Membaca Transformasi Identitas Budaya di Kota Manokwari, Papua Barat" dalam *Humaniora, Jurnal Budaya, Sastra, dan Bahasa* Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Volume 23, Nomor 3, Oktober 2011 (290-300)
- Suryawan, I Ngurah. 2011. "Komin Tipu Komin: Elite Lokal dalam Dinamika Otonomi Khusus dan Pemekaran Daerah di Papua" dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JSP)* Volume 15, Nomor 2, November 2011 (140-153).
- Tebay, Neles. 2009. *Dialog Jakarta-Papua Sebuah Perspektif Papua*. Jakarta: SKP Jayapura.
- Timmer, Jaap, 2007, "Desentralisasi Salah Kaprah dan Politik Elite di Papua", dalam Henk Schulte Nordhold dan Gerry van Klinken (eds.), *Politik Lokal di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hal. 595-625
- Tsing, Anna. Lowenhaupt.1998. *Di Bawah Bayang-Bayang Ratu Intan: Proses Marjinalisasi pada Masyarakat Terasing*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Tsing, Anna. Lowenhaupt. 2005. *Friction: An Ethnography of Global Connection*. Princeton and Oxford: Princeton University Press.
- Widjojo dkk, Muridan. 2009. *Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Past and Securing the Future*. Jakarta: Buku Obor, LIPI dan TIFA.

* Sebagian besar esai ini saya olah dari beberapa kertas kerja sebelumnya untuk kepentingan seminar dan konferensi serta artikel-artikel opini di media *Cahaya Papua*, sebuah media lokal di Kota Manokwari, Papua Barat

STRATEGI KEBUDAYAAN UNTUK REVOLUSI MENTAL DI INDONESIA

Heddy Shri Ahimsa-Putra

Pengantar

Membicarakan tentang strategi kebudayaan untuk mewujudkan Revolusi Mental pada sebuah bangsa bukanlah hal yang mudah. Meskipun demikian, sejarah kehidupan manusia menunjukkan bahwa "Revolusi-Revolusi Mental"—kalau saya boleh menyebutnya demikian—memang telah berlangsung pada berbagai bangsa. Di Inggris, Revolusi Mental ini telah mendorong munculnya sebuah revolusi dalam kehidupan orang Inggris pada umumnya, yang kemudian juga sangat berpengaruh pada kehidupan umat manusia pada umumnya, yaitu Revolusi Industri. Di Jerman, pemerintah Nazi di bawah pimpinan Hitler telah mampu mengubah mental orang Jerman yang kemudian menyebabkan terjadinya pembunuhan besar-besaran terhadap orang Yahudi dan Perang Dunia II yang memporandakan negara-negara di kawasan tersebut. Di Jepang Revolusi Mental juga telah terjadi, sehingga bangsa Jepang dapat menyamai bangsa-bangsa di Eropa Barat, dan mampu bangkit dengan cepat dari kekalahannya dalam perang Asia Timur Raya. Kini, kita juga tengah melihat dan merasakan dampak dari Revolusi Mental yang terjadi di kalangan bangsa Korea. Berbagai karya budaya orang Korea, baik berupa peralatan komunikasi dan transportasi (mobil, televisi, *handphone*), maupun karya seni (tari, film, *life-style*) telah masuk ke Indonesia dan diterima dengan senang hati oleh sebagian masyarakat Indonesia.

Beberapa kasus tersebut menunjukkan pada kita dua hal. *Pertama*, bahwa meskipun "mental" adalah sebuah fenomena individual, namun Revolusi Mental dapat terjadi tidak hanya pada individu, tetapi juga pada sebuah kolektivitas, entah itu berupa sebuah komunitas, suku bangsa, masyarakat, atau suatu bangsa. *Kedua*, bahwa perubahan atau Revolusi Mental dapat diwujudkan, dapat diupayakan. Hal ini berarti bahwa dibalik sebuah Revolusi Mental—terutama yang menyangkut sebuah kolektivitas—terdapat serangkaian rencana dan upaya yang sistematis, yang disusun atas dasar sebuah tujuan yang jelas, dan ini hanya dapat dilakukan bilamana konsepsi atau pandangan kita mengenai Revolusi Mental itu sendiri juga jelas.

Dalam tulisan ini saya mengemukakan pandangan saya mengenai "Revolusi Mental" serta strategi kebudayaan yang dapat ditempuh untuk mewujudkan revolusi tersebut. Tentu pandangan ini tidak dapat dianggap sebagai yang paling benar. Akan tetapi setidaknya-tidaknya dengan pemikiran ini kita memiliki sebuah titik

awal untuk membicarakan strategi-strategi kebudayaan yang dapat mempercepat proses terwujudnya Revolusi Mental di Indonesia, sebagaimana yang diinginkan oleh presiden terpilih, Jokowi. Dalam hal ini kita berasumsi bahwa suatu corak mental tertentu terkait dengan kebudayaan, bahkan kebudayaan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap terbentuknya suatu corak mental tertentu pada suatu kolektivitas atau suatu bangsa.

Revolusi Mental: Apa Itu?

Pada paro kedua abad yang lalu, tepatnya empat puluh tahun yang lalu, Koentjaraningrat, seorang ahli antropologi Indonesia, telah menulis sejumlah artikel mengenai keterkaitan antara kebudayaan, mental, dan pembangunan di harian *Kompas*, yang kemudian diterbitkan menjadi sebuah buku yang berjudul *Kebudayaan, Mentalitet, dan Pembangunan*. Meskipun buku ini sudah jarang dibaca, namun isinya masih tetap relevan dengan apa yang kita bicarakan sekarang.

Artikel-artikel dalam buku tersebut—yang ditujukan kepada pembaca harian *Kompas* pada umumnya, yaitu kalangan awam berpendidikan—ditulis di tengah situasi ketika masyarakat Indonesia mulai memasuki fase kehidupan sosial-ekonomi-politik yang lebih stabil, yang diciptakan oleh pemerintah Orde Baru, dan diinginkan segera mampu bergerak melakukan pembangunan di berbagai bidang, untuk mencapai kehidupan ekonomi yang lebih baik. Di sini para ilmuwan sosial-budaya dihadapkan pada sebuah tantangan besar, yaitu membantu pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, melalui kegiatan-kegiatan ilmiah yang biasa mereka lakukan.

Sebagai sebuah rencana nasional, pembangunan di masa itu dipandang sebagai sebuah rencana besar yang belum dapat berjalan dengan lancar. Akan ada banyak kendala yang dihadapi oleh pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut. Salah satunya adalah sikap mental, atau yang oleh Koentjaraningrat disebut "*mentalitet*". Pandangan Koentjaraningrat sebenarnya tidak begitu berbeda dengan pandangan Jokowi saya kira. Bedanya adalah pada cara menyatakannya. Kalau Jokowi secara implisit berpendapat bahwa kita sekarang memerlukan adanya "Revolusi Mental"—yang sebetulnya juga belum begitu jelas seperti apa wujudnya, Koentjaraningrat berpendapat bahwa untuk tercapainya cita-cita

pembangunan diperlukan adanya suatu *mentalitet* tertentu yaitu "*mentalitet* pembangunan".

Apa *mentalitet* pembangunan itu? Ternyata Koentjaraningrat tidak mendefinisikannya secara eksplisit. Beliau hanya mengatakan bahwa untuk mencapai tingkat kemakmuran tertentu bangsa Indonesia "tidak bisa tidak harus merubah beberapa sifat dari *mentalitet*" yang ada dalam diri mereka (1974: 40), dan uraian beliau selanjutnya mengenai masalah *mentalitet* ternyata adalah mengenai "nilai-budaya" dan "sikap". Saya tidak akan memaparkan lebih lanjut pandangan-pandangan Koentjaraningrat, tetapi sebagian pandangan beliau yang saya sepakati akan saya masukkan di sini.

a. Revolusi Mental: Definisi dan Penjelasan

Sebelum sebuah Revolusi Mental diwujudkan, makna konsep tersebut harus jelas terlebih dulu, agar kita dapat menyusun strategi yang tepat untuk mewujudkannya. Secara sederhana mental atau *mentalitet* dapat didefinisikan sebagai **pandangan-pandangan, pengetahuan, nilai-nilai, norma-norma serta aturan-aturan yang dimiliki oleh seorang individu, yang dijadikan kerangka acuan atau pedoman untuk memahami dan mewujudkan perilaku atau tindakan tertentu terhadap lingkungan yang dihadapi.** Sebagian ahli antropologi menyebut ini sebagai pengetahuan budaya (*cultural knowledge*) (Spradley, 1972). Dengan demikian secara umum *mentalitet* merupakan kerangka pemikiran yang dimiliki oleh seorang individu. Kerangka pemikiran tersebut unsur-unsurnya adalah: pengetahuan dan pandangan tentang dunia, tentang nilai, tentang norma, dan tentang aturan-aturan.

Revolusi biasa didefinisikan sebagai perubahan yang berlangsung dengan cepat. Artinya, perubahan tersebut terjadi dalam waktu yang pendek. Akan tetapi, sebagaimana diketahui, cepat atau pendek ini relatif sifatnya. Revolusi industri di Inggris misalnya, bukanlah sebuah revolusi yang berlangsung dengan cepat. Diperlukan waktu bertahun-tahun untuk bisa muncul berbagai penemuan dalam ilmu pengetahuan, yang kemudian bersama-sama menghasilkan berbagai perangkat teknologi yang begitu mengubah kehidupan manusia. Istilah revolusi di sini lebih ditujukan pada dampak yang dihasilkan dari perubahan yang terjadi, sebagaimana halnya juga istilah revolusi dalam "Revolusi Neolitik".

Jika demikian **Revolusi Mental** dapat didefinisikan sebagai **perubahan-perubahan mendasar (*fundamental*) yang terjadi pada kerangka pemikiran individu, yang berdampak luas dan penting terhadap lingkungan tempat individu tersebut berada.** Definisi ini tidak serta-merta dapat dipahami, karena di dalamnya terdapat sejumlah konsep atau istilah yang memang perlu dijelaskan lebih lanjut. Untuk itu, definisi ini dapat dibagi menjadi beberapa frase yang menunjukkan suatu pengertian tertentu

“Perubahan-perubahan mendasar yang terjadi pada kerangka pemikiran indivi-du....”. Artinya, sejumlah unsur dalam kerangka pemikiran tersebut berubah atau berganti, sehingga ciri, sifat, dan keadaan unsur-unsur tersebut menjadi sangat berbeda dengan yang sebelumnya. Unsur-unsur ini antara lain adalah pandangan tentang dunia, tentang penciptaannya, tentang kedudukan manusia di dalamnya, tentang berbagai unsur yang terdapat dalam dunia itu juga, dan sebagainya. Tentang kedudukan manusia sebagai salah satu makhluk yang hidup di muka bumi misalnya, ada pandangan yang mengatakan bahwa manusia di situ adalah khalifah, pemimpin, sehingga makhluk-makhluk yang lain memang sudah sewajarnya tunduk pada manusia, atau boleh dimanfaatkan oleh manusia. Pandangan yang lain mengatakan bahwa manusia harus membangun hubungan yang selaras, harmonis, dengan lingkungannya, baik itu berupa hewan, tumbuh-tumbuhan atau alam kebendaan. Perubahan dari pandangan yang satu ke pandangan yang lain itu merupakan perubahan yang mendasar, yang fundamental.

Unsur yang lain dalam kerangka pemikiran tersebut adalah nilai-nilai. Nilai adalah patokan atau kriteria untuk menentukan baik-buruknya sesuatu, boleh-tidaknya sesuatu dilakukan. Sebagai contoh adalah nilai mengenai kemandirian. Dalam kerangka berpikir tertentu, kemandirian tidak dipandang sebagai sesuatu yang ideal, karena seseorang yang mandiri tidak akan meminta bantuan orang lain dan tidak ingin dibantu oleh orang lain, sehingga hubungannya dengan individu-individu yang lain tidak akan erat. Dalam kerangka pemikiran yang lain, kemandirian justru sangat dihargai karena seorang individu yang mandiri tidak akan tergantung pada orang lain, dan tidak akan menyusahkan orang lain. Perubahan nilai kemandirian dari yang satu ke yang lain di situ merupakan perubahan yang mendasar, karena akan sangat mengubah hubungan seseorang dengan lingkungan sosialnya.

“... yang memberikan dampak yang luas dan penting ...”. Artinya, perubahan-perubahan yang terjadi pada kerangka pemikiran tersebut mempunyai pengaruh atau akibat yang bersifat kuantitatif, yaitu yang luas, dan yang bersifat kualitatif, yaitu yang penting. Dampak yang luas terlihat dari jangkauan akibat dari perubahan tersebut, serta dari jumlah unsur yang terkena. Semakin jauh dan semakin banyak unsur yang terkena dampak perubahan itu berarti semakin luas dampaknya. Dampak yang penting terlihat dari perubahan ciri, sifat, dan keadaan unsur yang terpengaruh. Semakin berbeda ciri, sifat, dan keadaan unsur yang terpengaruh oleh perubahan tersebut dari ciri, sifat, dan keadaan sebelumnya, semakin penting dampak tersebut.

“....terhadap lingkungan tempat individu tersebut berada.” Lingkungan di sini dapat dibedakan menjadi lingkungan fisik, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya. Lingkungan fisik adalah unsur-unsur yang ada di sekitar individu, dan memiliki hubungan dengannya, yang dapat dibedakan menjadi lingkungan fisik alami dan lingkungan fisik buatan. Lingkungan fisik alami misalnya adalah tanah, air, udara, hewan, tumbuh-tumbuhan, sedang lingkungan fisik buatan misalnya adalah rumah, perabotan, dan perlengkapan dalam rumah, jalanan, jembatan, gedung-gedung, dan sebagainya.

Lingkungan sosial merupakan berbagai jenis status (kedudukan) dan *role* (peran), kategori sosial, pola perilaku dan tindakan, pola interaksi sosial, pola relasi sosial, pelapisan sosial, penggolongan sosial dan sebagainya; sedang lingkungan budaya merupakan pengetahuan, pandangan, nilai-nilai, norma, aturan, bahasa, kepercayaan, dan sebagainya, yang sebagian bersifat abstrak, tidak dapat diamati.

Semakin banyak unsur-unsur lingkungan (fisik, sosial, budaya) yang berubah sebagai akibat dari perubahan mental yang terjadi, semakin luas dampak dari perubahan mental yang terjadi; semakin berbeda ciri, sifat, dan keadaan unsur-unsur lingkungan ini dengan sifat, ciri, dan keadaan sebelumnya, semakin penting dampak dari perubahan mental tersebut. Semakin luas dan semakin penting dampak perubahan yang terjadi, semakin mendasar Revolusi Mental yang terjadi, atau semakin revolusioner perubahan *mentalitet* yang terjadi.

b. Mentalitet yang Diinginkan: Mentalitet Pembangunan?

Uraian di atas menunjukkan bahwa mental atau *mentalitet* seseorang dapat berubah atau berganti, yang kemudian juga akan mengubah pola-pola perilaku dan tindakannya, pola interaksi sosialnya, serta relasinya dengan lingkungannya. Sehubungan dengan revolusi mental yang dikemukakan oleh Jokowi, yang menjadi pertanyaan adalah Revolusi Mental seperti apa yang diinginkan? Artinya, isi kerangka pemikiran seperti apa yang diinginkan akan menggantikan isi kerangka pemikiran yang ada sekarang? Mengenai hal ini Jokowi tampaknya perlu memberikan penjelasan yang lebih rinci.

Jika kita bandingkan dengan pandangan Koentjaraningrat, maka akan terlihat bahwa Koentjaraningrat memiliki pandangan yang lebih jelas mengenai corak *mentalitet* yang diinginkan. Oleh karena di masa itu Indonesia tengah giat-giatnya melakukan pembangunan di berbagai bidang kehidupan, maka *mentalitet* manusia Indonesia yang diinginkan adalah "*mentalitet* pembangunan". Seperti apa *mentalitet* pembangunan ini?

Mentalitet, dalam pandangan Koentjaraningrat, terdiri dari sejumlah nilai-nilai budaya, dan *mentalitet* pembangunan adalah nilai-nilai budaya yang dianggap sesuai dengan atau dapat mendukung atau mendorong kegiatan pembangunan. Nilai-nilai budaya tersebut antara lain adalah, *pertama*, "nilai budaya yang berorientasi ke masa depan", yaitu nilai budaya yang "akan mendorong manusia untuk melihat dan merencanakan masa depannya dengan lebih seksama dan telitei, dan oleh karena itu akan memaksa manusia untuk hidup berhati-hati dan berhemat". *Kedua* adalah nilai budaya "yang berhasrat untuk mengeksplorasi lingkungan alam dan kekuatan-kekuatan alam", karena nilai budaya semacam ini "akan menambah kemungkinan inovasi, terutama inovasi dalam teknologi (1974: 40). *Ketiga* adalah nilai budaya "yang menilai tinggi hasil dari karya manusia". Dengan nilai budaya ini seorang individu akan berkarya untuk karya itu sendiri. Artinya, kepuasan individu dalam berkarya adalah jika dia telah mampu menghasilkan karya yang menurut penilaiannya adalah karya yang bermutu. *Keempat* adalah nilai budaya "yang menilai tinggi usaha orang yang dapat mencapai hasil, sedapat mungkin atas usahanya sendiri". Nilai budaya ini akan dapat meningkatkan intensitas berusaha "untuk mempertinggi produksi" dan "menjadi agak lebih makmur sedikit" (1974:41).

Selain *mentalitet* yang mendukung pembangunan, Koentjaraningrat juga mengemukakan *mentalitet* yang tidak atau kurang sesuai dengan pembangunan, atau berbagai kelemahan yang ada dalam *mentalitet* orang Indonesia. Dalam hal ini Koentjaraningrat membedakannya menjadi dua, yaitu (a) *mentalitet* orang Indonesia terhadap lingkungan yang "sudah lama mengendap dalam alam pikiran ... karena terpengaruh atau bersumber kepada sistem nilai budaya kita sejak beberapa generasi yang lalu", dan (b) *mentalitet* terhadap lingkungan "yang baru timbul sejak zaman revolusi", dan "tidak bersumber pada sistem nilai budaya" Indonesia (1974: 43).

Untuk mengidentifikasi *mentalitet* yang pertama, Koentjaraningrat menggunakan kerangka "orientasi nilai budaya" yang disusun oleh ahli antropologi Amerika, Clyde Kluckhohn. Orientasi nilai budaya ini menurut Kluckhohn merupakan pandangan baik-buruk berkenaan dengan hakekat hidup, karya manusia, waktu, alam, dan sesama manusia. Kelemahan *mentalitet* orang Indonesia yang bersumber pada sistem nilai budaya Indonesia ini antara lain adalah, *pertama*, nilai budaya yang "tidak berorientasi terhadap hasil dari karya manusia itu sendiri ..., tetapi hanya terhadap amal dari karya" (1974: 44); *kedua* adalah nilai budaya "yang terlampaui banyak terarah ke zaman yang lampau akan melemahkan kemampuan seseorang untuk melihat ke masa depan". Hal ini menurut Koentjaraningrat akan "melemahkan motivasi untuk menabung dan hidup hemat" (1974: 45). *Ketiga* adalah nilai budaya yang "tidak aktif terhadap alam sekelilingnya", karena orang sebaiknya "hidup selaras dengan alam". Nilai budaya semacam ini menghasilkan *mentalitet* yang "terlampaui banyak menggantungkan diri kepada nasib". *Keempat* adalah nilai budaya yang menilai tinggi konsep "sama rata, sama rasa". Sikap konformis seperti ini menurut Koentjaraningrat tidak sesuai dengan semangat pembangunan, karena tidak mendorong seseorang untuk berusaha keras mencapai prestasi tertentu (1974: 45-46)

Mentalitet yang kedua, yang muncul setelah revolusi kemerdekaan, menurut Koentjaraningrat antara lain adalah, *pertama*, *mentalitet* yang meremehkan mutu. *Mentalitet* ini muncul karena "kemiskinan hebat yang melanda bangsa kita"; "tak adanya unsur persaingan dalam hal menghasilkan pangan, sandang, dan barang ekspor, dalam memberi jasa, dan dalam hal karya ilmiah", dan juga karena tidak adanya "jiwa bersaing" dalam nilai budaya orang Indonesia. *Kedua*, *mentalitet* "suka menerabas", yaitu *mentalitet* yang

"bernafsu untuk mencapai tujuannya secepat-cepatnya tanpa banyak kerelaan berusaha dari permulaan" secara bertahap, selangkah demi selangkah. *Ketiga, mentalitet* tak percaya kepada diri-sendiri. *Keempat, mentalitet* tak berdisiplin murni. *Kelima, mentalitet* "suka mengabaikan tanggung-jawab"

Apakah Revolusi Mental yang dimaksud oleh Jokowi adalah revolusi untuk menghasilkan *mentalitet* pembangunan seperti di atas? Ataupun itu sebuah revolusi yang akan mengikis *mentalitet-mentalitet* yang tidak sesuai dengan semangat pembangunan? Atau sebuah revolusi yang ditujukan untuk menghasilkan corak *mentalitet* yang lain lagi? Terus terang saya kurang mengetahui apa sebenarnya Revolusi Mental yang dibayangkan atau diangankan oleh Jokowi. Oleh karena itu di sini saya mengemukakan sebuah corak *mentalitet* lain, yang berbeda dengan yang telah dibahas oleh Koentjaraningrat.

c. *Mentalitet* Masa Depan: "*Mentalitet* Anti ..."

Saya menyebut *mentalitet* ini sebagai "*mentalitet* anti ...". Sengaja saya menggunakan istilah "anti ...", karena frasa ini menyampaikan pesan yang lebih tegas, yaitu penolakan. Penolakan terhadap hal-hal yang dipandang negatif. Penolakan terhadap hal-hal yang negatif dianggap akan lebih memudahkan terbentuknya suatu situasi dan kondisi yang positif daripada idealisasi situasi dan kondisi yang positif disertai keinginan untuk mewujudkannya. Ada sejumlah penolakan yang merupakan unsur-unsur dari "*mentalitet* anti ..." yaitu: (1) anti-kebodohan dan pembodohan; (2) anti-kecurangan dan pencurangan; (3) anti-kesenjangan dan penyenjangan; (4) anti-rendah diri dan perendahan; (5) anti-kerusuhan dan perusuhan.

Anti-Kebodohan dan Pembodohan. Ini merupakan pandangan yang menilai buruk setiap bentuk "kebodohan", terutama kebodohan dalam moral dan ilmu pengetahuan, dan sebaliknya menilai tinggi setiap bentuk "kecerdasan", baik itu kecerdasan pikiran, kecerdasan emosi, maupun bentuk-bentuk kecerdasan lainnya. Pandangan ini juga menilai buruk dan tidak menyetujui setiap bentuk aksi pembodohan, entah itu dalam bentuk kebohongan publik ataupun pemberian informasi yang tidak akurat, secara sengaja ataupun tidak. Sebaliknya, pandangan ini menilai baik setiap upaya pencerdasan warga masyarakat dalam berbagai bidang.

Dengan *mentalitet* anti-kebodohan seorang individu akan

menjadi rajin untuk menambah pengetahuan bagi dirinya sendiri. Jika dia seorang penelitel dia akan melakukan penelitelian yang sebaik-baiknya. Jika dia seorang pelajar dia akan belajar sebaik mungkin agar tidak terjatuh dalam kebodohan. Jika dia seorang pegawai perusahaan dia akan terus berusaha untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru, yang mungkin akan membantu upaya pengembangan perusahaan tempatnya bekerja.

Mentalitet tersebut juga akan menolak setiap bentuk tindakan, aktivitas, atau kebijakan yang akan menyebabkan munculnya kebodohan dalam masyarakat. Dengan *mentalitet* ini orang akan menjadi lebih waspada terhadap berbagai bentuk kebodohan dalam masyarakat dan berbagai hal yang menyebabkannya. Jika bentuk-bentuk pembodohan tertentu terjadi dalam masyarakat, mereka yang memiliki *mentalitet* anti-kebodohan dan pembodohan akan segera melakukan pencegahan, sehingga masyarakat terhindar dari kebodohan-kebodohan.

Anti-Kecurangan dan Pencurangan. Pandangan ini menilai rendah atau buruk setiap bentuk kecurangan atau ketidakjujuran dan setiap tindakan atau upaya pencurangan, dan menilai tinggi setiap bentuk kejujuran serta setiap tindakan atau upaya untuk menegakkan kejujuran tersebut dalam berbagai bidang kehidupan. *Mentalitet* ini akan menghargai dan menghormati orang-orang yang selalu jujur dan menegakkan kejujuran.

Adanya *mentalitet* anti kecurangan dan pencurangan ini akan membuat seorang individu lebih waspada, lebih kritis terhadap setiap bentuk kecurangan dan pencurangan, sehingga masyarakat dapat terhindar dari bencana yang mungkin ditimbulkan oleh segala bentuk kecurangan serta pencurangan. Tidak adanya kecurangan dan pencurangan dalam kehidupan masyarakat akan mendorong warga masyarakat bersemangat untuk melakukan pembangunan dan pengembangan masyarakat, sehingga masyarakat akan bertambah baik keadaannya.

Anti-Kesenjangan dan Penyenjangan. *Mentalitet* ini menilai rendah atau buruk setiap bentuk kesenjangan yang disebabkan oleh berbagai macam bentuk ketidakadilan, dan segala macam kebijakan, tindakan, atau aktivitas penyenjangan, yang disebabkan oleh ketidakadilan. Sebaliknya, *mentalitet* tersebut menilai tinggi setiap bentuk kesetaraan dan kebijakan, tindakan, atau aktivitas yang menghasilkan kesetaraan di kalangan warga masyarakat.

Dengan *mentalitet* anti-kesenjangan dan penyenjangan, seorang individu akan selalu berhati-hati dan telitei terhadap setiap kebijakan, tindakan, atau aktivitas yang akan menimbulkan kesenjangan-kesenjangan tertentu dalam kehidupan masyarakat. Dengan *mentalitet* ini masyarakat akan terhindar dari berbagai macam bentuk kesenjangan dan penyenjangan, yang menyebabkan orang malas untuk melakukan hal-hal baru yang dapat mendatangkan manfaat pada masyarakat.

Anti-Rendah diri dan Perendahan. Merasa rendah diri dan terlalu banyak merendahkan diri sendiri, termasuk mencela diri sendiri, adalah gejala yang sangat umum dijumpai di Indonesia. *Mentalitet* seperti ini menimbulkan rasa kurang percaya diri, dan kurang dapat menghargai prestasi yang berhasil dicapai oleh bangsa sendiri. *Mentalitet* anti-rendah diri menilai rendah perasaan rendah diri serta kebiasaan merendahkan diri, yang menyebabkan orang tidak terdorong untuk mencapai prestasi-prestasi yang dapat dibanggakan. Sebaliknya *mentalitet* ini menilai tinggi perasaan bangga terhadap apa yang ada pada diri sendiri, serta setiap kebijakan, tindakan, atau aktivitas yang menunjukkan penghargaan atau kebanggaan atas apa dimiliki atau prestasi yang telah dicapai.

Mentalitet anti-rendah diri dan perendahan akan membuat orang selalu berhati-hati dan waspada terhadap setiap bentuk tindakan atau aktivitas yang bersifat merendahkan diri sendiri atau kurang menghargai prestasi yang telah dicapai. *Mentalitet* ini juga akan dapat mendorong orang untuk melakukan berbagai inovasi, karena inovasi-inovasi yang berhasil dilakukan akan mendapat penghargaan yang memadai dan semakin didorong.

Anti-Kerusuhan dan Perusuhan. Adalah suatu kenyataan bahwa hingga kini situasi di Indonesia belum sepenuhnya ideal. Belum sepenuhnya tenteram. Di beberapa daerah masih saja selalu terjadi kerusuhan. Situasi seperti ini akan dapat diatasi jika masyarakat setempat memiliki *mentalitet* tertentu, yaitu "*mentalitet* anti kerusuhan dan perusuhan". *Mentalitet* ini menilai rendah, tidak menghargai sama sekali, setiap bentuk dan jenis kerusuhan, entah itu disengaja atau tidak, atau setiap bentuk kebijakan, tindakan atau aktivitas yang dapat menyebabkan terjadinya kerusuhan. *Mentalitet* ini juga menilai rendah setiap bentuk perusuhan, yang menyebabkan terjadinya kerusuhan-kerusuhan. Perusuhan adalah tindakan atau aktivitas yang menyebabkan terjadinya kerusuhan-kerusuhan tertentu.

Adanya *mentalitet* ini dalam suatu masyarakat akan mendorong warga masyarakat untuk selalu waspada dan berhati-hati terhadap setiap bentuk kerusakan dan perusuhan yang akibatnya akan merugikan masyarakat sendiri. Situasi dan kondisi yang tercipta karena adanya *mentalitet* tersebut mestinya akan mewujudkan sebuah masyarakat yang tertib, tenteram, dan tenang.

Strategi Kebudayaan ¹

Pandangan mengenai kebudayaan menurut hemat saya harus dilandasi oleh pandangan filosofis mengenai hakekat manusia, karena hakekat inilah yang membuat kebudayaan hanya dimiliki oleh manusia, dan tidak oleh binatang. Untuk itu pandangan filosofis tentang hakekat manusia yang menurut saya cocok untuk pembicaraan kali ini adalah pandangan dari Ernst Cassirer (1945), yang mengatakan bahwa manusia adalah *animal symbolicum*. Manusia berbeda dengan binatang yang manapun karena kemampuannya untuk melakukan simbolisasi. Oleh karena itu, manusia disebutnya sebagai *animal symbolicum*.

a. Kebudayaan : Simbol, Wujud dan Unsur

Apa yang dimaksud dengan simbol atau lambang? Istilah simbol telah didefinisikan dengan berbagai macam cara dan dari berbagai sudut pandang. Namun demikian, sebagaimana dikatakan oleh para ahli antropologi (White, 1949) secara sederhana kita dapat mengatakan bahwa simbol adalah *segala sesuatu yang dimaknai*. Simbol juga dapat didefinisikan sebagai *sesuatu yang—pada tataran pemikiran—mengacu, mengingatkan, menunjuk pada sesuatu yang lain lagi*. Oleh karena itu, kurang tepat jika dikatakan bahwa simbol adalah sesuatu yang bermakna, karena kata 'bermakna' mempunyai arti bahwa makna tersebut terdapat atau melekat pada sesuatu tersebut, padahal tidak. Makna tidak terdapat pada atau dalam sesuatu yang disebut simbol. Makna ini terdapat dalam pikiran manusia. Makna berasal dari manusia. Makna ini kemudian diberikan, 'ditempelkan', oleh manusia pada sesuatu, yang kemudian membuat sesuatu

1 Bagian ini saya ambil dari makalah saya berjudul "Kebhinnekaan Budaya sebagai Modal Merespon Globalisasi" yang saya presentasikan dalam Konferensi Internasional "Tantangan Revitalisasi Kebudayaan dalam Era Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015", di Jember, 8-9 Oktober 2014.

tersebut menjadi 'simbol' (Ahimsa-Putra, 2013d).

Berdasarkan atas pandangan tersebut maka *kebudayaan* dapat didefinisikan sebagai *keseluruhan tanda dan simbol yang diperoleh manusia dalam kehidupannya sebagai warga suatu masyarakat atau komunitas, dan digunakan untuk beradaptasi dengan lingkungan atau mempertahankan keberadaannya sebagai makhluk hidup*. Perlu ditekankan di sini, bahwa jika kita berbicara tentang tanda dan simbol maka kita berbicara mengenai tanda atau simbol dan maknanya, karena pengertian tanda dan simbol mencakup dua aspek tersebut. Simbol atau tanda ini dapat berupa (1) *hal-hal yang abstrak* seperti ide, pengetahuan, nilai-nilai, norma, dan aturan, yang tidak dapat dilihat, karena tersimpan sebagai pengetahuan yang ada dalam pikiran manusia, dapat pula berupa (2) *hal-hal yang agak abstrak*, atau tidak sepenuhnya abstrak, seperti misalnya perilaku dan tindakan manusia; atau berupa (3) *hal-hal yang sangat konkret* dan empiris seperti misalnya meja, kursi, buku, gelas, cangkir, dan seterusnya, yang semuanya merupakan hasil perilaku dan tindakan manusia (Ahimsa-Putra, 2013d).

Pemaknaan tanda dan simbol bisa berbeda antara individu satu dengan yang lain. Hal yang sama juga terjadi pada tingkat keluarga, kelompok, komunitas, masyarakat dan seterusnya. Inilah sebenarnya yang dimaksud dengan keaneka ragaman budaya. Keaneka ragaman ini bukan hanya pada tanda dan simbolnya saja, tetapi juga pada makna dan proses memberikannya (Lounsbury, 1966). Keaneka ragaman terjadi paling tidak oleh dua hal, yakni: *proses sosialisasi* dan *pengalaman pribadi*. Proses sosialisasi di sini adalah proses pembelajaran nilai-nilai, pandangan hidup dari kelompok, komunitas atau masyarakat tempat seseorang dibesarkan, sedang pengalaman pribadi adalah hal-hal yang dialami seseorang sebagai individu. Pengalaman ini selalu bersifat pribadi. Tidak pernah sama antara individu yang satu dengan yang lain. Dari pengalaman inilah terbentuk kemudian kerangka pemikiran, kerangka untuk melakukan pemaknaan, kerangka untuk memahami, yang berbeda antara satu orang dengan orang yang lain (Ahimsa-Putra, 2013d).

Para ahli antropologi berpendapat bahwa kebudayaan tersebut memiliki aspek atau dimensi, dan terdiri dari unsur-unsur. Berbeda dengan Koentjaraningrat dan ahli antropologi lainnya, saya berpendapat bahwa kebudayaan memiliki empat aspek atau wujud, bukan tiga. Berturut-turut—dari yang konkret ke yang abstrak—empat aspek tersebut adalah: (a) aspek fisik atau budaya material;

(b) aspek perilaku atau budaya perilaku; (c) aspek kebahasaan atau bahasa, dan (d) aspek gagasan atau budaya pengetahuan. Wujud atau aspek material kebudayaan berupa misalnya benda-benda, mulai dari yang kecil-kecil seperti jarum, kancing baju, hingga, bangunan yang besar-besar, seperti gedung dengan puluhan lantai, candi, atau bahkan berupa kawasan. Aspek perilaku kebudayaan berupa misalnya perilaku-perilaku, aktivitas bersama, berbagai interaksi sosial, relasi sosial, lapisan dan golongan sosial. Aspek kebahasaan kebudayaan berupa bahasa, atau lebih konkret lagi berupa istilah-istilah, ungkapan-ungkapan, peribahasa, nyanyian rakyat, mitos, legenda, dan sebagainya. Aspek gagasan berupa pengetahuan, gagasan-gagasan kolektif, seperti pandangan hidup, nilai-nilai, norma-norma, dan aturan-aturan (Ahimsa-Putra, 2013d).

Selain memiliki empat aspek, suatu kebudayaan juga terdiri dari berbagai unsur yang berhubungan satu sama lain membentuk suatu kesatuan. Hubungan antarunsur ini ada yang sangat erat, ada yang relatif longgar. Kebudayaan sebagai suatu gugusan unsur inilah yang perlu diingat dalam wacana kebudayaan. Sebagian ahli antropologi berpendapat bahwa unsur kebudayaan universal ada tujuh (lihat Koentjaraningrat, 1982). Namun, analisis saya atas gejala empiris kebudayaan sampai pada kesimpulan bahwa unsur kebudayaan yang bersifat universal ini ada sepuluh, dengan fungsi yang berbeda-beda, walaupun kadang-kadang juga bisa sama. Unsur-unsur tersebut adalah: (1) Perangkat Keagamaan: berfungsi mengatasi masalah ketidak-berdayaan yang dirasakan oleh manusia; (2) Perangkat Klasifikasi: berfungsi untuk mengatasi masalah penghitungan; (3) Perangkat Komunikasi: berfungsi untuk mengatasi masalah hubungan antarindividu; (4) Perangkat Permainan: berfungsi untuk mengatasi masalah kebosanan; (5) Perangkat Pelestarian: berfungsi untuk mengatasi masalah kehilangan/kepunahan; (6) Perangkat Reproduksi: berfungsi untuk mengatasi masalah reproduksi sosial; (7) Perangkat Kesehatan: berfungsi untuk mengatasi masalah sakit; (8) Perangkat Ekonomi: berfungsi untuk mengatasi masalah kelangkaan atau kekurangan; (9) Perangkat Kesenian: berfungsi untuk mengatasi masalah ekspresi kejiwaan; dan (10) Perangkat Transportasi: berfungsi untuk mengatasi masalah pemindahan tempat (Ahimsa-Putra, 2013d).

Kebudayaan yang memiliki empat aspek dan terdiri dari sepuluh unsur tersebut dapat digambarkan dengan tabel seperti pada halaman berikut (lihat tabel 1). Dengan demikian masing-masing

unsur kebudayaan tersebut memiliki empat aspek. Unsur keagamaan misalnya, memiliki aspek atau wujud material berupa bangunan dan peralatan peribadatan. Dalam agama Islam, bangunan ini berupa masjid, musala atau langgar, sedang peralatan peribadatan berupa kitab Alquran, sajadah, mimbar, tasbih, kopiah. Dalam agama Katholik, bangunan ini berupa gereja atau kapel, sedang peralatannya banyak sekali, ada jubah khusus yang dipakai oleh pastor pemimpin ibadah misa, pelayan misa (*misdienaar*), ada piala untuk anggur, roti, salib, rosario, dan sebagainya (Ahimsa-Putra, 2013d).

Tabel 1: Aspek dan Unsur Kebudayaan

Unsur (Perangkat)	Aspek gagasan	Aspek bahasa	Aspek perilaku	Aspek material
1. Keagamaan	kepercayaan ttg dunia ghaib	istilah-istilah keagamaan	ritual-ritual, upacara-upacara	peralatan ibadah, rumah ibadah
2. Klasifikasi	ilmu hitung, matematik	istilah-istilah penghitungan	kegiatan penghitungan	sempoa, komputer, kalkulator
3. Komunikasi	tata bahasa, semantik	kosa kata	berbicara, berbincang	telepon, televisi, radio, internet
4. Permainan	filsafat permainan, nilai, aturan	istilah, wacana permainan	olahraga, permainan	alat olah-raga, alat permainan
5. Pelestarian	pengetahuan, nilai, norma, aturan	istilah, wacana pelestarian	mengajar, kegiatan pelestarian, belajar	buku, pensil, sekolah, museum
6. Reproduksi Sosial	nilai, norma, hak dan kewajiban	istilah, wacana organisasi	kekerabatan, perkumpulan	balai desa, rumah, permukiman

Unsur (Perangkat)	Aspek gagasan	Aspek bahasa	Aspek perilaku	Aspek material
7. Kesehatan	pengetahuan sehat, sakit, obat	istilah, wacana kesehatan	pengobatan, penyembuhan	obat, peralatan kedokteran
8. Ekonomi	pengetahuan flora, fauna, tanah, air	istilah, wacana ttg flora, fauna, alam	berburu, meramu, bertani, beternak	peralatan berburu, bertani, beternak
9. Ekspresi	pengetahuan ttg indah, bagus	istilah, wacana ttg keindahan	menari, menyanyi, melukis, mengukir	peralatan tari, lukis ukir, musik
10. Transportasi	pengetahuan ttg alat transportasi	istilah, wacana, transportasi	kegiatan transportasi	sepeda, kereta api, mobil, pesawat

Sumber : Ahimsa-Putra, 2013d.

Wujud perilaku dalam agama Islam misalnya ibadah salat harian di masjid atau di rumah, ibadah salat Jumat, ibadah salat Tarawih di bulan puasa, mengucapkan doa sebelum dan sesudah makan, ibadah sahur, berbuka, mengeluarkan zakat, memberikan sedekah, naik haji, dan sebagainya. Pada agama Katholik aspek perilaku ini berupa ritual pembaptisan, ritual misa, ritual sembahyang di rumah, ritual berdoa sebelum makan, dan sebagainya. Wujud perilaku ini umumnya mempunyai pola-pola tertentu yang membuat perilaku tersebut dapat ditengarai dengan cukup mudah. Adanya pola-pola ini pula yang membuat perilaku-perilaku tersebut kemudian dapat diberi nama (Ahimsa-Putra, 2013d).

Wujud atau aspek ketiga atau kebahasaan dari unsur keagamaan adalah berbagai ucapan yang ada dalam ritual keagamaan. Dalam agama Islam wujud bahasa ini antara lain berupa doa-doa sesudah salat harian, doa-doa sebelum makan, sesudah ma-kan, sebelum tidur, ketika bangun tidur, kalimat syahadat, doa dalam salat, surat-

surat dalam Al Qur'an dan sebagainya. Dalam agama Katholik, wujud ini juga berupa doa-doa, nyanyian-nyanyian, khotbah pastor, dan sebagainya. Seperti halnya perilaku, doa-doa ini sebagian juga memiliki nama, nyanyian-nyanyian memiliki judul, sehingga umat mudah mengetahui doa mana yang harus diucapkan atau nyanyian mana yang harus dilantunkan (Ahimsa-Putra, 2013d).

Aspek gagasan dalam unsur keagamaan adalah berbagai ajaran, pandangan, pengetahuan, nilai-nilai, norma, dan aturan. Dalam agama Islam misalnya ada ajaran tentang rukun Islam dan rukun iman; ada pandangan tentang tauhid, tentang kemusyrikan dan kekafiran; ada pengetahuan tentang malaikat, jin, dan juga pengetahuan tentang Tuhan; ada aturan untuk menjalankan salat, puasa, mengeluarkan zakat, naik haji, dan sebagainya; juga ada nilai-nilai tentang hal-hal yang dianggap sangat baik, baik, buruk, sangat buruk, dan sebagainya. Begitu juga halnya dalam agama-agama yang lain.

Selanjutnya masing-masing wujud tersebut dapat dipandang sebagai kumpulan atau gugusan dari sub-sub-unsur yang lebih kecil. Sebagai contoh, wujud material keagamaan di atas merupakan kumpulan dari unsur-unsur material yang lebih kecil. Unsur material berupa bangunan misalnya, yaitu masjid, terdiri dari unsur-unsur yang lebih kecil seperti mihrab (tempat imam), jendela, pintu, tempat wudu, kamar kecil dan kamar mandi, dan sebagainya. Wujud perilaku salat merupakan kumpulan dari unsur-unsur perilaku seperti berdiri, *rukuk*, sujud, duduk, dan sebagainya. Wujud kebahasaan surat-surat dalam Alquran merupakan kumpulan dari surat-surat yang dibagi ke dalam juz. Setiap surat merupakan kumpulan dari ayat-ayat. Setiap ayat merupakan kumpulan dari kata-kata, dan seterusnya. Wujud gagasan tentang tauhid merupakan kumpulan dari gagasan tentang keesaan Tuhan, sifat-sifat Tuhan, nama-nama Tuhan, cara mengesakan Tuhan, dan sebagainya (Ahimsa-Putra, 2013d).

Masing-masing unsur, sub-unsur, sub-sub-unsur, dan unsur-unsur yang lebih kecil lagi di atas, semuanya dapat diperlakukan sebagai tanda dan simbol. Mereka menjadi tanda ketika mereka berfungsi sebagai alat pembeda dengan yang lain, dan mereka menjadi simbol ketika mereka diberi makna, atau dianggap merepresentasikan, mewakili sesuatu yang lain lagi. Oleh karena itu, masing-masing unsur kebudayaan dan wujudnya tersebut juga merupakan gugusan tanda dan simbol (Ahimsa-Putra, 2013d).

b. Strategi Kebudayaan

Kebudayaan—sebagaimana telah kita lihat bersama—merupakan sebuah konsep yang mengacu pada realitas tertentu. Kebudayaan ini memiliki empat aspek dan sepuluh unsur, yang masih mungkin diubah jika kurang sesuai dengan kenyataan. Untuk mewujudkan Revolusi Mental sebagaimana telah kita bicarakan di atas, perlu diidentifikasi unsur-unsur budaya apa saja yang dapat dimanfaatkan untuk mempercepat proses Revolusi Mental tersebut.

Dari telaah secara seksama berbagai unsur budaya yang ada, saya berpendapat bahwa unsur-unsur budaya yang paling dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan Revolusi Mental tersebut adalah: (a) unsur keagamaan; (b) unsur komunikasi dan (c) unsur pelestarian. Pemanfaatan setiap unsur ini juga harus mencakup empat dimensi yang ada pada kebudayaan, yaitu: (a) dimensi material/fisik; (b) dimensi perilaku, (c) dimensi kebahasaan, dan (d) dimensi gagasan/ide.

Strategi Tataran Gagasan/Pengetahuan. Pada tataran ini, upaya mewujudkan revolusi mental dapat dilakukan dengan membangun dan menanamkan pandangan serta keyakinan keagamaan, nilai-nilai, norma-norma, dan aturan-aturan, yang bersesuaian atau sejalan dengan "*mentalitet* anti" yang telah dipaparkan sebelumnya. Lima *mentalitet* anti itu sebaiknya diintegrasikan ke dalam ajaran-ajaran agama, untuk memudahkan proses penanamannya dalam pikiran individu. Jika telah diinternalisasi oleh individu, keabsahan lima *mentalitet* itu tidak akan dipertanyakan lagi, bahkan bukan tidak mungkin malah mendapat dukungan yang semakin meluas.

Proses penanaman "*lima mentalitet* anti" dalam diri individu merupakan proses yang tidak mudah, dan dalam hal ini subjeknya perlu mendapat perhatian yang serius. Penanaman nilai-nilai dapat berlangsung lewat jalur formal, lewat jalur non-formal, atau lewat jalur informal. Jalur formal misalnya sekolah-sekolah atau institusi pendidikan. Jalur non-formal berupa kursus-kursus. Jalur informal berupa pengajian-pengajian, forum diskusi. Di situ dapat dikembangkan dan ditanamkan nilai-nilai budaya yang memandang buruk kebodohan dan pembodohan, kecurangan dan pencurangan, kesenjangan dan penyenangan, kerendahan diri dan perendahan, serta kerusuhan dan perusuhan.

Strategi Tataran Kebahasaan. Pada tataran ini unsur budaya yang dapat dimanfaatkan adalah unsur budaya komunikasi

dan pelestarian. "*Mentalitet* lima anti" dapat disebarkan dalam masyarakat yang lebih luas daripada masyarakat atau komunitas pemiliknya. Penyebaran dapat dilakukan dengan menciptakan berbagai cerita baru yang di dalamnya terkandung nilai-nilai budaya yang membentuk "*mentalitet* lima anti". Cerita-cerita baru ini bisa ditampilkan menjadi pertunjukan teater modern, atau ditampilkan melalui teater tradisional, atau diterbitkan dalam bentuk komik yang menarik minat anak-anak untuk membacanya.

Selain itu juga dapat diciptakan lagu-lagu, ungkapan-ungkapan, atau pantun yang mengandung pesan-pesan berisi "*mentalitet* lima anti" di atas, atau diselenggarakan lomba-lomba untuk menciptakan lagu, ungkapan dan pantun yang berisi pesan "*mentalitet* lima anti" tersebut. Lagu, ungkapan dan pantun yang dipandang bagus dapat diterbitkan menjadi buku-buku yang dijadikan bacaan di sekolah-sekolah.

Strategi Tataran Perilaku/Tindakan. Pada tataran ini unsur budaya yang dapat dimanfaatkan adalah unsur budaya pelestarian. "*Mentalitet* lima anti" dapat disebarluaskan dan diwariskan dari generasi ke generasi dengan memanfaatkan perangkat simbol berupa perilaku, tindakan dan aktivitas mewariskan, mengajarkan, "*mentalitet* lima anti" dari generasi yang satu ke generasi yang lain; dari kelompok yang satu ke kelompok yang lain, dari golongan satu ke golongan yang lain. Ini dapat dilakukan dengan menyelenggarakan berbagai pertemuan, ceramah, diskusi, lokakarya, seminar, konferensi mengenai "*mentalitet* lima anti" tersebut.

Juga dapat dibangun berbagai jaringan yang bertujuan untuk menyebarluaskan "*mentalitet* lima anti" itu ke berbagai keluarga, kelompok, komunitas atau golongan sosial, agar *mentalitet* anti hal-hal yang buruk tersebut dapat tersebar luas dalam masyarakat. Berbagai penelitiaan juga dapat dilakukan untuk mengungkap nilai-nilai budaya lokal yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat nilai-nilai budaya yang terkandung dalam "*mentalitet* lima anti" di atas. Pengungkapan nilai-nilai budaya lokal yang bersesuaian dengan nilai budaya dalam "*mentalitet* lima anti" tersebut akan memudahkan penerimaan "*mentalitet* lima anti" tersebut oleh masyarakat lokal, karena tidak lagi dianggap sebagai unsur budaya dari luar.

Strategi Tataran Hasil Karya / Material. Pada tataran ini unsur budaya yang sangat perlu dimanfaatkan adalah unsur budaya komunikasi, karena perangkat komunikasi inilah yang kini

memainkan peran sangat penting dalam penyebaran kebudayaan. Dengan memanfaatkan IT yang ada, "lima *mentalitet* anti" akan dapat disebarkan ke berbagai pelosok Indonesia. Dengan teknologi itu pula penyebaran unsur-unsur kebudayaan dapat berlangsung sangat cepat. Melalui televisi dan radio misalnya, "*mentalitet* lima anti" itu dapat diperkenalkan ke tengah masyarakat lewat berbagai program siaran di situ, dan jika ini telah menjadi program nasional, maka proses penyebarluasan mentalitas yang baru dapat berlangsung dengan lebih mudah dan lebih cepat. Melalui internet penyebarluasan "*mentalitet* lima anti" juga dapat dilakukan melalui jejaring sosial seperti *facebook*, *twitter* atau lainnya.

Media cetak berupa surat kabar dan majalah juga dapat turut serta menyebarkan "*mentalitet* lima anti" di atas ke kalangan yang lebih luas. Melalui media cetak ini nilai-nilai budaya dalam "*mentalitet* lima anti" dapat disimpan dan dibaca kembali manakala diperlukan.

Penutup

Dalam tulisan ini saya membahas mengenai strategi kebudayaan yang dapat ditempuh untuk mewujudkan Revolusi Mental yang diinginkan oleh Jokowi. Oleh karena Jokowi sendiri belum menguraikan apa yang dimaksudnya sebagai Revolusi Mental, di sini saya mengajukan sebuah pandangan mengenai apa yang dimaksudkan sebagai Revolusi Mental. Atas dasar definisi ini saya merumuskan Revolusi Mental sebagai sebuah perubahan yang mendasar, yang membuat seseorang kemudian memiliki kerangka pemikiran tertentu yang sangat berbeda dengan kerangka pemikiran sebelumnya. Kerangka pemikiran ini berisi "*mentalitet* lima anti", yaitu anti-kebodohan dan pembodohan, anti-kecurangan dan pencurangan, anti-kesenjangan dan penyenjangan, anti-rendah diri dan perendahan, anti-kerusakan dan perusakan. Lima *mentalitet* anti ini akan membuat orang yang telah menginternalisasinya menjadi orang yang berhati-hati dan waspada agar dapat terhindar dari lima hal yang dipandang sebagai hal yang buruk.

Ada sejumlah bidang dan saluran dalam kebudayaan yang dapat digunakan untuk menyebarkan "*mentalitet* lima anti" tersebut. Pada tataran gagasan/pengetahuan dapat diciptakan berbagai pandangan dan nilai-nilai yang memuat butir-butir dalam "*mentalitet* lima anti" itu. Pada tataran kebahasaan, unsur budaya yang dapat

diciptakan adalah perangkat simbolik berupa cerita, pantun-pantun, nyanyian-nyanyian, serta ungkapan yang mengandung nilai-nilai budaya dalam “*mentalitet* lima anti”. Pada tataran perilaku dapat diciptakan jejaring sosial, kelompok-kelompok, komunitas atau organisasi-organisasi yang bertujuan untuk menyebarluaskan “*mentalitet* lima anti” ke tengah-tengah masyarakat. Pada tataran material/fisik, sosialisasi “*mentalitet* lima anti” dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat teknologi komunikasi seperti media elektronik dan media cetak. Jika berbagai kegiatan penyebaran *mentalitet* tersebut dapat berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan, maka Revolusi Mental yang diangankan oleh presiden terpilih Jokowi akan dapat menjadi kenyataan.

Daftar Pustaka

- Ahimsa-Putra, H.S. 2007. “Peran dan Fungsi Nilai Budaya dalam Kehidupan Manusia”. Makalah Dialog Budaya.
- . 2011a. Hakekat Kebudayaan: Pandangan Antropologi. Draft buku.
- . 2013a. “Wacana Pembuka: Bahasa, Budaya dan Karakter Manusia” dalam H.S. Ahimsa-Putra, R. Aman dan S. Kuswandi (editor), *Bahasa, Budaya, dan Karakter Manusia*. Manado: Balai Bahasa Manado.
- . 2013b. “Wacana Pembuka: Sastra, Budaya dan Kehidupan Manusia” dalam H.S. Ahimsa-Putra dan R. Untoro (editor), *Sastra, Budaya, dan Karakter Manusia*. Manado: Balai Bahasa Manado.
- . 2013c. “Wacana Pembuka: Sastra, Budaya dan Karakter Manusia” dalam H.S. Ahimsa-Putra dan Suminto A. Sayuti (eds.), *Sastra dan Pembangunan Karakter Manusia*. Manado: Balai Bahasa Manado.
- . 2013d. “Budaya Bangsa, Jati Diri, dan Integrasi Nasional: Sebuah Teori”. *Jejak Nusantara*. Edisi Perdana. Tahun I : 6-19.
- Cassirer, E. 1945. *An Essay on Man*. Yale: Yale University Press.
- Koentjaraningrat. 1974. *Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- . 1977. *Pokok-pokok Antropologi Sosial*. Jakarta: Dian Rakyat.

- _____. 1982. *Pengantar Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru.
- Lounsbury, F. 1966. "Varieties of Meaning" dalam *Culture and Communication*, A.G. Smith (ed.). New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Spradley, J.P.1972. "Introduction" dalam J.P.Spradley (ed.) *Culture and Cognition: Rules, Maps and Plans*.
- The Shorter Oxford English Dictionary On Historical Principles vol. II*. Oxford: Claren-Don Press.
- White, L. 1949. *The Science of Culture*. New York: Farrar, Strauss and Giroux.

**REVOLUSI MENTAL =
REVOLUSI PENDIDIKAN?
(Prosesualisme dalam Pendidikan)**

Achmad Fedyani Saifuddin

Ungkapan “Revolusi Mental” akhir-akhir ini menuai perbincangan hangat dalam masyarakat. Mungkin tidak terlalu persoalan dengan kata “mental”, tetapi kata “revolusi” menimbulkan banyak interpretasi. Banyak yang mengartikan kata “revolusi” itu sebagai perubahan cepat (baca: radikal), dan nampaknya banyak orang masih teringat peristiwa Revolusi Kebudayaan di Cina pada 1980an, pada abad yang lalu, atau bahkan Revolusi Perancis atau Revolusi Rusia, pada abad-abad yang lebih lampau lagi. Tatkala orang membayangkan kata revolusi semacam ini, yang tergambar dalam benak adalah perombakan radikal yang berdarah-darah, memakan banyak korban, disintegrasi masyarakat, menyisakan luka dan dendam yang tak akan hilang bergenerasi-generasi. Akankah yang dimaksud revolusi yang demikian, yang hendak dituju? Apakah keadaan bangsa kita sudah sedemikian buruk dan *chaos*, sehingga kita membutuhkan revolusi?

Dengan mempertautkan kata “revolusi” dengan “mental”, seharusnya kita terhindar dari imajinasi kekerasan fisik sebagaimana kita bayangkan dengan kata “revolusi” di berbagai negeri lain di masa lampau, meski Revolusi Kebudayaan di Cina ternyata juga adalah revolusi fisik. Kebudayaan berubah menjadi tindakan fisik, yang menjadi perwujudan dari pikiran radikal. Lapangan Tiananmen di Beijing menjadi saksi ketika ribuan orang tewas pada kejadian tersebut, dan entah berapa ribu lagi yang menderita luka-luka fisik maupun mental. Setelah itu memang, sebagaimana kita saksikan, Cina berhasil melalui suatu fase sulit dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mencapai keadaannya yang sekarang, sedang menjelma menjadi satu bangsa mandiri, kuat, dan unggul (mungkin akan menjadi terunggul) di dunia.

Akankah bangsa Indonesia mengikuti jejak-jejak historis yang dialami bangsa-bangsa lain? Penulis berpendapat bahwa cara-cara kekerasan tersebut harus dihindari karena masih ada cara lain yang dapat ditempuh, asalkan dijalankan secara konsekuen, konsisten, dan berkesinambungan. Cara itu adalah pendidikan yang harus dilihat sebagai proses kebudayaan. Perombakan secara lambat-laun maupun radikal dapat dilakukan melalui pendidikan khususnya pendidikan dasar dan menengah. Tulisan ini bertujuan mengulas secara singkat gagasan tersebut.

Pendidikan sebagai Kebudayaan

Dalam antropologi, transmisi pengetahuan dalam suatu masyarakat dilihat dalam perspektif sistem, di mana setiap peristiwa transmisi dikondisikan, baik secara potensial maupun faktual, oleh unsur-unsur dalam sistem. Oleh karena suatu sistem berbeda dari sistem yang lain maka pengetahuan yang terakumulasi dalam suatu sistem juga berbeda dari yang lainnya.¹ Itulah sebabnya, misalnya, kehidupan petani miskin di desa tidak akan sama dengan kehidupan orang kaya di kota. Namun, secara tidak langsung peristiwa-peristiwa dalam suatu sistem tetap berkaitan karena setiap peristiwa adalah bagian dari konteks sosial budaya yang lain.^{1,2} Banyak pengetahuan yang ditransmisikan dalam setiap kelompok bersifat tersirat dalam struktur hubungan yang ada. Oleh karena kebudayaan adalah proses belajar maka kebudayaan juga dapat dianggap sebagai proses transmisi pengetahuan di antara para anggota masyarakat yang bersangkutan.² Dalam ruang lingkup paling luas, pendidikan sebagai proses transmisi pengetahuan secara sistematis tidak dapat dipahami terpisah dari transmisi total sosialisasi atau enkulturasi.^{1,3}

Memusatkan perhatian pada pendidikan berarti memusatkan perhatian, sekurang-kurangnya sebagian, pada peristiwa-peristiwa penyampaian pengetahuan dari seseorang/kelompok kepada orang/kelompok lain. Proses ini kompleks dalam suatu masyarakat, karena begitu beragamnya lembaga pendidikan, mode komunikasi, tujuan, dan mode organisasi yang terlibat.^{1,2} Untuk menganalisis pendidikan sebagai sistem sosial budaya kita membutuhkan pemetaan distribusi sosial pengetahuan dan nilai-nilai yang terkait. Selain itu kita juga perlu mengidentifikasi semua tipe transaksi pendidikan dan konteks yang terjadi dalam masyarakat, agar dapat memahami hubungannya satu sama lain.^{1,3}

Dalam menanggapi pendidikan, kita dipengaruhi dan dibentuk oleh suatu cara berpikir tertentu. Cara pandang terhadap pendidikan yang konsep-konsepnya telah tersusun sedemikian sebagai sebuah sistem dapat dianggap sebagai sebuah paradigma.² Apabila paradigma tersebut telah tersebar luas (*well publicized*) dan memperoleh penerimaan yang baik dari banyak orang, maka ia dapat digunakan sebagai acuan bertindak dalam bidang pendidikan. Dalam skala nasional, misalnya, paradigma tersebut berfungsi sebagai acuan (landasan) dalam membangun kebijakan pendidikan nasional.

Dua Paradigma

Ada beragam cara pandang dalam memandang pendidikan, dan termasuk di dalamnya cara pandang sosial-budaya. Paradigma sosial-budaya pendidikan yang berasal dari disiplin antropologi masih belum dikenal luas di Indonesia.² Paradigma sosial-budaya memandang pendidikan sebagai proses transmisi pengetahuan secara sistematis, tidak dapat dipahami terpisah dari totalitas sosialisasi dan enkulturasi. Dua kata kunci dalam pernyataan ini adalah sistematis dan tidak terpisah, memberikan indikasi yang tegas bahwa perspektif ini menekankan analisis pada seperangkat unsur yang saling tergantung satu sama lain secara total sebagai suatu sistem.^{1,2}

Secara historis paradigma sistemik ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu paradigma struktural-fungsionalisme dan paradigma prosesualisme. Pergeseran perspektif dari tahap pertama ke tahap kedua sesungguhnya merupakan representasi kenyataan dalam masyarakat, yakni bagaimana orang mengkonsepsikan dan mewujudkan perilaku pembelajaran dalam masyarakat dari waktu ke waktu.⁴ Dalam sejarah pendidikan kita, pendidikan dilihat sebagai sistem yang didominasi oleh pemikiran Eropa pada abad ke-18 dan 19, yang kemudian diwarisi oleh tradisi pendidikan kolonial Hindia Belanda dan pendidikan nasional masa kini. Sistem pendidikan ini merupakan cermin cara berpikir yang disebut pertama, yakni paradigma struktural-fungsional. Perubahan cara berpikir mengenai pendidikan, di mana manusia ditanggapi sebagai subjek yang aktif menentukan "nasib" sendiri, mengembangkan paradigma prosesual yang mulai banyak memengaruhi paradigma sosial-budaya pendidikan pada akhir abad ke-20 yang lalu hingga kini.² Baiklah kita bicarakan secara singkat kedua cara pandang tersebut.

Paradigma Struktural-Fungsional

Cara pandang ini menempatkan pendidikan dalam tataran linear sebagai salah satu komponen dari sebuah sistem yang lebih besar. Andaikata suatu sistem terdiri dari sepuluh komponen, maka pendidikan mendapat porsi sepersepuluh dari sistem tersebut, yang tergantung pada keberadaan dan fungsi dari sembilan per sepuluh komponen lainnya. Pandangan holistik semacam ini menjadikan pendidikan sebagai sebagian kecil yang tergantung pada, dan kerap kali didominasi oleh, sebagian besar komponen sistem yang lain.^{1,5}

Kecenderungan berpikir struktural-fungsionalisme pada tingkat nasional mendorong penyusunan kebijakan dan pengambil keputusan pendidikan nasional untuk berpikir seragam, artinya ada suatu kekuasaan—yakni kekuasaan negara—yang berfungsi sentral untuk merancang *blue print*, menyusun kurikulum, mempersiapkan tenaga pengajar, dan menyediakan fasilitas pendidikan untuk semua bagian dan tingkatan di seluruh negeri. Sebagai hasilnya adalah sebuah sistem yang stabil, seimbang, dan “kurang menyukai” perubahan.²

Premis dari struktural-fungsionalisme meliputi : (a) masyarakat adalah sebuah sistem yang bekerja; (b) sistem yang bekerja menuntut institusi-institusi komponennya untuk memberikan kontribusi demi dipeliharanya sistem tersebut; (c) sistem sosial yang bekerja menuntut semua anggota sistem untuk dimotivasi dan dilatih untuk memfasilitasi fungsi sistem.^{1,5}

Apabila kita mencermati kebijakan nasional pendidikan kita, nampaknya selama ini pendidikan kita dirancang menurut premis pemikiran di atas. Kelebihan cara berpikir ini adalah transmisi pengetahuan yang seragam dan merata di seluruh Indonesia, baik kurikulum, latar belakang dan kualifikasi pengajar, metode belajar-mengajar, maupun buku-buku ajar yang digunakan, sehingga dalam jangka panjang kesatuan nasional melalui proses pendidikan dapat terpelihara.² Fakta menunjukkan bahwa proyek-proyek nasional pendidikan, khususnya proyek pengembangan fasilitas sekolah seragam di seluruh Indonesia. Kebijakan penyeragaman ini, di sisi lain, menafikan keragaman sosial-budaya di seluruh tanah air yang sesungguhnya potensial untuk pengembangan kesejahteraan masyarakat setempat.²

Paradigma Prosesual

Paradigma prosesual merupakan respon teoretis terhadap perubahan-perubahanyangterjadidalam masyarakat.^{1,2} Sebagaimana halnya paradigma struktural-fungsionalisme mengenai pendidikan, pemikiran prosesual juga memandang pendidikan sebagai sistem.¹ Perbedaannya adalah bahwa paradigma ini menempatkan manusia sebagai sentral, sebagai makhluk yang aktif, proaktif, dan bahkan manipulatif, dan mampu mengembangkan strategi-strategi untuk menghadapi, dan bahkan mengubah lingkungan di mana ia berada; yang berbeda dari pandangan struktural-fungsionalisme yang memandang manusia sebagai objek yang menjadikan lingkungan

sebagai pedoman pokok untuk bertindak.^{2,6} Menghadapi perubahan, paradigma struktural-fungsional lebih suka menggunakan konsep adaptasi karena adaptasi berarti “manusia terserap dalam, dan menjadi bagian dari sistem”.^{2,4,5}

Cara berpikir prosesual menempatkan faktor interaksi sebagai unsur penting. Dalam interaksi tersebut manusia berupaya agar bentuk dan kualitas kehidupan berubah menjadi lebih baik. Sering kali terjadi bahwa manusia berhasil mengubah gurun pasir yang tandus, atau hutan belantara yang ganas, menjadi lingkungan yang nyaman. Akan tetapi, cukup banyak juga kasus yang menunjukkan bahwa manusia menyesuaikan diri dengan tatanan lingkungan yang sudah ada. Kedua contoh ini menunjukkan dinamika manusia sebagai makhluk yang aktif. Konsep adaptasi yang secara eksplisit mencerminkan adanya batas-batas lingkungan yang tegas di satu pihak bergeser kepada konsep modifikasi dan manipulasi dengan batas-batas sistem lingkungan yang tidak tegas.^{2,5}

Dari Struktural Fungsionalisme ke Prosesualisme

Kebijakan otonomisasi pendidikan—sebagai bagian dari kebijakan otonomi daerah—di Indonesia yang sudah dijalankan semenjak lima belas tahun yang lalu menimbulkan dampak yang kompleks, tidak sesederhana mengubah paradigma teoretis di atas kertas. Perubahan orientasi pendidikan dalam perspektif sosial-budaya, andaikata perubahan itu dijalankan konsisten dan berkesinambungan, membutuhkan setidaknya-tidaknya satu atau dua generasi agar terwujud secara signifikan.^{2,7}

Perubahan paradigma pendidikan menuntut kesiapan kita untuk berubah dari satu ekstrim ke ekstrim yang lain. Secara teoretis hal itu mungkin dapat dilihat sebagai perubahan dari paradigma struktural-fungsionalisme ke paradigma prosesual dalam mengatur dan mengelola pendidikan kita.² Dengan menempatkan pendidikan (secara spesifik, maksudnya adalah sekolah) sebagai sentral, kita mengidentifikasi persoalan-persoalan dan membangun model eksplanasinya dengan melihat interaksi pendidikan dengan komponen-komponen (sistem) di lingkungannya dalam konteks dinamik. Berbeda dari pendekatan sistemik fungsional, pendekatan prosesual ini lebih menekankan kreativitas aktor (dalam hal ini para siswa dan guru), menjauhi ciri-ciri pasif dan statis.^{2,7}

Memandang pendidikan (di sekolah) sebagai kebudayaan berarti melihat pendidikan sebagai proses transmisi pengetahuan secara formal dan berkesinambungan, yang terjadi di antara pihak-pihak yang terlibat (dalam konteks sekolah, antara guru-guru, murid-murid, dan administrasi) menurut perangkat-perangkat aturan yang baku. Pengetahuan yang diperoleh tersebut akan digunakan dalam mewujudkan perilaku untuk menghadapi lingkungan.

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, kebijakan nasional pendidikan di Indonesia selama kurang-lebih 50 tahun merdeka didominasi oleh cara berpikir struktural-fungsionalisme. Akibatnya, ketika perubahan besar terjadi di dunia sekarang ini, khususnya ketika manusia mulai disadarkan bahwa mereka adalah subjek dan aktor yang aktif dan berhak menentukan nasib sendiri, kesadaran akan pendidikan sebagai proses yang terikat dengan berkembangnya gagasan demokrasi ini pun melanda dunia, termasuk Indonesia.⁶

Meningkatnya kesadaran antroposentrik ini membangkitkan perlunya manusia mengenal kebutuhan dan potensinya sendiri. Kebijakan otonomi pendidikan yang dicanangkan lima belas tahun yang lalu merupakan respon terhadap gagasan demokrasi tersebut. Dengan kata lain, telah terjadi pergeseran yang signifikan dari filosofi struktural-fungsionalisme ke prosesual yang anti-statis. Implikasi terhadap konsep kebudayaan adalah bahwa kebudayaan tidak lagi dipandang sebagai *black box* yang berisikan pengetahuan, keyakinan, aturan-aturan yang menjadi semacam pedoman baku bagi mewujudkan perilaku orang-orang yang memilikinya. Melainkan, orang-orang itu secara aktif mengevaluasi pengetahuan, keyakinan, dan aturan-aturan yang ada, merevisi atau merombak yang dipandang tidak relevan dan membangun yang baru. Sebagai subjek, manusia adalah pelantar (*agent of change*) yang selalu berinisiatif dan cenderung melakukan perubahan kearah kemajuan demi mencapai kehidupan yang lebih baik.

Sekolah dalam Prosesualisme

Pendidikan dan institusi sekolah pada tingkatan apapun kini sedang dalam konteks perubahan paradigma. Sekolah –yang harus dibaca sebagai guru, siswa, dan pengelola—harus mulai mengubah cara berpikir yang meliputi hal-hal berikut:²

- Menghapus pikiran yang berorientasi ke atas, dan sikap menunggu;

- Mengembangkan sikap mental antisipatif dan inisiatif;
- Mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan, hambatan-hambatan, dan potensi yang dimilikinya;
- Membangun kemampuan mengelola potensi;
- Membangun kualitas guru secara individual sehingga kualitas kemampuan meningkat;
- Membangun metodologi baru dalam menilai dan menggolong-golongkan siswa; dan
- Membangun komunitas sekolah dan kemauan belajar bersama.

Konstruktivisme dalam Pendidikan di Indonesia

Perwujudan yang lebih konkret dari paradigma prosesual dalam pendidikan adalah konstruktivisme.² Bentuk pemikiran inilah yang diusulkan untuk dikembangkan di Indonesia dalam rangka membangun jati diri keIndonesiaan yang relevan dengan kondisi masa kini. Dalam pendekatan konstruktivisme proses belajar siswa menekankan keaktifan, kreativitas, inovatif, dan mandiri. Semua ciri ini secara filosofi mengejawantah dalam paradigma prosesual yang sudah disinggung sebelumnya. Pengembangan pendidikan konstruktif ini penting dan relevan mengingat kondisi negeri kita yang unik.

Sudah kita maklumi bersama bahwa Indonesia adalah negeri yang sangat luas wilayahnya, suatu negeri kepulauan yang terbesar di dunia, memiliki kira-kira 16.000 pulau besar dan kecil, terpisah-pisah oleh lautan, dan dihuni oleh kira-kira 250 juta penduduk – jumlah penduduk terbesar keempat di dunia– yang tersusun atas etnik, agama, ras, dan golongan sosial ekonomi yang beraneka ragam. Sungguh dapat dikatakan bahwa negeri ini adalah suatu keajaiban karena unsur penyusun yang beraneka ragam itu bersatu dalam suatu kesatuan politik bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pembentukan suatu negara yang sangat kompleks susunannya itu sebenarnya adalah sebuah prestasi sejarah yang luar biasa karena kesatuan besar yang susunannya heterogen secara geografis dan demografis dan terpisah-pisah itu nyaris tak terbayangkan sukarnya, dan rentan persoalan. Namun, faktanya, NKRI masih

terpelihara hingga kini meski sarat dengan pelbagai persoalan. Indonesia dibangun melalui perjuangan yang heroik. Para elite politik pendiri bangsa yang memiliki pendirian yang kokoh berhasil menyatukan Indonesia hingga hari ini, mengikatnya dengan Pancasila sebagai ideologi negara, dan semangat kebangsaan yang masih mampu dipelihara. Pancasila diupayakan terus agar tetap sakti sebagai ideologi bangsa kita, dipertahankan agar tetap relevan dalam menghadapi perubahan yang semakin cepat pada masa kini.⁶

Kendati Indonesia besar, beraneka ragam unsur penyusunnya, indah seumpama zamrud di khatulistiwa, negeri ini tengah mengalami tantangan besar yang bersumber dari dalam maupun luar negeri. Bangsa kita kini berhadapan dengan pelbagai persoalan serius seperti kesenjangan sosial-ekonomi yang semakin melebar, kemiskinan yang meluas, hubungan antaretnik yang rentan konflik, hubungan antaraagama yang semakin penuh prasangka, hukum nasional yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, partai-partai politik yang menjamur, dan banyak lagi. Apa sebenarnya yang terjadi?

Indonesia dan Dunia

Perubahan-perubahan yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini disebabkan oleh faktor-faktor penyebab internal dan eksternal.⁸ Sebagai bagian dari sistem dunia, Indonesia tidak bisa menghindari perubahan yang terjadi. Dalam kondisi nasional seperti sekarang, nampaknya tidak ada jalan lain kecuali mengikuti kehendak sistem besar yang bernama sistem global itu. Fenomena dan konsep globalisasi yang sangat intensif dibicarakan semenjak dua dekade yang lalu mengindikasikan bahwa perubahan sudah menjadi isu kunci pada masa kini dan masa depan. Meski intensitas pengaruhnya bervariasi, setiap masyarakat di dunia sudah terkena imbasnya baik langsung maupun tidak.

Ada beberapa fakta yang penting kita amati dalam konteks hubungan Indonesia dan dunia. Pertama, kebebasan menjadi isu semakin penting di dunia. Isu ini sejalan dan melekat pada demokrasi yang kini telah menjadi milik dunia, dan menjadi acuan politik semua bangsa meskipun di berbagai negeri konsep ini ditafsirkan kembali sesuai dengan kondisi masing-masing. Negeri yang mengklaim asal mula demokrasi sebagai acuan politik seperti Amerika Serikat nampaknya berhasil mengekspor gagasan tersebut sehingga kini menjadi acuan politik semua negara. Demokrasi gaya Amerika

dibangun berdasarkan konsep kebebasan. Manusia pada dasarnya memiliki kebebasan individual yang sama, dan tidak ada orang yang boleh merenggut kebebasan orang lain kecuali dengan aturan-aturan hukum yang terkandung dalam demokrasi hukum.^{8,9}

Kedua, kita kini hidup dalam era pasca-perang dingin. Terutama semenjak Uni Soviet tercerai-berai menjadi negara-negara kecil, negara yang berideologi komunis ini tidak lagi menjadi musuh dan ancaman terbesar bagi Amerika Serikat yang berideologi kapitalisme. Runtuhnya Uni Soviet dianggap sebagai titik awal runtuhnya ideologi komunisme di dunia. Sibuk menata diri kembali dalam negeri yang lebih kecil bernama Rusia, ideologi komunisme pun mengendap tersimpan di bawah permukaan sejarah kini. Nun di timur sana, nasib komunisme Cina juga sama. Menyaksikan keruntuhan komunisme Rusia menyebabkan komunis Cina seperti kehilangan semangat untuk mempertahankan eksistensinya. Bersamaan dengan itu, Cina sendiri sudah berubah. Revolusi kebudayaan telah membuka Cina bagi masuknya gagasan-gagasan baru yang Barat. Kini kita dapat menyaksikan generasi muda Cina yang lebih terbuka dan keBarat-baratan, yang jauh dari sosok generasi pendahulunya.^{6,10}

Ketiga, penduduk dunia kini sesungguhnya didominasi oleh generasi muda berusia 25 tahun ke bawah. Catatan menunjukkan bahwa sekitar 60 persen jumlah total penduduk dunia termasuk kategori ini. Porsi penduduk muda ini mengandung dua makna: (1) telah terjadi perubahan besar dalam tatanan sosial dan kebudayaan pada tingkat global terutama sebagai akibat dari perkembangan teknologi yang luar biasa cepatnya. Perubahan yang terlalu cepat menjadikan kesinambungan sejarah tidak dapat terpelihara, sehingga di berbagai posisi dalam sejarah terdapat bagian-bagian yang *missing link*; (2) perubahan berakibat pula terhadap gagasan-gagasan besar yang menjadi syarat bagi kesatuan bangsa seperti nasionalisme, ideologi nasional, sejarah nasional, dan bahkan integrasi nasional. Generasi muda mengetahui dan memahami sejarah sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman sejarah yang diberikan di sekolah-sekolah yang juga sudah dalam bentuk tafsiran, di mana rasa dan pengalaman kesejarahan itu sudah semakin menghilang karena waktu dan perbedaan generasi.^{6,8}

Keempat, perubahan yang cepat masa kini harus juga diterjemahkan sebagai meningkatnya komunikasi lintas-teritorial dan kebudayaan yang dimungkinkan dan didorong oleh kemajuan teknologi. Tak dapat dimungkiri bahwa dampak teknologi itu --positif

atau negatif- sudah merambah hingga ke dalam keluarga dan rumah tangga. Dampak teknologi juga berarti masuknya gagasan-gagasan baru yang tak terbendung. Arus informasi dari manapun dengan cepat diketahui oleh siapa saja di mana pun berada melalui aneka ragam media seperti surat-kabar atau majalah, televisi, telepon seluler, atau internet. Yang menarik, sarana-sarana informasi ini sebagian besar dikuasai dengan antusias oleh generasi muda, sementara sebagian dari generasi yang lebih tua mengalami gagap teknologi, padahal generasi muda dominan jumlahnya.^{6,8,10}

Keempat fakta di atas telah mengimbas masyarakat dan kebudayaan kita di Indonesia. Perbenturan antara fakta dunia dan fakta Indonesia telah menimbulkan persoalan-persoalan bangsa. Selain tentunya memetik manfaat dari kemajuan teknologi yang mampu meningkatkan kualitas kehidupan manusia, efek destruktifnya juga telah dirasakan di negeri kita, meskipun kajian yang serius tentang hal ini belum pernah dilakukan. Kita menengarai munculnya dan meningkatnya persoalan-persoalan bangsa seperti: (1) memudarnya ideologi bangsa, Pancasila. Nampak benar bahwa Pancasila tidak lagi dihormati dan dimuliakan seperti masa lalu. Peringatan hari lahir Pancasila tidak lagi memperoleh tempat yang layak dalam pemberitaan media. Berita tentang hari lahir Pancasila ditempatkan pada suatu sudut yang tidak begitu penting, dan sebagai gantinya adalah pembahasan tentang Pancasila yang cenderung dekonstruktif. Dalihnya adalah kebebasan yang datang mengikuti reformasi 1998 di negeri ini membuka peluang orang untuk mengemukakan pendapat secara bebas; (2) memudarnya nasionalisme. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari terbukanya komunikasi lintas-teritorial dan lintas-budaya yang semakin meningkat. Sebagian orang menganggap batas-batas bangsa menjadi hambatan dan sudah bukan jamannya lagi. Mereka memandang batas bangsa dan rasa kebangsaan sebagai sentimen yang sempit, yang tidak lagi relevan dengan dinamika kehidupan global masa kini dan masa depan; (3) Persatuan Indonesia dipandang sebagai keinginan yang sukar dicapai karena mencerminkan orientasi kelompok yang sempit. Negara-bangsa Indonesia yang besar namun miskin mungkin tidak lagi menjadi pilihan tatkala dunia menyediakan kesempatan kehidupan yang lebih baik melalui kesejahteraan dan kemakmuran meski pun tidak lagi harus hidup dalam negara-bangsa besar yang penuh kesenjangan. Sebagian teori menunjukkan bahwa demokrasi akan lebih mungkin berjalan dengan baik pada negara-negara yang lebih kecil ukurannya, dan yang unsur penyusunnya tidak banyak

dan kompleks; dan (4) meningkatnya konflik-konflik kepentingan. Gejala ini meningkat sejalan dengan menguatnya primordialisme kedaerahan. Beberapa tahun terakhir muncul konsep "putra daerah" yang menunjukkan meningkatnya semangat kedaerahan atau etnik tersebut. Konflik-konflik antaretnik dan agama yang terjadi beberapa tahun yang lalu merupakan gejala yang relatif baru karena pada masa lampau hal ini hampir tak terdengar.^{6,8}

Hegemoni Barat atas Ilmu Pengetahuan

Pada uraian di atas telah ditunjukkan bahwa perubahan global telah memberikan dampak yang besar dan luas kepada kehidupan kita, khususnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Dampak tersebut tidak hanya melanda kehidupan politik tetapi juga semua aspek kehidupan kita sebagai manusia Indonesia. Mudah-mudahan kehidupan kita terkena dampak besar dan meluas itu adalah karena ciri-ciri masyarakat bangsa kita yang tidak mendukung bagi berlangsungnya proses kebebasan, demokratisasi, dan globalisasi dengan mulus karena kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, kesenjangan sosial yang melebar, keaneka ragaman yang timpang, hukum nasional yang tidak berjalan baik, dan lain-lain. Lebih dari itu bangsa kita sudah sangat lama tergantung pada hutang luar negeri yang sangat besar jumlahnya, ketiga terbesar di antara negara-negara penghutang di dunia saat ini. Selain itu ketergantungan lain yang tak kalah seriusnya adalah ketergantungan dalam ilmu pengetahuan dan pendidikan.^{6,8}

Pendidikan adalah ujung tombak kemajuan suatu bangsa. Dengan pendidikan kita membawa bangsa kepada kemajuan dan kehidupan yang lebih baik. Persoalannya adalah apabila sumber pengetahuan itu selalu berada di luar negeri, dan kita hanya sebatas pengguna, maka ketergantunganlah yang terjadi. Ketergantungan yang berkepanjangan akan membahayakan bangsa karena kita tidak pernah mengembangkan kekuatan pengetahuan yang *contested* dengan pengetahuan dari luar itu. Namun, fakta menunjukkan bahwa ketergantungan penuh itulah yang sudah dan sedang terjadi pada kita. Di pihak lain, penguasaan dan pengendalian ilmu pengetahuan –yang dikenal sebagai hegemoni pengetahuan– berada di Barat.⁹

Untuk sementara, dan untuk kepentingan tulisan ini, penulis masih menggunakan istilah Barat dan Timur sekedar untuk memperjelas uraian. Para ahli ilmu sosial mencatat bahwa istilah

Barat dan Timur sarat mengandung gagasan hegemonik. Barat selalu diartikan sebagai Eropa –dan kemudian diperluas dengan Amerika Serikat dan Australia– yang (lebih) maju, (lebih) beradab, dan memiliki ilmu pengetahuan yang lebih tinggi; sedangkan Timur adalah dunia lain yang (kurang) maju, (kurang beradab), dan memiliki ilmu pengetahuan yang lebih rendah dari Barat. Pencitraan prasangka ini terjadi bersamaan dengan masa kolonialisme Eropa terhadap bangsa-bangsa non-Eropa, dan dimantapkan di kalangan masyarakat yang dikolonisasi sebagai orang Eropa yang memiliki derajat yang lebih tinggi daripada masyarakat setempat. Citra ini menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat yang dikoloni, dan bahkan terus dibawa hingga masyarakat yang bersangkutan bebas dari kolonialisme.^{8,9}

Dalam ilmu pengetahuan di Indonesia, khususnya ilmu-ilmu sosial, kecenderungan memandang model pengetahuan Barat lebih tinggi sangat kuat. Banyak sarjana ilmu sosial kita yang dikirim belajar ke luar negeri untuk Master maupun Doktor cenderung tidak menjadi diri sendiri tatkala mereka kembali ke tanah air. Mereka cenderung membawa sekelumit pengetahuan dari tempat mereka belajar, dan kembali ke Indonesia menyandang panji-panji dan atribut-atribut dari luar negeri – khususnya dari universitas di mana mereka belajar. Mereka sibuk berdebat membawa model masing-masing yang mereka anggap sebagai kebenaran. Para Master atau Doktor yang baru datang itu sibuk berdebat mempertahankan model masing-masing, sehingga mereka (kembali) terkotak-kotak menurut asal universitas, asal negara, dan asal disiplin di mana mereka belajar. Pendidikan lanjutan di luar negeri rupanya turut memberi warna pluralistik baru dalam wajah pendidikan di Indonesia.^{6,8}

Dari perspektif Barat, pendidikan bagi Timur adalah pasar. Permintaan yang tinggi akan pendidikan Barat dari negeri-negeri non Barat, khususnya negara-negara berkembang semisal Indonesia adalah lahan yang subur dari pengelola pendidikan tinggi Barat. Hegemoni ilmu pengetahuan menjelma lebih konkrit menjadi kapitalisme pendidikan atau pasar pendidikan. Setelah pemerintah Indonesia menyetujui untuk turut-serta dalam perjanjian global pasar bebas, maka negeri ini sudah terbuka bagi pendidikan dari mana pun datangnya.¹¹ Sebaliknya, di atas kertas Indonesia juga berhak untuk membuka pasar pendidikan di luar negeri. Tetapi dalam kenyataannya lembaga pendidikan tinggi dari luar negeri kini menjamur di Indonesia. Beberapa universitas dari mancanegara

sudah membuat cabang-cabang di beberapa kota besar di Indonesia, sedangkan kita belum melakukan langkah apa pun untuk merengkuh kesempatan di luar negeri karena kemampuan bersaing yang lemah.

Dunia Berubah, Paradigma Ilmu Pengetahuan Berubah

Dalam tiga dekade terakhir terjadi perubahan besar dalam ilmu pengetahuan sosial dalam memposisikan manusia. Sebagaimana kita ketahui, posisi manusia selalu terikat dengan paradigma ilmu sosial. Ketika paradigma evolusionisme dan kemudian struktural-fungsionalisme mendominasi pemikiran teori-teori sosial, manusia sesungguhnya diposisikan sebagai objek. Paradigma objektif memandang manusia sebagai komponen yang melengkapi suatu sistem sosial, dan setiap komponen memiliki kedudukan dan peranan masing-masing yang saling tergantung satu sama lain, yang bersama-sama menyebabkan bekerjanya sistem sosial (masyarakat) tersebut.^{2,4}

Yang patut kita cermati dalam paradigma sistemik ini adalah sifatnya yang selalu membangun keseimbangan atau harmoni atau ekuilibrium. Dengan kata lain, komponen-komponen tertentu yang bertindak menyimpang, atau tidak menjalankan peranan yang seharusnya, akan disingkirkan atau diredam, dan digantikan oleh komponen yang lain.^{4,5} Dalam realitas, sistem sosial yang demikian itu dapat menjerumuskan kepada otoritarianisme, atau bahkan diktatorisme, di mana kekuasaan mutlak di tangan seseorang dapat menyingkirkan orang-orang tertentu yang bersuara lain. Banyak orang memandang paradigma struktural-fungsionalisme ini sebagai paradigma kolonial yang digunakan untuk memantapkan kekuasaan di koloni-koloni mereka. Kekuasaan berada di tangan penguasa kolonial, yang mengendalikan arah dan bentuk dinamika internal masyarakat koloni sesuai dengan kebijakan pemerintah kolonial. Kekuasaan kolonial membentuk struktur piramidal di mana penguasa atau pemerintah berada di puncak piramid sedangkan masyarakat kolonial di lapisan bawah.⁸

Perubahan dunia adalah multifokal, yaitu suatu kompleksitas arah yang selaras dengan isu liberalisme atau kebebasan ala Barat. Kebebasan manusia berarti tidak lagi memposisikannya sebagai objek, melainkan sebagai subjek yang mampu berpikir, berkreasi, berproduksi, dan memanipulasi. Sebagai manusia bebas, setiap orang berhak atas dirinya sendiri dan mengambil keputusan yang terbaik

menurut pertimbangannya. Manusia memiliki hak yang sama untuk membentuk kerjasama yang sesuai dengan kepentingan orang-orang yang menginginkannya. Kebudayaan dan struktur sosial bukan suatu yang sudah jadi, dan menjadi resep bagi manusia untuk bertindak melainkan suatu konstruksi yang dibangun berdasarkan kesepakatan sejumlah orang yang memiliki kepentingan yang sama. Oleh karena itu kebudayaan dan struktur sosial adalah dinamik, tidak statik dan ekuilibrium sebagaimana yang dikonsepsikan dalam paradigma sistemik.^{6,8}

Oleh karena manusia dikonsepsikan sebagai subjek yang mampu membangun dan merombak, maka pendekatan ini disebut konstruktivisme, yang dalam tulisan ini dilihat sebagai bagian dari prosesualisme. Tatkala demokrasi, liberalisme, hak asasi manusia, kesetaraan jender, harkat hidup kaum minoritas, dan isu-isu lain yang sejajar merambah dunia, sebenarnya isu-isu ini berjalan bersama dengan pemikiran konstruktivisme itu.¹² Apabila pemikiran konstruktivisme itu benar-benar terwujud dalam kehidupan masyarakat yang nyata, maka diasumsikan bahwa demokrasi dan isu-isu lain yang sejajar itu bekerja dengan baik. Tidak hanya kolonialisme telah berakhir tetapi juga kesejajaran Timur dan Barat seharusnya tercapai pada era baru ini, termasuk ilmu pengetahuan dan pendidikan.^{2,6} Lebih banyak ruang kebebasan dan kreatif di lapangan ilmu pengetahuan dan pendidikan tercipta, lebih banyak orang Timur akan menawarkan gagasan-gagasan dan inovasi-inovasi baru dalam ranah ilmu pengetahuan ke Barat dan diterima baik di Barat sebagai pemerayaan ilmu pengetahuan dunia yang tak lagi terbagi secara dikotomik.¹³

Sisi Terang Konstruktivisme

Pemikiran konstruktivisme, sebagaimana halnya pemikiran positivisme, juga berasal dari Barat. Mulanya adalah kritik terhadap ciri dan sifat ilmu pengetahuan sosial Barat yang dianggap kolonial oleh para ahli ilmu sosial Barat sendiri, yang menuntut Barat agar mengoreksi pemikiran mereka sesuai dengan perkembangan dunia.^{9,12}

Dilihat dari sisi perkembangan, konstruktivisme mendorong manfaat besar bagi masyarakat negara-negara berkembang seperti Indonesia. Terbukanya kerangkeng kolonialisme, atas nama kebebasan yang bermakna positif, memberi peluang bangsa kita untuk

membenahi masalah-masalah internal, terutama ketergantungan kepada luar negeri, kemiskinan yang serius, dan tak kalah penting meningkatkan harkat kebudayaan yang menghapus citra rendah diri pada bangsa kita yang lama berada di bawah kolonialisme. Dalam pemikiran konstruktivisme itu kita mendapat peluang besar untuk membangun jati-diri bangsa untuk menjadi diri sendiri yang demokratis dan kuat melalui pemikiran multikulturalisme sebagai ganti pluralisme.^{6,8}

Sisi Buram Konstruktivisme

Pemikiran konstruktivisme mengandung efek domino terhadap berbagai segi kehidupan masyarakat di dunia. Selain sisi terang, memajukan kehidupan demokratis dan hak asasi manusia, posisi manusia yang semakin dimanusiakan, berakhirnya kolonialisme dalam pengertian penguasaan teritorialitas, konstruktivisme mengandung pula sisi buram, tatkala arus pemikiran konstruktif tersebut berbalik arah menjadi mode penguasaan dan pengendalian baru, yakni pengendalian pikiran, pengetahuan, dan lebih konkret – pendidikan.^{6,8} Bahkan kita mungkin dapat menengarai bahwa inilah bentuk positivisme baru, hegemoni baru terhadap Indonesia, karena kita ternyata tidak siap dalam banyak hal untuk menyambut era pemikiran baru tersebut dengan kapasitas maupun potensi kebudayaan yang *contestable*. Kondisi-kondisi kemiskinan, keterbelakangan, banyak hutang, kesenjangan sosial-ekonomi, konflik-konflik, dan sebagainya menjadikan kita gamang dan tidak siap mengadaptasi dengan cepat perubahan yang terjadi. Hasilnya adalah ketergantungan baru.

Ketika pemikiran konstruktivisme berhadapan dengan kondisi-kondisi Indonesia, hubungan kekuasaan yang terbentuk menjadi tidak seimbang. Lembaga-lembaga pendidikan dari luar negeri, khususnya dari negara-negara maju, merambah masuk ke dalam masyarakat kita, menawarkan berbagai jenis dan bentuk pendidikan tinggi disertai dengan janji-janji kualitas yang lebih baik, mendorong terjadinya fragmentasi baru dalam masyarakat kita. Sebagian warga masyarakat kita yang punya banyak uang akan memilih pendidikan tinggi dari luarnegeri itu, sedangkan sebagian besar tertinggal, bahkan putus sekolah, karena tak sanggup membayar biaya pendidikan yang semakin tinggi untuk pendidikan tinggi di dalam negeri sekali pun.^{6,8,11}

Dengan kata lain, apabila kita tidak jeli, tidak mampu memanfaatkan sisi terang konstruktivisme, kurang cerdas, dan tidak berfikiran luas, maka konstruktivisme justru akan berdampak negatif bagi bangsa kita karena kebebasan yang ditawarkan justru akan memecah-belah bangsa kita pada masa yang akan datang. Pluralisme bangsa kita adalah kondisi yang rentan yang dapat membelokkan arah konstruktivisme yang membangun di atas menjadi kondisi destruktif. Hal ini karena pluralisme kebudayaan kita tidak terbiasa berkomunikasi antar-kebudayaan, batas-batas kebudayaan kita jelas dan ketat, masyarakat kita hidup terkotak-kotak di wilayah yang geografinya luas dan penuh kendala.

Revolusi Mental = Revolusi Pendidikan

Dari diskusi di atas nampak terbentang luas persoalan penting tatkala kita berupaya menerjemahkan jargon *Revolusi Mental* menjadi kenyataan. Dalam konteks ini, menurut hemat penulis, pendidikan sebagai kebudayaan harus menjadi konsep terdepan. Revolusi tidak diartikan sebagai proses perubahan radikal dan menyeluruh pada struktur sosial yang dianggap buruk menjadi suatu struktur baru yang lebih baik dan lebih menyejahterakan, melainkan suatu *soft revolution*, gerakan perubahan cara berpikir yang selama ini mengandung banyak unsur penghambat tercapainya kemajuan dalam kehidupan masyarakat kita dari lokal hingga nasional.

Secara populer dan publik kita kerap kali mendengar tentang sejumlah gejala seperti korupsi, nepotisme, kolusi, kurang mandiri, kurang inisiatif, kurang inovatif, kurang toleran, dan sebagainya, yang dianggap sebagai faktor-faktor yang menghambat kemajuan bangsa, dan bahkan mengganggu integrasi bangsa. Itulah sebagian dari sangat banyak faktor yang harus dilenyapkan dalam Revolusi Mental tersebut.

Mengemukakan persoalan bangsa lebih mudah daripada menemukan solusinya. Dalam tulisan ini penulis berpendapat bahwa salah satu solusi adalah pada proses pendidikan sebagai kebudayaan. Dalam perspektif ini kita terlebih dahulu menyepakati bahwa kita harus mulai dari filosofi pendidikan sebelum memasuki ranah yang lebih teknis. Apa sesungguhnya filosofi pendidikan kita? Dari mana sejumlah karakter positif seperti tidak korupsi, tidak nepotisme,

tidak kolusi, mandiri, berinisiatif, inovatif, toleran, dan sebagainya kita mulai bangun? Saya kira hanya proses pendidikan yang mampu menjawab dan menggarap hal itu. Pendidikan bukan sekadar teknis seperti susunan kurikulum, menambah atau mengurangi jumlah mata pelajaran, nilai kredit setiap mata pelajaran, atau membangun gedung dan fasilitas lainnya, melainkan membangun suatu pemahaman filosofis mengenai membangun manusia Indonesia baru dengan karakter-karakter positif yang sudah dibicarakan di atas. Menurut saya, inilah esensi dari Revolusi Mental tersebut. Dengan kata lain, Revolusi Mental tak lain adalah revolusi pendidikan.***

Rujukan

1. Hansen JH. *Sociocultural Perspectives on Human Learning: An Introduction to Educational Anthropology*. New York: Prentice-Hall : 1987.
2. Saifuddin AF. "Kebijakan Otonomi Daerah: Otonomi Pendidikan dalam Perspektif Sosial Budaya," *Antropologi Indonesia. Indonesian Journal of Sosial and Cultural Anthropology*, Th.XXVI, No. 65, Mei-Agustus, hlm 1-12: 2001.
3. Singleton JM. "Schooling : Coping with Education in Modern Society," T. Weaver (ed.) *To See Ourselves: Anthropology and Modern Sosial Issues*. Glenview, Ill: Scott, Foremans and Co., pp. 278-280:1973.
4. Saifuddin AF. *Logika Antropologi : Suatu Percakapan (Imajiner) Mengenai Dasar Paradigma*. Jakarta: PrenadaMedia: 2015.
5. Saifuddin AF. *Antropologi Kontemporer. Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma*. Jakarta: PrenadaMedia: 2005.
6. Saifuddin AF. *Catatan Reflektif Antropologi Sosialbudaya*. Depok : Institut Antropologi Indonesia : 2011.
7. Saifuddin AF. "Multicultural Education: Putting School First (A Lesson from the Education Autonomy Policy Implementation in Indonesia)". Sunarto, Kamanto, Russel Heng-Eng, A.F. Saifuddin, eds. *Multicultural Education in Indonesia and Southeast Asia. Stepping into the Unfamiliar*. Jakarta : Tifa-Jurnal Antropologi Indonesia, pp.95-104 : 2004.

8. Saifuddin AF. Dimensi Sosialbudaya Pertahanan : Setahun *Weekly Sociocultural Insights*. Jakarta: Kementerian Pertahanan RI:2011.
9. Said E. Orientalism. London : Routledge-Kegan Paul : 1978.
10. Time Magazine, pp.28-29, 19 November 2009.
11. Saifuddin AF (Ed.). Indonesia Menyongsong Era Baru Komunitas ASEAN 2015. Depok : FISIP UI Press : 2014.
12. Marcus G.E. Fischer MJ. Anthropology as Cultural Critique. An Experimental Moment in the Human Sciences. Chicago : University of Chicago Press : 1987.

PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA SEBAGAI STRATEGI KEBUDAYAAN

Ki Supriyoko

Pendahuluan

Di *Kompas* 10 Mei 2014, Joko Widodo menyatakan kita cenderung menerapkan paham liberalisme yang kontradiktif dengan nilai, budaya, dan karakter bangsa Indonesia. Kita perlu melakukan tindakan korektif dengan mencanangkan Revolusi Mental untuk menciptakan paradigma, budaya politik, dan pendekatan *nation building* baru yang lebih manusiawi, sesuai budaya Nusantara, bersahaja dan berkesinambungan.

Selanjutnya dinyatakan dalam melaksanakan Revolusi Mental kita dapat menggunakan Konsep Trisakti yang disampaikan Bung Karno dalam pidatonya tahun 1963 dengan tiga pilarnya, "Indonesia yang berdaulat secara politik", "Indonesia yang mandiri secara ekonomi", dan "Indonesia yang berkepribadian secara sosial-budaya".

Pilar ketiga Trisakti adalah membangun kepribadian sosial dan budaya. Sifat keindonesiaan makin pudar karena derasnya arus globalisasi dan dampak revolusi teknologi komunikasi selama 20 tahun terakhir. Indonesia tak boleh membiarkan bangsanya larut dengan arus budaya yang belum tentu sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa kita.

Sistem pendidikan harus diarahkan untuk membantu membangun identitas bangsa Indonesia yang berbudaya dan beradab, yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral agama yang hidup di negara ini. Akses pada pendidikan dan layanan kesehatan masyarakat yang terprogram, terarah, dan tepat sasaran oleh negara dapat membantu kita membangun kepribadian sosial dan budaya Indonesia.

Masih dari Joko Widodo, kalau disepakati Indonesia perlu melakukan Revolusi Mental, pertanyaannya dari mana kita harus memulai. Jawabnya dari masing-masing kita sendiri, dimulai dengan lingkungan keluarga dan lingkungan tempat tinggal serta lingkungan kerja dan kemudian meluas menjadi lingkungan kota dan lingkungan negara. Revolusi Mental harus menjadi sebuah gerakan nasional.

Karakter sebagai Jati Diri

Pendidikan karakter bangsa bisa dijadikan sebagai strategi kebudayaan nasional untuk menjalankan Revolusi Mental sebagaimana yang dikemukakan Joko Widodo dalam tulisannya tersebut. Dengan pendidikan karakter yang tepat maka Revolusi

Mental dapat dijalankan.

Kiranya karakter bangsa bukan menjadi sesuatu yang baru bagi bangsa Indonesia. Para pendiri bangsa ini, termasuk proklamator kemerdekaan negeri ini, sejak jauh hari sudah memikirkan pentingnya karakter untuk menjadikan bangsa ini menjadi besar dan terhormat di tengah-tengah masyarakat dunia. Para pendiri bangsa dimaksud di antaranya adalah Bung Karno, Bung Hatta, dan Ki Hadjar Dewantara.

Presiden pertama Republik Indonesia, Bung Karno, dalam konsepnya mengenai pembangunan karakter dan bangsa, *Nation and Character Building*, secara jelas menyatakan bahwa membangun karakter bangsa Indonesia mau tidak mau dan suka tidak suka harus dijalankan secara terus-menerus dan berkesinambungan mengingat tingginya tingkat kemajemukan masyarakat Indonesia.

Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, Bung Hatta, menyatakan dalam memelihara dan memajukan ilmu maka karakterlah yang utama, bukan kecerdasan. Kurang kecerdasan dapat diisi, kurang karakter sukar memenuhinya seperti ternyata dengan berbagai bukti di dalam sejarah. Kecerdasan dapat dicapai dengan jalan studi oleh orang yang mempunyai karakter.

Sementara itu Bapak Pendidikan Nasional dan Menteri Pengajaran dan Pendidikan yang pertama, Ki Hadjar Dewantara, pernah menyatakan bahwa pendidikan merupakan daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin atau karakter), pikiran (*intellect*) dan tubuh anak. Bagian-bagian itu tidak boleh dipisahkan supaya kita dapat memajukan kesempurnaan hidup anak-anak kita.

Menurut Soemarno Soedarsono (2002), setiap manusia memiliki identitas, jati diri, karakter, serta aspek-aspek kepribadian manusia lainnya. Lebih lanjut dideskripsikan perbedaan pengertian antara identitas, jati diri, karakter dan aspek-aspek kepribadian manusia tersebut.

Identitas merupakan penampilan fisik seseorang yang tampak secara lahiriah yang belum tentu mencerminkan diri manusia sesungguhnya; sedangkan jati diri merupakan sifat dasar seseorang yang hakiki yang berasal dari Tuhan, yang merupakan sejatinya diri manusia yang asli. Orang yang fisiknya gagah, adanya bidang, warna kulitnya hitam, dan sebagainya, itu merupakan identitas; sebaliknya

orang yang perangnya halus, sikapnya santun, bicaranya hati-hati, dan sebagainya, itu merupakan jati diri.

Karakter adalah watak, yaitu pengembangan jati diri manusia. Dengan demikian karakter seseorang lebih mencerminkan jati diri daripada identitas. Sikap santun pada orang lain lebih menunjukkan karakter seseorang daripada fisiknya yang gagah misalnya. Karakter merupakan aspek kepribadian manusia; sedangkan aspek kepribadian yang lainnya adalah intelektual, temperamen, dan keterampilan.

Pada dasarnya karakter seseorang dapat diubah atau dikembangkan, demikian juga dengan keterampilan; sementara intelektual dan temperamen sangat sulit diubah atau dikembangkan. Orang yang karakternya kurang baik bisa dikembangkan menjadi baik, orang yang karakternya kurang peduli dapat diubah menjadi peduli. Jelaslah bahwa karakter manusia bisa dikembangkan; karena itu usaha mengembangkan karakter bangsa menjadi sesuatu yang sangat realistis.

Pentingnya Karakter

Pentingnya karakter, baik yang bersifat individual maupun bangsa, sering dilukiskan dengan kata-kata bijak, misalnya: *When wealth is lost, nothing is lost; when health is lost something is lost; when character is lost, everything is lost*. Artinya: kalau kekayaan hilang, tidak ada yang hilang; kalau kesehatan hilang, ada sesuatu yang hilang; (namun) kalau watak hilang, segalanya akan hilang.

Kata-kata bijak lain menyatakan: *Knowledge is power, but character is more*. Maksudnya: pengetahuan adalah kekuatan (yang besar), tetapi watak memiliki nilai lebih daripada itu. Atau: *Character building is a never ending process*. Artinya adalah, membangun watak manusia itu merupakan suatu proses yang tiada pernah berhenti.

Indonesia memiliki pengalaman politik yang menarik dengan dijalankannya reformasi yang berkait dengan pengembangan karakter bangsa Indonesia itu sendiri. Di luar kebaikan dan keberhasilannya, reformasi yang digelorakan mulai Mei 1998 ternyata telah menimbulkan ekses yang berkepanjangan sampai hari ini; di antaranya adalah terjadinya euforia di berbagai perilaku sosial dan politik.

Sekarang terjadi perilaku yang berlawanan dengan cita-cita reformasi. Pada masyarakat bawah terjadi vandalisme, brutalisme, anarkisme dan kekerasan fisik lainnya; sementara itu pada masyarakat atas antara lain *white collar crime*, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan, dan sebagainya.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi dua masalah besar sekaligus; yaitu masalah genting yang memerlukan solusi segera (*urgent*) serta masalah penting yang memerlukan penanganan segera (*important*). Adapun masalah yang genting utamanya berkaitan dengan munculnya fenomena disintegrasi bangsa seperti fanatisme kepartaian yang berlebihan; sementara itu masalah yang penting antara lain menyangkut pembangunan karakter bangsa itu sendiri.

Bentuk Karakter Bangsa

Menurut Soemarno Soedarsono ada enam hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam membentuk karakter bangsa. Adapun keenam hal yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Kejujuran
2. Keterbukaan
3. Keberanian mengambil risiko
4. Bertanggung jawab
5. Memenuhi komitmen
6. Kemampuan berbagi (*sharing*)

Menurut James Kouzes dan Barry Posner di dalam karya tulisnya "*Credibility*" (1993) ada empat hal pembentuk karakter:

1. Kejujuran (*honesty*)
2. Berorientasi ke depan (*future orientation*)
3. Memberikan inspirasi (*inspiring*)
4. Memiliki kompetensi (*competence*)

Menurut Benjamin S. Bloom yang mengembangkan "Teori Domein", ada tiga domein yang perlu mendapatkan perhatian di dalam upaya pembentukan karakter, yaitu:

1. Kognitif (*cognitive*)
2. Afektif (*affective*)
3. Psikomotorik (*psychomotoric*)

Menurut Ki Hadjar Dewantara yang notabene merupakan Bapak Pendidikan Indonesia, ada dua hal yang perlu mendapat perhatian dalam pengembangan karakter, yaitu:

1. Dasar, adalah pemberian dari Tuhan
2. Ajar, adalah pengajaran atau pendidikan bagi Sang Anak

Menurut Keteladanan Nabi Muhammad SAW; karakter bisa dibangun dengan mengedepankan empat sikap dasar kepemimpinannya Muhammad. Adapun keempat sikap dasar yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Kejujuran (*siddiqh*)
2. Keterpercayaan (*amanah*)
3. Keterbukaan (*tabligh*)
4. Kecerdasan dan kearifan (*fathonah*)

Menurut Inti Ajaran (Islam) ada tiga inti ajaran yang secara langsung dan tidak langsung dapat membangun karakter. Ketiga hal yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Pemerkokohan keyakinan (*aqidah*)
2. Penegakan hukum dan peraturan (*syari'ah*)
3. Perbaikan perilaku (*akhlaq*)

Menurut Inti Ajaran *Ahlu Sunnah wal Jamaah* (Aswaja) dalam Qodri Azizi ada tiga inti ajaran Aswaja yang dapat digunakan untuk membangun karakter.

1. Keterbukaan (*tawayuh*)
2. Keadilan dan proporsionalitas (*ta'adul*)
3. Ketenggang-rasaan (*tasamuh*)

Menurut Ki Supriyoko terdapat lima tujuan pendidikan yang harus mendapatkan perhatian karena secara langsung maupun tidak langsung akan menentukan karakter Sang Anak, yaitu:

1. Membangun iman
2. Meningkatkan takwa
3. Memuliakan akhlak
4. Menguasai ilmu dan teknologi
5. Menyalehkan amal

Berbagai pendapat tersebut di atas perlu diacu dalam mengembangkan karakter bangsa sekaligus menjalankan pendidikan karakter bangsa sebagai suatu strategi kebudayaan Indonesia.

Pendekatan Keteladanan

Pendidikan karakter bangsa bisa dijalankan dengan berbagai pendekatan sekaligus; salah satu pendekatan yang paling efektif dan produktif adalah pendekatan keteladanan, yaitu dengan cara meneladani perilaku baik para orang lain.

Keteladanan dapat diambil tidak saja dari “orang besar” akan tetapi sangat mungkin justru dari “orang kebanyakan”, bahkan sangat mungkin juga dari “orang kecil” yang berasal dari masyarakat bawah (*grass-root level*).

Keteladanan Soekarno-Hatta. Soekarno dan Hatta adalah presiden dan wakil presiden pertama Republik Indonesia merupakan dua pribadi berbeda; kalau Soekarno sosok hasil didikan Timur yang mengutamakan kepribadian, karakter, dan kepemimpinan, maka Hatta sosok hasil didikan Barat yang mengutamakan sistem, kompetensi, dan profesionalisme. Meski pribadinya berbeda tetapi keduanya saling meleburkan egonya untuk memimpin negara Indonesia. Seandainya kedua pemimpin itu saling menonjolkan egonya tentu akan muncul konfrontasi yang berimplikasi buruk kepada bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta adalah teladan dalam hal meleburkan ego demi kepentingan bangsa.

Keteladanan George Washington. Washington adalah presiden pertama Amerika Serikat (AS). Ia menjadi presiden tahun 1776-1781 dengan sukses. Rakyat AS mendambakannya kembali di periode ke-2 dalam jabatan lima tahun berikutnya. Washington bersedia, dan melalui mekanisme konstitusional kembali memimpin AS. Dalam mengemban jabatan ke-2 juga sukses sehingga ketika masa jabatannya habis rakyat memintanya lagi untuk memimpin AS.

Ketika itu usia Washington masih muda untuk jabatan presiden, 63 tahun. Kali ini Washington menolak menjadi presiden AS untuk ketiga kalinya karena undang-undang tidak mengizinkan seseorang menjadi presiden tiga kali berturut-turut. Washington teladan dalam kepatuhan pada undang-undang.

Keteladanan Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew adalah perdana menteri Singapura yang berhasil mempersatukan berbagai etnis (Melayu, Cina, India, dan Eropa) sambil memajukan negara. Meski dari negara yang kecil tetapi namanya amat dihormati oleh pemimpin-pemimpin dunia. Lee Kuan Yew tidak sombong tetapi jujur dan sederhana. Ia tidak pernah mencuri uang negara; bahkan tidak pernah menggunakan fasilitas negara secara berlebihan. Kalau pergi ke luar Singapura sering menggunakan pesawat komersial dengan pakaian yang sederhana; terkadang duduk sejajar dengan penumpang yang lainnya. Lee Kuen Yew adalah teladan dalam kejujuran dan kesederhanaan.

PROFIL

Hurip Danu Ismadi adalah Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan, Balitbang Kemdikbud (2012-sekarang). Sebelumnya pernah menjabat sebagai Kasubdit Pendidikan Kesetaraan, Direktorat Jenderal Non formal dan Informal (2009-2011) dan Kasubdit Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Menengah, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah (2011). Selain itu, menjabat sebagai *Associate Professor*, Dosen Kebijakan Pendidikan, Penelitian dan Evaluasi Pendidikan, di Universitas Pakuan Bogor, Jawa Barat (2007-sekarang). Pendidikan sarjana ditempuh di bidang Pendidikan Non-Formal di Universitas Negeri Yogyakarta, Master di bidang Teknologi Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta, dan Doktor di bidang Penelitian dan Evaluasi Pendidikan dari universitas yang sama. Aktivasinya dalam presentasi dan konferensi internasional, antara lain: *Nonformal Education Innovation Meeting*, Innotech, Manila, Philippine (1991); *Nonformal Education Meeting in Bangkok*, Thailand (1994); *Nonformal Education Implementing in Beijing*, China (1994); *Nonformal Education Conference in Seoul*, Korea (1994); *Life Long Learning Meeting in Kuala Lumpur*, Malaysia (1996); *Seamaul Undong Movement Meeting*, Seoul, Korea (2001); *Functional Literacy Conference*, Islamabad, Pakistan (2005); *Life Long Learning Implementation Meeting*, Busan, Korea (2006); *UNESCO Equivalency Education Meeting*, Cairo, Egypt (2009); *UNESCO Equivalency Education Meeting*, Bangkok, Thailand (2009); *UNESCO Equivalency Education Conference*, Semarang, Indonesia (2009); *ASEM Life Long Learning Conference*, Nhtrang City, Vietnam (2010); *Community Learning Center Meeting*, Hongkong (2010); *International Inspiration Meeting*, Cardiff Wales, England (2010); *Lecturer of Non Formal Education at UNESCO Timor Leste* (2011); *International Meeting of ASEAN Study at Frankfurt University*, Germany (2012).

Semiarto Aji adalah staf pengajar dan peneliti di lingkungan Departemen Antropologi FISIP UI. Menyelesaikan disertasi doktornya di Universitas Indonesia tahun 2010 dengan topik mengenai pertanian kota. Minat riset yang menjadi perhatiannya membentang dari isu lingkungan mulai dari pertanian, kehutanan, sampai ke REDD; studi etnisitas dan identitas sosial; hubungan desa dan kota;

dan studi kawasan terutama Kalimantan dan Papua. Aktif sebagai peneliti di beberapa lembaga seperti Lembaga Ekolabel Indonesia (1998-2003), Papua Center UI (sejak 2010), Abdurrahman Wahid Institute (sejak 2013) dan peneliti tamu di berbagai universitas di luar negeri seperti Asia Research Institute, National University of Singapore (2007), Institute for Philipines Culture, Ateneo de Manila University (2008-2009), Monash Sustainability Institute, Melbourne (2012), dan Victoria University of Wellington (2015). Tulisannya mengenai etnisitas, multikulturalisme, REDD, pertanian kota, pertambangan, dan metodologi tersebar di berbagai jurnal nasional dan internasional.

Karlina Supelli adalah ahli filsafat dan astronomi. Karlina menempuh pendidikan sarjananya di bidang astronomi, Institut Teknologi Bandung, kemudian melanjutkan pendidikan master dan doktoral di bidang astronomi di University College of London. Ketertarikannya pada filsafat mengantarkannya untuk mengambil program S2 dan S3 ilmu filsafat di Universitas Indonesia. Hingga sekarang Karlina Supelli merupakan pengajar tetap di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta. Publikasinya mencerminkan minatnya yang luas, mulai dari perkembangan fisika, matematika, metafisika, serta isu-isu filsafat dan kemanusiaan. Salah satu bukunya yang mendapat banyak apresiasi adalah *Dari Kosmologi ke Dialog: Mengenal Batas Pengetahuan, Menentang Fanatisme* (2011, Mizan).

Antonius Benny Susetyo Pr. adalah pengamat sosial serta aktivis penggerak manusia merdeka. Pendidikan tingginya ditempuh di Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi (STFT) Widya Sasana Malang. Saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jendral Setara Institut dan Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Agama dan Kepercayaan (HAK) Konferensi Waligereja Indonesia. Selain itu, dikenal juga sebagai Pendiri Pergerakan Manusia Merdeka bersama Abdurrahman Wahid, dan bersama Hendaradi mendirikan SETARA, yang berusaha memperjuangan Hak Sipil Warga Negara dan Demokrasi. Aktif di berbagai forum dan komunitas, antara lain: Dekrit Rakyat; Forum Kajian Demokrasi dan Hak Asasi Manusia; Forum Komunikasi

Antarumat Beragama; Forum Kerja Kemanusiaan; Kelompok Visi Anak Bangsa; Kolumnis di sejumlah media nasional mengupas masalah sosial dan budaya. Beberapa karya yang telah dipublikasikan, antara lain: *Melangkah dari Reruntuhan, Tragedi Situbondo* (Grasindo, 1998 –kontributor); *Indonesia di Persimpangan Jalan* (kontributor, 1999); *Orde Para Bandit* (Averroes Press dan LKiS, 2001); *Membuka Mata Hati Indonesia* (Averroes Press dan Pustaka Pelajar, 2002); *Kasih Itu Pembebasan: Renungan bagi Kaum Beriman untuk Membela Kaum Lemah* (Yayasan Pustaka Nusatama, April 2003); *Vox Populi Vox Dei* (Averroes Press, 2004); *Hancurnya Etika Politik* (Kompas, 2004); *Bimbingan Rohani Calon Pemimpin, Panduan bagi Pembimbing Rohani dalam Pembinaan Kaderisasi* (Dioma, 2004); *Politik Pendidikan Penguasa* (LKiS, 2005); *Teologi Ekonomi* (Averroes Press, 2006); dan *Politik, Agama dan Kekuasaan* (Averroes Press, 2007).

Haryatmoko adalah ahli filsafat dan etika politik. Pendidikan S1-nya ditempuh di Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara, Jakarta. S2 dan S3 dalam Anthropologi dan Sejarah Agama-agama di Universitas Sorbonne - Paris IV, Perancis. Selain itu, menamatkan S3 dalam bidang Etika Politik di Institut Catholique de Paris, Perancis, dan mengikuti International Visiting Fellow di Georgetown University, Washington D.C., USA untuk riset tentang *Public Ethics* (2010-2011). Sejak tahun 1997 hingga sekarang tercatat sebagai Pengajar Filsafat di Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, serta pengajar tamu di beberapa universitas di Indonesia. Beberapa karya yang telah dipublikasikan: *Etika Politik dan Kekuasaan* (Penerbit Buku KOMPAS: 2003, 2004, 2014); *Etika Komunikasi* (Kanisius: 2007); *Dominasi Penuh Muslihat: Akar Kekerasan dan Diskriminasi* (Gramedia: 2010); *Etika Publik: untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi* (Gramedia: 2011, 2013); *Le statut épistémologique de l'enseignement social de l'Eglise* (Bern: Peter Lang, 1996).

Saldi Isra adalah Guru Besar Hukum Tata Negara dan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang. Menyelesaikan Sarjana Hukum di Universitas Andalas (UNAND) dengan predikat *Summa Cumlaude* tahun 1994, *Master of Public Administration* di Universitas Malaya Kuala Lumpur tahun 2001, dan Doktor Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tahun 2009 dengan

predikat *Cumlaude*. Tahun 2011-2016 Ketua Program Doktor pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum UNAND. Mengikuti kursus "*Law and Governance in Developing Countries*" di Van Vollenhoven Institute Faculty of Law Leiden University, September-Desember 2003 dan *Chevening Fellowship* dalam kursus "*What Democracy Means*" di University of Birmingham Inggris, Januari-April 2006. Tahun 2003-2007 peneliti The Indonesian-Netherlands Studies of Decentralization of the Indonesia "Rechtsstaat" (Negara Hukum, *Rule of Law*) and Its Impact on Agrarian (INDIRA) kerja sama beberapa universitas di Indonesia dengan Van Vollenhoven University of Leiden, Belanda. Sepanjang September-Oktober 2009 peserta "Rule of Law Forum" di Dallas-Texas, Washington, dan New York AS. Visiting Scholar di Gakushuin University-Tokyo, Oktober 2011. Aktif menulis di beberapa media cetak nasional dan sampai saat ini sekitar 600 (enam ratus) tulisan telah dipublikasikan di *Kompas*, *Koran Tempo*, *Media Indonesia*, *Republika*, *The Jakarta Post*, *Koran Seputar Indonesia*, *Majalah Tempo*, *Majalah Gatra* dll. Tidak hanya itu, sejauh ini telah menghasilkan belasan buku dan 50-an tulisan berbagai jurnal ilmiah dan ratusan makalah yang disampaikan dalam seminar nasional maupun internasional. Sepanjang 2004-2014 menerima beberapa penghargaan, di antaranya: (1) Bung Hatta Anti Corruption Award (BHACA), 2004; (2) Award of Achievement for People Who Make a Difference dari The Gleitsman Foundation, USA, 2004; (3) UNAND Award atas prestasi bidang penelitian dan karya ilmiah, 2007; (4) Tokoh Muda Inspiratif versi *Kompas*, 2009; (5) dan Megawati Soekarnoputri Award sebagai Pahlawan Muda Bidang Pemberantasan Korupsi, 2012.

Sri Margana adalah dosen Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada. Ia memperoleh gelar Sarjana dan Master dari Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada. Sejak tahun 1998 ia telah bekerja sebagai dosen di Departemen Sejarah, di universitas yang sama. Pada tahun 2001 ia mengikuti The Advanced Master Programme dari Universitas Leiden, Belanda. Kemudian di tahun 2002 sampai 2007 ia menempuh pendidikan doktoral di universitas yang sama. Minat khususnya adalah sejarah sosial-politik Jawa pada masa pra-kolonial dan selama periode kolonial. Disertasinya diterbitkan dengan judul *Ujung Timur Pulau Jawa 1763-1813: Perebutan Hegemoni Blambangan* (2012).

Pujo Semedi adalah Dekan Fakultas Ilmu Budaya dan Dosen Jurusan Antropologi Universitas Gadjah Mada. Pendidikan sarjana di bidang antropologi diperoleh dari Universitas Gadjah Mada, pendidikan S2 dari Ateneo de Manila University, Filipina, dan pendidikan S3 dari University of Amsterdam. Disertasinya diterbitkan dengan judul *Close to the Stone, Far from the Throne. The story of a Javanese fishing community, 1820s – 1990s*. Yogyakarta: Benang Merah (2004). Publikasinya yang lain yaitu *The Blue Revolution. Another environmental disaster in Indonesia*. Jakarta: Konphalindo (2001); *Antropologi Ekonomi* (ditulis bersama Sjafrin Sairin dan Bambang Hidayana), Yogyakarta: Pustaka Pelajar (2002); *Drinking with the Devil. Plantation community and world capitalism in Java, 1870s – 2000s*. Manuscript (2006); *From Hunting Gathering to Industrial Labour. Social transformation among Bintuni bay tribes in the early 21st century*. Research report. Dept. of Anthropology, Cenderawasih University (2006). *Padvinder, Pandu, Pramuka. Youth and state in Indonesia, 1910s – 2000s*. Working paper. KITLV (In Search of Middle Indonesia Project) (2007).

Sunaryo Kartadinata, Profesor Ilmu Pendidikan bidang Bimbingan dan Konseling Universitas Pendidikan Indonesia. Pernah menjabat Sekretaris Jurusan Bimbingan dan Konseling, Pembantu Dekan I, Ketua Prodi S2-S3 Bimbingan dan Konesiling, dan Pembantu Rektor II IKIP Bandung/UPI. Rektor pertama UPI BHMN periode 2005-2010 dan periode 2010-2015 dalam status sebagai PTN badan hukum. Fokus visinya memperkuat UPI sebagai Universitas berjatidiri Pendidikan. Aktif memimpin organisasi profesi, di antaranya, (1) Ketua Majelis Eksekutif Asosiasi LPTK Indonesia, (2) Ketua Umum PB Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia, (3) Ketua Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia, (4) Vice President of Consortium of Asia Pacific Education Universities, (5) President of Indonesian Society for Special Needs Education. Di samping itu juga menjabat sebagai (1) Dewan Pakar ICMI Orwil Jabar, (2) Dewan Penasehat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Jawa Barat, (3) Dewan Kehormatan KONI Jawa Barat, (4) Dewan Pangaping Paguyuban Pasundan, (5) Dewan Penasihat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Jawa Barat, (6) Ketua Dewan Penasihat Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling Nasional. Produktif menulis dan melakukan penelitian, dan telah memegang lima sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam bidang hak cipta. Penghargaan yang diterima di antaranya: (1) Honorary Police dari Polwil Priangan Timur (2) Award Penggerak

Pendidikan Inklusi di Indonesia, dan (3) Award Institusi Pembina Olahraga Terbaik di Indonesia.

I Ngurah Suryawan, Staf Pendidik/Dosen di Jurusan Antropologi Fakultas Sastra Universitas Negeri Papua (UNIPA) Manokwari, Papua Barat dan peneliti di Pusbadaya (Pusat Studi Bahasa dan Budaya Papua) UNIPA Manokwari, Papua Barat. Kandidat Doktor Ilmu-ilmu Humaniora (Antropologi) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Ketua Penyunting *Noken* (Jurnal Ilmiah Bahasa, Sastra, dan Sosial Budaya) yang diterbitkan Pusbadaya dan Fakultas Sastra UNIPA dan *Tifa Antropologi* (Jurnal Ilmiah Etnografi Papua) yang diterbitkan Jurusan Antropologi Fakultas Sastra UNIPA. Menulis buku dan menjadi editor dari *Tanah Papua di Garis Batas: Perspektif, Solusi, dan Tantangan* (2011), *Narasi Sejarah Sosial Bangsa Papua: Bangkit dan Memimpin Dirinya Sendiri* (2011), *Jiwa yang Patah* (2012), *Tong Pu Mimpi: Keterpecahan dan Pembaharuan Kebudayaan Rakyat Papua* (akan terbit). Memfokuskan penelitian tentang politik kebudayaan, sejarah sosial, kekerasan, dan identitas di Tanah Papua. Email: ngurahsuryawan@gmail.com.

Heddy Shri Ahimsa-Putra adalah Guru Besar Antropologi Universitas Gadjah Mada. Memperoleh pendidikan Antropologi dari Universitas Gadjah Mada (Sarjana Muda, 1973-1976); Universitas Indonesia (Sarjana, 1978-1980; M.A.1983); Rijksuniversiteit Leiden di Negeri Belanda (Pascasarjana, 1980-1982); dan Columbia University, New York City, Amerika Serikat (M.A, 1986; M.Phil, 1989; Ph.D, 1993). Menjadi pengajar di Jurusan Antropologi dan Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, serta mengajar pula di beberapa perguruan tinggi di beberapa kota di Indonesia. Sebagai penulis tunggal, buku-buku yang telah diterbitkan antara lain *Keluarga Ngadimin and Others* (dalam bahasa Jepang) (1987); *Minawang* (1988); *Strukturalisme Lévi-Strauss, Mitos dan Karya Sastra* (2001); Sebagai editor dan penulis, buku-buku yang telah diterbitkan antara lain *Ketika Orang Jawa Nyeni* (2000); *Jejak Masa Lalu, Sejuta Warisan Budaya* (bersama Arwan Tuti Artha) (2004); *Masalah Kesehatan Dalam Kajian Ilmu Sosial-Budaya* (2005); *Esei-esei Antropologi: Teori, Metode dan Etnografi* (2006); *Masyarakat Melayu dan Budaya Melayu dalam Perubahan* (2007); *Arkeologi dan Sumber Daya Budaya di Kalimantan: Masalah dan Apresiasi* (2011); *Bahasa, Budaya dan Karakter Manusia* (bersama R.

Aman dan S. Kuswandi) (2013); *Sastra, Budaya dan Karakter Manusia* (bersama R. Untoro) (2013); *Sastra dan Pembangunan Karakter Manusia* (bersama Suminto A. Sayuti) (2013); *Teori, Etnografi dan Refleksi* (2015).

Achmad Fedyani Saifuddin adalah Guru Besar Antropologi Universitas Indonesia. Pendidikan sarjana bidang antropologi diperoleh dari Universitas Indonesia, kemudian gelar Master of Arts (MA) dan Doktor of Philosophy (Ph.D.) diperoleh dari Universitas Pittsburgh, Pennsylvania, Amerika. Bidang khusus yang dia tekuni selama ini adalah kemiskinan di perkotaan (khususnya Indonesia dan Asia Tenggara), agama dan kebudayaan (khususnya konflik dan integrasi penganut agama), bidang lain yang dia tekuni adalah mengenai kekerabatan dan organisasi sosial, kajian-kajian tentang jaringan sosial, masyarakat dan kebudayaan Amerika, kemudian antropologi kesehatan serta metodologi antropologi. Beberapa publikasinya antara lain *Antropologi Kontemporer: Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma* (2006); *Logika Antropologi: Suatu Percakapan (Imajiner) tentang Dasar Paradigma* (2015).

Ki Supriyoko adalah Guru Besar Pendidikan dan Direktur Pascasarjana Pendidikan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Yogyakarta. Selain menjadi dosen, juga menjabat sebagai Wakil Presiden Pan-Pacific Association of Private Education (PAPE) di Jepang, Wakil Ketua Umum Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa, Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), Anggota Dewan Kehormatan dan Dewan Pakar Pengurus Besar (PB) PGRI, dan menjadi Ketua RT-29 Celeban Baru Yogyakarta sejak tahun 1981 hingga sekarang. Pernah pula tercatat sebagai Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah (BAN-S/M), Anggota Badan Akreditasi Sekolah Nasional (Basnas), dan Sekretaris Komisi Nasional (Komnas) Pendidikan Nasional.



Munculnya gagasan mengenai Revolusi Mental memperlihatkan bahwa persoalan mentalitas bangsa jauh dari selesai. Sejak Mochtar Lubis dan Koentjaraningrat mengkritisi perihal mentalitas bangsa, alih-alih mentas dari persoalan, kita masih dihadapkan pada persoalan yang sama. Malahan, bertambah seiring perubahan zaman, globalisasi, desentralisasi, serta menguatnya sektarianisme dan politik identitas. Hal ini menunjukkan pentingnya upaya menyusun strategi kebudayaan. Buku ini mendudukkan revolusi mental dalam kerangka diskursus akademik dan sebagai alternatif pengembangan strategi kebudayaan. Persoalan mentalitas dikupas dari beragam perspektif keilmuan, di samping tawaran strategi kebudayaan guna mengatasi berbagai permasalahan mentalitas bangsa. Kajian dari berbagai ahli di dalam buku ini memperlihatkan bahwa revolusi mental menuntut perubahan pada dua tataran, yaitu pemerintah dan warga negara. Oleh karena itu, perubahan juga harus diarahkan pada kedua tataran tersebut: bagaimana penguasa menjadi pelindung dan pelayan publik yang cakap dan santun, dan bagaimana rakyat dapat menjadi warga negara yang terlindungi, terjamin hak-haknya, dan bertanggung jawab pada lingkungannya.

Karlina Supelli | A. Benny Susetyo | Haryatmoko | Saldi Isra | Sri Margana
Pujo Semedi | Sunaryo Kartadinata | I Ngruh Suryawan
Heddy Shri Ahimsa Putra | Achmad Fedyani Saifuddin | Ki Supriyoko



Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan
Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2015

ISBN : 978-602-72093-2-9



9 786027 209329

REVOLUSI MENTAL
SEBAGAI STRATEGI KE

Perpustakaan
Jenderal Keb

306.4
KAR
r